



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

RPD - P 2023-2026

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH - PERUBAHAN

SKW



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 11.1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023 – 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SINGKAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 dan dengan adanya perubahan Perangkat Daerah perlu menyusun Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 – 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Singkawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 30);

16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);
17. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2022-2024 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023
– 2026**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Singkawang.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang
5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Singkawang

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Rencana Pembangunan Daerah adalah selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 4 (empat) tahun, yang merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun, yaitu periode tahun 2005 sampai tahun 2025.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun, yaitu periode tahun 2023 sampai tahun 2026.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.
15. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

16. Strategi adalah cara sistematis dan langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
17. Arah Kebijakan adalah penjabaran strategi dan kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan yang dilaksanakan secara bertahap.
18. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
19. Kinerja adalah capaian dampak, hasil, dan keluaran dari tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
20. Kerangka Pendanaan adalah pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana, dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB II

RPD

Pasal 2

Perubahan RPD memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan Kerangka Pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 4 (empat) tahun

Pasal 3

- (1) Perubahan RPD disusun menggunakan pendekatan perencanaan berorientasi proses, meliputi:
 - a. teknokratik;
 - b. partisipatif;
 - c. politis; dan
 - d. atas-bawah dan bawah-atas.
- (2) Perubahan RPD disusun menggunakan pendekatan perencanaan berorientasi hasil, meliputi:
 - a. holistik-tematik;
 - b. integratif; dan
 - c. spasial.

- (3) Perubahan RPD disusun dengan berpedoman pada:
 - a. RPJPD;
 - b. RTRW; dan
 - c. RPJMN.
- (4) RPJMD disusun dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat

Pasal 4

Perubahan RPD menjadi pedoman:

- a. penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, rencana kerja Perangkat Daerah, dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- c. bagi pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Pasal 5

Perubahan RPD digunakan oleh Penjabat (Pj) Wali Kota sebagai pedoman untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Pasal 6

- (1) Sistematika Perubahan RPD adalah sebagai berikut:

- | | | |
|----------|---|--|
| BAB I | : | Pendahuluan; |
| BAB II | : | Gambaran Umum; |
| BAB III | : | Gambaran Keuangan Daerah; |
| BAB IV | : | Permasalahan Isu dan Strategi; |
| BAB V | : | Tujuan dan Sasaran; |
| BAB VI | : | Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah; |
| BAB VII | : | Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah; |
| BAB VIII | : | Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan |
| BAB IX | : | Penutup. |

- (2) Isi beserta uraian Perubahan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Penjabat (Pj) Wali Kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan RPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan:
 - a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil Perubahan RPD;
 - b. sinkronisasi antara RPJMD dengan RPJPD, RTRW, dan RPJMN; dan
 - c. kesesuaian antara capaian Perubahan RPD dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - b. pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
 - a. kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan
 - c. hasil Rencana Pembangunan Daerah.
- (5) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (6) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Perubahan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV PERUBAHAN RPD

Pasal 8

- (1) Perubahan RPD Tahun 2023-2026 dapat dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi yang ada;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan RPD Tahun 2023-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Dalam hal Perubahan RPD Tahun 2023-2026 belum tersusun, penyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada RPJPD dan RPJMN yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, RKPD Tahun 2024 tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2024 atau sampai dilakukan perubahan sesuai dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 25 Mei 2023

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
SUMASTRO

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 25 Mei 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,
ttd
AULIA CANDRA

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023 NOMOR 11.1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


RULY AMRI, S.H

NIP 19740716 200502 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-7
1.3.1. Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dan RPJMN Tahun 2020-2024	I-8
1.3.2. Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dan RPJPD Kota Singkawang Tahun 2005-2025	I-10
1.3.3. Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023	I-15
1.3.4. Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dan RTRW Nasional	I-16
1.3.5. Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dan RTRW Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034	I-16
1.3.6. Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dan RTRW Kota Singkawang Tahun 2021-2041	I-17
1.4. Maksud dan Tujuan	I-20
1.4.1. Maksud	I-20
1.4.2. Tujuan	I-20
1.5. Sistematika Penulisan	I-21
 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	 II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1. Geografi	II-1
A. Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi	II-1
B. Topografi	II-3
C. Geologi	II-3
D. Klimatologi	II-4
E. Penggunaan Lahan	II-5
F. Wilayah Rawan Bencana	II-6
2.1.2. Penataan Ruang	II-9
A. Rencana Struktur Ruang	II-9
B. Rencana Pola Ruang	II-30
2.1.3. Demografi	II-40
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-42
2.2.1. Pertumbuhan PDRB	II-42
2.2.2. Inflasi	II-45

2.2.3.	PDRB Perkapita	II-46
2.2.4.	Kemiskinan dan Ketimpangan.....	II-46
2.2.5.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II-47
2.2.6.	Angka Melek Huruf (AMH)	II-48
2.2.7.	Kesehatan.....	II-49
2.2.8.	Ketenagakerjaan	II-49
2.2.9.	Pendapatan Daerah	II-50
2.2.10.	Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	II-51
2.2.11.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	II-51
2.2.12.	Pertambangan, Perdagangan dan Industri	II-52
2.3.	Aspek Pelayanan Umum	II-52
2.3.1.	Layanan Urusan Wajib Dasar.....	II-53
	A. Pendidikan	II-53
	B. Kesehatan.	II-56
	C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II-58
	D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.	II-59
	E. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	II-60
	F. Sosial	II-61
2.3.2.	Layanan Urusan Wajib Non Dasar	II-62
	A. Tenaga Kerja	II-62
	B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	II-63
	C. Pangan	II-64
	D. Pertanahan.....	II-65
	E. Lingkungan Hidup.....	II-66
	F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	II-67
	G. Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	II-68
	H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-68
	I. Perhubungan.....	II-69
	J. Komunikasi dan Informatika	II-70
	K. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II-71
	L. Penanaman Modal	II-72
	M. Kepemudaan dan Olah Raga.....	II-72
	N. Statistik.....	II-73
	O. Kebudayaan	II-73
	P. Perpustakaan	II-74
	Q. Kearsipan	II-74
2.3.3.	Layanan Urusan Pilihan.....	II-75
	A. Pariwisata.....	II-75
	B. Pertanian.....	II-75
	C. Kelautan dan Perikanan	II-76
	D. Energi dan Sumber Daya Mineral	II-77
	E. Perdagangan.....	II-77
	F. Perindustrian	II-78
2.3.4.	Penunjang Urusan	II-78
	A. Perencanaan Pembangunan.....	II-78

	B. Keuangan	II-79
	C. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan ...	II-80
	D. Penelitian dan Pengembangan	II-80
	E. Pengawasan.....	II-81
	F. Sekretariat Dewan	II-81
2.4.	Aspek Daya Saing Daerah.....	II-82
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1.	Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	III-2
3.1.1.	Kinerja Pelaksanaan APBD.....	III-2
3.1.2.	Pendapatan Daerah	III-3
3.1.3.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	III-9
3.1.4.	Pendapatan Transfer.....	III-10
3.1.5.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	III-11
3.1.6.	Belanja Daerah	III-11
3.1.7.	Pembiayaan Daerah	III-13
3.1.8.	Neraca Daerah	III-15
3.1.9.	Rasio Likuiditas	III-19
3.1.10.	Rasio Lancar (<i>Current Ratio</i>)	III-19
3.1.11.	Rasio Cepat (<i>Quick Ratio</i>)	III-20
3.1.12.	Rasio Solvabilitas	III-21
3.1.13.	Rasio Total Kewajiban/Total Hutang Terhadap Total Aset.....	III-21
3.1.14.	Rasio Hutang Terhadap Ekuitas.....	III-22
3.1.15.	Rasio Aktivitas	III-23
3.1.16.	Rasio Rata-Rata Umur Piutang	III-23
3.1.17.	Rasio Rata-Rata Umur Persediaan	III-24
3.2.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Masa Lalu.....	III-25
3.2.1.	Analisis Kesehatan Keuangan Daerah	III-25
3.2.2.	Kemandirian Keuangan Daerah	III-25
3.2.3.	Tax Ratio	III-26
3.2.4.	Realisasi Belanja Modal Terhadap Realisasi Total Belanja APBD	III-27
3.2.5.	Realisasi Belanja Pegawai Terhadap Realisasi Total Belanja APBD.....	III-28
3.2.6.	Analisis Belanja Daerah	III-29
3.2.7.	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja	III-29
3.2.8.	Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	III-33
3.2.9.	Analisis Pembiayaan Daerah	III-37
3.2.10.	Analisis Sumber Penutup Defisit Riil.....	III-37
3.3.	Kerangka Pendanaan	III-41
3.3.1.	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang	III-41
3.3.2.	Penghitungan Kerangka Pendanaan.....	III-48
3.3.3.	Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat	III-48
3.3.4.	Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah	III-53

3.3.5. Kebijakan Alokasi Anggaran.....	III-55
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	IV-1
4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah.....	IV-1
4.1.1. Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Terkait Pelaksanaan Dasar	IV-1
4.1.1.1. Pendidikan.....	IV-1
4.1.1.2. Kesehatan.....	IV-2
4.1.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IV-4
4.1.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.....	IV-5
4.1.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV-6
4.1.1.6. Sosial.....	IV-7
4.1.2. Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar	IV-11
4.1.2.1 Tenaga Kerja	IV-11
4.1.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	IV-12
4.1.2.3 Pangan.....	IV-12
4.1.2.4 Pertanahan	IV-13
4.1.2.5 Lingkungan Hidup	IV-14
4.1.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	IV-16
4.1.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	IV-17
4.1.2.8 Perhubungan	IV-18
4.1.2.9 Komunikasi dan Informatika.....	IV-19
4.1.2.10 Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	IV-19
4.1.2.11 Penanaman Modal	IV-21
4.1.2.12 Kepemudaan dan Olahraga.....	IV-21
4.1.2.13 Statistik.....	IV-22
4.1.2.14 Persandian.....	IV-23
4.1.2.15 Kebudayaan.....	IV-23
4.1.2.16 Perpustakaan.....	IV-24
4.1.2.17 Kearsipan	IV-25
4.1.3. Urusan Pilihan.....	IV-26
4.1.3.1. Perikanan dan Kelautan.....	IV-26
4.1.3.2. Perindustrian	IV-27
4.1.3.3. Pariwisata	IV-28
4.1.3.4. Pertanian	IV-28
4.1.3.5. Perdagangan	IV-31
4.1.4. Unsur Penunjang, Pendukung, Pengawasan Urusan Pemerintah, serta Unsur Kewilayahan dan Pemerintahan Umum	IV-31
4.1.4.1 Perencanaan	IV-31
4.1.4.2 Keuangan	IV-32

4.1.4.3	Kepegawaian	IV-33
4.1.4.4	Pendidikan dan Pelatihan.....	IV-34
4.1.4.5	Penelitian dan Pengembangan.....	IV-34
4.1.4.6	Pengawasan	IV-35
4.1.4.7	Sekretariat DPRD.....	IV-36
4.1.4.8	Sekretariat Daerah.....	IV-37
4.1.4.9	Kewilayahan	IV-38
4.1.4.10	Pemerintahan Umum-Kesatuan Bangsa dan Politik	IV-38
4.2.	Isu Strategis.....	IV-39
4.2.1.	Isu Sustainable Development Goals (SDG's)	IV-39
4.2.2.	Isu Strategis RPJM Nasional Tahun 2020-2024.....	IV-40
4.2.3.	Isu-isu Strategis RPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026	IV-48
4.2.4.	Telaah RTRW Kota Singkawang 2022-2042	IV-51
4.2.5.	Penetapan Isu Strategis Kota Singkawang	IV-80
BAB V	TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN.....	V-1
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS	VI-1
6.1.	Strategi	VI-1
6.2.	Arah Kebijakan	VI-4
6.3.	Program Prioritas	VI-8
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....	VII-1
7.1.	Kerangka Pendanaan Pembangunan	VII-1
7.2.	Program Perangkat Daerah	VII-7
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	VIII-1
8.1.	Indikator Kinerja Utama Daerah	VIII-1
8.2.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	VIII-3
8.3.	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	VIII-11
BAB IX	PENUTUP	IX-1

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RPD	I-8
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Singkawang	II-2
Gambar 2.2 Peta Rencana Struktur Ruang Kota Singkawang	II-29
Gambar 2.3 Peta Rencana Pola Ruang	II-39

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1.1	Visi, Misi	I-9
Tabel 1.2	Prioritas Daerah	I-11
Tabel 1.3	Visi, Misi, dan Prioritas Pertumbuhan Daerah	I-15
Tabel 2.1	Tinggi Wilayah di Atas permukaan Laut (dpl) menurut Kecamatan di Kota Singkawang	II-3
Tabel 2.2	Rata-rata Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan di Kota Singkawang	II-4
Tabel 2.3	Rata-rata Lembab Nisbi dan Temperatur Udara di Kota Singkawang	II-5
Tabel 2.4	Penggunaan Lahan di Kota Singkawang	II-5
Tabel 2.5	Luas Wilayah Kota Singkawang menurut Tergenang dan Tidak Tergenang	II-6
Tabel 2.6	Jumlah Kejadian Abrasi Pantai di Kota Singkawang Tahun 2018-2022	II-7
Tabel 2.7	Jumlah Kejadian Bencana Banjir di Kota Singkawang Tahun 2018-2022	II-7
Tabel 2.8	Jumlah Kejadian Bencana Longsor di Kota Singkawang Tahun 2018-2022	II-8
Tabel 2.9	Jumlah Kejadian Rawan Bencana Tsunami di Kota Singkawang Tahun 2018-2022	II-8
Tabel 2.10	Jumlah Kejadian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Singkawang Tahun 2018-2022	II-8
Tabel 2.11	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Singkawang Tahun 2022	II-40
Tabel 2.12	Jumlah Kelurahan, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kota Singkawang Tahun 2022	II-41
Tabel 2.13	Jumlah Penduduk Kota Singkawang Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018-2022	II-41
Tabel 2.14	Jumlah Penduduk Kota Singkawang Berumur 15 Tahun Keatas Berdasarkan Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja di Kota Singkawang Tahun 2022	II-42
Tabel 2.15	PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kota Singkawang Tahun 2018-2022	II-43
Tabel 2.16	PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Kota Singkawang Tahun 2018-2022	II-43
Tabel 2.17	Perkembangan Inflasi Kota Singkawang, Kota Pontianak dan Nasional Tahun 2018-2022	II-45
Tabel 2.18	PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Kota Singkawang Tahun 2018-2022	II-46

Tabel 2.19	Kemiskinan dan Ketimpangan Kota Singkawang Tahun 2018-2022	II-47
Tabel 2.20	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Singkawang Tahun 2018-2022	II-48
Tabel 2.21	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis Kota Singkawang Tahun 2017/2018 – 2020/2021	II-48
Tabel 2.22	Aspek Kesejahteraan Masyarakat dalam Bidang Kesehatan Kota Singkawang Tahun 2018-2022	II-49
Tabel 2.23	Kondisi Ketenagakerjaan Kota Singkawang Tahun 2018-2022	II-50
Tabel 2.24	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%) Kota Singkawang Tahun 2018-2022	II-51
Tabel 2.25	Aspek Kesejahteraan Masyarakat dalam Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Singkawang Tahun 2018-2022	II-52
Tabel 2.26	Aspek Kesejahteraan Masyarakat dalam Bidang Pertambangan, Perdagangan dan Industri Kota Singkawang Tahun 2018-2022	II-52
Tabel 2.27	Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Pendidikan Kota Singkawang Tahun Ajaran 2017/2018-2021/2022	II-53
Tabel 2.28	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kesehatan Kota Singkawang Tahun 2018-2022	II-56
Tabel 2.29	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018-2022	II-58
Tabel 2.30	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018-2022	II-59
Tabel 2.31	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Singkawang Tahun 2018-2022	II-60
Tabel 2.32	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Sosial Kota Singkawang Tahun 2018-2022	II-61
Tabel 2.33	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Ketenagakerjaan Kota Singkawang Tahun 2017-2019	II-62
Tabel 2.34	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2018-2022	II-63
Tabel 2.35	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pangan Kota Singkawang Tahun 2018-2022	II-65
Tabel 2.36	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2018-2022	II-66
Tabel 2.37	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Lingkungan Hidup Kota Singkawang Tahun 2018-2022	II-66

Tabel 2.38	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Tahun 2018-2022	II-67
Tabel 2.39	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kota Singkawang Tahun 2018-2022	II-68
Tabel 2.40	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Singkawang Tahun 2018-2022	II-69
Tabel 2.41	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2018-2022	II-70
Tabel 2.42	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2017-2019	II-70
Tabel 2.43	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Singkawang Tahun 2018-2022	II-71
Tabel 2.44	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Penanaman Modal Kota Singkawang Tahun 2018-2022	II-72
Tabel 2.45	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kota Singkawang Tahun 2018-2022	II-72
Tabel 2.46	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Statistik Kota Singkawang Tahun 2018-2022	II-73
Tabel 2.47	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kebudayaan Kota Singkawang Tahun 2018-2022	II-73
Tabel 2.48	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perpustakaan Kota Singkawang Tahun 2018-2022	II-74
Tabel 2.49	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kearsipan Kota Singkawang Tahun 2018-2022	II-74
Tabel 2.50	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pariwisata Kota Singkawang Tahun 2018-2022	II-75
Tabel 2.51	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanian Kota Singkawang Tahun 2018-2022	II-75
Tabel 2.52	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kelautan dan Perikanan Kota Singkawang Tahun 2018-2022	II-76
Tabel 2.53	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Singkawang Tahun 2018-2022	II-77
Tabel 2.54	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perdagangan Kota Singkawang Tahun 2018-2022	II-77
Tabel 2.55	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perindustrian Kota Singkawang Tahun 2018-2022	II-78
Tabel 2.56	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Kota Singkawang Tahun 2018-2022	II-79

Tabel 2.57	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Keuangan Kota Singkawang Tahun 2017-2021	II-79
Tabel 2.58	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kota Singkawang Tahun 2018-2022	II-80
Tabel 2.59	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Penelitian dan Pengembangan Kota Singkawang Tahun 2018-2022	II-80
Tabel 2.60	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pengawasan Kota Singkawang Tahun 2018-2022	II-81
Tabel 2.61	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Sekretariat Dewan Kota Singkawang Tahun 2018-2022	II-81
Tabel 2.62	Aspek Daya Saing Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022	II-82
Tabel 3.1	Pendapatan Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022	III-5
Tabel 3.2	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Singkawang Tahun 2017-2022	III-6
Tabel 3.3	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022	III-12
Tabel 3.4	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022	III-14
Tabel 3.5	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Singkawang Tahun 2017-2021	III-16
Tabel 3.6	Analisis Rasio Lancar Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2017-2021 (%)	III-20
Tabel 3.7	Rasio Cepat Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2017-2021 (%)	III-21
Tabel 3.8	Rasio Hutang Terhadap Total Aset Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2017-2021	III-22
Tabel 3.9	Rasio Hutang Terhadap Ekuitas Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2017-2021 (%)	III-23
Tabel 3.10	Rasio Rata-rata Umur Piutang Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2017-2021 (Hari)	III-24
Tabel 3.11	Rasio Rata-rata Umur Persediaan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2017-2021	III-22
Tabel 3.12	Tax Rasio Kota Singkawang Tahun 2018-2022	III-27
Tabel 3.13	Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja dan Proporsi Rata-rata Komponen Belanja Terhadap Total Belanja Kota Singkawang Tahun 2017-2022 (%)	III-30
Tabel 3.14	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Singkawang Tahun 2019-2021	III-33
Tabel 3.15	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Singkawang Tahun 2019-2021	III-37

Tabel 3.16	Analisis Sumber Penutup Defisit Riil Kota Singkawang Tahun 2018-2022	III-38
Tabel 3.17	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Singkawang Tahun 2018-2022	III-40
Tabel 3.18	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026	III-43
Tabel 3.19	Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Kota Singkawang Tahun 2022-2026	III-50
Tabel 3.20	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2022-2026	III-54
Tabel 3.21	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2022-2026	III-56
Tabel 4.1	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan	IV-2
Tabel 4.2	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan	IV-3
Tabel 4.3	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IV-4
Tabel 4.4	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	IV-5
Tabel 4.5	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV-6
Tabel 4.6	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Sosial	IV-7
Tabel 4.7	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Tenaga Kerja	IV-11
Tabel 4.8	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	IV-12
Tabel 4.9	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pangan	IV-13
Tabel 4.10	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pertanahan	IV-14
Tabel 4.11	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Lingkungan Hidup	IV-15
Tabel 4.12	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	IV-17
Tabel 4.13	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	IV-18
Tabel 4.14	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perhubungan	IV-18
Tabel 4.15	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika	IV-19
Tabel 4.16	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	IV-20

Tabel 4.17	Permasalahan Pembangunan Penanaman Modal	Daerah	Urusan	IV-21
Tabel 4.18	Permasalahan Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga	Daerah	Urusan	IV-22
Tabel 4.19	Permasalahan Pembangunan Daerah	Urusan Statistik	IV-23	
Tabel 4.20	Permasalahan Pembangunan Persandian	Daerah	Urusan	IV-23
Tabel 4.21	Permasalahan Pembangunan Kebudayaan	Daerah	Urusan	IV-24
Tabel 4.22	Permasalahan Pembangunan Perpustakaan	Daerah	Urusan	IV-25
Tabel 4.23	Permasalahan Pembangunan Kearsipan	Daerah	Urusan	IV-25
Tabel 4.24	Permasalahan Pembangunan Perikanan dan Kelautan	Daerah	Urusan	IV-26
Tabel 4.25	Permasalahan Pembangunan Perindustrian	Daerah	Urusan	IV-27
Tabel 4.26	Permasalahan Pembangunan Pariwisata	Daerah	Urusan	IV-28
Tabel 4.27	Permasalahan Pembangunan Pertanian	Daerah	Urusan	IV-29
Tabel 4.28	Permasalahan Pembangunan Perdagangan	Daerah	Urusan	IV-31
Tabel 4.29	Permasalahan Pembangunan Penunjang Perencanaan	Daerah	Unsur	IV-32
Tabel 4.30	Permasalahan Pembangunan Penunjang Keuangan	Daerah	Unsur	IV-33
Tabel 4.31	Permasalahan Pembangunan Penunjang Kepegawaian	Daerah	Unsur	IV-33
Tabel 4.32	Permasalahan Pembangunan Penunjang Pendidikan dan Pelatihan	Daerah	Unsur	IV-34
Tabel 4.33	Permasalahan Pembangunan Penunjang Penelitian dan Pengembangan	Daerah	Unsur	IV-35
Tabel 4.34	Permasalahan Pembangunan Pengawasan	Daerah	Unsur	IV-35
Tabel 4.35	Permasalahan Pembangunan Pendukung Sekretariat DPRD	Daerah	Unsur	IV-36
Tabel 4.36	Permasalahan Pembangunan Pendukung Sekretariat Daerah	Daerah	Unsur	IV-37
Tabel 4.37	Permasalahan Pembangunan Kewilayahan	Daerah	Unsur	IV-38
Tabel 4.38	Permasalahan Pembangunan Pemerintahan Umum dan Kesatuan Bangsa	Daerah	Unsur	IV-38

Tabel 4.39	Tujuh Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024	IV-42
Tabel 4.40	Rumusan Isu Strategis RPD	IV-84
Tabel 5.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	V-15
Tabel 6.1	Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Singkawang	VI-1
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kota Singkawang	VI-4
Tabel 6.3	Program Prioritas Pembangunan Kota Singkawang	VI-9
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang	VII-2
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas Perangkat Daerah	VII-8
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Singkawang	VIII-2
Tabel 8.2	Penerapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Pemerintahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026	VIII-4
Tabel 8.3	Penerapan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023-2026	VIII-12

DAFTAR GRAFIK

		Hal
Grafik 2.1	Luas Wilayah Kota Singkawang (dalam Ha)	II.2
Grafik 2.2	PDRB ADHB & ADHK Menurut Lapangan Usaha di Kota Singkawang Tahun 2018-2022	II.44
Grafik 2.3	Kontribusi Sektoral PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Kota Singkawang Tahun 2022** (%)	II.44
Grafik 2.4	Perkembangan Inflasi Kota Singkawang, Kota Pontianak dan Indonesia Tahun 2018-2022	II.45
Grafik 2.5	PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Kota Singkawang Tahun 2018-2021 (Juta Rp.)	II.46
Grafik 3.1	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022	III.3
Grafik 3.2	Persentase Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Pendapatan Asli Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (%)	III.9
Grafik 3.3	Persentase Kontribusi Pendapatan Transfer Terhadap Total Pendapatan Transfer Kota Singkawang Tahun 2018-2022	III.10
Grafik 3.4	Realisasi PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022	III.26
Grafik 3.5	Realisasi Belanja Modal Terhadap Realisasi Total Belanja APBD Kota Singkawang Tahun 2018-2022	III.27
Grafik 3.6	Realisasi Belanja Pegawai Terhadap Realisasi Total Belanja APBD Kota Singkawang Tahun 2018-2022	III-28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan perubahan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026 yang digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023-2026.

Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dilandasi oleh adanya perubahan struktur pada perangkat daerah yang ada di Kota Singkawang khususnya pada Badan Keuangan Daerah (BKD) yang dimekarkan menjadi 2 (dua) perangkat daerah yaitu menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Perubahan struktur perangkat daerah didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dokumen Perubahan RPD Tahun 2023-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023-2026.

Kota Singkawang termasuk dari sejumlah daerah otonom yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 sehingga diperlukan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Penyusunan dokumen Perubahan RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 memperhatikan penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun 2025; Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2017-2022; RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026; Isu-isu

strategis yang berkembang; Kebijakan nasional; dan Regulasi yang berlaku.

Pada tingkat perangkat daerah (PD), sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya setiap perangkat daerah menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan pembangunan yang terdiri dari (a) dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan (b) dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Dengan berpedoman pada uraian diatas dan sejalan dengan Instruksi Menteri tersebut Pemerintah Kota Singkawang perlu melakukan adaptasi dengan melakukan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Kalbar sampai tahun 2025; hasil evaluasi capaian indikator daerah RPJMD Tahun 2017-2022; isu-isu strategis yang berkembang; kebijakan nasional.

Berbagai kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya sangat mempengaruhi asumsi-asumsi dalam perencanaan pembiayaan atau penganggaran pembangunan daerah sehingga secara langsung berpengaruh pada pencapaian target atau indikator pembangunan yang sudah ditetapkan. Sejalan dengan itu serta memperhatikan ketentuan di atas maka Pemerintah Kota Singkawang perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap strategi, arah kebijakan, program, serta indikator dan target kinerjanya melalui Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023–2026.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Beberapa regulasi yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam penyusunan Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 13. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil

Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
24. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman

Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

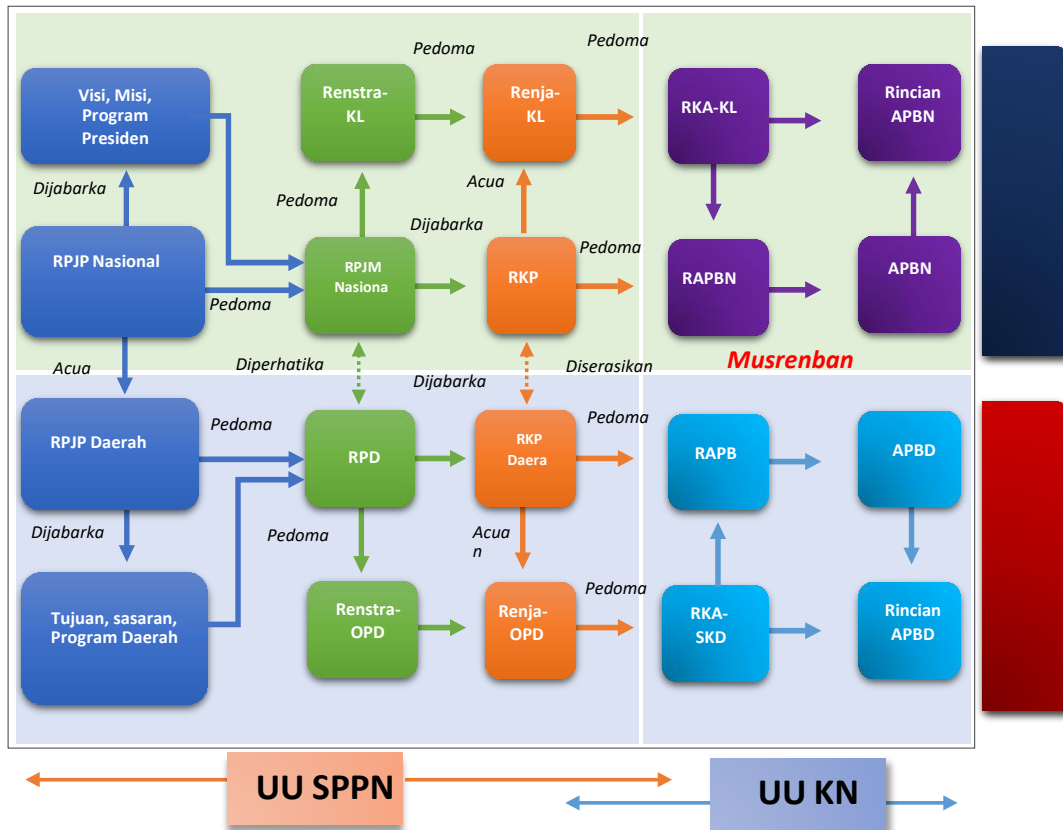
36. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
37. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 – 2025;
38. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Nomor 9);
39. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);
40. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 30);
41. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 1);
42. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4);
43. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018- 2022 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 62);
44. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembar Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sinkronisasi antar dokumen perencanaan menentukan efektivitas Pembangunan Daerah. Dokumen RPD Tahun 2023-2026 disusun dengan berpedoman dan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya, mulai dari RPJPD, perencanaan nasional, maupun perencanaan tata ruang. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Demikian halnya dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 yang menempatkan RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai bahan penyusunan dan penyesuaian RPJMD, sekaligus RPJMD sebagai instrumen penjabaran program di dalam RPJMN.

Secara sistematis tahapan dan tata cara penyusunan RPD dapat dilihat pada gambar 1.1. berikut:

Gambar 1.1



1.3.1. Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dan RPJMN Tahun 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. RPJMN Tahun 2020-2024 menjadi pedoman bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan. Visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 sesuai RPJMN Tahun 2020-2024 adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”**.

Tabel 1.1

VISI	MISI
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
	Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya
	Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan tujuh agenda pembangunan. Tujuh agenda pembangunan itu, yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Visi, misi dan program yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024 menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Kota Singkawang dalam menyusun/menyesuaikan perubahan rencana pembangunan daerah yang terdapat dalam Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

Dalam proyek prioritas pembangunan nasional, Kota Singkawang merupakan lokus dari pembangunan, diantaranya :

- a. Pengembangan destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah;
- b. Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi (Pembangunan Bandara Baru Singkawang);
- c. Pengembangan kawasan perkotaan;
- d. Program pembinaan dan pengembangan Infrastruktur permukiman

1.3.2. Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dan RPJPD Kota Singkawang Tahun 2005-2025

Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 merupakan rencana pembangunan tahap keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan Perubahan RPD harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Singkawang Tahun 2005-2025.

Dalam RPJPD Kota Singkawang Tahun 2005- 2025, dengan visi **“Singkawang Maju, Sejahtera Berbasis Jasa, Perdagangan dan Agroindustri”**, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif, produktif, inovatifberbudaya dan mandiri berlandaskan kepada nilai-nilai luhur Pancasila.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan daerah untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
4. Mewujudkan perekonomian yang maju dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan investasi, yang berbasis pada peningkatan kegiatan jasa, perdagangan, dan agroindustri.
5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat miskin.
6. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berkeadilan dengan mempehatikan keseimbangan ekosistem.
7. Mewujudkan infrastruktur yang memadai, penataan ruang dan pertanahan untuk meningkatkan arus perdagangan barang dan jasa sekaligus mengembangkan kepariwisataan.
8. Mewujudkan budaya politik yang demokratis, serta keamanan dan ketertibanmasyarakat berbasis supremasi hukum

Pada Perubahan RPD Tahun 2023–2026 Kota Singkawang yang tertuang dalam RPJPD Kota Singkawang, prioritas pembangunan daerah diarahkan pada bidang.

Tabel 1.2.

No	Prioritas Daerah	Uraian
1.	Perokonomian Daerah	▪ Peningkatan kegiatan industri, perdagangan, dan jasa berskala luas. ▪ Perencanaan pengembangan sektor/bidang usaha skala menengah/besar yang dipandang

No	Prioritas Daerah	Uraian
		strategis untuk dipromosikan kepada investor luar. ▪ Pengembangan kegiatan penanaman modal di daerah berskala nasional dan internasional. ▪ Pengembangan kawasan perdagangan dan bisnis terpadu di daerah.
2.	Pembangunan Pendidikan	▪ Peningkatan kemampuan akademik dan profesionalisme diikuti dengan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. ▪ Peningkatan kualitas dan pemberdayaan lembaga pendidikan (sekolah dan luar sekolah). ▪ Penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan memenuhi standar. ▪ Peningkatan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. ▪ Membaiknya indikator-indikator pembangunan pendidikan (APK SD/MI = 100,0% ; APM SD/MI = 100,0% ; APK SMP/MTs = 100,0% ; APM SMP/MTs = 99,0% ; APK SMA/SMK/MA = 90,0% ; APM SMA/SMK/MA = 80,0% ; AMH usia 15-24 thn = 100,0% ; IPM = 80,0).
3.	Pembangunan Kesehatan	▪ Peningkatan kualitas maupun jangkauan cakupan program yang berdampak pada penurunan angka kematian bayi, angka kematian ibu dan peningkatan status gizi balita. ▪ Peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga kesehatan dan manajemen kesehatan. ▪ Membaiknya indikator-indikator pembangunan kesehatan (AKBayi = 17 per 1.000 kh ; AKBalita = 20 per 1.000 kh ; AKIbu = 250 per 100.000 kh ; AHHidup = 77 thn ; % Balita Gizi Buruk = 0,5%).

No	Prioritas Daerah	Uraian
4.	Pembangunan Fertilitas dan Keluarga Berencana	▪ Pemantapan dan pengembangan Program KIE dalam menunjang Kesehatan Reproduksi dan partisipasi Pria ber KB (jumlah peserta KB Aktif meningkat menjadi 95,0%). ▪ Peningkatan kualitas dan kuantitas Kader KB dalam rangka mendorong terwujudnya keluarga berkualitas tinggi.
5.	Pembangunan Ketenagakerjaan	▪ Penurunan angka pengangguran terbuka menjadi 1,8% melalui pembangunan berorientasi padat karya. ▪ Perlindungan tenaga kerja anak dan perempuan.
6.	Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Pemberdayaan penduduk dan keluarga miskin, fakir miskin, penyandang cacat, dan kelompok rentan lainnya sehingga jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 9,0% dan jumlah keluarga berstatus KS I (keluarga miskin) berkurang menjadi 7,7%.
7.	Sarana dan Prasarana	▪ Bidang Transportasi ; pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dengan target sepanjang $\pm$ 350 Km, pemeliharaan dan rehabilitasi jembatan sebanyak 30 unit, pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang $\pm$ 85 Km, pembangunan dan peningkatan jembatan $\pm$ 15 unit. Peningkatan infrastruktur dan fungsi Bandar Udara Singkawang. Peningkatan Status dan Pelayanan Pelabuhan Laut Singkawang. ▪ Bidang Sumber Daya Air: Bidang Sumber Air (Daerah Irigasi & Daerah Rawa) : perbaikan tanggul 22.500 M', perbaikan pintu air 12 unit, pembuatan pintu air 30 unit, perbaikan saluran 75.000 M', pembuatan saluran 40.000 M', pembuatan Jalan Usaha Tani 1.400 M', perbaikan bangunan pelengkap 20 unit, perbaikan bangunan bendung 18 unit, pembuatan bangunan bendung 5 unit dan normalisasi sungai 12.000 M'.

No	Prioritas Daerah	Uraian
		▪ Bidang Informasi dan Telekomunikasi : semakin berkembang dan memasyarakatnya pengguna pelayanan informasi dan telekomunikasi. ▪ Bidang Sumber daya air : peningkatan pelayan air bersih. ▪ Bidang Energi Listrik : kebutuhan akan energi listrik untuk wilayah Kota Singkawang terpenuhi dan sistem manajemen dan tingkat keandalan pelayanan kepada konsumen semakin baik.
8.	Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam melalui Peningkatan Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.
9.	Hukum, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;	▪ Menjadikan Kota Singkawang sebagai kota jasa dan tujuan wisata utama yang paling aman dan tertib di Kalimantan Barat khususnya dan Indonesia umumnya. ▪ Mengimplementasikan Perda dan sekaligus melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan relevansi Perda-Perda yang ada sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan politik dan hukum yang ada.
10.	Politik dan Pemerintahan	▪ Terwujudnya prototipe sebuah <i>civil society</i> yang kuat di Kota Singkawang. ▪ Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sudah sepenuhnya didasarkan pada semangat dan prinsip-prinsip <i>good governance</i>.
11.	Wilayah dan Tata Ruang	▪ Evaluasi dan revisi tata ruang di semua wilayah disesuaikan perkembangan dan kebutuhan tata ruang kota. ▪ Berkembang pesatnya kawasan baru dan tumbuhnya pusat-pusat industri sebagai fasilitas vital perdagangan regional sesuai dengan RTRK Kota Singkawang.

No	Prioritas Daerah	Uraian
12.	Budaya dan Agama	▪ Terbangunnya secara signifikan tingkat kesolehan individu dan kesolehan sosial dalam kehidupan masyarakat. ▪ Kearifan lokal menjadi identitas sosial dan budaya, dan terwujudnya <i>civil society</i>.

1.3.3. Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, prioritas pembangunan daerah dikelompokkan ke dalam tujuh prioritas pembangunan, yakni: (1) peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta Perbatasan; (2) peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah; (3) peningkatan kualitas SDM; (4) peningkatan perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran; (5) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat; (6) Peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan (7) Peningkatan Pemerataan Pembangunan, Keadilan, Keamanan, Kedamaian, serta Ketahanan Budaya.

Tabel 1.3.

Visi	Misi	Prioritas Pembangunan Daerah
Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan	Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur.	▪ Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta Perbatasan. ▪ Peningkatan Pemerataan Pembangunan, Keadilan, Keamanan, Kedamaian, serta Ketahanan Budaya.
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah

	Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif.	Peningkatan kualitas SDM
	Mewujudkan masyarakat sejahtera	Peningkatan perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran.
	Mewujudkan masyarakat yang tertib	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
	Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Prioritas pembangunan daerah yang termuat dalam Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 telah selaras dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.

1.3.4. Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dan RTRW Nasional

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Khatulistiwa, di mana Kota Singkawang termasuk di dalamnya, merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional. Selain itu, Kawasan Singkawang dan Sekitarnya merupakan Kawasan Andalan dengan sektor unggulan pertanian, industri, perkebunan dan perikanan.

1.3.5. Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dan RTRW Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034, beberapa Kawasan Strategis di Kota Singkawang antara lain:

- 1) Kawasan Pariwisata Pasir Panjang dan sekitarnya sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi dengan sektor unggulan

pariwisata, industri dan perikanan;

- 2) Kota Singkawang akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singkawang sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi dengan sektor unggulan industri manufaktur dan pengolahan hasil pertanian di Kecamatan Singkawang Selatan;
- 3) Kawasan Strategis Ekosistem Gunung Raya Pasi sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan; dan
- 4) Kawasan Rawan Bencana Alam Gayung Bersambut sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial.

Kota Singkawang merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berdasarkan perspektif tata ruang untuk menunjang Kota Pontianak sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Dengan demikian Kota Singkawang sebagai PKW berdasarkan kondisi *existing* yang sudah berkembang, untuk masa yang akan datang harus terus didorong menjadi:

- 1) Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN;
- 2) Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau
- 3) Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.

1.3.6. Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dan RTRW Kota Singkawang Tahun 2021-2041

Prinsip perencanaan pembangunan daerah adalah terintegrasinya antara rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan perubahan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, dalam penyusunan dokumen Perubahan RPD harus berpedoman pada dokumen RTRW. Mengintegrasikan dokumen RTRW ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dilakukan

melalui analisis dan telaah terhadap dokumen RTRW. Hal ini penting untuk memastikan dan menjamin agar arah kebijakan yang telah ditetapkan ke dalam dokumen Perubahan RPD secara konsisten, selaras, bersinergi dan harmonis dengan arah kebijakan yang telah dituangkan kedalam dokumen RTRW Kota Singkawang.

Berbagai data dan informasi penting yang terdapat dalam dokumen RTRW perlu dianalisis dan ditelaah secara mendalam, meliputi antara lain:

- a. Rencana struktur ruang wilayah Kota Singkawang adalah rencana yang mencakup rencana sistem perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota selain untuk melayani kegiatan skala kota, meliputi:
 - 1) Sistem jaringan transportasi,
 - 2) Sistem jaringan energi dan kelistrikan,
 - 3) Sistem jaringan telekomunikasi,
 - 4) Sistem jaringan sumber daya air,
 - 5) Dan sistem jaringan lainnya.
- b. Rencana Pola Ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kota yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kota hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2021-2041, beberapa Kawasan Strategis di Kota Singkawang antara lain:

- a. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan ekonomi yaitu:
 - 1) Kawasan Pusat Kota di Kecamatan Singkawang Barat dan Kecamatan Singkawang Tengah sebagai pusat kegiatan perekonomian yang didukung oleh kelengkapan sarana dan prasarana perkotaan;

- 2) Kawasan Muara Sungai Sedau sebagai kawasan pelabuhan penyeberangan dan industri pengolahan perikanan di Kecamatan Singkawang Selatan sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis dari aspek ekonomi karena menjadi pusat pergerakan orang dan barang serta pengolahan hasil perikanan yang dapat meningkatkan investasi daerah;
 - 3) Kawasan Peternakan dan Pertanian Terpadu di Kecamatan Singkawang Selatan dengan potensi utama yang dapat diolah menjadi industri manufaktur di Kota Singkawang dan wilayah sekitarnya, antara lain potensi perkebunan karet, perkebunan sawit, pengelolaan hasil peternakan ayam, dan pengelolaan hasil peternakan babi.
- b. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya yaitu:
- 1) Kawasan Kota Pusaka di Kecamatan Singkawang Tengah dan Kecamatan Singkawang Barat;
 - 2) Kawasan Wisata Budaya Nyarumkop-Bagak, di Kecamatan Singkawang Timur, sebagai bagian wilayah kota yang penetapannya ditujukan untuk mendukung pengembangan bagian wilayah kota lainnya yang tertinggal; dan
 - 3) Kawasan Desa Wisata Budaya Pajintan di Kelurahan Pajintan, Kecamatan Singkawang Timur.
- c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, berada di Kawasan Bandar Udara Singkawang di Kecamatan Singkawang Selatan (Aerocity).
- d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, berada di Kawasan Strategis Ekosistem Gunung Raya Pasi di Kecamatan Singkawang Timur dan Kecamatan Singkawang Selatan.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Penyusunan Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, masyarakat pada umumnya, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan daerah dalam upaya mempercepat terwujudnya peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat di Kota Singkawang khususnya, serta masyarakat di kabupaten/kota tetangga terdekat lainnya.

1.4.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026, antara lain adalah:

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar untuk perumusan permasalahan dan isu-isu strategis daerah, serta sebagai dasar penentuan prioritas program pembangunan daerah selama 4 (empat) tahun ke depan;
- b. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar memproyeksi kemampuan riil kapasitas pendanaan tahunan untuk jangka waktu 4 (tahun) tahun ke depan;
- c. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023-2026, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam tahun 2023-2026, dengan berpedoman pada RPJPD Kota Singkawang Tahun 2005-2025;
- d. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2023-2026;
- e. Menetapkan indikator kinerja perangkat daerah dan indikator kinerja kepala daerah, sebagai dasar penilaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2023-2026;

- f. Mendukung koordinasi untuk menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintahan daerah maupun antara Pemerintah Kota Singkawang dengan Pemerintah Pusat dan antar Pemerintah Kota Singkawang dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, serta menyediakan pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing, sekaligus merupakan landasan dalam menentukan program-program unggulan yang terkait langsung dengan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah;
- g. Menjadi landasan untuk mengintegrasikan dan mensinergikan antara perencanaan dengan penganggaran, serta sinergi antara pengendalian, pelaksanaan, dan evaluasi hasil rencana pembangunan di Kota Singkawang sepanjang tahun 2023-2026;
- h. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD untuk memahami dan merumuskan kebijakan terkait dengan program-program pembangunan yang selanjutnya dijabarkan ke dalam kegiatan yang nantinya diukur dengan indikator; dan
- i. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, transparan, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, maka nampak nilai strategis yang terkandung dalam Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026, yaitu antara lain sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Renstra PD, RKPD, dan Renja PD dalam upaya mewujudkan pencapaian target tujuan sasaran pembangunan daerah tahun 2023-2026.

1.5. Sistematika Penulisan

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah

Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
 - 1.3. Hubungan Antar Dokumen
 - 1.4. Maksud dan Tujuan
 - 1.5. Sistematika Penulisan
- Bab II Gambaran Umum
 - 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.3. Aspek Pelayanan Umum
 - 2.4. Aspek Daya Saing Daerah
- Bab III Gambaran Keuangan Daerah
 - 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
 - 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
 - 3.3. Kerangka Pendanaan
- Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis
 - 4.1. Permasalahan Pembangunan
 - 4.2. Isu-isu Strategis
- Bab V Tujuan dan Sasaran
 - 5.1. Tujuan
 - 5.2. Sasaran
- Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas
 - 6.1. Strategi
 - 6.2. Arah Kebijakan
 - 6.3. Program Prioritas
- Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
- Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Bab IX Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Secara umum Kota Singkawang merupakan wilayah yang dinamis, berbagai dinamika pembangunan terus berlangsung baik di bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya sehingga berbagai perkembangan terjadi pada hampir semua sektor.

2.1.1. Geografi

A. Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi

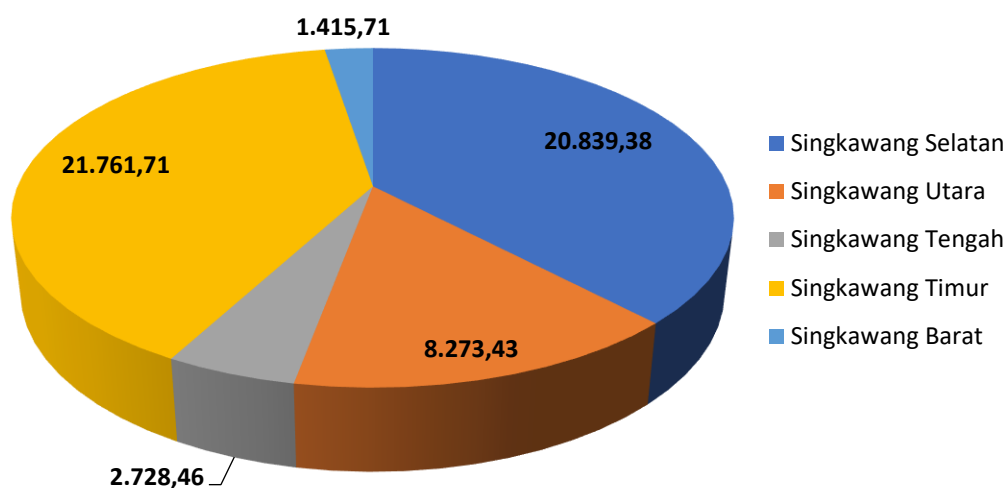
Kota Singkawang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001. Kota Singkawang merupakan salah satu Pemerintahan Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Kota Singkawang merupakan hasil pemekaran Kabupaten Bengkayang. Kota Singkawang terletak pada $0^{\circ}44'55,85''$ - $01^{\circ}01'21,51''$ Lintang Utara dan $108^{\circ}51'47,6''$ - $109^{\circ}10'19''$ Bujur Timur di antara Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang.

Dibandingkan dengan luas wilayah daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Barat, Kota Singkawang merupakan yang terkecil luas wilayahnya setelah Kota Pontianak. Secara administratif, Kota Singkawang terdiri dari 5 kecamatan dan 26 kelurahan. Kecamatan Singkawang Timur merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yaitu 21.761,71 Ha, sedangkan Kecamatan Singkawang Barat merupakan wilayah terkecil yaitu 1.415,71 Ha dari wilayah Kota Singkawang.

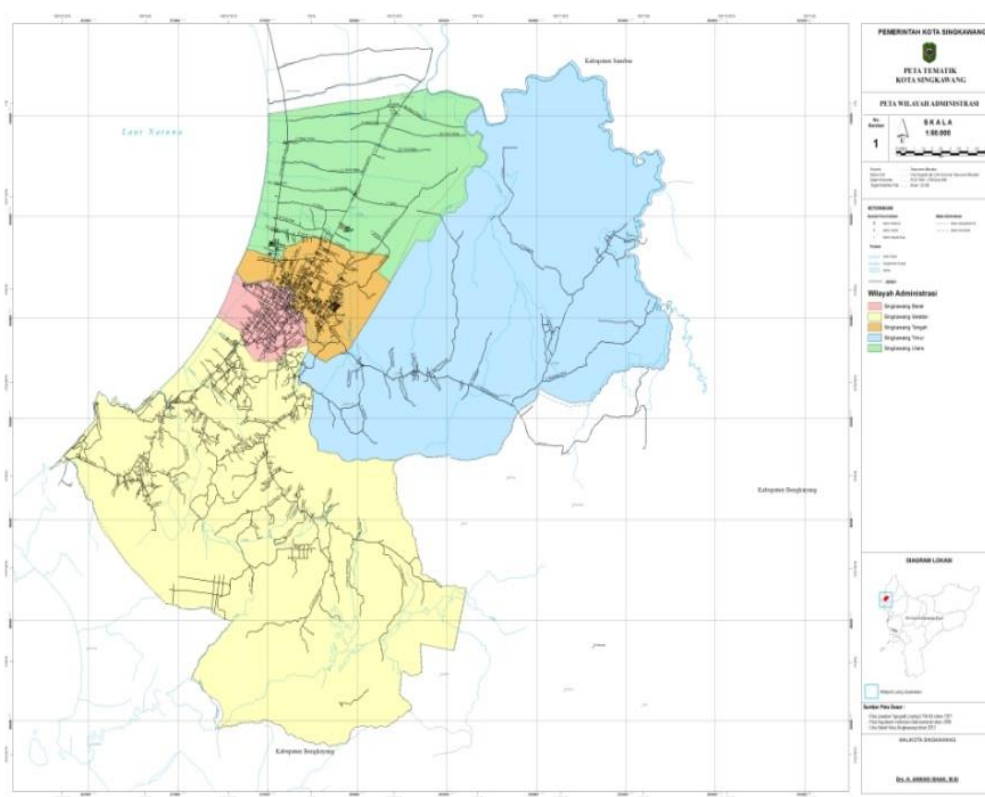
Batas-batas wilayah administrasi Kota Singkawang adalah:

- Utara : Kabupaten Sambas
- Selatan : Kabupaten Bengkayang
- Timur : Kabupaten Bengkayang
- Barat : Laut Natuna

Grafik 2.1
Luas Wilayah Kota Singkawang (dalam Ha)



Gambar 2.1
Peta Administrasi Kota Singkawang



B. Topografi

Berdasarkan topografi, wilayah Kota Singkawang sebagian besar merupakan wilayah dataran dan selebihnya wilayah bukit dan gunung. Wilayah dataran mencapai 31.904 hektar tersebar di 5 kecamatan, sedang bukit dan gunung seluas 18.496 hektar sebagian besar di wilayah Singkawang Timur dan Singkawang Selatan, sedikit di sebelah Barat dan Tengah, sedangkan di Singkawang Utara tidak terdapat wilayah pegunungan dan perbukitan. Berdasarkan kelas lereng, sebagian besar luas wilayah Kota Singkawang berada pada kelas kurang dari 2 persen (37.236 hektar atau 73,88 persen), dan luas wilayah paling kecil berada pada kelas diatas 40 persen (812 hektar atau 1,61 persen).

Tinggi wilayah di atas permukaan laut (dpl) menurut kecamatan di Kota Singkawang di sajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (dpl) menurut Kecamatan di Kota Singkawang

No.	Kecamatan	Tinggi (m)
(1)	(2)	(3)
1.	Singkawang Selatan	<500
2.	Singkawang Timur	>700
3.	Singkawang Utara	<500
4.	Singkawang Barat	<500
5.	Singkawang Tengah	<500

Sumber: BPS Kota Singkawang, 2023

C. Geologi

Dilihat dari tekstur tanah, maka sebagian besar luas wilayah Kota Singkawang terdiri dari jenis tanah halus yang meliputi areal 24.238 hektar (48,09 persen), berikutnya jenis tanah sedang 18.496 hektar (36,70 persen), jenis tanah kasar 3.168 hektar (6,29 persen), jenis tanah gambut 3.940 hektar (7,82 persen), jenis tanah rawa 256 (0,51 persen) dan jenis tanah lainnya 302 hektar (0,60 persen).

Dari lima jenis tanah yang terdapat di Kota Singkawang sebagian besar merupakan tanah Aluvial (25.338 Ha), sedangkan yang terkecil adalah tanah Latosol (2.988 Ha). Beberapa jenis tanah yang terdapat di Kota Singkawang

adalah sebagai berikut:

- ✓ **Organosol** yaitu tanah yang tersusun dari bahan organik/campuran bahan mineral dan bahan organik. Jenis tanah ini mudah mengerut tak balik dan bila kering pekat terhadap erosi serta mudah terbakar. Terdapat seluas 3.752 ha atau sekitar 7,44 persen dari total wilayah kota.
- ✓ **Alluvial** yaitu jenis tanah yang berwarna kelabu, coklat sampai hitam, mempunyai sifat tidak peka terhadap erosi dan cocok digunakan untuk usaha budidaya pertanian, dan terbentuk dari endapan laut, sungai dan danau terdapat seluas 25.338 ha atau 50,27 persen dari total wilayah kota.
- ✓ **Podsol** yaitu tanah yang bersifat basa dengan tingkat kejenuhan yang rendah, berwarna kuning putih, pada umumnya bertekstur kasar karena terbentuk dari batuan endapan serta termasuk miskin unsur hara. Terdapat 14.276 ha atau 28,33 persen dari total wilayah kota.
- ✓ **Latosol** yaitu jenis tanah yang memiliki solusi tanah yang tebal antara 130-200 cm, berwarna coklat, merah sampai kekuning-kuningan. Tanah ini sangat peka terhadap erosi tetapi sangat potensial dikembangkan sebagai usaha pertanian. Terdapat seluas 2.988 ha atau 5,93 persen dari total wilayah kota.
- ✓ **PMK (Podsolid Merah Kuning)** yaitu jenis tanah ini berwarna kuning merah, bereaksi masam dengan tingkat kejenuhan basa rendah, sebagian telah dibudidayakan untuk perkebunan karet dan ladang dengan luas 4.046 ha atau 8,03 persen dari total luas wilayah kota.

D. Klimatologi

Jumlah curah hujan dan hari hujan di Kota Singkawang dalam 5 (lima) tahun terakhir yaitu dari tahun 2018-2022 terjadi pada tahun 2020 yang lebih tinggi sebesar 369,67 milimeter dan 15 hari. Data rata-rata jumlah curah hujan dan hari hujan tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Rata-rata Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan di Kota Singkawang

No	Tahun	Curah Hujan/Bulan (Milimeter)	Hari Hujan/Bulan (Hari)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2018	232,42	11

No	Tahun	Curah Hujan/Bulan (Milimeter)	Hari Hujan/Bulan (Hari)
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	2019	211,00	9
3.	2020	369,67	15
4.	2021	243,18	14
5.	2022	253,33	24

Sumber: BPS Kota Singkawang 2023

Rata-rata lembab nisbi dan temperatur udara di Kota Singkawang tahun 2018-2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Rata-rata Lembab Nisbi dan Temperatur Udara di Kota Singkawang

No.	Tahun	Rata-rata Lembab Nisbi (%)	Temperatur Udara (°C)		Rata-rata
			Maksimum	Minimum	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	2018	75,80	27,08	19,74	27,20
2.	2019	-	-	-	-
3.	2020	-	-	-	-
4.	2021	97,67	23,07	28,85	33,60
5.	2022	79,73	33,27	22,88	28,66

Sumber: BPS Kota Singkawang 2023

E. Penggunaan Lahan

Berdasarkan penggunaan lahan, sebagian besar luas lahan di Kota Singkawang adalah perkebunan (45,60 persen), hutan (15,19 persen) dan sawah irigasi non teknis (12,92 persen). Dari 50.400 hektar luas wilayah Kota Singkawang, areal untuk pemukiman hanya 358,0 hektar (0,71 persen), sementara areal untuk industri merupakan yang areal yang paling kecil yaitu hanya sekitar 10 hektar (0,02 persen). Areal-areal yang lain adalah berupa padang/semak (10,73 persen), hutan belukar (6,51 persen), kebun campuran (5,22 persen), pertambangan (2,61 persen), dan lain-lain (0,50 persen).

Tabel 2.4
Penggunaan Lahan di Kota Singkawang

No	Uraian	Luas Areal (Ha)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pemukiman	358,00	0,71
2	Industri	10,00	0,02

No	Uraian	Luas Areal (Ha)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Pertambangan	1.317,00	2,61
4	Sawah Irigasi Non Teknis	6.512,00	12,92
5	Hutan Belukar	3.280,00	6,51
6	Kebun Campuran	2.629,00	5,22
7	Perkebunan	22.980,00	45,60
8	Hutan	7.656,00	15,19
9	Padang/Semak	5.408,00	10,73
10	Perairan Darat	-	-
11	Tanah Terbuka	-	-
12	Lain-lain	250,00	0,50
TOTAL		50.400,00	100,00

Sumber: KDA Kota Singkawang 2020

F. Wilayah Rawan Bencana

Luas wilayah tergenang di Kota Singkawang mencapai 14.147 hektar (28,07 persen dari total luas wilayah) tersebar diseluruh kecamatan. Untuk daerah tergenang, Kecamatan Singkawang Timur merupakan kecamatan yang paling luas tergenang (6.126 hektar), sedangkan Kecamatan Singkawang Barat wilayahnya paling sedikit tergenang (1.206 hektar). Luas wilayah yang tidak tergenang mencapai 36.253 hektar (71,93 persen dari total wilayah), dari 36.253 hektar yang tidak tergenang 8,32 persen jenis menyerap dan sisanya 91,68 persen tidak menyerap. Adapun khusus kawasan rawan bencana yang terdapat di Kota Singkawang meliputi:

1. Kawasan rawan bencana banjir;
2. Kawasan rawan bencana Gerakan tanah; dan
3. Kawasan rawan bencana gempa bumi.

Tabel 2.5

Luas Wilayah Kota Singkawang menurut Tergenang dan Tidak Tergenang

No.	Kecamatan	Tergenang (Ha)	Tidak Tergenang (Ha)		Luas Wilayah (Ha)
			Menyerap	Tidak Menyerap	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Singkawang Selatan	1.308	3.016	18.124	22.448
2.	Singkawang Timur	6.126	0	10.500	16.626
3.	Singkawang Utara	2.948	0	3.717	6.665

No.	Kecamatan	Tergenang (Ha)	Tidak Tergenang (Ha)		Luas Wilayah (Ha)
			Menyerap	Tidak Menyerap	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Singkawang Barat	1.206	0	298	1.504
5.	Singkawang Tengah	2.559	0	598	3.157
Total		14.147	3.016	33.237	50.400

Sumber: BPS Kota Singkawang 2023

Jumlah kejadian bencana menurut jenis bencana dan kecamatan di Kota Singkawang tahun 2018-2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Jumlah Kejadian Abrasi Pantai di Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Singkawang Selatan	1	1	-	-	-
2.	Singkawang Timur	-	-	-	-	-
3.	Singkawang Utara	5	5	-	-	-
4.	Singkawang Barat	2	2	-	-	-
5.	Singkawang Tengah	1	1	-	-	-
Total		9	9	0	0	0

Sumber: BPBD Kota Singkawang, 2023

Secara umum jumlah kejadian abrasi pantai di Kota Singkawang tahun 2018-2022 rendah bahkan tidak ada di tahun 2020, 2021, dan 2022. Untuk Kecamatan Singkawang Utara yang mengalami abrasi tertinggi di tahun 2018-2019 sebanyak 5 kali.

Tabel 2.7
Jumlah Kejadian Bencana Banjir di Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Singkawang Selatan	1	1	-	1	-
2.	Singkawang Timur	5	5	-	-	-
3.	Singkawang Utara	4	4	-	1	-
4.	Singkawang Barat	4	4	3	3	-
5.	Singkawang Tengah	5	5	4	2	3
Total		19	19	7	7	3

Sumber: BPBD Kota Singkawang, 2023

Masih adanya jumlah kejadian bencana banjir di Kota Singkawang tahun 2018-2022 di setiap Kecamatan. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, tahun 2023 bencana banjir yang terendah di Kota Singkawang.

Tabel 2.8
Jumlah Kejadian Bencana Longsor di Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Singkawang Selatan	6	6	-	-	1
2.	Singkawang Timur	1	1	-	-	-
3.	Singkawang Utara	-	-	-	-	-
4.	Singkawang Barat	-	-	-	-	-
5.	Singkawang Tengah	-	-	-	-	-
Total		7	7	0	0	1

Sumber: BPBD Kota Singkawang, 2023

Tidak adanya kejadian bencana longsor tahun 2020-2021 disetiap Kecamatan yang ada di Kota Singkawang.

Tabel 2.9
Jumlah Kejadian Bencana Tsunami di Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Singkawang Selatan	-	-	-	-	-
2.	Singkawang Timur	-	-	-	-	-
3.	Singkawang Utara	-	-	-	-	-
4.	Singkawang Barat	-	-	-	-	-
5.	Singkawang Tengah	-	-	-	-	-
Total		0	0	0	0	0

Sumber: BPBD Kota Singkawang, 2023

Secara umum jumlah kejadian bencana tsunami di Kota Singkawang dari tahun 2018-2022 tidak ada.

Tabel 2.10
Jumlah Kejadian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Singkawang Selatan	4	24	4	1	8
2.	Singkawang Timur	3	7	3	1	-
3.	Singkawang Utara	6	40	-	1	1
4.	Singkawang Barat	-	2	-	1	3
5.	Singkawang Tengah	1	19	6	-	7
Total		14	92	13	4	19

Sumber: BPBD Kota Singkawang, 2023

Masih adanya kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan di Kota Singkawang dari tahun 2018-2022. Pada tahun 2021 bencana kebakaran hutan yang paling sedikit terjadi dan pada tahun 2019 yang paling banyak terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan di Kota Singkawang.

2.1.2. Penataan Ruang

A. Rencana Struktur Ruang

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2022-2042. Penyusunan Perubahan RPD Tahun 2023-2026 berpedoman pada tujuan RTRW Kota Singkawang Tahun 2022-2042, yaitu penataan ruang wilayah Kota Singkawang sebagai pusat kegiatan wilayah yang memiliki keunggulan pariwisata berwawasan lingkungan hidup, kegiatan industri serta perdagangan dan jasa berorientasi ekspor yang aman, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan dengan menyusun kebijakan dan strategi penataan ruang yang terdiri atas:

- a. Pengembangan kawasan pusat kegiatan wilayah yang mencakup kawasan pemerintahan, pariwisata budaya, perdagangan dan jasa untuk mendukung perwujudan kota sebagai kota wisata unggulan;
- b. Pengembangan pusat pelayanan yang merata dan berhirarki untuk peningkatan pelayanan ke seluruh wilayah;
- c. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan lainnya yang terpadu dan merata;
- d. Perlindungan kawasan-kawasan yang merupakan situs cagar budaya dan pengembangan daya tarik wisata;
- e. Peningkatan potensi alam dan budaya dalam mewujudkan pengembangan pariwisata unggulan;
- f. Perwujudan dukungan untuk sektor pariwisata dengan kemudahan investasi pada sektor jasa, industri, dan perdagangan;
- g. Pengembangan kegiatan industri untuk memacu perkembangan kegiatan perdagangan berorientasi ekspor dan menunjang

pengembangan kegiatan di sektor pertanian pangan, perkebunan, peternakan, serta perikanan dan kelautan baik di wilayah kota maupun di wilayah kabupaten yang berbatasan;

- h. Perwujudan dan pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- i. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; dan
- j. Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang Kota Singkawang, ditetapkan Strategi penataan ruang wilayah yaitu:

- a. Strategi pengembangan kawasan pusat kegiatan wilayah yang mencakup kawasan pemerintahan, perdagangan dan jasa untuk mendukung perwujudan kota sebagai pusat kegiatan wilayah yang terdiri atas:
 - a. Menetapkan kawasan pemerintahan kota dan kawasan komersial yang memiliki jangkauan pelayanan regional sebagai bagian dari kawasan strategis;
 - b. Menata jaringan prasarana dan simpul transportasi darat dalam rangka menjaga kelancaran lalu lintas lokal dan regional di kawasan pusat kota;
 - c. Menata kawasan terbangun khususnya kegiatan-kegiatan komersial terutama yang berada pada jalan arteri dan kolektor;
 - d. Mengendalikan kawasan permukiman yang berkepadatan tinggi;
 - e. Mengembangkan sistem jaringan drainase yang efektif dan efisien dalam rangka menghindari terjadinya banjir; dan
 - f. Menyediakan ruang terbuka hijau yang memadai sebagai unsur pengikat sosial masyarakat kota.
- b. Strategi untuk pengembangan pusat pelayanan yang merata dan berhirarki untuk peningkatan pelayanan ke seluruh wilayah, terdiri atas:

- a. Menjaga berfungsinya secara optimal pusat-pusat pelayanan yang sudah ada;
 - b. Mendorong berfungsinya pusat-pusat pelayanan kegiatan yang baru;
 - c. Meningkatkan keterkaitan antar-pusat pelayanan dalam wilayah kota, dan antara pusat-pusat pelayanan dengan daerah layanannya yang merupakan bagian dari wilayah kabupaten yang berbatasan; dan
 - d. Mengendalikan perkembangan pusat-pusat pelayanan yang agar sesuai dengan fungsi dan panduan rancang kota.
- c. Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan lainnya yang terpadu dan merata, terdiri atas:
- a. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara, serta keterpaduan intra dan antarmoda;
 - b. Membangun jaringan jalan baru yang diarahkan untuk menghubungkan pusat-pusat pelayanan kota dengan pusat-pusat lingkungan serta jalan alternatif untuk mengantisipasi kemacetan pada ruas-ruas jalan yang sangat berpotensi mengalami kemacetan dalam masa rencana;
 - c. Membangun Jalan Lingkar Barat (by pass) yang menghubungkan Jalan Kaliasin sampai Jalan Ratu Sepudak (Semelagi Kecil) yang berfungsi sebagai jalan arteri;
 - d. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi;
 - e. Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan, serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik secara optimal;
 - f. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air, mempercepat konservasi sumber daya air, serta meningkatkan pengendalian

- daya rusak air; dan
- g. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan yang meliputi drainase, air minum, persampahan, pengolahan limbah, angkutan umum, jalur pejalan kaki, kegiatan sektor informal, dan jalur evakuasi bencana.
 - d. Strategi perlindungan kawasan-kawasan yang merupakan situs cagar budaya dan pengembangan daya tarik wisata, terdiri atas:
 - a. Menetapkan kawasan-kawasan yang merupakan situs cagar budaya;
 - b. Melindungi dan memelihara kawasan yang merupakan situs cagar budaya dengan cara pengamanan, perawatan, dan pemugaran;
 - c. Menetapkan areal objek wisata dan kawasan terkait sekitarnya sebagai bagian dari kawasan pariwisata;
 - d. Pengembangan kawasan untuk Bumi Perkemahan di sekitar Danau Sarantangan di Kelurahan Sagatani, Kebun Botani di Kelurahan Bagak Sahwa, kebun koleksi di Kelurahan Nyarumkop dan Bagak Sahwa, serta konservasi di luar habitat alami (*ex situ*) di Gunung Besar di Kelurahan Sedau dan di kaki Gunung Raya di Kelurahan Bagak Sahwa untuk menunjang pengembangan wisata pendidikan dan budidaya tanaman hortikultura; dan
 - e. Mengembangkan prasarana dan sarana pendukung pada areal pengembangan pariwisata.
 - e. Strategi peningkatan potensi alam dan budaya dalam mewujudkan pengembangan pariwisata unggulan, terdiri atas:
 - a. Menetapkan areal objek wisata dan kawasan terkait sekitarnya sebagai bagian dari kawasan pariwisata;
 - b. Mengembangkan kegiatan pada kawasan wisata alam dan budaya tanpa merusak kelestariannya dengan membaginya kedalam zona lindung dan budi daya;
 - c. Mengembangkan prasarana dan sarana pendukung pada areal pengembangan pariwisata; dan

- d. Mengembangkan desa wisata sebagai kesatuan dari atraksi wisata alam maupun budaya untuk meningkatkan perekonomian dan partisipasi masyarakat.
- f. Strategi perwujudan dukungan untuk sektor pariwisata dengan kemudahan investasi pada sektor jasa, industri, dan perdagangan terdiri atas:
 - a. Menetapkan areal objek wisata dan kawasan terkait sekitarnya sebagai bagian dari kawasan pariwisata; dan
 - b. Mengembangkan prasarana dan sarana pendukung pada areal pengembangan pariwisata.
- g. Strategi pengembangan kegiatan industri untuk memacu perkembangan kegiatan perdagangan berorientasi ekspor dan menunjang pengembangan kegiatan di sektor pertanian pangan, perkebunan, peternakan, serta perikanan dan kelautan baik di wilayah kota maupun di wilayah kabupaten yang berbatasan, terdiri atas:
 - a. Menetapkan kawasan industri di Kelurahan Sedau dan Kelurahan Pangmilang yang terintegrasi dengan kawasan pelabuhan dan pergudangan;
 - b. Membangun kanal pengendali banjir yang menghubungkan bagian hulu dari Sungai Sedau dengan muara Sungai Jamthang untuk mengantisipasi terjadinya banjir di kawasan industri;
 - c. Mengembangkan prasarana dan sarana pengelolaan lingkungan khusus untuk kawasan industri;
 - d. Mendayagunakan secara optimal kawasan industri beserta fasilitasnya dengan memperhatikan kelestarian dan kualitas lingkungan;
 - e. Mendorong pengembangan sektor industri ke arah pengembangan dan pemanfaatan sentra- sentra industri kecil dan aneka industri dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan; dan
 - f. Mendorong pengembangan kawasan industri yang dikelola oleh perusahaan pengelola kawasan industri.

- h. Strategi perwujudan dan pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup, terdiri atas:
 - a. Menetapkan kawasan lindung;
 - b. Melestarikan ekosistem kawasan cagar alam;
 - c. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung selain dari kawasan cagar alam yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - d. Mengalokasikan peruntukan ruang terbuka hijau kota dengan luas lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota, dengan ruang terbuka hijau publik lebih dari 20% dari luas wilayah kota; dan
 - e. Mengembangkan kerjasama dengan kabupaten yang berbatasan dalam meningkatkan fungsi lindung.
- i. Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, terdiri atas:
 - a. Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup terutama kawasan cagar alam, kawasan resapan air, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, RTH hutan kota, sempadan danau, sempadan sungai, dan sempadan pantai;
 - b. Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - c. Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
 - d. Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;

- e. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- f. Mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya; dan
- g. Mengembangkan kegiatan budi daya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana alam
- j. Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, terdiri atas:
 - a. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak di kawasan pusat kota;
 - b. Membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan tangkapan air untuk mempertahankan ketersediaan sumber air;
 - c. Membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
 - d. Melakukan penyempurnaan secara berkala terhadap ketentuan-ketentuan peraturan zonasi yang telah ditetapkan terutama dalam rangka mengantisipasi dampak yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan atau teknologi baru;
 - e. Mengendalikan perkembangan kawasan terbangun yang mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan sungai dan pantai; dan
 - f. Menata kawasan perkotaan yang adaptif terhadap ancaman bencana banjir.

Rencana struktur ruang wilayah Kota Singkawang meliputi sistem pusat pelayanan, dan sistem jaringan prasarana.

1. Sistem Pusat Pelayanan

Sistem pusat pelayanan di daerah terdiri atas Pusat Pelayanan Kota (PPK), Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

- a. Pusat Pelayanan Kota (PPK) meliputi kawasan perdagangan dan jasa, perkantoran dan pelayanan umum yang terletak di Kecamatan Singkawang Barat.
- b. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) meliputi:
 - 1) SPPK I berfungsi sebagai simpul transportasi udara serta pusat permukiman, perdagangan dan jasa berada di Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan;
 - 2) SPPK II berfungsi sebagai simpul transportasi laut, pusat kegiatan pariwisata, serta perdagangan dan jasa yang berada di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan;
 - 3) SPPK III yang berfungsi sebagai pusat pelayanan umum, perdagangan dan jasa, berada di Kelurahan Setapak Besar Kecamatan Singkawang Utara;
 - 4) SPPK IV yang berfungsi sebagai pusat permukiman dan pariwisata berada di Kelurahan Pajintan, Kecamatan Singkawang Timur; dan
 - 5) SPPK V berada yang berfungsi sebagai pusat pariwisata, perdagangan dan jasa berada di Kelurahan Bagak Sahwa, Kecamatan Singkawang Timur
- c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), meliputi:
 - 1) Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan Semelagi Kecil, kecamatan Singkawang Utara;
 - 2) Pusat Pelayanan Lingkungan Sungai Rasau, Kecamatan Singkawang Utara;

- 3) Pusat Pelayanan Lingkungan Naram, Kecamatan Singkawang Utara;
- 4) Pusat Pelayanan Lingkungan Mayasopa, Kecamatan Singkawang Timur;
- 5) Pusat Pelayanan Lingkungan Sijangkung, Kecamatan Singkawang Selatan; dan
- 6) Pusat Pelayanan Lingkungan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan.

2. Sistem Jaringan Prasarana

Sistem Jaringan Prasarana yang ada di daerah merupakan sistem jaringan transportasi yang terdiri atas sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan infrastruktur perkotaan.

a. Sistem Jaringan Transportasi, meliputi:

1) Sistem jaringan jalan; terdiri atas:

a) Jalan umum, terdiri atas:

(1) Jalan arteri; terdiri atas:

- Jalan arteri primer, terdiri atas:
 - jalan Alianyang;
 - sebagian Jalan Tebas-Singkawang, sepanjang 49,72 km (empat puluh sembilan koma tujuh puluh dua kilometer);
 - Batas Kota Singkawang-Sei. Duri; dan
 - sebagian jalan Ahmad Yani, sepanjang 0,14 km (nol koma empat belas kilometer)
- Jalan arteri sekunder, terdiri atas:
 - Jalan Merdeka;
 - Jalan Diponegoro;
 - Sebagian jalan Ahmad Yani, sepanjang 1,23 km (satu koma dua puluh tiga kilometer)

- Sebagian jalan Tebas-Singkawang sepanjang 1,45 km (satu koma empat puluh lima kilometer)

(2) Jalan kolektor, terdiri atas:

- Jalan kolektor primer, terdiri atas:
 - Jalan Sudirman; dan
 - Jalan Pahlawan
- Jalan kolektor sekunder, terdiri atas:
 - Jalan Baru;
 - Jalan Budi Utomo;
 - Jalan Bun Fui;
 - Jalan Conglongkong Trans;
 - Jalan Demang Akub;
 - Jalan Dr. Sutomo;
 - Jalan Firdaus HR;
 - Jalan Firdaus HR II;
 - Jalan Firdaus III;
 - Jalan GS. Lalanang;
 - Jalan Gunung Kaba';
 - Jalan H. Bakar;
 - Jalan Hamid Matali;
 - Jalan Hermansyah;
 - Jalan Jembatan 25;
 - Jalan Kepol Mahmud;
 - Jalan Kridasana;
 - Jalan Kurau;
 - Jalan Lingkar Timur;
 - Jalan Mahad Usman;
 - Jalan Matang Lintang;
 - Jalan Mesjid Raya;
 - Jalan Mesjid Sei Bulan;

- Jalan Niaga;
- Jalan Nusantara;
- Jalan P. Antasari;
- Jalan Padat Karya Sungai Wie;
- Jalan Pangmilang SP1-SP2;
- Jalan Pelita;
- Jalan Pemuda;
- Jalan Pertanian;
- Jalan Perwira;
- Jalan Poros Pajintan;
- Jalan Pramuka;
- Jalan R. A. Kartini;
- Jalan Raya Sagatani;
- Jalan Raya Sebakuan;
- Jalan Sama-Sama;
- Jalan Saman Bujang;
- Jalan Sanggau Kulor;
- Jalan Sejahtera;
- Jalan Semai;
- Jalan SM. Tsjafioeddin;
- Jalan Stasiun;
- Jalan Tani SMP VII;
- Jalan Trans Semelagi;
- Jalan Trisula;
- Jalan Veteran;
- Jalan Veteran Ujung;
- Jalan Wonosari; dan
- Jalan Yunus Yakob.

(3) Jalan lokal; dan

(4) Jalan lingkungann berupa jalan lingkungan sekunder tersebar di seluruh Kota Singkawang.

- b) Jalan khusus, yaitu Jalan Tanjung Bajau dari Kawasan Wisata Palm Beach menuju Sinka Island Park;
- c) Jalan tol, terdiri dari:
 - (1) Jalan tol yang menghubungkan Pontianak-Mempawah-Bengkayang-Singkawang; dan
 - (2) Pintu Tol Singkawang berada di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan.
- d) Terminal penumpang, terdiri atas:
 - (1) Terminal penumpang tipe A, berupa Terminal Singkawang yang ditetapkan di Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah;
 - (2) Terminal penumpang tipe C, meliputi:
 - Terminal Beringin di Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah;
 - Terminal Pasiran di Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat;
 - Terminal di Kelurahan Semelagi Kecil Kecamatan Singkawang Utara;
 - Terminal di Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan; dan
 - Terminal di Kelurahan Bagak Sahwa Kecamatan Singkawang Timur
- e) Terminal barang, yaitu rencana lokasi terminal barang berada di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan; dan
- f) Jembatan timbang, yaitu rencana revitalisasi penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor dengan pengaktifan kembali Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Sedau.

- 2) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, berupa:
 - a) Alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau, berupa alur-pelayaran kelas II yang menghubungkan Kota Singkawang dengan Pelabuhan Pulau Tambelan; dan
 - b) Pelabuhan Penyeberangan, yaitu Pelabuhan Sedau Singkawang yang ditetapkan di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan.
- 3) Sistem jaringan transportasi laut, terdiri dari:
 - a) pelabuhan pengumpul, yaitu Pelabuhan Singkawang yang berada di Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat; dan
 - b) pelabuhan perikanan, berupa pangkalan pendaratan ikan berada di Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat dan Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan.
- 4) Bandar udara umum dan bandar udara khusus, berupa:
 - a) Bandar Udara umum, berupa Bandar Udara Pengumpan. Bandar Udara pengumpan yaitu Bandar Udara Singkawang di Kelurahan Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan; dan
 - b) Bandar Udara khusus, yaitu Bandar Udara Smart Semelagi di Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara.
- b. Sistem Jaringan Sumber Daya Air, berupa prasarana sumber daya air yang terdiri atas:
 - 1) Sistem jaringan irigasi, terdiri atas:
 - a) Jaringan irigasi primer berupa anak sungai yang mengalir melintasi beberapa kelurahan yang terdiri dari:
 - (1) Kelurahan Sedau, Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Pangmilang, dan Kelurahan Sagatani di Kecamatan Singkawang Selatan;

- (2) Kelurahan Sanggau Kulor, Kelurahan Bagak Sahwa, dan Kelurahan Nyarumkop di Kecamatan Singkawang Timur; dan
- (3) Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah.
- b) Jaringan irigasi sekunder berada pada kawasan-kawasan pertanian yang tersebar di beberapa kelurahan meliputi:
 - (1) Kelurahan Sedau, Kelurahan Pangmilang, dan Kelurahan Sagatani di Kecamatan Singkawang Selatan;
 - (2) Kelurahan Pajintan, Kelurahan Sanggau Kulor, Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Mayasopa, dan Kelurahan Nyarumkop di Kecamatan Singkawang Timur;
 - (3) Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah; dan
 - (4) Kelurahan Pasiran di Kecamatan Singkawang Barat
- c) Jaringan irigasi tersier mengalir melintasi beberapa kelurahan yang terdiri dari:
 - (1) Kelurahan Sedau, Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Pangmilang, dan Kelurahan Sagatani di Kecamatan Singkawang Selatan;
 - (2) Kelurahan Pajintan, Kelurahan Sanggau Kulor, Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Nyarumkop, dan Kelurahan Mayasopa di Kecamatan Singkawang Timur; dan
 - (3) Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah.
- 2) Sistem pengendalian banjir, berupa kolam retensi terletak di Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah; dan
- 3) Bangunan sumber daya air, terdiri atas:
 - a) Embung terletak di Kelurahan Semelagi Kecil di Kecamatan Singkawang Utara; Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah; Kelurahan Pajintan di

Kecamatan Singkawang Timur dan Kelurahan Pangmilang di Kecamatan Singkawang Selatan;

b) Pintu Air terletak di:

(1) Kelurahan Kuala dan Kelurahan Pasiran di Kecamatan Singkawang Barat;

(2) Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Sedau, Kelurahan Pangmilang, dan Kelurahan Sagatani di Kelurahan Singkawang Selatan;

(3) Kelurahan Sanggau Kulor, Kelurahan Pajintan, Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Nyarumkop, dan Kelurahan Mayasopa di Kecamatan Singkawang Utara; dan

(4) Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah

c) Prasarana Irigasi terletak di:

(1) Kelurahan Kuala dan Kelurahan Pasiran di Kecamatan Singkawang Barat;

(2) Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Sedau, Kelurahan Pangmilang, dan Kelurahan Sagatani di Kelurahan Singkawang Selatan;

(3) Kelurahan Sanggau Kulor, Kelurahan Pajintan, Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Nyarumkop, dan Kelurahan Mayasopa di Kecamatan Singkawang Utara; dan

(4) Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah.

c. Infrastruktur Perkotaan, terdiri atas:

1) SPAM, terdiri atas:

a) Jaringan perpipaan, meliputi:

(1) Unit air baku, terdiri dari:

- Unit air baku berupa intake yang terdapat di:
 - Kelurahan Sedau, Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Pangmilang, dan Kelurahan Sagatani

di Kecamatan Singkawang Selatan;

- Kelurahan Pasiran di Kecamatan Singkawang Barat;
 - Kelurahan Sanggau Kulor, Kelurahan Pajintan, Kelurahan Nyarumkop, Kelurahan Bagak Sahwa, dan Kelurahan Mayasopa di Kecamatan Singkawang Timur; dan
 - Kelurahan Semelagi Kecil dan Kelurahan Sungai Bulan di Kecamatan Singkawang Utara.
- Jaringan air baku yang tersebar di beberapa kelurahan meliputi:
 - Kelurahan Mayasopa, Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Nyarumkop, Kelurahan Pajintan, dan Kelurahan Sanggau Kulor di Kecamatan Singkawang Timur;
 - Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah; dan
 - Kelurahan Naram, Kelurahan Sungai Bulan, dan Kelurahan Semelagi Kecil di Kecamatan Singkawang Utara

(2) Unit produksi, terdiri atas:

- Unit produksi berupa Instalasi Pengolahan Air (IPA) terdiri dari Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah, Kelurahan Sungai Bulan dan Kelurahan Semelagi Kecil di Kecamatan Singkawang Utara.
- Unit produksi berupa reservoir yang terletak di Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah.
- Jaringan produksi meliputi:
 - Kelurahan Sanggau Kulor dan Kelurahan Pajintan di Kelurahan Singkawang Timur;

- Kelurahan Roban, Kelurahan Condong, Kelurahan Sekip Lama, Kelurahan Jawa, dan Kelurahan Sungai Wie, di Kecamatan Singkawang Tengah; dan
- Kelurahan Sungai Garam Hilir di Kecamatan Singkawang Utara

(3) Unit distribusi, berupa jaringan distribusi yang tersebar hampir di seluruh Kota Singkawang kecuali Kelurahan Mayasopa di Kecamatan Singkawang Timur.

- b) Bukan jaringan perpipaan, terdiri dari sumur pompa terdapat di Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, Kelurahan Pajintan, Mayasopa, Bagak Sahwa Kecamatan Singkawang Timur, dan Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan.

2) SPAL; terdiri atas:

- a) Sistem pengelolaan air limbah non domestik terletak di:

(1) Kelurahan Pasiran dan Kelurahan Melayu di Kecamatan Singkawang Barat;

(2) Kelurahan Roban, Kelurahan Sekip Lama, Kelurahan Sungai Wie, Kelurahan Condong di Kecamatan Singkawang Tengah;

(3) Kelurahan Sedau, Kelurahan Pangmilang, Kelurahan Sagatani, Kelurahan Sijangkung di Kecamatan Singkawang Selatan;

(4) Kelurahan Setapak Kecil di Kecamatan Singkawang Utara; dan

(5) Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Sanggau Kulor di Kecamatan Singkawang Timur

- b) Sistem pengelolaan air limbah domestik, terdiri dari:

(1) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat, meliputi:

- Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Pajintan Kecamatan Singkawang Timur;
 - Kelurahan Bukit Batu Kecamatan Singkawang Tengah; dan
 - Kelurahan Pangmilang, Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat berupa penanganan limbah rumah tangga pada kawasan padat permukiman dengan pembangunan WC, septic tank rumah tangga atau septic tank bio filter yang tersebar di seluruh kelurahan sesuai kebutuhan.
- 3) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), berada di dekat kawasan pengolahan sampah perkotaan TPA Wonosari di Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah dan pada Kawasan Peruntukan Industri yang terdapat di Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan;
- 4) Sistem jaringan persampahan, terdiri atas:
- a) Tempat penampungan sampah sementara (TPS), terdapat di:
- (1) Kelurahan Setapak Besar, Kelurahan Sungai Bulan, Kelurahan Naram, dan Kelurahan Sungai Garam Hilir di Kecamatan Singkawang Utara;
- (2) Kelurahan Sungai Wie, Kelurahan Roban, dan Kelurahan Condong di Kecamatan Singkawang Tengah;
- (3) Kelurahan Pasiran dan Kelurahan Melayu di Kecamatan Singkawang Barat;
- (4) Kelurahan Sedau di Kecamatan Singkawang Utara; dan
- (5) Kelurahan Pajintan di Kecamatan Timur
- b) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) terdapat di Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah

- c) Tempat Pemrosesan Akhir sampah yakni TPA Wonosari terdapat di Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah
- 5) Sistem jaringan evakuasi bencana, terdiri atas:
 - a) Jalur evakuasi bencana mengikuti jaringan jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan di Kota Singkawang; dan
 - b) Tempat evakuasi bencana memanfaatkan lapangan olahraga, fasilitas umum, RTH, kantor pemerintah dan bangunan besar lain yang aman dari bencana
- 6) Sistem drainase, terdiri atas:
 - a) Jaringan drainase primer, terdapat di:
 - (1) Sungai Singkawang;
 - (2) Sungai Sedau;
 - (3) Sungai Air Merah;
 - (4) Sungai Semelagi Kecil;
 - (5) Sungai Pinang;
 - (6) Sungai Selakau;
 - (7) Sungai Air Putih;
 - (8) Sungai Air Hitam;
 - (9) Sungai Setapuk Besar;
 - (10) Sungai Setapuk Kecil;
 - (11) Sungai Rasau;
 - (12) Sungai Bulan;
 - (13) Sungai Nangka;
 - (14) Sungai Garam;
 - (15) Sungai Wie;
 - (16) Sungai Sakok; dan
 - (17) Sungai Jamthang.
 - b) Jaringan drainase sekunder terdapat disepanjang kanan dan kiri jaringan jalan dengan fungsi arteri, kolektor dan

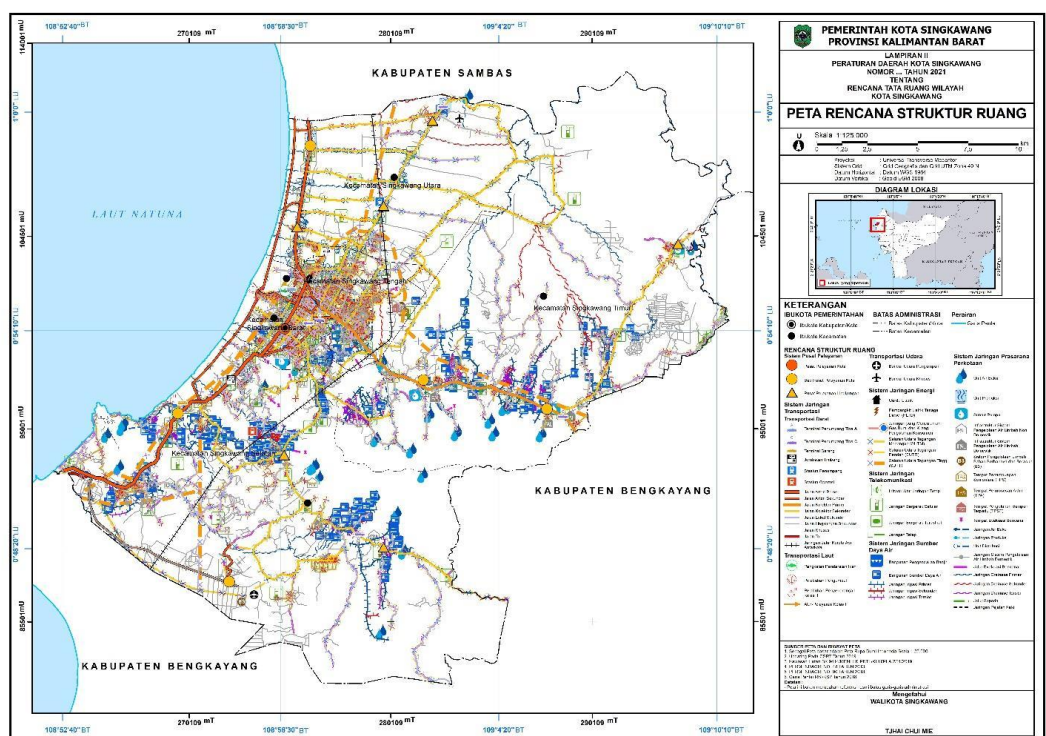
sebagian lokal di Kota Singkawang.

- c) Jaringan drainase tersier meliputi jaringan drainase yang terdapat disepanjang kanan dan kiri jaringan jalan dengan fungsi jalan lokal di Kota Singkawang.
- 7) Jalur sepeda, berupa pengembangan jalur sepeda yang berada di sebagian ruas jalan:
- a) Jalan Ahmad Yani;
 - b) Jalan Firdaus HR;
 - c) Jalan SM. Tsjafoeddin;
 - d) Jalan Diponegoro;
 - e) Jalan Pemuda;
 - f) Jalan Merdeka;
 - g) Jalan Setiabudi;
 - h) Jalan Sejahtera;
 - i) Jalan Kalimantan;
 - j) Jalan Sudirman; dan
 - k) Jalan Nusantara
- 8) Jaringan pejalan kaki, berupa pengembangan jalur pejalan kaki yang berada di sebagian ruas jalan Kota Singkawang khususnya pada kawasan pendidikan, perkantoran, perdagangan dan jasa, dan pariwisata yang terdiri dari:
- a) Jalan Firdaus HR;
 - b) Jalan Dr. Sutomo;
 - c) Jalan P. Antasari;
 - d) Jalan SM. Tsjafoeddin;
 - e) Jalan Yos Sudarso
 - f) Jalan Alianyang;
 - g) Jalan Ahmad Yani;
 - h) Jalan Firdaus HR II;
 - i) Jalan Diponegoro;
 - j) Jalan Merdeka;

- k) Jalan Pemuda;
- l) Jalan Nusantara;
- m) Jalan Perwira;
- n) Jalan R.A Kartini;
- o) Jalan Satria;
- p) Jalan Bintara;
- q) Jalan Sudirman;
- r) Jalan Kalimantan;
- s) Jalan GS. Lalanang;
- t) Jalan Yohana Godang; dan
- u) Jalan GM. Situt.

Secara detail rencana struktur ruang di Kota Singkawang tersaji pada berikut:

Gambar 2.2 Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota



Sumber : Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2022-2042

B. Rencana Pola Ruang

Rencana Pola Ruang Wilayah Daerah meliputi:

1. Kawasan Lindung

Rencana pola ruang kawasan lindung terdiri atas:

- a. Badan air; adalah sebagian badan air yang berada di Kota Singkawang, dengan luas kurang lebih 265 ha (dua ratus enam puluh lima hektare), yaitu:
 - 1) Sungai Singkawang;
 - 2) Sungai Sedau;
 - 3) Sungai Air Merah; dan
 - 4) Sungai Selakau;
 - 5) Sungai Setapuk Besar;
 - 6) Sungai Garam;
 - 7) Sungai Wie;
 - 8) Embung Panjintan; dan
 - 9) Danau Serantangan
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, berupa kawasan lindung gambut. Kawasan lindung gambut memiliki luas kurang lebih 287 ha (dua ratus delapan puluh tujuh hektare), terdapat di:
 - 1) Kelurahan Pangmilang di Kecamatan Singkawang Selatan; dan
 - 2) Kelurahan Sedau di Kecamatan Singkawang Selatan
- c. Kawasan perlindungan setempat, memiliki luas kurang lebih 397 ha (tiga ratus sembilan puluh tujuh hektare) yang terletak di sekitar:
 - 1) Sungai Acoi;
 - 2) Sungai Garam;
 - 3) Sungai Merah;
 - 4) Sungai Pasi;
 - 5) Sungai Sedau;

- 6) Sungai Setapuk Besar;
 - 7) Sungai Transad;
 - 8) Sungai Wie;
 - 9) Sungai Singkawang;
 - 10) Danau serantangan;
 - 11) Danau Biru; dan
 - 12) Kawasan Pantai di Kecamatan Singkawang Selatan
- d. Ruang terbuka hijau, memiliki luas 7.749 ha (tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan hektare), terdiri atas:
- 1) Rimba Kota, memiliki luas kurang lebih 7.355 ha (tujuh ribu tiga ratus lima puluh lima hektare) yang terletak di:
 - a) Kelurahan Kuala dan Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat;
 - b) Kelurahan Pangmilang, Kelurahan Sagatani, Kelurahan Sedau dan Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan;
 - c) Kelurahan Roban dan Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah;
 - d) Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Mayasopa, Kelurahan Nyarumkop, Kelurahan Pajintan dan Kelurahan Sanggau Kulor Kecamatan Singkawang Timur; dan
 - e) Kelurahan Naram, Kelurahan Semelagi Kecil, Kelurahan Setapuk Besar, Kelurahan Setapuk Kecil, Kelurahan Sungai Bulan, Kelurahan Sungai Garam Hilir dan Kelurahan Sungai Rasau Kecamatan Singkawang Utara
 - 2) Taman Kota, memiliki luas kurang lebih 221 ha (dua ratus dua puluh satu hektare) tersebar di seluruh Kota Singkawang:
 - a) Kelurahan Sungai Rasau, Kelurahan Setapuk Besar, dan Kelurahan Setapuk Kecil di Kecamatan Singkawang Utara;

- b) Kelurahan Sedau, Kelurahan Sijangkung, dan Kelurahan Pangmilang di Kecamatan Singkawang Selatan;
 - c) Kelurahan Pasiran, Kelurahan Melayu, dan Kelurahan Tengah di Kecamatan Singkawang Barat; dan
 - d) Kelurahan Roban, Kelurahan Jawa, dan Kelurahan Condong di Kecamatan Singkawang Tengah.
- 3) Taman Kecamatan, memiliki luas kurang lebih 10 ha (sepuluh hektare) terletak di Kelurahan Sungai Rasau, Kecamatan Singkawang Utara.
- 4) Taman Kelurahan, memiliki luas kurang lebih 7 ha (tujuh hektare) terletak di:
 - a) Kelurahan Naram, Kelurahan Sungai Bulan dan Kelurahan Sungai Rasau, Kecamatan Singkawang Utara; dan
 - b) Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat
- 5) Pemakaman, dengan luas kurang lebih 154 ha (seratus lima puluh empat hektare) yang tersebar di seluruh Kota Singkawang.
- e. Kawasan konservasi, berupa kawasan suaka alam (KSA). Kawasan suaka alam (KSA) merupakan cagar alam Gunung Raya Pasi di Kota Singkawang dengan luas kurang lebih 2.479 ha (dua ribu empat ratus tujuh puluh sembilan hektare) terletak di Kelurahan Pangmilang, Kelurahan Sagatani, Kelurahan Sijangkung di Kecamatan Singkawang Selatan dan Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Nyarumkop, Kelurahan Pajintan.
- f. Kawasan ekosistem mangrove, dengan luasan kurang lebih 137 ha (seratus tiga puluh tujuh hektare), terdapat di:
 - 1) Kelurahan Sungai Wie di Kecamatan Singkawang Tengah;
 - 2) Kelurahan Pasiran dan Kelurahan Kuala di Kecamatan Singkawang Barat;

- 3) Kelurahan Sungai Garam Hilir, Kelurahan Naram, Kelurahan Sungai Bulan, Kelurahan Sungai Rasau, Kelurahan Setapak Kecil, Kelurahan Setapak Besar, Kelurahan Semelagi Kecil di Kecamatan Singkawang Utara; dan
- 4) Kelurahan Sedau di Kecamatan Singkawang Selatan.

2. **Kawasan Budi Daya**

Kawasan Budi Daya meliputi:

- a. Badan jalan; meliputi sebagian badan jalan yang tersebar di seluruh Kota Singkawang, dengan luas kurang lebih 220 ha (dua ratus dua puluh hektare).
- b. Kawasan hutan produksi; meliputi:
 - 1) Kawasan hutan produksi tetap dengan luasan kurang lebih 5.183 ha (lima ribu seratus delapan puluh tiga hektare), terdapat di:
 - a) Kelurahan Mayasopa dan Kelurahan Nyarumkop di Kecamatan Singkawang Timur; dan
 - b) Kelurahan Semelagi Kecil, Kelurahan Setapak Besar, Kelurahan Setapak Kecil, Kelurahan Sungai Rasau di Kecamatan Singkawang Utara.
 - 2) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan luasan kurang lebih 0,28 ha (nol koma dua delapan hektare) terdapat di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan.
- c. Kawasan pertanian, terdiri atas:
 - 1) Kawasan tanaman pangan, dengan luasan kurang lebih dengan luas kurang lebih 10.995 ha (sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima hektare), terdapat di:
 - a) Kelurahan Semelagi Kecil, Kelurahan Setapak Besar, Kelurahan Setapak Kecil, Kelurahan Sungai Rasau, Kelurahan Sungai Bulan, Kelurahan Naram, dan Kelurahan Sungai Garam Hilir di Kecamatan Singkawang Utara;

- b) Kelurahan Bukit Batu, Kelurahan Roban, dan Kelurahan Sungai Wie di Kecamatan Singkawang Tengah;
 - c) Kelurahan Sedau, Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Pangmilang, dan Kelurahan Sagatani di Kecamatan Singkawang Selatan;
 - d) Kelurahan Sanggau Kulor, Kelurahan Pajintan, Kelurahan Nyarumkop, Kelurahan Bagak Sahwa, dan Kelurahan Mayasopa di Kecamatan Singkawang Timur; dan
 - e) Kelurahan Pasiran di Kecamatan Singkawang Barat.
- 2) Kawasan hortikultura, dengan luasan kurang lebih 702 ha (tujuh ratus dua hektare) tersebar di seluruh Kota Singkawang:
- a) Kelurahan Mayasopa di Kecamatan Singkawang Timur; dan
 - b) Kelurahan Sagatani di Kecamatan Singkawang Selatan.
- 3) Kawasan perkebunan, dengan luasan kurang lebih 9.819 ha (sembilan ribu delapan ratus sembilan belas hektare), terdapat di:
- a) Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Mayasopa, Kelurahan Nyarumkop, Kelurahan Sanggau Kulor, dan Kelurahan Pajintan di Kecamatan Singkawang Timur;
 - b) Kelurahan Semelagi Kecil, Kelurahan Setapuk Besar, Kelurahan Setapuk Kecil, Kelurahan Sungai Rasau, Kelurahan Sungai Bulan, Kelurahan Naram, dan Kelurahan Sungai Garam Hilir di Kecamatan Singkawang Utara;
 - c) Kelurahan Sedau, Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Pangmilang, dan Kelurahan Sagatani di Kecamatan Singkawang Selatan; dan
 - d) Kelurahan Roban dan Kelurahan Sungai Wie di Kecamatan Singkawang Tengah

- 4) Kawasan peternakan, dengan luasan kurang lebih 2.266 ha (dua ribu dua ratus enam puluh enam hektare), terdapat di:
 - a) Kelurahan Naram dan Kelurahan Sungai Bulan di Kecamatan Singkawang Utara;
 - b) Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah;
 - c) Kelurahan Pajintan, Kelurahan Nyarumkop dan Kelurahan Sanggau Kulor di Kecamatan Singkawang Timur; dan
 - d) Kelurahan Sedau, Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Pangmilang dan Kelurahan Sagatani di Kecamatan Singkawang Selatan
- d. Kawasan perikanan, terdiri dari:
 - 1) Kawasan perikanan tangkap, dengan luasan kurang lebih 62 ha (enam puluh dua hektare) terdapat di Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah.
 - 2) Kawasan perikanan budi daya, dengan luasan kurang lebih 53 ha (lima puluh tiga hektare) terdapat di Kelurahan Setapak Besar, Kelurahan Sungai Rasau, dan Kelurahan Sungai Bulan di Kecamatan Singkawang Utara.
- e. Kawasan pertambangan dan energi, meliputi:
 - 1) Kawasan pertambangan mineral, terdiri atas:
 - a) Kawasan peruntukan pertambangan batuan, dengan luasan kurang lebih 203 ha (dua ratus tiga hektare), terdapat di:
 - (1) Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah;
 - (2) Kelurahan Sanggau Kulor, Kelurahan Nyarumkop di Kecamatan Singkawang Timur; dan
 - (3) Kelurahan Sedau dan Kelurahan Sagatani Kecamatan Singkawang Selatan.
 - b) Kawasan pertambangan mineral bukan logam, dengan luasan kurang lebih 230 ha (dua ratus tiga puluh hektare) terdapat di Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang

Selatan.

- 2) Kawasan pembangkitan tenaga listrik, dengan luas kurang lebih 6 ha (enam hektare), terdapat di Kelurahan Roban, Kelurahan Sungai Wie dan Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah.
- f. Kawasan peruntukan industri, terdapat di Kelurahan Pangmilang, Kelurahan Sijangkung, dan Kelurahan Sedau dengan luas kurang lebih 208 ha (dua ratus delapan hektare).
- g. Kawasan pariwisata, dengan luas kurang lebih 1.255 ha (seribu dua ratus lima puluh lima hektare), terdiri atas:
 - 1) Kawasan *Mangrove* Setapak di Kecamatan Singkawang Utara;
 - 2) Taman Pasir Panjang Indah di Kecamatan Singkawang Selatan;
 - 3) *Palm Beach* di Kecamatan Singkawang Selatan;
 - 4) Tanjung Bajau di Kecamatan Singkawang Selatan;
 - 5) Pantai Batu Burung di Kecamatan Singkawang Selatan;
 - 6) Danau Serantangan di Kecamatan Singkawang Selatan;
 - 7) Taman Rekreasi Bukit Bougenville di Kecamatan Singkawang Selatan;
 - 8) Taman Rekreasi Chidayu Indah di Kecamatan Singkawang Selatan;
 - 9) Dayang Resort di Kecamatan Singkawang Selatan;
 - 10) Batu Belimbing di Kecamatan Singkawang Timur;
 - 11) Wisata *Mangrove* Kuala di Kecamatan Singkawang Barat; dan
 - 12) Taman Rekreasi Teratai Indah di Kecamatan Singkawang Barat.
- h. Kawasan permukiman, terdiri atas:
 - 1) Kawasan perumahan, dengan luasan kurang lebih 10.086 ha (sepuluh ribu delapan puluh enam hektare) yang tersebar diseluruh Kota Singkawang.

- 2) Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, memiliki luas kurang lebih 363 ha (tiga ratus enam puluh tiga hektare), yang tersebar di seluruh Kota Singkawang.
- 3) Kawasan infrastruktur perkotaan, memiliki luas kurang lebih 68 ha (enam puluh delapan hektare) yang terdapat di:
 - a) Kelurahan Sedau, Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Sagatani, dan Kelurahan Pangmilang di Kecamatan Singkawang Selatan;
 - b) Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah; dan
 - c) Kelurahan Sanggau Kulor di Singkawang Timur
- i. Kawasan perdagangan dan jasa, dengan luasan kurang lebih 1.455 ha (seribu empat ratus lima puluh lima hektare), yang tersebar di seluruh Kota Singkawang;
- j. Kawasan perkantoran, dengan luasan kurang lebih 45 ha (empat puluh lima hektare), yang tersebar di seluruh Kota Singkawang;
- k. Kawasan transportasi, memiliki luas 279 ha (dua ratus tujuh puluh sembilan hektare) yang terdapat di:
 - 1) Kelurahan Kuala di Kecamatan Singkawang Barat;
 - 2) Kelurahan Pangmilang dan Kelurahan Sedau di Kecamatan Singkawang Selatan;
 - 3) Kelurahan Sungai Wie di Kecamatan Singkawang Tengah; dan
 - 4) Kelurahan Semelagi Kecil di Kecamatan Singkawang Utara.
- l. Kawasan pertahanan dan keamanan, dengan luas kurang lebih 194 ha (seratus sembilan puluh empat hektare), terdapat di:
 - 1) Kelurahan Bukit Batu, Kelurahan Sekip Lama, Kelurahan Jawa, Kelurahan Condong, dan Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah;
 - 2) Kelurahan Sedau, Kelurahan Sijangkung, dan Kelurahan Sagatani di Kecamatan Singkawang Selatan;
 - 3) Kelurahan Pasiran, Kelurahan Melayu, dan Kelurahan Tengah di Kecamatan Singkawang Barat; dan

4) Kelurahan Pajintan di Kecamatan Singkawang Timur.

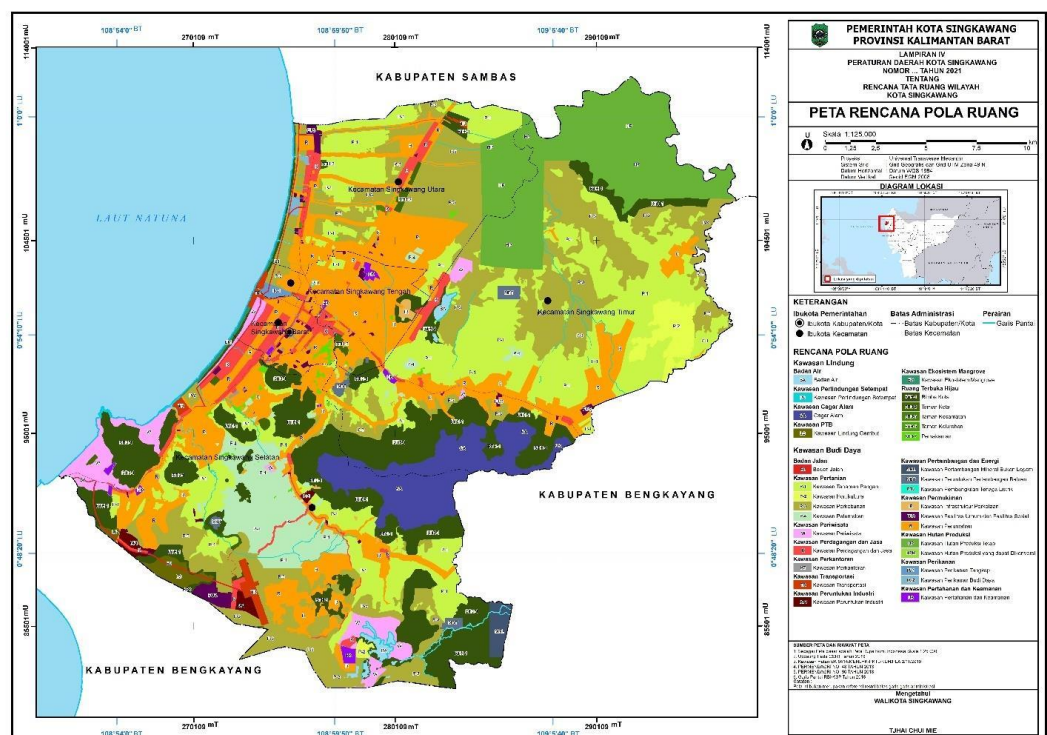
Kawasan pertahanan dan keamanan, terdiri dari:

- 1) Sekolah Calon Tamtama (Secata) dan Sartaif Tentara Nasional Indonesia Markas Komando Resimen Induk Daerah Militer XII Tanjungpura, di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan;
- 2) Lapangan Tembak Rindam di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan;
- 3) Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) XII Tanjungpura di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan;
- 4) Komando Distrik Militer (Kodim) 1202/ Komando Rayon Militer (Koramil) 1202-16/Sedau, di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan;
- 5) Sekolah Polisi Negara (SPN) Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, di Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan;
- 6) Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Satuan Korps Brigade Mobil (Brimob)/Detasemen B Pelopor, Kelurahan Sijangkung, Kecamatan Singkawang Selatan;
- 7) Komando Rayon Militer (Koramil) 1202- 05/Singkawang Barat, di Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat;
- 8) Komando Distrik Militer (Kodim) 1202/Singkawang, di Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat;
- 9) Kepolisian Resor (Polres) Singkawang di Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat;
- 10) Detasemen Polisi Militer (Denpom) XII/1 Sintang, Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat;
- 11) Perumahan Polisi/ Tentara di Kelurahan Tengah, Kecamatan Singkawang Barat;
- 12) Brigade Infantri (Brigif) 19/Khatulistiwa di Kelurahan Bukit Batu, Kecamatan Singkawang Tengah;

- 13) Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Singkawang, di Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah;
- 14) Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura Batalyon Infanteri Raider 641/Beruang, di Kelurahan Pajintan, Kecamatan Singkawang Timur;
- 15) Mess Singkawang Lapangan Udara (Lanud) Hadi Soemantri, di Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat; dan
- 16) Kepolisian Sektor (Polsek) di Kecamatan Singkawang Tengah, Kecamatan Singkawang Barat dan Kecamatan Singkawang Selatan.

Rencana Pola Ruang dengan tingkat ketelitian peta skala 1:25.000 pada berikut:

Gambar 2.3 Peta Rencana Pola Ruang



Sumber : Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2022-2042

2.1.3. Demografi

Kota Singkawang merupakan salah satu daerah berpenduduk multi etnis, dengan keragaman corak budayanya. Kemajemukan penduduk ini berdampak pada terjadinya pembauran (asimilasi) budaya dan sosial. Asimilasi terjadi diantaranya melalui perkawinan, hubungan kerja, dan interaksi hubungan bertetangga yang kemudian melahirkan model kehidupan berkeluarga dan sosial.

Kota Singkawang termasuk sebagai kota yang memiliki beragam Suku, Agama, Ras dan Adat (SARA) di Indonesia. Keberagaman etnis atau suku di Singkawang diwakili tiga suku mayoritas, yaitu Tionghoa (disebut juga dengan “Cina”), Dayak, dan Melayu, sehingga muncul julukan CiDaYu (Cina, Dayak, Melayu). Kota Singkawang merupakan kota yang mayoritas penduduknya berasal dari etnis Tionghoa dan kota ini memiliki komunitas Tionghoa terbesar di Indonesia. Ada suku pendatang lain seperti Jawa, Madura, Bugis, Batak, Sunda dan Banjar.

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan, karena tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai sasaran pembangunan. Sebagaimana daerah lain di Indonesia, data demografi Kota Singkawang mengacu pada 2 sumber, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Data demografi Kota Singkawang tahun 2022 berdasarkan proyeksi BPS Kota Singkawang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.11
Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Singkawang Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (Km)	Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun (%)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (Km2)
1	Singkawang Selatan	4	224,48	56.932	2,09	23,58	253,62
2	Singkawang Timur	5	166,26	23.815	1,09	9,86	143,24
3	Singkawang Utara	7	66,65	32.524	2,79	13,47	487,98
4	Singkawang Barat	4	15,04	56.270	0,81	23,30	3741,36
5	Singkawang Tengah	6	31,57	71.926	1,30	29,79	2278,30
Jumlah/ Total		26	504,00	241.467	1,55	100	479,10

Sumber: KDA Kota Singkawang, 2023

Kepadatan penduduk Kota Singkawang terletak di Kecamatan Singkawang Barat yaitu 3.741,36 km² dengan luas yang lebih kecil seluas 15,04 km dan dengan 4 (empat) Kelurahan yaitu Kelurahan Pasiran, Kelurahan Melayu, Kelurahan Tengah, dan Kelurahan Kuala, namun untuk laju pertumbuhan penduduk pada Kecamatan Singkawang Barat yang terkecil diantara 5 (lima) Kecamatan hanya 0,81 % per tahun.

Sedangkan data demografi Kota Singkawang tahun 2022 berdasarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.12
Jumlah Kelurahan, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk
Kota Singkawang Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (Km ²)	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk Per Km
1	Singkawang Selatan	4	224,48	56.511	251
2	Singkawang Timur	5	166,26	24.318	146
3	Singkawang Utara	7	66,65	33.607	504
4	Singkawang Barat	4	15,04	53.584	3.562
5	Singkawang Tengah	6	31,57	72.307	2.290
Jumlah/ Total		26	504	240.327	476

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, 2023

Selanjutnya bila dilihat dari jenis kelamin, penduduk Kota Singkawang Tahun 2022 terdistribusi kedalam penduduk laki-laki berjumlah 122.863 jiwa dan perempuan berjumlah 117.464 jiwa. Secara rinci jumlah penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.13
Jumlah Penduduk Kota Singkawang Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2018-2022

No	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	2018	111.782	107.279	219.061
2	2019	113.747	109.163	222.910
3	2020	120.280	114.784	235.064
4	2021	121.633	116.258	2378.91
5	2022	122.863	117.464	240.327
Jumlah/ Total		590.305	564.948	1.155.253

Sumber: BPS Kota Singkawang, 2023

Penduduk merupakan salah satu faktor produksi yang mampu menggerakkan perekonomian daerah. Ketersediaan penduduk khususnya angkatan kerja yang berkualitas tentunya akan menjadi modal strategis bagi kemajuan daerah. Sampai dengan Agustus 2021 Penduduk Usia Kerja di Kota Singkawang tercatat 171.213 jiwa yang terdiri dari Angkatan Kerja (penduduk yang berumur 15 tahun ke atas) sebanyak 110.114 jiwa dan Bukan Angkatan Kerja sebesar 61.099 jiwa. Secara rinci jumlah angkatan kerja dan bukan angkatan kerja di Kota Singkawang sebagai berikut :

Tabel 2.14
Jumlah Penduduk Kota Singkawang Berumur 15 Tahun Keatas
Berdasarkan Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja di Kota Singkawang
Tahun 2022

No	Status Keadaan Ketenagakerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
		orang	orang	orang
	(1)	(2)	(3)	(4)
	Penduduk Usia Kerja	88.573	85.992	174.565
1.	Angkatan Kerja	74.864	45.338	120.202
	Bekerja	71.405	38.428	109.833
	Pengangguran Terbuka	3.459	6.910	10.369
2.	Bukan Angkatan Kerja	13.709	40.654	54.363
	Sekolah	5.167	6.945	12.112
	Mengurus Rumah Tangga	3.450	32.183	35.633
	Lainnya	5.092	1.526	6.618

Sumber: BPS Kota Singkawang, 2023

Berdasarkan tabel di atas komposisi angkatan kerja Kota Singkawang pada 2022 terdiri dari 109.833 jiwa yang bekerja dan 10.369 jiwa pengangguran terbuka.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Pertumbuhan PDRB

Kemampuan suatu wilayah dalam mengelola faktor produksi yang dimiliki secara komersil untuk menghasilkan nilai tambah dicerminkan dari angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibedakan menjadi dua yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK).

Tabel 2.15
PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kota Singkawang
Tahun 2018-2022

No	Lapangan Usaha	2018		2019		2020		2021*		2022**	
		Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1134,87	11,71	1159,87	11,34	1200,55	11,86	1293,67	11,89	1409,29	11,81
2	Pertambangan dan Penggalian	465,09	4,80	492,84	4,82	500,48	4,94	542,77	4,99	584,87	4,90
3	Industri Pengolahan	1364,38	14,08	1460,88	14,28	1470,46	14,52	1603,08	14,74	1720,96	14,42
4	Pengadaan Listrik dan Gas	13,27	0,14	14,63	0,14	15,16	0,15	16,00	0,15	17,24	0,14
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	32,11	0,33	34,92	0,34	37,42	0,37	40,54	0,37	43,90	0,37
6	Konstruksi	1581,83	16,32	1636,95	16,00	1598,44	15,79	1790,45	16,46	1960,28	16,43
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1958,24	20,21	2126,46	20,79	1987,49	19,63	2065,37	18,99	2363,42	19,81
8	Transportasi dan Pergudangan	236,36	2,44	251,45	2,46	251,68	2,49	255,86	2,35	311,05	2,61
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	332,69	3,43	360,45	3,52	332,47	3,28	367,44	3,38	435,40	3,65
10	Informasi dan Komunikasi	287,90	2,97	306,19	2,99	328,37	3,24	338,93	3,12	355,37	2,98
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	442,07	4,56	437,77	4,28	427,60	4,22	460,02	4,23	503,84	4,22
12	Real Estat	280,14	2,89	291,10	2,85	294,40	2,91	304,48	2,80	314,99	2,64
13	Jasa Perusahaan	63,27	0,65	67,21	0,66	66,45	0,66	66,39	0,61	75,66	0,63
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	635,35	6,56	673,75	6,59	715,34	7,06	749,78	6,89	786,15	6,59
15	Jasa Pendidikan	567,41	5,85	597,26	5,84	546,50	5,40	572,76	5,27	595,77	4,99
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	144,87	1,49	154,30	1,51	208,93	2,06	269,58	2,48	299,62	2,51
17	Jasa Lainnya	151,54	1,56	162,35	1,59	144,49	1,43	140,80	1,29	153,81	1,29
	PDRB	9691,38	100	10228,39	100	10126,22	100	10877,85	100	11931,62	100

Sumber: Kota Singkawang Dalam Angka, 2023

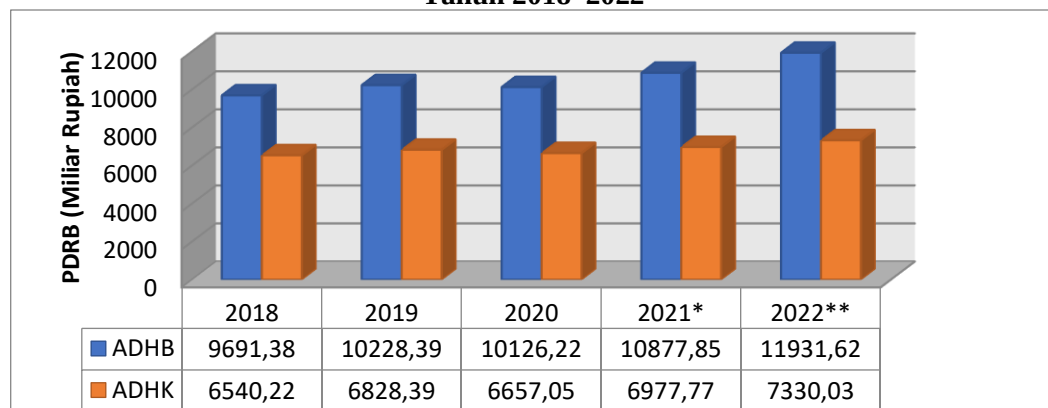
Tabel 2.16
PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Kota Singkawang
Tahun 2018-2022

No	Lapangan Usaha	2018		2019		2020		2021*		2022**	
		Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	854,10	2,91	887,34	3,89	890,51	0,36	927,53	4,16	962,66	3,79
2	Pertambangan dan Penggalian	273,14	4,19	282,28	3,35	282,10	-0,06	299,43	6,14	310,10	3,56
3	Industri Pengolahan	915,63	14,01	966,74	5,58	958,88	-0,90	1001,99	4,58	1034,31	3,22
4	Pengadaan Listrik dan Gas	10,63	0,16	10,90	2,61	11,06	1,46	11,45	3,46	11,92	4,18
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	26,26	0,41	28,10	7,00	29,85	6,21	31,59	5,85	34,13	8,03
6	Konstruksi	960,74	14,68	984,39	2,46	934,78	-5,04	996,81	6,64	1024,40	2,77
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1420,05	21,74	1516,26	6,78	1402,15	-7,53	1453,69	3,68	1579,68	8,67
8	Transportasi dan Pergudangan	182,07	2,78	192,14	5,53	189,48	-1,39	189,38	-0,05	211,26	11,55
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	227,26	3,47	242,10	6,53	219,92	-9,16	238,90	8,63	271,58	13,68
10	Informasi dan Komunikasi	271,42	4,07	285,82	5,31	303,51	6,19	312,82	3,07	327,62	4,73

No	Lapangan Usaha	2018		2019		2020		2021*		2022**	
		Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	323,37	4,94	315,28	-2,50	309,98	-1,68	320,41	3,37	331,61	3,49
12	Real Estat	180,74	2,77	185,13	2,43	185,47	0,19	191,17	3,07	193,75	1,35
13	Jasa Perusahaan	45,19	0,69	47,25	4,57	46,77	-1,03	47,03	0,57	51,57	9,64
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	266,46	4,07	278,10	4,37	289,55	4,12	299,29	3,36	298,93	-0,12
15	Jasa Pendidikan	372,30	5,69	383,55	3,02	356,89	-6,95	372,88	4,48	383,88	2,95
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	94,31	1,44	98,95	4,92	130,55	31,93	165,96	27,13	177,16	6,75
17	Jasa Lainnya	116,55	1,81	124,05	6,43	116,39	-6,18	117,42	0,89	125,48	6,86
	PDRB	6540,22	100	6828,39	4,41	6657,05	-2,51	6977,77	4,82	7330,03	5,05

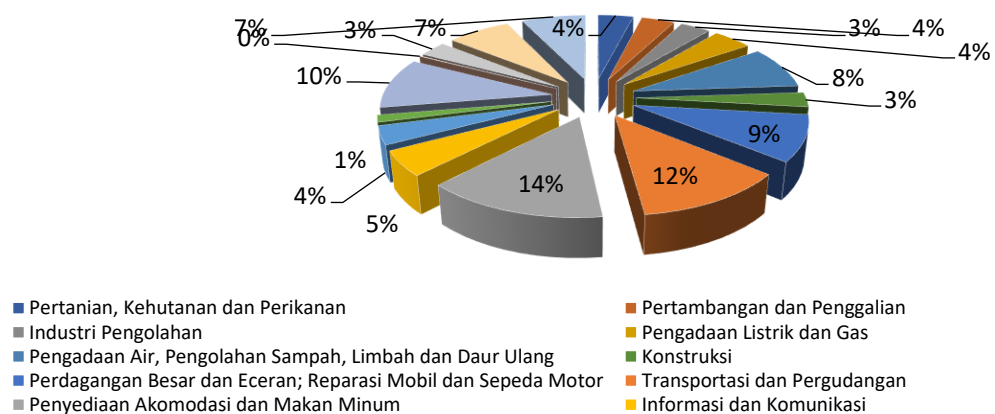
Sumber: Kota Singkawang Dalam Angka, 2023

Grafik 2.2
PDRB ADHB & ADHK Menurut Lapangan Usaha di Kota Singkawang Tahun 2018–2022



Sumber: Kota Singkawang Dalam Angka, 2023

Grafik 2.3
Kontribusi Sektoral PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Kota Singkawang Tahun 2022 (%)**



Sumber: Kota Singkawang Dalam Angka, 2023

Berdasarkan data BPS Kota Singkawang, laju pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang tahun 2022 sebesar 5,05%. Naik dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 4,82%. Secara umum pada tahun 2022 terdapat 4 (empat) sektor yang memberikan kontribusi paling besar terhadap total PDRB Kota Singkawang, yaitu a) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; b) Industri Pengolahan; c) Konstruksi; dan d) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

2.2.2. Inflasi

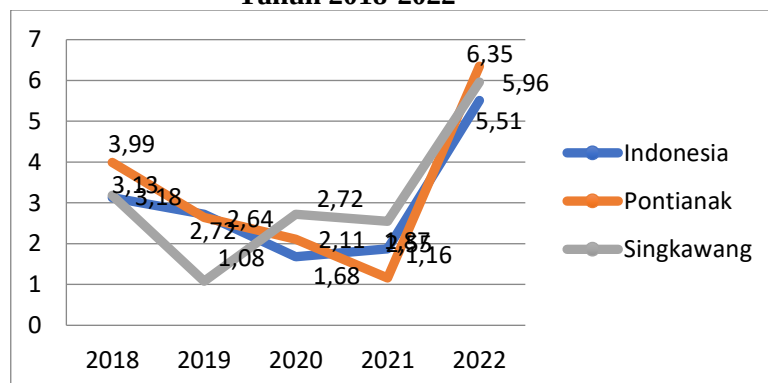
Inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Perkembangan angka inflasi Kota Singkawang dan perbandingan dengan angka inflasi Kota Pontianak dan Indonesia disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.17
Perkembangan Inflasi Kota Singkawang, Kota Pontianak dan Nasional
Tahun 2018-2022

Wilayah Inflasi	Inflasi (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Indonesia	3,13	2,72	1,68	1,87	5,51	2,98
Pontianak	3,99	2,64	2,11	1,16	6,35	3,25
Singkawang	3,18	1,08	2,72	2,55	5,96	3,10

Sumber: BPS Kota Singkawang, 2023, data diolah

Grafik 2.4
Perkembangan Inflasi Kota Singkawang, Kota Pontianak dan Indonesia
Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kota Singkawang, 2023

2.2.3. PDRB Perkapita

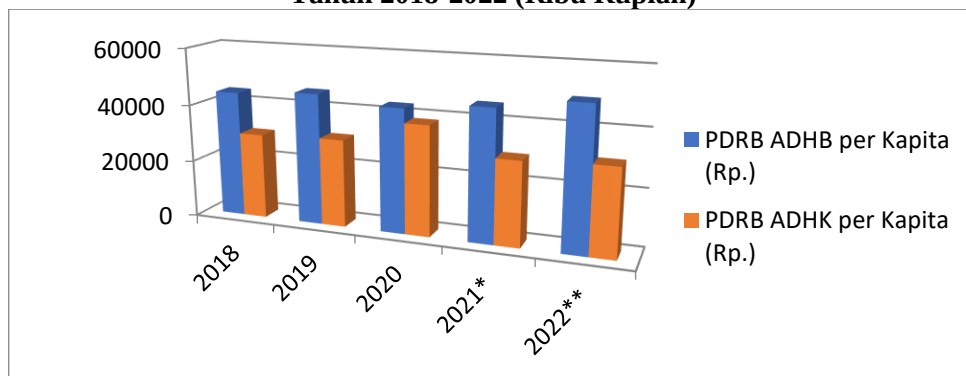
PDRB perkapita merupakan salah satu indikator yang dapat mencerminkan tingkat kemakmuran daerah. PDRB perkapita Kota Singkawang dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cenderung fluktuatif. Perkembangan PDRB perkapita Kota Singkawang tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.18
PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021*	2021**
1	2	3	4	5	6	7
1	PDRB ADHB per Kapita (Ribu Rupiah)	44.224	45.886	43.219	45.726	49.413
2	PDRB ADHK per Kapita (Ribu Rupiah)	29.856	30.633	28.320	29.332	30.356

Sumber: BPS Kota Singkawang 2023

Grafik 2.5
PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Kota Singkawang
Tahun 2018-2022 (Ribu Rupiah)



Sumber : BPS Kota Singkawang, 2023

2.2.4. Kemiskinan dan Ketimpangan

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi fokus perhatian Pemerintah Indonesia. Kemiskinan menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya seperti tidak terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 2010-2022 tampak berfluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, jumlah penduduk

miskin Kota Singkawang sebesar 10,82 ribu jiwa (4,67%). Dibandingkan dengan penduduk miskin tahun 2021 yang berjumlah 11,03 ribu jiwa (4,83%), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 0,21 ribu jiwa (0,16%).

Garis kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 4,72% yaitu dari Rp527.892 per kapita per bulan pada tahun 2021 menjadi Rp552.823 per kapita per bulan pada tahun 2022.

Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Data lengkap kemiskinan dan ketimpangan di Kota Singkawang tahun 2018-2022 dapat dilihat pada berikut:

Tabel 2.19
Kemiskinan dan Ketimpangan Kota Singkawang
Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	Penduduk Miskin		Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
			Jumlah	Persentase		
1	2018	464.673	11.168	5,12	0,70	0,18
2	2019	429.131	10.900	4,91	0,53	0,10
3	2020	510.596	10.230	4,53	0,48	0,09
4	2021	527.892	11.030	4,83	0,73	0,17
5	2022	552.823	10.820	4,67	0,87	0,27

Sumber: Kota Singkawang Dalam Angka, 2023

2.2.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup: (1) umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); (2) pengetahuan (*knowledge*); dan (3) standar hidup layak (*decent standard of living*).

Dalam lima tahun terakhir (2018–2022) IPM Kota Singkawang terus mengalami peningkatan, dari 71,08 pada tahun 2018 menjadi 72,89 pada tahun 2022 dan sudah masuk ke dalam kategori tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$). Data lengkap

IPM Kota Singkawang beserta komponen pembentuknya tahun 2018-2022 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.20
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Singkawang
Tahun 2018–2022

URAIAN	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	71,41	71,85	72,06	72,18	72,46
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,87	12,89	12,90	12,91	12,92
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,57	7,72	7,89	7,90	8,19
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP)	11.514.000	11.789.000	11.650.000	11.767.000	12.089.000
IPM	71,08	71,72	71,94	72,11	72,89

Sumber: BPS Kota Singkawang, Desember 2023

2.2.6. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (AMH) sebagai salah satu variabel dari indeks pendidikan, dihitung dari persentase penduduk menurut kelompok umur yang dapat membaca dan menulis dengan huruf latin dan atau huruf lainnya. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang, pada tahun ajaran 2021/2022 AMH Kota Singkawang untuk kelompok umur 15 tahun ke atas sebesar 94,11 persen. Deskripsi dalam bentuk tabel dalam kurun waktu 2017/2018-2021/2022 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.21
Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas
Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis
Kota Singkawang Tahun 2017/2018 – 2021/2022

No	Uraian	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022
1	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis (jiwa)	195.271	198.381	167.533	170.016	168.514
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas (jiwa)	197.974	200.949	169.972	174.839	179.060
3	Angka melek huruf (%)	98,63	98,72	98,56	97,24	94,11

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

2.2.7. Kesehatan

Salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat adalah status gizi. Untuk kondisi status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badanya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit dibawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk. Perkembangan persentase balita gizi buruk dalam kurun waktu 2018-2022 cenderung fluktuatif. Perkembangan prevalensi balita gizi kurang dalam kurun waktu yang sama juga cenderung fluktuatif.

Tabel 2.22
Aspek Kesejahteraan Masyarakat dalam Bidang Kesehatan
Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[43]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Angka Harapan Hidup (Tahun)	71,41	71,85	72,06	72,18	72,46
2.	Persentase balita gizi buruk (%)	0,2	0,3	0,7	0,4	0,35
3.	Prevalensi balita gizi kurang (%)	2,9	4,4	6,5	5,45	7,44
4.	Cakupan desa siaga aktif (%)	88,46	88,00	n/a	n/a	n/a

Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, 2023

2.2.8. Ketenagakerjaan

Kesempatan kerja adalah jumlah penduduk yang berpartisipasi dalam pembangunan dengan melakukan suatu pekerjaan dan menghasilkan pendapatan. Semakin meningkat pembangunan, semakin besar pula kesempatan kerja yang tersedia. Kesempatan kerja juga meliputi kesempatan untuk bekerja sesuai dengan pendidikan dan keterampilan, dan kesempatan untuk mengembangkan diri. Semakin banyak orang yang bekerja berarti semakin luas kesempatan kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Pada tahun 2021 nilai TPT tertinggi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018-2022 sebesar 9,16 persen. Kondisi tenaga kerja Kota Singkawang tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.23
Kondisi Ketenagakerjaan Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Tenaga Kerja (15 Thn+) (Jiwa)	156.384	159.726	167.844	171.213	174.565
2	Bukan Angkatan Kerja (Jiwa)	60.880	21.646	60.692	61.099	
	%	38,93	13,55	n/a	n/a	n/a
3	Angkatan Kerja (Jiwa)	95.504	106.963	107.152	110.114	120.202
	TPAK (%)	61,07	66,97	63,84	64,31	68,86
4	Bekerja (Jiwa)	95.504	106.963	107.152	110.114	120.202
	Persentase thd Angkatan Kerja (%)	92,12	93,56			
5	Menganggur (Jiwa)	7.530	8.523	9.411	10.082	10.369
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,88	6,44	8,78	9,16	8,63

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja, 2023

2.2.9. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur APBD, karena besaran pendapatan akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang selama ini menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta tetap berupaya melakukan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan baru dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di wilayah Kota Singkawang.

Pendapatan daerah cenderung mengalami kenaikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, namun kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih terbilang kecil. Kondisi ini tentu harus disikapi secara bijak, serta terus memacu peningkatan pendapatan yang bersumber dari PAD sehingga secara bertahap akan dapat mengurangi tingkat ketergantungan keuangan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat.

Data persentase PAD terhadap pendapatan daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.24
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)
Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	130.864.903.686	166.200.436.090	154.272.914.307	181.247.816.650	213.790.179.584,91
2	Pendapatan Daerah	879.090.770	920.008.487.061	826.117.163.781	886.643.880.118	940.121.752.620,75
3	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	14,89	18,07	18,67	20,44	22,74

Sumber: Badan Keuangan Daerah, 2023

2.2.10. Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) merupakan badan pemeriksa keuangan eksternal terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah/ Pemerintah Daerah atau badan lain. BPK RI diberi kewenangan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Pemerintah/Pemerintah Daerah, yang kemudian memberikan opini antara lain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Pemeriksaan atas laporan keuangan oleh BPK dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Dalam periode tahun 2017-2021, opini yang dikeluarkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Singkawang adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

2.2.11. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kinerja pembangunan yang menyangkut aspek kesejahteraan masyarakat pada bidang pertanian, kehutanan dan perikanan selama periode 2018-2022 dapat digambarkan melalui indikator pada tabel berikut.

Tabel 2.25
Aspek Kesejahteraan Masyarakat dalam Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (%)	82,10	82,30	83,90	84,00	
2.	Penguatan cadangan pangan (Ton)	n/a	n/a	n/a	10	
3.	Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	11,71	11,34	11,86	11,89	11,81

Sumber: Dinas PKPP Kota Singkawang, 2022 dan KDA Kota Singkawang, Tahun 2023

2.2.12. Pertambangan, Perdagangan dan Industri

Kinerja pembangunan yang menyangkut aspek kesejahteraan masyarakat pada bidang pertambangan, perdagangan dan industri selama periode 2018-2022 dapat digambarkan melalui indikator pada tabel berikut:

Tabel 2.26
Aspek Kesejahteraan Masyarakat dalam Bidang Pertambangan, Perdagangan dan Industri Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Kontribusi sektor pertambangan dan Penggalan terhadap PDRB (%)	4,19	4,82	4,94	4,99	4,90
2.	Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB (%)	20,21	20,79	19,63	18,99	19,81
3.	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)	14,08	14,28	14,52	14,74	14,42

Sumber: BPS Kota Singkawang, 2023

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi pelayanan umum yang mencakup layanan urusan wajib dasar, layanan urusan wajib non dasar, layanan urusan pilihan dan penunjang urusan. Masing-masing layanan urusan tersebut dapat disampaikan melalui penjelasan berikut ini.

2.3.1. Layanan Urusan Wajib Dasar

A. Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sesuai nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Indikator yang digunakan untuk melihat aspek pelayanan umum dalam bidang pendidikan Kota Singkawang secara ringkas disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.27
Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Pendidikan Kota Singkawang
Tahun Ajaran 2017/2018-2021/2022

No	Uraian	Tahun				
		2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)					
	Angka Partisipasi Kasar PAUD (%)	12,91	13,20	11,75	11,65	11,22
2.	Angka Partisipasi Kasar (APK) (%) :					
	a. APK SD/MI/Paket A	102,38	102,51	104,80	102,25	100,05
	b. APK SMP/MTs/Paket B	89,27	94,52	104,37	105,33	105,55
3.	Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) (%) :					
	a. APT SD/MI/Paket A	59,69	58,82	57,15	56,37	55,87
	b. APT SMP/MTs/Paket B	33,53	33,24	32,69	33,85	33,05
4.	Angka Partisipasi Murni (APM) (%) :					
	a. APM SD/MI/Paket A	86,54	87,38	90,98	89,24	89,69
	b. APM SMP/MTs/Paket B	66,18	67,50	74,32	76,98	82,25
5.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) (%) :					
	a. APS SD/MI/Paket A	95,61	94,91	97,84	96,42	95,94
	b. APS SMP/MTs/Paket B	93,45	96,90	95,50	87,05	91,11
6.	Angka Putus Sekolah (%) :					
	a. Angka Putus Sekolah SD/MI	0,09	0,34	0,44	0,14	0,04
	b. Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,03	1,06	0,64	0,16	0,17
7.	Angka Kelulusan (AL) (%) :					
	a. Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	b. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.	Angka Melanjutkan (AM) (%) :					
	a. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	104,27	107,79	110,92	106,39	112,15
9.	Fasilitas Pendidikan (%) :					
	a. Ruang Kelas SD dalam Kondisi Baik	90,19	89,21	96,64	97,95	98,48

No	Uraian	Tahun				
		2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	b. Ruang Kelas SMP dalam Kondisi Baik	80,22	84,13	96,47	95,38	98,19
10.	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah (per 10.000):					
	a. Rasio Ketersediaan SD/MI/ Penduduk Usia 7-12 thn	39	39	39	39	39,35
	b. Rasio Ketersediaan SMP/MTs/ Penduduk Usia 13-15 thn	32	33	36	37	36,73
11.	Rasio Guru/Murid (per 10.000):					
	a. Rasio Guru SD/MI /Murid SD/MI	494	465	438	483	510
	b. Rasio Guru SMP/MTs /Murid SMP/MTs	624	589	583	622	584
	e. Rasio Guru SD/MI /Murid SD/MI/ Kelas	0,05	0,04	0,04	0,05	0,05
	f. Rasio Guru SMP/MTs /Murid SMP/MTs /Kelas	0,14	0,13	0,14	0,14	0,13
12.	Guru yang memenuhi kualifikasi S.1/D.IV (%)					
	a. SD/MI	71,85	82,64	86,49	85,07	88,51
	b. SMP/MTs	87,34	96,15	95,91	93,66	91,51

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang, 2022

Angka Partisipasi Kasar (APK) rasio jumlah siswa (berapapun usianya) pada tingkat pendidikan SD/SMP/SMA sederajat dibagi jumlah penduduk berusia 3-18 tahun. APK merupakan indikator sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah dimasing-masing jenjang pendidikan. Secara umum nilai APK pada tahun ajaran 2017/2018 hingga 2021/2022 menunjukkan trend fluktuatif. Peningkatan APK SD dan SMP relatif tidak terlalu besar, namun dari segi angka cukup bagus yaitu diatas 100%. Sedangkan capaian APK PAUD lebih rendah dibanding SD dan SMP, karena kurangnya anak usia dini yang mengenyam pendidikan anak usia dini, baik itu Kelompok Bermain (KB) dan Taman Kanak-Kanak (TK).

Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) adalah angka yang menunjukkan status pendidikan terakhir yang telah ditamatkan penduduk suatu wilayah pada tahun tertentu, yang dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar/ijazah. APT merupakan persentase jumlah penduduk menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, terhadap total jumlah penduduk dalam tahun tertentu.

APT bermanfaat untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah, juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga

kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah. Dalam empat tahun terakhir (2017/2018 - 2021/2022) lebih dari 40% penduduk yang tidak menamatkan pendidikan SD dan lebih dari 60% penduduk yang tidak menamatkan pendidikan SMP. Hal ini disebabkan oleh banyaknya usia penduduk diatas 25 tahun yang tidak memiliki minat untuk melanjutkan pendidikannya melalui pendidikan kesetaraan paket.

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Secara umum nilai APM menunjukkan tren fluktuatif untuk semua jenjang pendidikan. APM sudah melampaui target merupakan gambaran bahwa anak usia sekolah sudah bersekolah sesuai dengan jenjang usia, sehingga tidak ada permasalahan yang signifikan.

Kondisi kinerja pembangunan bidang pendidikan Kota Singkawang selanjutnya dapat dilihat dari rasio ketersediaan sekolah, yaitu jumlah sekolah tingkat pendidikan tertentu per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan tersebut. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan tertentu. Dalam empat tahun terakhir (2017/2018 - 2021/2022) rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar setara SD/MI masih belum tercapai, berdasarkan usia penduduk 7-12 tahun disebabkan belum adanya tambahan pembangunan sekolah di Kota Singkawang. Namun berdasarkan capaian angka tersebut bukan permasalahan yang terlalu signifikan karena selisih angka capaian hanya 1%.

Kondisi kinerja pembangunan bidang pendidikan Kota Singkawang dilihat dari ketersediaan tenaga pengajar dan ukuran jumlah ideal murid untuk satu guru untuk mencapai mutu pengajaran dapat digambarkan dengan rasio guru terhadap murid yaitu jumlah guru tingkat pendidikan tertentu per 10.000 jumlah murid jenjang pendidikan tersebut. Dalam empat tahun terakhir (2017/2018 - 2021/2022) rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan SD dan SMP masih terdapat kekurangan pendidik, hal ini disebabkan banyaknya tenaga pendidik yang pensiun.

B. Kesehatan

Data aspek pelayanan umum dalam bidang kesehatan Kota Singkawang tahun 2018-2022 yang menggambarkan kinerja pembangunan daerah di Kota Singkawang dapat ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.28
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kesehatan Kota Singkawang
Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	7,42	5,37	7,67	7,70	8,37
2.	Angka Kelangsungan Hidup bayi (AKHB) per 1.000 kelahiran hidup	n/a	n/a	992,23	992,03	991,63
3.	Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup	8,57	7,2	7,91	7,96	1,49
4.	Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup	6,95	5,8	6,43	6,90	5,30
5.	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	115,87	96,34	98,93	159,36	111,60
6.	Rasio Posyandu per 100 Balita	0,71	0,70	0,79	0,79	0,67
7.	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per 100.000 penduduk	20	20	20	20	96,67
8.	Rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk	3,19	3,14	2,5	2,5	5,0
9.	Rasio Dokter per 100.000 penduduk	32	32	56	55	72
10.	Rasio Tenaga Medis per 100.000 penduduk	5	7	18	27	9
11.	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani (%)	67,36	78,00	69,66	71,22	52,95
12.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	91,02	88,60	85,88	88,04	72,45
13.	Cakupan Kelurahan UCI (%)	30,77	38,46	42,3	50	n/a
14.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15.	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak (%)	64,51	60,80	80	82,5	35,50
16.	Non polio AFP rate per 100.000 penduduk	0	0	3	3	2
17.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%)	50,23	25,00	50,4	12,5	24,6
18.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (%)	100,00	100,00	79,9	58,9	65,5
19.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	Penderita diare yang ditangani (%)	78,00	49,60	35,84	12,00	32,7
21.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
22.	Cakupan Kunjungan Bayi (%)	96,17	99,9	47,46	50,05	48,28
23.	Cakupan Puskesmas (%)	180,00	200,00	100,00	100,00	100,00
24.	Cakupan Puskesmas Pembantu (%)	69,00	69,00	70,00	70,00	94,12
25.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)	94,33	96,30	90,68	89,97	75,74
26.	Cakupan pelayanan nifas (%)	86,73	85,20	82,23	86,03	70,62

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
27.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	50,66	51,20	43,27	52,04	40,40
28.	Cakupan pelayanan anak balita (%)	36,76	42,80	37,58	24,80	22,26
29.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin (%)	42,05	45,40	97,33	100	99,60
30.	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	94,48	98,60	3,88	22,65	41,00
31.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
33.	Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)	83,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang, 2023

Kesehatan merupakan salah satu faktor utama yang diperlukan untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Berkaitan dengan peningkatan pelayanan kesehatan, pemerintah terus mengembangkan sarana dan prasarananya. Upaya tersebut dilakukan melalui penambahan dokter, tenaga medis/paramedis, puskesmas dan sarana/prasarana pada pusat pelayanan kesehatan.

Posyandu, Puskesmas, Poliklinik, Pustu dan Rumah Sakit merupakan pusat pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kota Singkawang. Lokasi posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai karena idealnya satu Posyandu melayani 100 balita. Oleh karena itu perlu dihitung rasio ketersediaan posyandu per balita yang berguna untuk mengetahui berapa selayaknya jumlah posyandu yang efektif tersedia sesuai dengan tingkat penyebarannya serta sebagai dasar untuk merevitalisasi fungsi dan peranannya dalam pembangunan daerah.

Dokter dan Tenaga Medis di Kota Singkawang merupakan tenaga kesehatan yang memiliki peran besar dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ketersediaan jumlah dokter dan tenaga medis menunjukkan tingkat pelayanan yang diberikan dalam bidang kesehatan terhadap jumlah penduduk di Kota Singkawang.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator pelayanan umum bidang pekerjaan umum dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.29
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
A. Pekerjaan Umum						
1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	51,38	16,12	36	38,5	40,967
2.	Persentase jalan mantap	50,24	51,36	53,54	58,67	60,257
3.	Rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk (km/jiwa)	0,21	0,20	0,20	0,18	3,592
4.	Persentase jalan kota dalam kondisi baik (>40 km/jam) (%)	15,05	16,12	36	38,5	40,967
5.	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (min. 1,5m) (%)	1,82	1,82	n/a	n/a	
6.	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	5,17	5,17	n/a	n/a	
7.	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (%)	93,44	93,78	94,11	94,02	94,22
8.	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	8,98	8,98	n/a	n/a	
9.	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	38,38	39,55	19,92	10,45	
10.	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	6,38	6,95	n/a	n/a	
11.	Persentase irigasi kota dalam kondisi baik (%)	40	45	50,29	n/a	64,27
12.	Rasio Jaringan Irigasi	0,02	0,02	n/a	n/a	0,54
13.	Persentase penduduk berakses air minum (%)	38,11	39,74	39,17	40,9	49,08
14.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	n/a	n/a	n/a	73,17	
15.	Rasio tempat ibadah per 1.000 penduduk	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
16.	Luas kawasan genangan banjir	2.268	2.198	59,84	62,06	73,52
B. Penataan Ruang						
1.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (%)	45,44	45,51	n/a	n/a	8,96
2.	Ruang publik yang berubah peruntukannya (%)	4,9	4,8	n/a	n/a	n/a
3.	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	0,70	0,70	n/a	n/a	0,42
4.	Ketaatan terhadap RTRW (%)	90,5	90,7	n/a	n/a	90,84

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang, 2023

Penataan ruang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang efektif dan efisien dengan melibatkan masyarakat dan swasta sebagai upaya mencapai terwujudnya penataan ruang dan

pengembangan wilayah secara terpadu. Luas wilayah Kota Singkawang yang sempit menjadi salah satu faktor yang bisa mendorong proses penataan lahan cukup efektif.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan wajib pelayanan dasar perumahan rakyat dan kawasan permukiman meliputi upaya penanganan kawasan kumuh dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Upaya penanganan kawasan kumuh di Kota Singkawang masih perlu untuk ditingkatkan. Berikut ini merupakan indikator pelayanan umum bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.30
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 -2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rasio rumah layak huni	0,2044	0,2060	0,2070	0,2072	0,2432
2.	Rasio permukiman layak huni	0,9874	0,9986	0,9987	0,973	0,9757
3.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	89,68	90,51	91,17	91,42	97,91
4.	Cakupan layanan rumah layak huni dan terjangkau (%)	94,06	98,69	99,53	99,60	99,63
5.	Persentase permukiman yang tertata (%)	67,53	69,56	69,80	69,96	70,29
6.	Persentase lingkungan permukiman kumuh (%)	0,029	0,023	0,017	0,109	0,0957
7.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang ditangani (%)	80,63	84,68	88,73	52,20	17,64
8.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) (%)	75,96	76,50	77,35	78,27	79,31
9.	Persentase rumah layak huni (%)	89,68	90,51	91,17	91,42	97,91
10.	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di Kawasan perkotaan	80,63	84,68	88,73	52,20	57,33

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang, 2023

Capaian ketersediaan rumah layak huni di Kota Singkawang relatif meningkat setiap tahun. Adapun beberapa kendala umum yang dihadapi dalam penanganan rumah tidak layak huni yaitu belum adanya penyusunan dokumen database jumlah rumah, Rumah Layak Huni (RLH), Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dan belum optimalnya penataan,

perencanaan, pembangunan/ peningkatan/ pemeliharaan infrastruktur Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) perumahan kawasan permukiman yang tidak layak huni.

E. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat selama periode 2018-2022 rata-rata mengalami peningkatan pada cakupan pelayanan bencana kebakaran kota 100% dan hanya tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran yang mengalami penurunan yaitu menjadi 90,48%. Gambaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.31
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) (%)	100	100	n/a	n/a	n/a
2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	92,31	100	90	90	100
3.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota	80	90	n/a	100	100
4.	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	68,30	70,50	n/a	100	90,48
5.	Persentase penegakan Perda	92,31	100	90	90	100
6.	Persentase pelanggaran Perda yang ditindak (%)	80	85	90	90	100
7.	Persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban yang tertangani (%)	n/a	n/a	95	95	100
8.	Rasio personil Satpol PP per 10.000 penduduk	n/a	n/a	3,3	3,3	3,5
9.	Rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	n/a	n/a	0,9	0,9	0,9

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang, 2023

Secara umum capaian pelayanan guna mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kota Singkawang sudah cukup baik. Beberapa indikator yang menggambarkan Kota Singkawang cukup kondusif antara lain penurunan jumlah pelanggaran perda, penegakan perda, penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketenteraman dan keindahan (K3) serta beberapa indikator lainnya.

F. Sosial

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengamankan pelayanan sosial guna untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya. Pelayanan sosial tersebut terdiri dari 4 pilar yaitu perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan masyarakat. Pelayanan sosial dilakukan bersama antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan sosial selama periode 2018-2022 pada masing-masing indikator dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.32
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Sosial Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesehatan Sosial) yang memperoleh bantuan sosial (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2.	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesehatan Sosial) yang tertangani (%)	64,86	67,95	69,94	70,19	96,17
3.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	100	100	100	100	100
4.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)	100	100	100	100	100
5.	Persentase rehabilitas sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti (%)	26,21	12,60	22,89	22,95	8,20
6.	Persentase rehabilitas sosial dasar anak terlantar di luar panti (%)	3,65	24,10	34,72	34,74	3,25
7.	Persentase rehabilitas sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti (%)	56,52	36,94	40	40,08	21,51
8.	Persentase rehabilitas sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti (%)	0,00	66,67	100	100	100
9.	Persentase perlindungan dan jaminan sosial melampaui pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100	100	100	100	100
10.	Persentase penanganan kemiskinan dalam sesuai pemenuhan kebutuhan dasar (%)	96,68	77,57	78,30	79,95	70,87
11.	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial melampaui (LKS) dan SDM yang terlibat dalam pembangunan kesejahteraan sosial (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang, 2023

Berdasarkan tabel diatas, aspek pelayanan umum dalam bidang sosial Kota Singkawang selama periode 2018-2022 cenderung fluktuatif. Namun interpretasi beberapa aspek sudah sesuai dan melampaui target, bahkan untuk persentase PPKS yang tertangani relatif meningkat dari tahun ke tahun. Sedangkan untuk persentase rehabilitas sosial dasar penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak terlantar di luar panti masih rendah walaupun cenderung menurun setiap tahunnya. Hal ini di karenakan jumlah penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak terlantar lebih besar dari yang tertangani. Terkait permasalahan tersebut diantaranya disebabkan oleh persoalan tuntutan kehidupan yang semakin berat, disamping persoalan kemiskinan. Oleh karena itu penanganan persoalan sosial harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi.

2.3.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

A. Tenaga Kerja

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan ketenagakerjaan selama periode 2017-2019 dapat disampaikan pada berikut ini.

Tabel 2.33
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Ketenagakerjaan
Kota Singkawang Tahun 2017-2019

No	Uraian	Tahun		
		2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun (per 1.000)	43,00	20,00	13,00
2.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	25,58	55,00	23,08
3.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	36,10	8,14	19,68
4.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	29,96	n/a	0,10
5.	Besaran Pemeriksaan Perusahaan (%)	0,77	0,00	9,09
6.	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan (%)	18,97	0,00	37,70
7.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	100,00	0,00	100,00
8.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)	100,00	0,00	100,00

No	Uraian	Tahun		
		2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
9.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)	0,00	0,00	100,00
10.	Rasio Lulusan S1/S2/S3 per 10.000 penduduk	283,17	306,82	321,40

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, 2020

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan aspek serius dalam pembangunan manusia. Permasalahan pemberdayaan perempuan pada dasarnya merupakan urusan yang cukup kompleks karena dianggap sebagai salah satu indikator berdayanya masyarakat suatu daerah. Gambaran kinerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Singkawang selama periode tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.34
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	8,21	6,12	10,98	10,81	12,55
2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (%)	10,00	23,33	23,33	23,33	23,33
3.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	16,55	11,88	n/a	13,76	10,30
4.	Rasio KDRT (%)	0,06	0,01	0,02	0,01	0,02
5.	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	32,55	10,96	19,42	19,04	52,72
6.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	54,55	100,00	100,00	100,00	100
7.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	97,67
8.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (%)	74,36	100,00	100,00	100,00	100
9.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	63,93	62,96	100,00	89,66	76,09
10.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	88,52	67,50	100,00	89,66	76,09

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
11.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100
12.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	76,19	65,52	100,00	100,00	100
13.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
14.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023

Pada tabel diatas, persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan sebesar -2,09%. Namun ditahun 2019-2020 mengalami kenaikan sebesar 4.86%. Persentase proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 13,33% dari tahun sebelumnya dan sama sampai dengan tahun 2022. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kapasitas dan kesadaran perempuan dalam kegiatan politik. Sedangkan untuk partisipasi perempuan di lembaga swasta tertinggi ditahun 2018 yaitu sebesar 16,55%.

Berdasarkan data diatas, persentase Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Singkawang dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya sosialisasi, advokasi dan edukasi dalam membangun rumah tangga yang sehat, sehingga pemerintah mampu menekan angka kekerasan. Sedangkan untuk beberapa indikator cakupan lainnya sudah berakhir pada tahun 2014, sehingga persentase sudah melampaui target.

C. Pangan

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pangan salah satunya ditunjukkan dengan angka ketersediaan pangan utama. Ketersediaan pangan utama menggambarkan ketersediaan pangan yang dapat dikonsumsi oleh penduduk (per kapita) pada suatu daerah dalam satu tahun. Berdasarkan data Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang, pada tahun 2021 ketersediaan pangan utama Kota Singkawang sebesar 457,25 kg/kapita/tahun. Artinya pada tahun 2021 jumlah ketersediaan pangan utama yang dapat dikonsumsi setiap penduduk Kota Singkawang dalam satu tahun sebanyak 457,25 kg.

Tabel 2.35
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pangan Kota Singkawang
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Ketersediaan pangan utama (kg/kap/tahun)	222,73	375,63	435,48	457,25	
2.	Ketersediaan energi (kkal/kap/hari)	1.185	1.438	1.747	1.834,35	
3.	Ketersediaan protein (gram/kap/hari)	50,60	63,70	90,89	95,52	

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang, 2022

D. Pertanahan

Persentase luas lahan bersertifikat setiap tahun dari tahun 2018-2022 mengalami peningkatan. Upaya masyarakat untuk mensertifikatkan lahannya perlu didorong agar semua lahan yang dimiliki masyarakat, dan swasta dapat teregistrasi dengan baik. Hal tersebut tentunya akan memudahkan pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan lahan sesuai peruntukannya.

Berdasarkan sumber data ATR/BPN Kota Singkawang, bahwa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi merupakan urusan dan tugas Kementerian ATR/BPN dan yang direvisi kembali pada Peraturan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional-Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi, bahwa Kementerian ATR/BPN melaksanakan tugas dan fungsi dalam memberikan Izin Lokasi. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang bahwa dalam rangka penanaman modal tidak diperlukan lagi Izin Lokasi.

Adapun gambaran umum kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pertanahan di Kota Singkawang selama periode 2018-2022 dapat ditunjukkan pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel 2.36
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanahan Kota Singkawang
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	59,31	59,58	61,26	51,10	62,92
2.	Persentase Penyelesaian kasus tanah Negara (%)	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Penyelesaian izin lokasi (%)	100,00	100,00	100,00	n/a	n/a

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang, 2023

E. Lingkungan Hidup

Pada periode 2018-2022, upaya penanganan sampah lebih mengarah pada kenaikan terutama pada tahun 2022, hal ini dapat dilihat dari data masing-masing indikator. Gambaran perkembangan pelayanan bidang lingkungan hidup sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.37
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Lingkungan Hidup
Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Tersusunnya RPPLH Kota	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kota	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat kota	ada	ada	ada	tidak ada	tidak ada
4.	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air:	52,11	83,33	80,00	80 (58,00)	82,50 (61,67)
	a. Sungai Hangmoy	22,11	21,67	20	20	20
	b. Sungai Singkawang	14,74	20	20	20	20,833
	c. Sungai Semelagi	7,89	21,67	20	20	20,833
	d. Sungai Sedau	7,37	20	20	20	20,833
5.	Indeks kualitas udara (%)	85,4	88,89	85,85	87,77	87,22
6.	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang	100	101,62	52,63	103	126,27

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kota (%)					
7.	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
8.	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kota	100,00	71,00	100,00	100,00	100,00
9.	Timbunan sampah yang ditangani (%)	35,54	20.043,28	25.373,44	17.965,26	25.882,88
10	Persentase jumlah sampah yang tertangani (%)	0,057	49,27	37,20	41,88	75,46
11.	Indeks tutupan lahan (%)	n/a	26,62	30,21	33,80	34,42

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang, 2023

F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kinerja pembangunan pada pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil selama 5 tahun (2018-2022) dapat tergambar dari cakupan pelayanan administrasi kependudukan. Data mengenai kinerja ini selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.38
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0,86	0,91	0,98	0,98	0,98
2.	Rasio bayi berakte kelahiran	0,90	0,92	0,96	0,98	0,85
3.	Rasio pasangan berakte nikah	0,31	0,36	0,43	0,49	0,53
4.	Ketersediaan database kependudukan skala kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)	86,00	91,00	98,03	98,58	98,78
7.	Cakupan penerbitan akta kelahiran (%)	90,00	92,00	88,69	89,16	93,21

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, 2023

Dari tabel di atas, terlihat bahwa rasio penduduk ber-KTP meningkat mencapai angka 0,98 dari jumlah penduduk wajib KTP pada tahun 2020-2022, dibandingkan dengan tahun 2018 hanya 0,86. Kinerja pembangunan pada pelayanan kependudukan dan catatan sipil juga dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan serta belum optimalnya pemberlakuan sanksi bagi penduduk yang melanggar administrasi kependudukan.

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa / Kelurahan

Kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Kota Singkawang cenderung aktif dalam pelaksanaan pembangunan. Sejak 2018 semua kelompok PKK didorong terus sehingga semuanya aktif kembali dari tingkat kecamatan sampai tingkat kota. Posyandu yang selama ini menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk pelayanan kesehatan bagi balita juga aktif semuanya.

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan di Kota Singkawang selama periode 2018-2022 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.39
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) (%)	100,00	81,25	100,00	100,00	100,00
2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%)	100,00	96,88	100,00	100,00	100,00
3.	Persentase LSM aktif (%)	55,00	50,00	100,00	100,00	100,00
4.	Persentase PKK aktif (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	Persentase Posyandu aktif (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang, 2023

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana selama periode 2018-2022 dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.40
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP) (%)	2.03	2,03	1,95	1,61	n/a
2.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4.	Rasio akseptor KB (%)	56,50	56,39	n/a	n/a	67.58
5.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	n/a	43,47	n/a	n/a	17.56
6.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan (%)	0	0	0	0	0
7.	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (%)	4,2	6,3	7,2	8,3	8.34
8.	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk (%)	n/a	n/a	100	100	53.85
9.	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap kelurahan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100
10.	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (%)	100,00	100,00	n/a	n/a	58.76
11.	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan (%)	n/a	n/a	100,00	100,00	100

Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang, 2023

I. Perhubungan

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perhubungan di Kota Singkawang jika dilihat dari jumlah arus penumpang angkutan umum selama 5 tahun (2018-2022), pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis. Dan mulai naik kembali pada tahun 2021 dan 2022 dikarenakan adanya peningkatan adanya penggunaan kendaraan pribadi dan munculnya angkutan umum *online*. Tidak adanya rasio ijin trayek karena jumlah ijin trayek tidak ada sedangkan jumlah penduduk terus bertambah. Jumlah penumpang angkutan umum pada Tahun 2020

dan 2021 mengalami penurunan yang signifikan. Gambaran mengenai kinerja pelayanan umum dalam bidang perhubungan sebagai berikut.

Tabel 2.41
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perhubungan Kota Singkawang
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	47.798	36.159	5.986	12.559	15.113
2.	Rasio ijin trayek	0	0	0	0	0
3.	Jumlah uji KIR angkutan umum	325	231	285	277	330
4.	Jumlah Pelabuhan Laut	2	2	2	2	2
5.	Jumlah Terminal Bis	2	2	2	2	2
6.	Persentase layanan angkutan darat (%)	0,065	0,060	0,084	0,040	0,060
7.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (%)	94%	94%	100%	100%	79%
8.	Pemasangan rambu-rambu (%)	90%	90%	70%	0%	25%
9.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,08	0,08	0,0058	0,0058	0,0061
10.	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	47.798	36.159	5.986	12.559	15.113
11.	Jumlah barang melalui dermaga per tahun (ton)	47.798	36.159	5.986	12.559	15.113
12.	Jumlah orang melalui terminal per tahun	47.798	36.159	5.986	12.559	15.113
13.	Jumlah Bandar Udara	n/a	n/a	1	1	1
14.	Rasio panjang kota yang mendapatkan penerangan	n/a	n/a	41,50	41,90	42,7

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Singkawang, 2023

J. Komunikasi dan Informatika

Gambaran umum kinerja pembangunan pada pelayanan urusan komunikasi dan informatika di Kota Singkawang selama periode 2017-2019 dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.42
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Komunikasi dan Informatika
Kota Singkawang Tahun 2017-2019

No	Uraian	Tahun		
		2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Komunikasi Publik (%)	n/a	80	82

No	Uraian	Tahun		
		2017	2018	2019
2.	Persentase penggunaan TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) dalam pelayanan publik (%)	50	100	100
3.	Persentase terpenuhinya infrastruktur TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) penunjang pelayanan publik dan pemerintahan Kota Singkawang (%)	70	70	89
4.	Persentase terwujudnya keamanan informasi penyelenggaraan pemerintahan Kota Singkawang (%)	50	50	75
5.	Persentase jumlah <i>upload</i> berita dan informasi melalui <i>website</i> , media cetak, media elektronik dan sosial (%)	n/a	100	100
6.	Persentase penanganan pengaduan masyarakat melalui aplikasi pengaduan (%)	n/a	0	20
7.	Cakupan pelayanan informasi dan dokumentasi melalui PPID Kota Singkawang (%)	n/a	0	20
8.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	n/a	20	35
9.	Persentase peningkatan SDM persandian (%)	n/a	0	10
10.	Cakupan tingkat ketersediaan data statistik pembangunan daerah (%)	n/a	0	70

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang, 2022

K. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Persentase koperasi aktif pada tahun 2018-2022 menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Untuk UKM Non BPR/LKM aktif dan Usaha Mikro dan Kecil pada tahun 2018-2022 menunjukkan hampir 100%. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah selama periode 2018-2022 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.43
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Persentase koperasi aktif (%)	61,22	64,00	65,38	74,29	75,20
2.	Persentase UKM non BPR/LKM aktif (%)	98,59	98,72	99,74	99,76	98,80
3.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	97,29	97,21	97,04	99,96	72,45

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Singkawang, 2023

L. Penanaman Modal

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan penanaman modal selama periode 2018-2022 pada setiap indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.44
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Penanaman Modal
Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	114	366	255	2.720	2.474
2.	Jumlah nilai realisasi investasi (PMDN/PMA) (Miliyar Rp.)	110,57	505,70	830,28	610,36	651,89
3.	Rasio daya serap tenaga kerja	2,97	3,40	6,39	3,11	2,48
4.	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (%)	33,64	395,13	324,58	-219,92	41,53

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, 2023

M. Kepemudaan dan Olah Raga

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kepemudaan dan olahraga selama periode 2018-2022 dapat disampaikan melalui tabel berikut.

Tabel 2.45
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	87,00	75,00	70,00	75,00	79,4
2.	Persentase wirausaha muda (%)	n/a	n/a	n/a	0,59	98,06
3.	Cakupan pembinaan olahraga (%)	50	58	0	10	
4.	Cakupan pelatih yang bersertifikasi (%)	53,68	53,68	n/a	n/a	n/a
5.	Cakupan pembinaan atlet muda (%)	75	80	n/a	n/a	n/a
6.	Jumlah atlet berprestasi	110	11	0	3	140
7.	Jumlah prestasi olahraga	17	5	0	3	38

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang, 2022

Secara umum terjadi penurunan dalam urusan kepemudaan dan olahraga dari tahun 2020-2021, hal ini terjadi karena adanya wabah pandemi Covid-19,

yang membuat kegiatan kepemudaan dan olahraga dibatalkan atau dilarang untuk melaksanakan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak.

N. Statistik

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan statistik selama periode 2018-2022 tergambar pada indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.46
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Statistik Kota Singkawang
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Buku "Daerah Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Buku "PDRB Daerah"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang, 2023

Dari tabel urusan statistik di atas tergambar bahwa dokumen-dokumen statistik tersedia dari tahun 2018-2022. Data-data tersebut agar senantiasa diupdate sesuai perkembangan dan kebutuhan. Namun untuk sistem data dan statistik yang terintegrasi sampai tahun 2018 masih belum terbangun.

O. Kebudayaan

Penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kota Singkawang dalam lima tahun terakhir (2018-2022) cenderung fluktuatif. Sementara untuk jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinterventarisasi menunjukkan kenaikan yang sangat pesat. Gambaran kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kebudayaan selama periode 2018-2022 dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.47
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kebudayaan
Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali/tahun)	6	5	2	1	3
2.	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%)	76,30	73,20	80,33	81,30	74,23

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
3.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	13	14	64	64	136
4.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang, 2023

P. Perpustakaan

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perpustakaan selama periode 2018-2022 melalui beberapa indikator dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.48
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perpustakaan
Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	19.562	17.932	9.016	9.196	15.998
2.	Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	32.950	36.440	36.440	37.050	37.310
3.	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	0,960	0,830	1,09	1,08	1,20
4.	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/bulan	1.630	1.494	751	766	1.333
5.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	9.040	9.738	9.738	10.460	10.282
6.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	5	5	5	5	6

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang, 2023

Q. Kearsipan

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kearsipan selama periode 2018-2022 tergambar pada indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.49
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kearsipan Kota Singkawang
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	62,07	72,41	62,07	79,31	60,51
2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (kegiatan)	58	58	-	58	58

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang, 2023

Secara umum pengelolaan kearsipan mengalami fluktuatif dari tahun 2018-2022. Hanya ditahun 2020 tidak adanya peningkatan SDM dalam pengelolaan kearsipan.

2.3.3. Layanan Urusan Pilihan

A. Pariwisata

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pariwisata selama periode 2018-2022 dapat dilihat melalui indikator pada tabel berikut.

Tabel 2.50
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pariwisata Kota Singkawang
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Jumlah kunjungan wisata (orang)	684.793	722.853	529.647	642.114	1.008.607
2.	Lama kunjungan wisata	1,9	2,2	0,33	2	2,09
3.	PAD sektor pariwisata (%)	9,49	10,36	n/a	n/a	9,77
4.	Cakupan Ekonomi Kreatif (%)	41,76	75	100	100	100

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang, 2023

Kunjungan wisatawan ke Kota Singkawang dalam 5 (lima) tahun terakhir terjadi peningkatan yang pesat pada tahun 2022, dikarenakan berakhirnya kondisi Pandemi dalam 2 (dua) tahun terakhir. Kontribusi PAD sektor pariwisata didekati dengan PAD yang bersumber dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Kontribusi PAD sektor pariwisata dalam lima tahun terakhir menunjukkan angka yang masih relatif kecil terhadap total PAD.

B. Pertanian

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pertanian selama periode 2018-2022 secara ringkas tergambar melalui indikator pada tabel berikut ini.

Tabel 2.51
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanian
Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	11,71	11,34	11,86	11,89	11,81
2.	Produktivitas padi atau bahan pangan	32,06	33,76	n/a	38,05	36,60

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	utama lokal lainnya per hektar (kw/ha)					
3.	Cakupan bina kelompok petani (%)	47	13	n/a	13,4	n/a

Sumber: Dinas PKPP Kota Singkawang, Tahun 2022 dan KDA Kota Singkawang 2023

Usaha pertanian sebagian besar dilakukan warga Kota Singkawang di wilayah Singkawang Timur, Singkawang Utara dan Singkawang Selatan. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB menunjukkan kecenderungan menurun dalam tiga tahun terakhir. Hal ini terjadi karena pertumbuhan sektor pertanian masih lebih lambat dibanding dengan pertumbuhan sektor lain yang memberikan kontribusi lebih besar terhadap total PDRB Kota Singkawang.

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya dan cakupan bina kelompok petani dalam lima tahun terakhir menunjukkan fluktuatif. Hal ini terjadi belum optimalnya kapasitas SDM petani dan jumlah petani yang semakin menurun, serta belum optimalnya fasilitas akses pasar.

C. Kelautan dan Perikanan

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kelautan dan perikanan selama periode 2018-2022 dapat tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2.52
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kelautan dan Perikanan
Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Produksi perikanan (%)	216,94	53,20	n/a	85,35	n/a
2.	Konsumsi ikan (%)	98,40	97,70	n/a	95	n/a
3.	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	25,60	22,60	n/a	41,35	n/a
4.	Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	38,90	48,27	n/a	80	n/a

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang, 2022

Kota Singkawang yang merupakan kota pesisir mempunyai potensi besar dalam produksi perikanan dan hasil laut lainnya. Jumlah produksi ikan selama 5

tahun cenderung fluktuatif, dan produksi ikan kelompok nelayan juga sama cenderung fluktuatif ditahun 2017-2021.

Konsumsi ikan di Kota Singkawang selama 5 tahun terakhir ini mengalami penurunan. Masa hidup komoditas ikan segar cenderung pendek, mengakibatkan kualitas ikan akan menurun dan konsumsi ikan akan terkena imbasnya.

D. Energi dan Sumber Daya Mineral

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan energi dan sumber daya mineral periode 2017-2021 pada masing-masing indikator ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.53
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Persentase RT yang menggunakan listrik (%)	96,88	97,86	99,51	98,76	n/a
2.	Pertambangan tanpa ijin (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber: Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Singkawang, 2020; BPS Kota Singkawang 2022

E. Perdagangan

Cakupan bina kelompok pedagang cukup tinggi, lebih dari setengah kelompok pedagang/usaha informal mendapat bantuan binaan pemda. Data cakupan bina kelompok pedagang selama periode 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.54
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perdagangan
Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan Pemda	8	8	12	12	13
2.	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal	13	13	13	13	14
3.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	61,54	65,54	92,3	92,3	92,8

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Singkawang, 2023

F. Perindustrian

Cakupan bina kelompok pengrajin pada tahun 2018-2022 sama yaitu sebesar 83,33 persen, yaitu 5 dari 6 kelompok pengrajin yang ada di Kota Singkawang mendapat bantuan dari Pemerintah Kota Singkawang. Namun Cakupan bina kelompok pengrajin menurun pada tahun 2020-2021. Dan mulai naik lagi pada tahun 2022. Data cakupan bina kelompok pengrajin selama periode 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.55
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perindustrian
Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binan pemda	5	5	4	4	8
2.	Jumlah kelompok pengrajin	6	6	20	20	20
3.	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	83,33	83,33	20	20	40

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Singkawang, 2023

2.3.4. Penunjang Urusan

A. Perencanaan Pembangunan

Setiap tahun anggaran pemerintah Kota Singkawang secara rutin melakukan penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen tersebut merupakan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kota Singkawang. Untuk periode tahun 2018-2022, penyusunan RKPD mengacu pada RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 dan RPJPD Kota Singkawang Tahun 2005-2025 yang dikomparasikan dengan usulan masyarakat hasil musrenbang tingkat Kota Singkawang dan pokok-pokok pikiran DPRD. Dokumen RKPD tersebut selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Walikota setiap tahun. Gambaran pelayanan umum dalam bidang perencanaan pembangunan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.56
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perencanaan Pembangunan
Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada
2.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada
3.	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada
4.	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD (%)	100	100	100	100	100
5.	Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang, 2023

B. Keuangan

Kinerja pembangunan pada penunjang urusan keuangan periode 2018-2022 pada masing-masing indikator ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.57
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Keuangan
Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	Opini Blm Keluar
2.	Persentase SILPA terhadap APBD (Penerimaan Daerah) (%)	2,98	4,49	9,30	4,99	13,87
3.	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4.	Persentase belanja pendidikan (%)	36,94	24,90	20,79	22,84	23,46
5.	Persentase belanja kesehatan (%)	24,60	30,37	47,07	12,35	27,69
6.	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung (%)	57,63:42,37	59,34:40,65	n/a	n/a	n/a
7.	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang, 2023

C. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja pembangunan pada penunjang urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan periode 2018-2022 pada masing-masing indikator ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.58
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	3,91	4,69	25,5	39,7	42,23
2.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	6,84	5,55	2,58	4,28	3,54
3.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%)	26,49	49,54	89,22	36,60	58,38
4.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah (orang)	23	21	24	28	27
5.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah (orang)	1.428	1.345	1.475	1.411	1.063
6.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah (orang)	1.949	1.997	1.997	1.877	2.069

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang, 2023

D. Penelitian dan Pengembangan

Kinerja pembangunan pada penunjang urusan penelitian dan pengembangan periode 2018-2022 pada masing-masing indikator ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.59
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Penelitian dan Pengembangan Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	0
2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%)	50,00	12,00	100,00	100,00	100,00
3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%)	3,45	24,14	0	13,79	6,89
4.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%)	0	0	0	100	100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang, 2023

E. Pengawasan

Kinerja pembangunan pada penunjang urusan pengawasan periode 2018-2022 terjadi peningkatan pada masing-masing indikator. Namun hanya Maturasi SPIP pada tahun 2018 yang tidak diketahui hasilnya atau tidak dapat dihitung. Gambaran pengawasan di Kota Singkawang ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.60
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pengawasan
Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK	285	292	307	324	337
2.	Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	697	716	756	799	835
3.	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK (%)	85,80	88,12	89,68	90,99	92,22
4.	Maturasi SPIP	n/a	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Singkawang, 2023

F. Sekretariat Dewan

Setiap tahun Sekretariat DPRD secara rutin melakukan rencana kerja tahunan baik pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kota Singkawang maupun pada program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsinya. Sehingga kegiatan anggora DPRD, Rapat Kerja antara Eksekutif dan Legislatif dapat terlaksana. Gambaran ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.61
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Sekretariat Dewan
Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kota	ada	ada	ada	ada	ada
2.	Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan	ada	ada	ada	ada	ada

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	(RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)					
3.	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Singkawang, 2023

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing merupakan aspek penting untuk mengukur kemampuan daerah dalam menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat. Indikator yang menjelaskan aspek daya saing Kota Singkawang diringkas dalam tabel berikut:

Tabel 2.62
Aspek Daya Saing Daerah
Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Rata-rata pengeluaran rill per kapita (Ribu Rp.)	11.514	11.789	11.650	11.767	12.089
2.	Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum	62,91	56,69	53,23	52,22	n/a
3.	Angka kriminalitas yang tertangani	14,76	9,72	8,67	10,27	7,41
4.	Rasio ketergantungan	54,72	54,65	54,57	49,39	n/a

Sumber: Kota Singkawang Dalam Angka, 2023; Bank Indonesia, 2022, Satuan Polisi Pamong Praja, 2023

Rata-rata pengeluaran rill per kapita dari tahun 2018-2022 cenderung fluktuatif. Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran kesejahteraan masyarakat. Semakin besar pengeluaran rumah tangga untuk non pangan, maka tingkat kesejahteraan rumah tangga yang bersangkutan akan semakin baik.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN

DAERAH

Kondisi keuangan daerah menjadi faktor yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam lingkup mikro gambaran keuangan daerah meliputi analisis pengelolaan keuangan daerah baik dari segi pendapatan maupun belanja daerah. Berbagai literatur dan *best practice* mengemukakan bahwa manajemen pembelanjaan pemerintah daerah adalah instrumen kunci dari kebijakan pemerintah daerah, karena itu disarankan kepada otoritas penganggaran untuk mencermati adanya hubungan integral dan keseimbangan antara “*revenue* dan *expenditure*”. Hal ini penting untuk menjaga terciptanya keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*) daerah serta perspektif pembangunan yang berorientasi jangka menengah dan panjang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan dan belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa APBD mempunyai fungsi berikut ini:

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;

5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Gambaran kinerja keuangan daerah masa lalu dapat ditunjukkan dengan menganalisis pertumbuhan dan proporsi komponen APBD berupa: pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah selama periode tersebut, kemudian pertumbuhan dan rasio neraca daerah, disamping itu juga dengan pendekatan rasio-rasio keuangan daerah yang sering digunakan dalam analisis keuangan daerah, seperti kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas operasional, solvabilitas jangka pendek, sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kondisi keuangan Pemerintah Kota Singkawang selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan kinerja yang semakin baik, Salah satu yang menunjukkan hal tersebut adalah opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah diperoleh Pemerintah Kota Singkawang selama 5 (lima) kali berturut-turut sejak tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021.

Analisis terhadap kinerja keuangan masa lalu Kota Singkawang penting untuk dilakukan karena bertujuan untuk melihat capaian-capaian yang telah dilakukan oleh Kota Singkawang. Capaian tersebut dapat membantu dalam menentukan kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk satu periode ke depan. Berikut ini adalah hasil analisis kinerja keuangan masa lalu Kota Singkawang.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

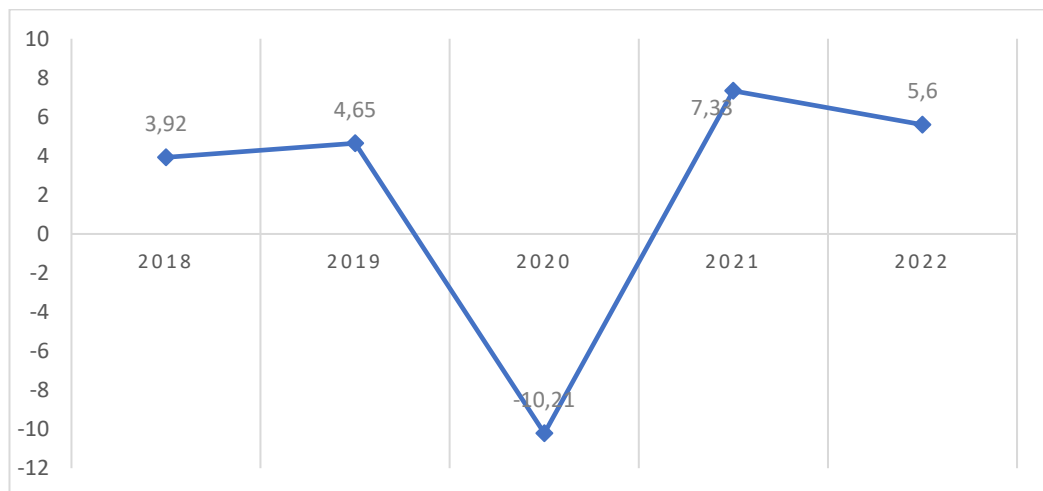
Sub bab ini menganalisis kinerja pelaksanaan APBD periode sebelumnya berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Singkawang tahun 2018-2022. Analisis dilakukan sesuai struktur APBD yang meliputi

pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk memproyeksi pertumbuhan APBD periode yang akan datang. Berikut ini adalah uraian analisis kinerja pelaksanaan APBD Kota Singkawang.

3.1.2. Pendapatan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Komponen pendapatan daerah meliputi PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berikut ini adalah grafik pendapatan daerah Kota Singkawang tahun 2018-2022.

Grafik 3.1. Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah
Kota Singkawang Tahun 2018-2022



Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Singkawang Tahun 2018-2022

Dari tahun 2018 hingga 2022, pertumbuhan pendapatan daerah Kota Singkawang mengalami perkembangan fluktuatif dan cenderung menurun. Pada tahun 2019, pendapatan daerah mengalami pertumbuhan sebesar 4,65 persen dari tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2020 pendapatan daerah mengalami penurunan yang sangat signifikan, yaitu minus sebesar 10,21 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan daerah belum berjalan optimal. Persoalan ini terjadi disebabkan oleh adanya penurunan kontribusi komponen

pendapatan daerah, yaitu pendapatan transfer pemerintah pusat dan pajak daerah. Kondisi ini terjadi disebabkan oleh kasus covid-19 dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 7,33 persen.

Analisis kinerja pendapatan daerah juga dapat dilihat dari kontribusi masing-masing komponen pendapatan daerah terhadap pendapatan daerah. Kontribusi masing-masing komponen pendapatan daerah ini menunjukkan seberapa besar pengaruh masing-masing komponen pendapatan daerah terhadap total pendapatan daerah. Berikut ini adalah uraian kontribusi masing-masing komponen pendapatan daerah terhadap pendapatan daerah di Kota Singkawang.

Tabel 3.1
Pendapatan Daerah Kota Singkawang Tahun 2018–2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
		APBD-P	APBD-P	APBD-P	APBD-P	APBD-P
1	2	3	4	5	6	7
	PENDAPATAN	920.788.333.852	926.165.524.663	843.115.014.197	862.086.752.094	906.091.798.448
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	154.358.330.760	180.424.370.397	179.478.666.800	168.881.218.902	189.000.000.000
	Pendapatan Pajak Daerah	43.570.000.000	48.565.000.000	45.342.000.000	56.270.000.000	66.140.000.000
	Hasil Retribusi Daerah	7.766.230.000	5.890.248.950	6.312.000.000	5.873.000.000	8.040.000.000
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.185.000.000	5.185.000.000	5.200.000.000	6.651.000.000	6.839.224.000
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	97.837.100.760	120.784.121.447	122.624.666.800	100.087.218.902	107.980.776.000
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	154.358.330.760	180.424.370.397	179.478.666.800	168.881.218.902	189.000.000.000
	PENDAPATAN TRANSFER	742.981.003.092	722.292.154.266	630.559.488.397	661.330.552.094	717.091.798.448
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	685.370.997.000	680.623.897.000	575.268.284.807	598.425.628.666	650.634.354.000
	Bagi Hasil Pajak	20.026.235.000	18.022.758.000	14.817.097.000	23.261.424.000	27.879.700.000
	Dana Alokasi Umum	492.487.388.000	518.961.237.000	467.470.514.000	457.023.658.000	457.023.658.000
	Dana Alokasi Khusus	125.573.554.000	98.183.010.000	55.650.290.807	118.140.546.666	140.941.192.000
	Dana Penyesuaian	47.283.820.000	45.456.892.000	37.330.383.000	-	24.789.804.000
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	57.610.006.092	41.668.257.266	55.291.203.590	62.904.923.428	66.457.444.448
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	57.610.006.092	41.668.257.266	55.291.203.590	60.804.923.428	66.057.444.448
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Lainnya	-	-	-	2.100.000.000	400.000.000
	Jumlah Pendapatan Transfer	742.981.003.092	722.292.154.266	630.559.488.397	661.330.552.094	717.091.798.448
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	23.449.000.000	23.449.000.000	33.076.859.000	31.874.981.098	0

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
		APBD-P	APBD-P	APBD-P	APBD-P	APBD-P
1	2	3	4	5	6	7
	Pendapatan Hibah	23.449.000.000	23.449.000.000	25.672.200.000		0
	Pendapatan Lainnya	-	-	7.404.659.000	31.874.981.098	0
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	23.449.000.000	23.449.000.000	33.076.859.000	31.874.981.098	0
	JUMLAH PENDAPATAN	920.788.333.852	926.165.524.663	843.115.014.197	862.086.752.094	906.091.798.448

Tabel 3.2
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Singkawang Tahun 2017–2022

URAIAN	TAHUN						RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
PENDAPATAN	845.956.950.690,75	879.090.770.463,79	920.008.487.061,04	826.117.163.781,80	886.640.763.780,39	940.121.752.620,75	2,34
PENDAPATAN ASLI DAERAH	132.099.418.843,54	130.864.903.685,88	166.200.436.090,04	154.272.914.307,02	175.464.901.487,36	213.790.179.584,91	10,87
Pendapatan Pajak Daerah	39.381.087.311,44	48.215.803.129,57	55.880.760.307,90	54.434.652.300,80	54.434.652.300,80	69.682.698.342,74	13,1
Hasil Retribusi Daerah	5.292.349.787,36	5.521.903.151,55	5.528.551.127,00	4.705.877.645,26	4.705.877.645,26	4.065.789.461,00	-4,15
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.309.820.337,00	5.185.336.109,00	5.242.664.299,00	6.867.923.037,00	6.867.923.037,00	7.850.510.913,00	13,17
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	83.116.161.407,74	71.941.861.295,76	99.548.460.356,14	109.456.448.504,30	109.456.448.508,30	132.191.180.868,17	11,39
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	132.099.418.843,54	130.864.903.685,88	166.200.436.090,04	154.272.914.307,02	175.464.901.487,36	213.790.179.584,91	10,87

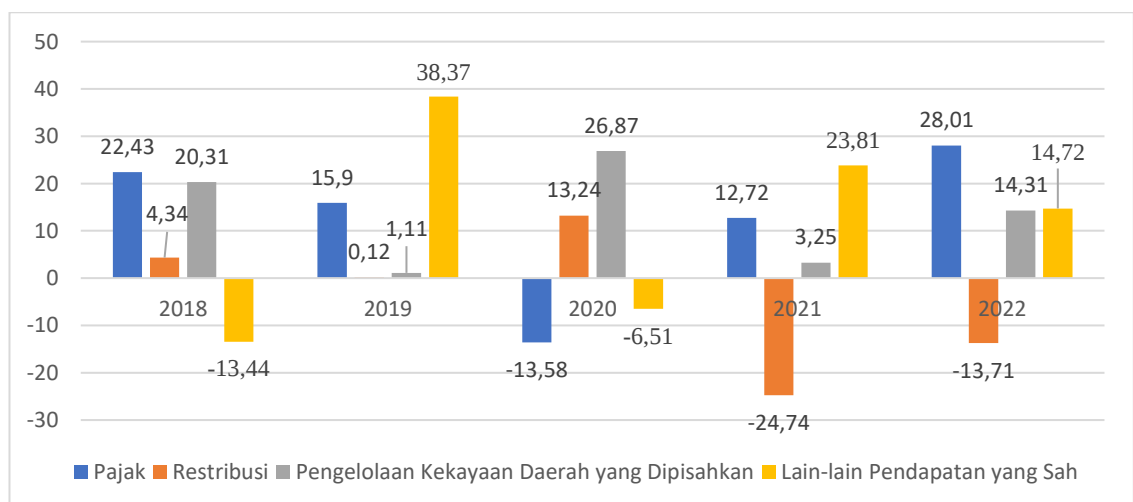
URAIAN	TAHUN						RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
PENDAPATAN TRANSFER	685.688.085.102,75	717.038.578.498,00	722.300.229.244,00	629.532.976.737,00	675.488.406.974,03	721.054.344.405,84	1,3
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	642.412.823.339,00	659.424.489.879,00	664.546.815.255,00	575.518.153.068,00	606.276.727.141,00	650.806.160.719,93	0,54
Dana Bagi Hasil	15.419.151.686,00	17.274.801.314,00	14.234.429.877,00	19.553.583.383,00	44.820.822.529,00	47.245.209.191,00	33,29
Dana Alokasi Umum	492.487.388.000,00	492.487.388.000,00	518.961.237.000,00	465.326.232.000,00	457.023.658.000,00	455.807.507.643,00	-1,4
Dana Alokasi Khusus	90.715.120.133,00	105.402.109.115,00	90.794.007.988,00	53.307.954.685,00	104.432.246.612,00	122.963.639.885,93	14,94
Dana Penyesuaian	43.791.163.520,00	44.260.191.450,00	40.557.140.390,00	37.330.383.000,00	-	24.789.804.000,00	
Pendapatan Transfer Antar Daerah	43.275.261.763,75	57.614.088.619,00	57.753.413.989,00	54.014.823.669,00	69.211.679.833,03	70.248.183.685,91	11,31
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	43.275.261.763,75	57.614.088.619,00	57.753.413.989,00	54.014.823.669,00	67.111.679.833,03	69.848.183.685,91	11,36
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Lainnya	-	-			2.100.000.000,00	400.000.000,00	
Jumlah Pendapatan Transfer	685.688.085.102,75	717.038.578.498,00	722.300.229.244,00	629.532.976.737,00	675.488.406.974,03	721.054.344.405,84	1,3
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	28.169.446.744,46	31.187.288.279,91	31.507.821.727,00	42.311.272.737,78	35.687.455.319,00	5.277.228.630,00	-13,13
Pendapatan Hibah	28.169.446.744,46	31.052.200.000,00	31.482.388.000,00	34.887.756.800,00	29.907.656.494,00	5.238.000.000,00	
Pendapatan Lainnya	-	135.088.279,91	25.433.727,00	7.423.515.937,78	5.779.798.825,00	39.228.630,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	28.169.446.744,46	31.187.288.279,91	31.507.821.727,00	42.311.272.737,78	35.687.455.319,00	5.277.228.630,00	-13,13
JUMLAH PENDAPATAN	845.956.950.690,75	879.090.770.463,79	920.008.487.061,04	826.117.163.781,80	886.640.763.780,39	940.121.752.620,75	2,34

Secara umum, rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kota Singkawang sebesar 2,34 persen. Komponen pendapatan daerah yang pertumbuhannya paling tinggi, yaitu berasal dari PAD dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Meskipun rata-rata pertumbuhan pendapatan transfer sangat rendah, namun memiliki kontribusi terhadap pendapatan daerah paling besar, Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan transfer terutama transfer dari pusat masih menjadi komponen utama dalam penyusunan pendapatan daerah Kota Singkawang. Ketergantungan terhadap pendapatan transfer tersebut berasal dari dana perimbangan dan transfer pemerintah daerah lainnya.

3.1.3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dari ketiga komponen pembentuk pendapatan daerah, PAD memiliki rata-rata pertumbuhan sudah baik. Pertumbuhan PAD ini tentu saja didukung oleh kontribusi dari masing-masing komponen dalam PAD itu sendiri. Berikut ini adalah tabel persentase kontribusi komponen PAD terhadap total PAD Kota Singkawang.

Grafik 3. 2. Persentase Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Pendapatan Asli Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Singkawang Tahun 2018-2022

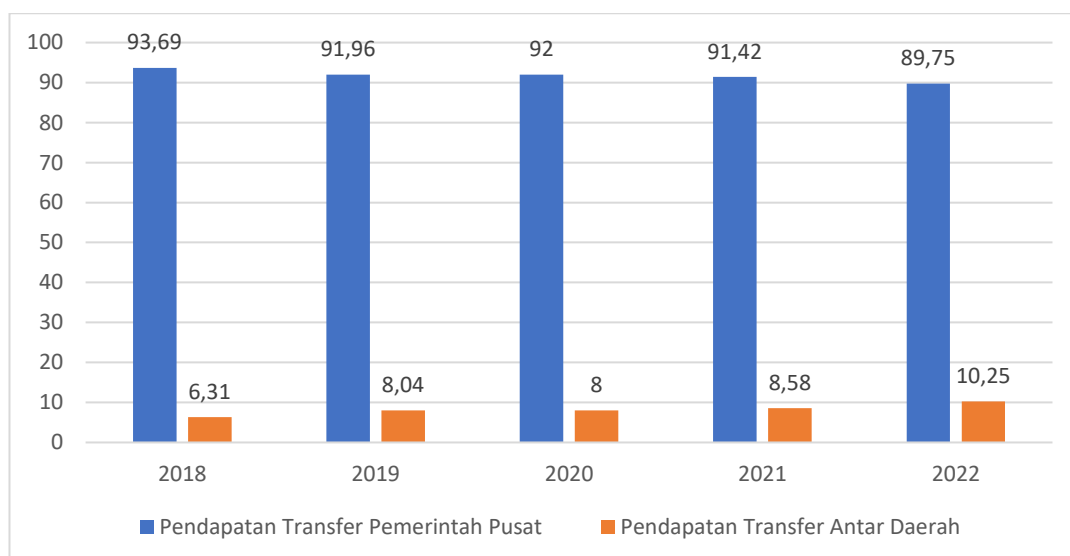
Rata-rata kontribusi komponen PAD terhadap total PAD paling tinggi berasal dari lain-lain PAD yang sah, diikuti oleh pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, pajak daerah dan kemudian retribusi daerah. Hal lain yang penting untuk diperhatikan dari kontribusi masing-masing komponen PAD adalah tingkat pertumbuhan seluruh komponen tersebut masih berjalan fluktuatif. Kondisi ini terjadi karena masih belum optimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD dan masih lemahnya data terkait sumber-sumber PAD, seperti pajak dan retribusi. Hal ini perlu diantisipasi karena bisa berdampak pada penurunan PAD yang selanjutnya berpengaruh pada pendapatan daerah itu sendiri.

3.1.4. Pendapatan Transfer

Kontribusi pendapatan transfer masih menjadi komponen utama dalam pendapatan daerah Kota Singkawang. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh pendapatan transfer terhadap kapasitas keuangan daerah masih signifikan. Berikut ini adalah gambaran kontribusi masing-masing komponen pendapatan transfer Kota Singkawang.

Grafik 3. 3. Persentase Kontribusi Pendapatan Transfer Terhadap Total Pendapatan Transfer Kota Singkawang Tahun 2018-2022



Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Singkawang Tahun 2018-2022

Persentase kontribusi komponen pendapatan transfer masih didominasi oleh transfer pemerintah pusat yang berasal dari dana perimbangan, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Insentif Daerah (DID), dan sebagainya. Rata-rata

pertumbuhan seluruh komponen pendapatan transfer mengalami *trend* fluktuatif dan cenderung menurun, seperti dana perimbangan, bagi hasil, dan lain-lain. Kondisi ini perlu diantisipasi karena alokasi dana dari pemerintah pusat sangat tergantung pada kondisi APBN.

3.1.5. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah di Kota Singkawang mengalami penurunan yang sangat tajam pada tahun 2022 dimana besarnya adalah Rp. 5.277.228.630, sedangkan pada tahun 2021 besar jumlahnya yaitu Rp. 35.687.455.319,-

3.1.6. Belanja Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah merupakan semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berikut ini adalah tabel gambaran pertumbuhan belanja daerah Kota Singkawang tahun 2018-2022.

Tabel 3. 3. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	BELANJA	846.529.530.756,31	868.360.427.472,46	847.117.697.822,13	1.053.654.087.067,98	852.462.710.625,46	1,35
	BELANJA OPERASIONAL	604.158.186.731,31	660.021.592.453,46	645.302.413.887,13	680.259.287.014,48	709.460.637.103,12	4,18
	Belanja Pegawai	372.846.358.044,00	374.627.261.454,00	376.546.299.363,00	391.236.295.267,50	356.894.230.162,00	-0,97
	Belanja Barang dan Jasa	193.865.664.551,31	241.837.708.596,46	218.699.777.341,13	267.408.174.803,98	306.675.838.041,12	13,03
	Belanja Hibah	31.464.569.536,00	38.722.528.403,00	48.441.241.183,00	18.462.010.520,00	44.421.707.100,00	31,72
	Belanja Batuan Sosial	5.981.594.600,00	4.834.094.000,00	1.615.096.000,00	3.152.806.423,00	1.468.861.800,00	-10,99
	Jumlah Belanja Operasional	604.158.186.731,31	660.021.592.453,46	645.302.413.887,13	680.259.287.014,48	709.460.637.103,12	4,18
	BELANJA MODAL	242.244.490.970,00	208.338.835.019,00	169.584.859.897,00	366.764.402.831,50	139.864.789.578,34	5,45
	Belanja Modal Tanah	17.517.606.638,00	868.644.710,00	522.500.000,00	44.773.000,00	4.887.776.200,00	264,72
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.779.529.496,00	80.193.751.524,00	50.376.815.037,00	50.882.542.056,50	28.556.467.532,00	-12,56
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.074.950.740,00	40.873.287.917,00	38.652.346.042,00	78.483.345.284,00	26.578.905.592,74	12
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	122.291.439.180,00	82.491.676.718,00	76.671.012.204,00	234.222.824.631,00	75.303.305.731,60	24,51
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.580.964.916,00	3.911.474.150,00	3.362.186.614,00	3.130.917.860,00	4.538.334.522,00	-1,47
	Jumlah Belanja Modal	242.244.490.970,00	208.338.835.019,00	169.584.859.897,00	366.764.402.831,50	139.864.789.578,34	5,45
	BELANJA TIDAK TERDUGA	126.853.055,00	-	32.230.424.038,00	6.630.397.222,00	3.137.283.944,00	-
	Belanja Tidak Terduga	126.853.055,00	-	32.230.424.038,00	6.630.397.222,00	3.137.283.944,00	-
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	126.853.055,00	-	32.230.424.038,00	6.630.397.222,00	3.137.283.944,00	-
	Jumlah Belanja	846.529.530.756,31	868.360.427.472,46	847.117.697.822,13	1.053.654.087.067,98	852.462.710.625,46	1,35

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Singkawang Tahun 2018-2022

Dari tahun 2018 hingga 2022, rata-rata pertumbuhan belanja daerah Kota Singkawang mengalami peningkatan, yaitu 1,35 persen. Rata-rata pertumbuhan Belanja Operasional lebih kecil dibanding dengan Rata-Rata pertumbuhan Belanja Modal. Rata-rata pertumbuhan Belanja Operasional tahun 2018-2022 adalah 4,18 persen sedangkan Rata-rata pertumbuhan pertumbuhan Belanja Modal tahun 2018-2022 adalah 5,45 persen. Sedangkan untuk Belanja Tidak Terduga pada tahun 2020 mengalami lonjakan yang sangat signifikan disbanding tahun 2019 dikarenakan ada Pandemi COVID-19.

3.1.7. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah yang diarahkan pada:

- a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
- b. Penyertaan modal kepada BUMD; dan
- c. Persentase SiLPA diupayakan tidak meningkat dengan semakin efektifnya perencanaan anggaran.

Realisasi pembiayaan daerah Kota Singkawang tahun 2018-2022 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.4. Sumber Penerimaan Pembiayaan adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya. Diharapkan pada masa yang akan datang SiLPA akan semakin rasional dan tidak terlalu besar dengan semakin membaiknya perencanaan pendapatan dan belanja. Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Hutang. Penyertaan Modal dilakukan kepada BUMD.

Tabel 3. 4. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022

NO	URAIAN		TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	2		3	4	5	6	7	8
	PEMBIAYAAN		12.776.916.747,51	36.507.732.637,59	79.356.265.903,17	243.894.263.831,77	48.692.010.360,18	107,6
		PENERIMAAN PEMBIAYAAN	28.776.916.747,51	44.507.732.637,59	87.356.265.903,17	251.894.263.831,77	76.881.004.544,18	67,45
		Penggunaan SiLPA	28.776.916.747,51	44.517.657.137,59	87.356.265.903,17	57.448.314.122,84	76.881.004.544,18	37,63
		Penerimaan Kembali Investasi Non-Permanen	-	-	-	-	-	
		Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	194.445.949.708,93	-	
		Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	28.776.916.747,51	44.507.732.637,59	87.356.265.903,17	251.894.263.831,77	76.881.004.544,18	67,45
		PENGELUARAN PEMBIAYAAN	16.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	28.188.994.184,00	50,59
		Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	16.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	14.300.000.000,00	7,19
		Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	13.888.994.184,00	
		Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah	16.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	28.188.994.184,00	50,59
		PEMBIAYAAN NETTO	12.776.916.747,51	36.507.732.637,59	79.356.265.903,17	243.894.263.831,77	48.692.010.360,18	107,6

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Singkawang Tahun 2018-2022

3.1.8. Neraca Daerah

Neraca daerah merupakan gambaran posisi keuangan yang terdiri dari asset, kewajiban, dan dana ekuiditas. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Berikut ini adalah gambaran pertumbuhan neraca daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2021.

Tabel 3. 5. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Singkawang Tahun 2017-2021

U R A I A N				TAHUN					Rata-rata Pertumbuhan (%)
				Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2021	
1				2	3	4	5	6	7
A S E T				1.730.057.803.173,03	1.831.603.275.337,29	2.076.719.179.169,79	2.134.053.034.227,97	2.393.349.278.069,41	8,54
	ASET LANCAR			78.451.185.535,67	116.524.251.876,06	181.187.138.149,79	118.198.568.357,72	161.354.778.087,14	26,44
		Kas		28.776.916.747,51	44.517.657.137,59	87.356.265.903,17	57.448.314.122,84	76.881.004.544,18	37,63
			Kas di Kas Daerah	26.794.253.880,09	40.853.910.929,52	77.306.310.217,22	54.298.444.832,20	59.598.965.524,35	30,42
			Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-	5.908.000,00	-	-
			Kas di Bendahara Pengeluaran	129.698.411,00	-	8.457.850,00	-	53.587.852,00	-
			Kas di BLUD	134.664.546,42	1.439.140.627,65	6.581.056.404,76	1.001.735.101,18	16.663.586.490,43	701,17
			Kas di Bendahara FKTP	346.436.268,00	684.115.305,00	485.779.769,00	317.417.566,00	187.057.755,00	-1,81
			Kas di Bendahara BOS	1.371.863.642,00	1.540.490.275,42	2.974.661.662,19	1.824.808.623,46	377.806.922,40	-3,14
		Investasi Jangka Pendek		-	-	-	-		-
		Piutang		26.919.132.503,62	47.088.007.377,35	48.492.120.223,62	44.079.579.525,08	48.287.530.390,27	19,59
			Piutang Pajak Daerah	22.329.367.934,80	29.997.360.608,80	33.107.949.304,80	29.152.457.969,90	31.929.388.916,37	10,57
			Piutang Retribusi Daerah	494.218.399,00	773.284.538,00	449.729.425,00	370.673.499,00	308.554.589,00	-4,93
			Piutang Lainnya	15.006.275.744,00	28.672.926.613,00	29.449.725.722,49	31.604.085.132,64	35.221.578.215,00	28,14
			Penyisihan Piutang	-10.910.729.574,18	-12.355.564.382,45	-14.515.284.228,67	-17.047.637.076,46	-19.171.991.329,86	15,16
		Beban Dibayar di Muka		26.722.602,74	22.916.666,66	-	-	58.666.666,67	-
		Persediaan		22.728.413.681,80	24.895.670.694,46	45.338.752.023,00	16.670.674.709,80	36.127.576.486,02	36,28
		INVESTASI JANGKA PANJANG		68.910.628.604,58	86.873.931.575,58	97.088.460.075,58	107.212.673.701,58	115.595.242.416,58	14,02

U R A I A N			TAHUN					Rata-rata Pertumbuhan (%)
			Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2021	
1			2	3	4	5	6	7
		Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-	-	-	-	-
		Investasi Non Permanen Modal Bergulir	2.635.467.585,57	2.618.301.422,57	2.590.604.086,57	2.538.770.808,57	2.532.994.421,57	-0,98
		Penyisihan Investasi Non Permanen Modal Bergulir	-2.635.467.585,57	-2.618.301.422,57	-2.590.604.086,57	-2.538.770.808,57	-2.532.994.421,57	-0,98
		Investasi Jangka Panjang Permanen	68.910.628.604,58	86.873.931.575,58	97.088.460.075,58	107.212.673.701,58	115.595.242.416,58	14,02
		Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	68.910.628.604,58	86.873.931.575,58	97.088.460.075,58	107.212.673.701,58	115.595.242.416,58	14,02
		Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP	1.578.260.916.547,49	1.578.891.212.145,93	1.748.801.369.465,11	1.873.298.581.786,95	2.080.471.466.993,51	7,24
		Tanah	365.612.680.982,03	370.135.421.597,30	453.575.188.804,20	542.297.584.901,99	544.750.013.847,09	10,95
		Peralatan dan Mesin	340.151.562.965,06	374.845.113.771,67	490.298.428.264,67	547.337.714.728,66	587.651.353.079,49	15
		Gedung dan Bangunan	611.813.450.277,96	605.137.681.734,44	651.861.658.983,44	678.705.176.252,03	725.571.486.371,03	4,41
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.201.116.562.123,46	1.298.945.980.106,99	1.375.229.386.601,99	1.451.547.931.930,20	1.690.222.287.052,14	9
		Aset Tetap Lainnya	49.096.532.186,98	48.748.107.177,00	66.817.295.910,00	70.129.061.590,00	58.572.782.571,00	6,21
		Konstruksi Dalam Pengerjaan	12.412.266.873,00	13.733.665.521,89	14.235.845.554,89	18.055.158.012,98	60.954.046.541,05	69,68
		Akumulasi Penyusutan	-	-	-	-	-	12,21
			1.001.942.138.861,00	1.132.654.757.763,36	1.303.216.434.654,08	1.434.774.045.628,91	1.587.250.502.468,29	
		DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	-
		ASET LAINNYA	4.435.072.485,29	49.313.879.739,72	49.642.211.479,31	35.343.210.381,72	35.927.790.572,18	246,36
		Aset Tak Berwujud	1.905.986.611,61	4.235.175.126,61	7.750.725.684,61	8.561.121.585,61	12.058.666.265,61	64,13

U R A I A N				TAHUN					Rata-rata Pertumbuhan (%)
				Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2021	
1				2	3	4	5	6	7
			Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-944.277.322,32	-1.738.952.347,65	-3.234.997.484,57	-4.794.557.951,68	-6.954.550.004,81	65,86
			Aset lain-lain	3.852.599.892,00	83.251.368.358,07	86.349.545.420,07	83.867.412.596,02	92.238.578.401,40	517,94
			Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-379.236.696,00	-36.433.711.397,31	-41.223.062.140,80	-52.290.765.848,23	-61.414.904.090,02	2391,14
TOTAL ASET				1.730.057.803.173,03	1.831.603.275.337,29	2.076.719.179.169,79	2.134.053.034.227,97	2.393.349.278.069,41	8,54
			KEWAJIBAN	25.638.699.190,91	43.984.448.375,99	35.515.632.609,24	31.538.598.351,85	240.619.446.010,42	176,01
			KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.972.344.820,67	26.318.094.005,75	17.849.278.239,00	13.872.243.981,61	28.202.375.691,25	69,74
			Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-	-	-	-	-
			Pendapatan Diterima di Muka	174.381.627,67	117.972.918,75	162.442.413,00	253.388.294,11	271.079.741,58	17,08
			Utang Belanja	7.797.963.193,00	26.190.201.087,00	17.686.835.826,00	13.618.855.687,50	27.931.295.949,67	71,37
			Utang Jangka Pendek Lainnya	-	9.920.000,00	-	-	-	-
			KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	17.666.354.370,24	17.666.354.370,24	17.666.354.370,24	17.666.354.370,24	212.417.070.319,17	-
			Utang Dalam Negeri	-	-	-	-	194.445.949.708,93	-
			Utang Jangka Panjang Lainnya	17.666.354.370,24	17.666.354.370,24	17.666.354.370,24	17.666.354.370,24	17.971.120.610,24	0,43
			TOTAL KEWAJIBAN	25.638.699.190,91	43.984.448.375,99	35.515.632.609,24	31.538.598.351,85	240.619.446.010,42	176,01
			EKUITAS	1.698.361.365.010,13	1.785.451.569.948,64	2.020.760.465.232,01	2.130.182.513.189,32	2.152.729.832.058,99	6,2
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS				1.724.000.064.201,04	1.829.436.018.324,63	2.056.276.097.841,25	2.161.721.111.541,17	2.393.349.278.069,41	8,59

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Singkawang Tahun 2017-2021

Dari tahun 2017 hingga 2021 rata-rata pertumbuhan aset daerah Kota Singkawang sebesar 8,64 persen. Sementara itu, pertumbuhan aset lancar sebesar 26,44 persen. Pertumbuhan aset tetap mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,24 persen. Komponen aset tetap yang meningkat signifikan adalah aset tanah, Peralatan dan mesin serta jalan, irigasi, dan jaringan. Kondisi ini disesuaikan dengan peningkatan yang tidak signifikan pada komponen konstruksi dalam pengerjaan.

Pertumbuhan kewajiban Kota Singkawang mengalami kenaikan yang cukup tajam yaitu sebesar 176,01 persen. Kenaikan ini disebabkan karena ada utang Dalam Negeri pada tahun 2021.

Dari hasil analisis terhadap neraca daerah di atas, selanjutnya dilakukan analisis rasio keuangan. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keadaan dan posisi keuangan Kota Singkawang dari satu periode ke periode berikutnya. Instrumen yang digunakan untuk menghitung rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Berikut ini adalah uraian analisis terhadap masing-masing rasio di atas.

3.1.9.Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas terdiri dari rasio lancar/*current ratio* dan rasio cepat/*ratio quick*. Berikut ini adalah ulasan terkait rasio lancar dan rasio cepat.

3.1.10. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar merupakan kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar atau aset lancar. Dengan kata lain, rasio ini menunjukkan apakah Pemda memiliki aset yang cukup untuk melunasi hutangnya. Adapun rumus rasio lancar adalah membandingkan aktiva lancar dengan hutang lancar ($\text{Rasio Lancar} = \text{Aset Lancar} / \text{Hutang Lancar}$). Berikut ini adalah hasil analisis rasio lancara Pemerintah Kota Singkawang.

Tabel 3. 6. Analisis Rasio Lancar Pemerintah Kota Singkawang
Tahun 2017-2021 (%)

No	Tahun	Aset Lancar	Kewajiban Jangka Pendek/ Hutang Lancar	Rasio
1	2017	78.451.185.535,67	7.972.344.820,67	9,84
2	2018	116.524.251.876,06	26.318.094.005,75	4,43
3	2019	181.187.138.149,79	17.849.278.239,00	10,15
4	2020	118.198.568.357,72	13.872.243.981,61	8,52
5	2021	161.354.778.087,14	28.202.375.691,25	5,72

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Singkawang Tahun 2017-2021

Rasio lancar Pemerintah Daerah mengalami penurunan yang cukup tajam karena terdapat utang belanja yang cukup besar. Rasio lancar sebesar 5,72 persen pada tahun 2021, dapat dikatakan kurang baik karena nilai tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki beban yang cukup besar untuk membayar kewajiban jangka pendek.

3.1.11. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio *quick* adalah ukuran kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset yang lebih likuid atau aset yang paling mendekati uang tunai (aset cepat). Rasio ini menunjukkan kekuatan atau kelemahan finansial Pemerintah Daerah. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa banyak utang jangka pendek Pemerintah Daerah yang dapat dipenuhi dengan menjual semua aset likuid Pemerintah Daerah dalam waktu yang paling singkat. Semakin besar nilai rasio cepat, maka semakin baik. Adapun rumus rasio cepat adalah aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban lancar ($\text{Rasio Cepat} = (\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}) / \text{Kewajiban lancar}$). Berikut ini adalah hasil analisis rasio cepat Pemerintah Daerah.

Tabel 3. 7. Rasio Cepat Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2017-2021 (%)

No	Tahun	Aktiva Lancar	Persediaan	Kewajiban Jangka Pendek	Rasio Quick
1	2017	78.451.185.535,67	22.728.413.681,80	7.972.344.820,67	6,99
2	2018	116.524.251.876,06	24.895.670.694,46	26.318.094.005,75	3,48
3	2019	181.187.138.149,79	45.338.752.023,00	17.849.278.239,00	7,61
4	2020	118.198.568.357,72	16.670.674.709,80	13.872.243.981,61	7,32
5	2021	161.354.778.087,14	36.127.576.486,02	28.202.375.691,25	4,44

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Singkawang Tahun 2017-2021

Perkembangan rasio cepat Pemerintah Daerah mengalami penurunan mulai tahun 2019 hingga tahun 2021. Penurunan ini terjadi karena utang lancar/Kewajiban Jangka Pendek mengalami kenaikan yang signifikan. Kondisi rasio cepat Pemerintah dengan kondisi yang kurang baik harus lebih diperhatikan walaupun hal ini masih menunjukkan bahwa aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Singkawang masih mampu melunasi utang jangka pendeknya melalui pencairan aset lancarnya.

3.1.12. Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Selain itu, rasio ini juga menunjukkan indikasi tingkat keamanan bagi para pemberi pinjaman. Ada 2 (dua) rasio yang digunakan dalam rasio solvabilitas, yaitu rasio total hutang terhadap total aset dan rasio hutang terhadap modal.

3.1.13. Rasio Total Kewajiban/Total Hutang Terhadap Total Aset

Rasio ini mengukur seberapa besar pendanaan pemerintah yang dibiayai oleh utang dibandingkan dengan total aktiva yang dimiliki oleh pemerintah. Utang di sini adalah utang Pemerintah Daerah, baik utang jangka panjang maupun utang jangka pendek. Oleh karena itu, rasio ini menggambarkan seberapa jauh utang dapat ditutupi oleh aktiva. Semakin kecil nilainya, maka semakin baik tingkat keamanannya. Adapun rumus rasio total hutang terhadap aset adalah total hutang dibagi dengan total aset (Rasio Hutang Terhadap Total

Aset=Total Hutang/Total Aset). Berikut ini adalah hasil perhitungan rasio hutang terhadap total aset Pemerintah Kota Singkawang.

Tabel 3. 8. Rasio Hutang Terhadap Total Aset Pemerintah Kota Singkawang
Tahun 2017-2021

No	Tahun	Total Kewajiban	Total Aset	Rasio Hutang Terhadap Total Aset
1	2017	25.638.699.190,91	1.730.057.803.173,03	0,01
2	2018	43.984.448.375,99	1.831.603.275.337,29	0,02
3	2019	35.515.632.609,24	2.076.719.179.169,79	0,02
4	2020	31.538.598.351,85	2.134.053.034.227,97	0,01
5	2021	240.619.446.010,42	2.393.349.278.069,41	0,10

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Singkawang Tahun 2017-2021

Perkembangan rasio hutang terhadap total aset Pemerintah Daerah mengalami perkembangan fluktuatif. Perkembangan rasio hutang yang paling tinggi berada pada tahun 2021, yaitu sebesar 0,10 persen. Kondisi ini terjadi karena kenaikan total hutang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan total aset.

3.1.14. Rasio Hutang Terhadap Ekuitas

Rasio hutang terhadap modal digunakan untuk mengukur seberapa perlunya hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki. Rasio ini sangat penting untuk diperhatikan karena berkaitan dengan kesehatan keuangan daerah saat pemeriksaan. Semakin kecil nilainya, menunjukkan semakin mandiri keuangan daerah atau tidak tergantung pembiayaan dari hutang. Adapun rumus rasio hutang terhadap ekuitas adalah total hutang dibagi dengan ekuitas (Rasio Hutang Terhadap Ekuitas = Total Hutang/Ekuitas). Berikut ini hasil perhitungan rasio hutang terhadap ekuitas Pemerintah Kota Singkawang.

Tabel 3. 9. Rasio Hutang Terhadap Ekuitas Pemerintah Kota Singkawang
Tahun 2017-2021 (%)

No	Tahun	Total Utang	Total Ekuitas	Rasio Hutang Terhadap Total Ekuitas
1	2017	25.638.699.190,91	1.698.361.365.010,13	0,02
2	2018	43.984.448.375,99	1.785.451.569.948,64	0,02
3	2019	35.515.632.609,24	2.020.760.465.232,01	0,02
4	2020	31.538.598.351,85	2.130.182.513.189,32	0,01
5	2021	240.619.446.010,42	2.152.729.832.058,32	0,11

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Singkawang Tahun 2017-2021

Perkembangan rasio hutang terhadap ekuitas Pemerintah Kota Singkawang mengalami kenaikan khususnya pada tahun 2021 yakni 0,11% yang menunjukkan kemandirian keuangan kurang baik.

3.1.15. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas merupakan rasio untuk melihat efektifitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah. Dengan kata lain, rasio ini mengukur seberapa efektif Pemerintah Daerah menggunakan persediaan, piutang, dan aset tetapnya dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Rasio ini diukur melalui rata-rata umur piutang dan rata-rata umur persediaan. Berikut ini adalah hasil perhitungan rata-rata umur piutang dan rata-rata umur persediaan.

3.1.16. Rasio Rata-Rata Umur Piutang

Rasio rata-rata umur piutang merupakan rasio yang digunakan untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang atau merubah piutang menjadi kas. Rasio ini dihitung dengan membandingkan 365 hari dibagi perputaran piutang. Perputaran piutang didapatkan dari perhitungan pendapatan daerah dibagi dengan rata-rata piutang pendapatan daerah, di mana rata-rata piutang pendapatan daerah didapatkan dari saldo awal ditambah saldo akhir piutang dibagi 2 (dua).

Berikut ini adalah hasil perhitungan rata-rata umur piutang Kota Singkawang.

Tabel 3. 10. Rasio Rata-Rata Umur Piutang Pemerintah Kota Singkawang
Tahun 2017-2021 (Hari)

URAIAN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Rata-Rata Umur Piutang	17,47	20,19	24,29	27,42	31,08

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Singkawang Tahun 2017-2021

Rata-rata umur piutang Pemerintah Kota Singkawang mengalami peningkatan setiap tahun. Peningkatan ini menunjukkan bahwa jangka waktu pelunasan pelunasan semakin lama. Hal ini menimbulkan resiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang semakin besar.

3.1.17. Rasio Rata-Rata Umur Persediaan

Rata-rata umur persediaan adalah rasio untuk melihat berapa lama dana yang tertanam dalam bentuk persediaan. Persediaan yang dimiliki digunakan untuk memberikan pelayanan publik. Rasio ini dihitung dengan membandingkan 365 hari dibagi dengan perputaran persediaan. Berikut ini adalah hasil perhitungan rata-rata umur persediaan.

Tabel 3. 11. Rasio Rata-Rata Umur Persediaan Pemerintah Kota Singkawang
Tahun 2017-2021

URAIAN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Rata-Rata Umur Persediaan	2.829,34	1.589,39	2.113,41	1.133,80	

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Singkawang Tahun 2017-2021

Rata-rata umur persediaan Pemerintah Kota Singkawang mengalami perkembangan yang fluktuatif dan cenderung menurun. Kondisi ini menunjukkan pengelolaan persediaan oleh Pemerintah Kota Singkawang sudah berjalan efisien. Dengan kata lain, Pemerintah Kota Singkawang dapat mengendalikan

persediaannya untuk memberikan pelayanan publik secara efisien.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Masa Lalu

Analisis ini bertujuan memberikan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan daerah masa lalu Pemerintah Kota Singkawang. Instrumen yang digunakan untuk melihat kinerja pengelolaan keuangan daerah masa lalu adalah analisis kesehatan keuangan daerah, realisasi kebijakan belanja daerah dan pembiayaan daerah pada periode sebelumnya. Informasi yang diperoleh dari analisis ini digunakan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa akan datang dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi anggaran untuk pembangunan daerah ke depan.

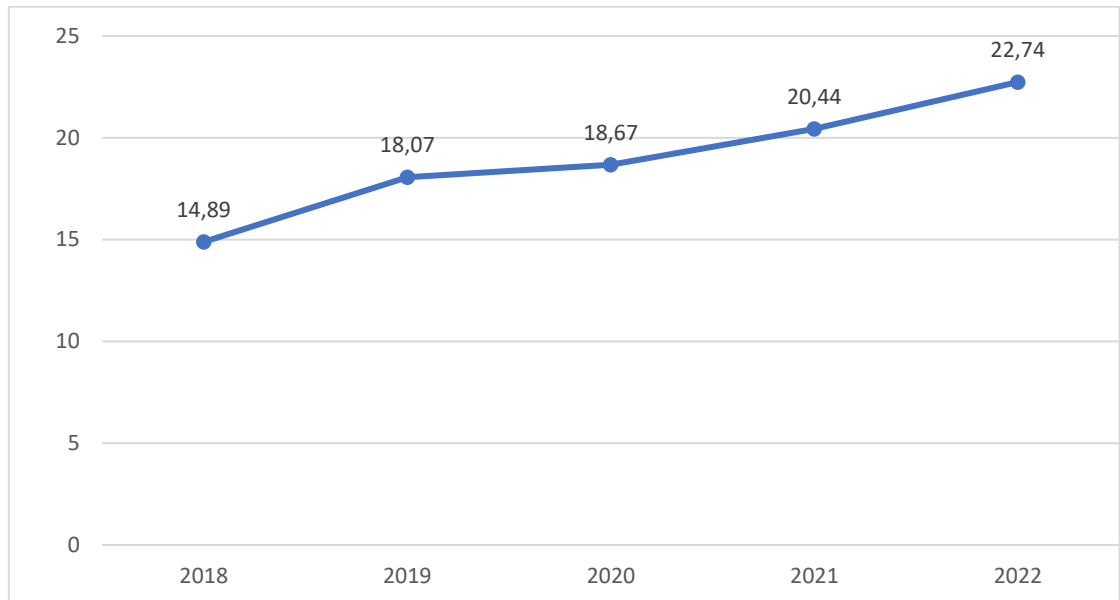
3.2.1. Analisis Kesehatan Keuangan Daerah

Analisis Kesehatan keuangan daerah dapat diukur dari tingkat kemandirian keuangan daerah, ruang fiskal daerah, tax ratio, rasio belanja pegawai, dan rasio belanja modal. Adapun hasil analisis Kesehatan keuangan daerah dapat dilihat pada sub bab berikut ini.

3.2.2. Kemandirian Keuangan daerah

Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat diukur dari realisasi PAD terhadap pendapatan daerah. Semakin tinggi realisasi PAD terhadap pendapatan daerah, maka semakin tingkat kemandirian daerah semakin baik, dan sebaliknya. Adapun realisasi PAD terhadap pendapatan Kota Singkawang dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3. 4. Realisasi PAD Terhadap Pendapatan
Kota Singkawang Tahun 2018-2022



Dari tahun 2018 hingga 2022, persentase realisasi PAD terhadap pendapatan daerah terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kota Singkawang dalam meningkatkan PAD sudah berjalan baik. Meskipun demikian, kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah harus tetap dioptimalkan hingga diatas 25 persen.

3.2.3. Tax Ratio

Rasio merupakan indikator untuk melihat tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat di suatu daerah dan digunakan untuk mengetahui perkiraan besaran porsi pajak dalam perekonomian daerah. Berikut ini adalah tex ratio Kota Singkawang tahun 2018-2022.

Tabel 3. 12. Tax Ratio Kota Singkawang Tahun 2018-2022

Tahun	Pajak	PDRB	Tax Ratio
2018	48.215.803.129,57	9.691.380.000.000	0,50
2019	55.880.760.307,90	10.228.390.000.000	0,55
2020	48.290.277.485,26	10.126.220.000.000	0,48
2021	54.434.652.300,80	10.877.850.000.000	0,50
2022	69.682.698.342,74	11.931.620.000.000	0,58

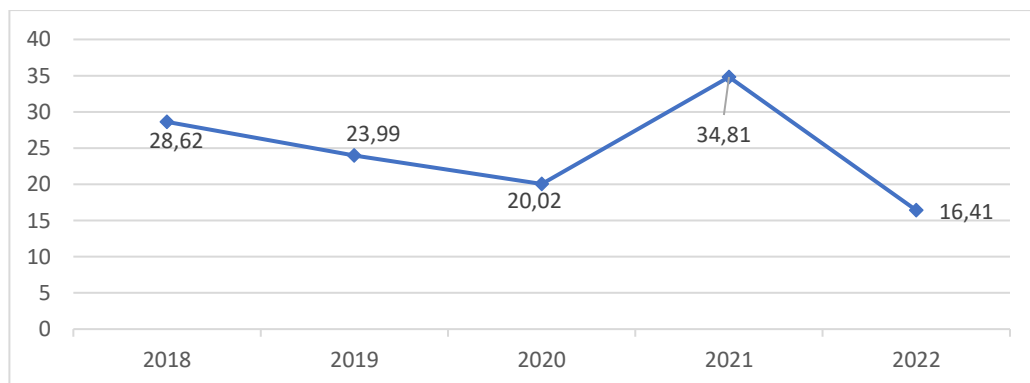
Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Singkawang Tahun 2018-2022

Tax Ratio Kota Singkawang mengalami perkembangan fluktuatif dan meningkat mulai pada tahun 2020 hingga 2022. Angka 0,58 pada tahun 2022 merupakan angka yang belum optimal. Hal ini disebabkan oleh tingkat kepatuhan pembayaran pajak belum berjalan maksimal, data objek pajak belum optimal.

3.2.4. Realisasi Belanja Modal Terhadap Realisasi Total Belanja APBD

Realisasi belanja modal terhadap realisasi total belanja APBD merupakan indikator yang mengukur porsi belanja modal yang dibelanjakan terhadap total belanja daerah dalam rangka pemberian layanan kepada masyarakat. Semakin tinggi realisasi belanja modal terhadap total belanja daerah maka semakin baik. Berikut ini adalah grafik realisasi belanja modal terhadap realisasi total belanja APBD Kota Singkawang.

Grafik 3. 5. Realisasi belanja modal terhadap realisasi total belanja APBD Kota Singkawang Tahun 2018-2022



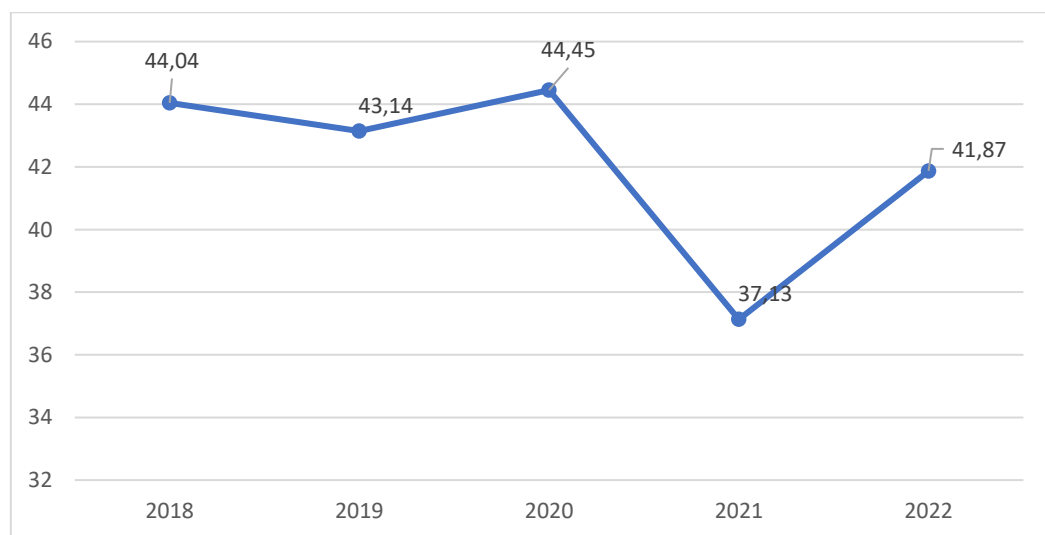
Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Singkawang Tahun 2018-2022

Pada tahun 2022, realisasi belanja modal terhadap realisasi total belanja APBD Kota Singkawang mengalami penurunan yang cukup signifikan yakni sebesar 18,4 persen, dimana pada tahun 2021 realisasi belanja modal terhadap realisasi total belanja sebesar 34,81 menjadi 16,41 pada tahun 2022. Pada Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 34,81 persen, dikarenakan Pemerintah Kota Singkawang mendapatkan Dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar 200 Milyar yang dialokasikan untuk Infrastruktur Dasar serta Jalan, Irigasi dan Jaringan.

3.2.5. Realisasi Belanja Pegawai Terhadap Realisasi Total Belanja APBD

Realisasi belanja pegawai terhadap realisasi total belanja APBD merupakan indikator untuk mengukur seberapa besar porsi belanja pegawai terhadap total belanja. Semakin tinggi porsi belanja pegawai maka kebijakan pengelolaan belanja daerah dinilai kurang proporsional. Hal ini terjadi karena belanja untuk kebutuhan masyarakat akan semakin berkurang. Berikut adalah realisasi belanja pegawai terhadap realisasi total belanja APBD.

Grafik 3. 6. Realisasi Belanja Pegawai Terhadap Realisasi Total Belanja APBD
Kota Singkawang Tahun 2018-2022



Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Singkawang Tahun 2018-2022

Laju pertumbuhan realisasi belanja pegawai terhadap total belanja daerah mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 mengalami

penurunan yang sangat signifikan Kondisi ini menunjukkan bahwa porsi belanja pemenuhan kebutuhan pegawai menurun karena terjadi kenaikan pada total belanja yang disebabkan dikarenakan Pemerintah Kota Singkawang mendapatkan Dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar 200 Milyar. Sedangkan pada tahun 2022, realisasi belanja pegawai kembali meningkat hingga 41,87 persen, namun kondisi ini masih lebih baik dibanding dari tahun-tahun sebelumnya khususnya pada tahun 2018 hingga tahun 2020.

3.2.6. Analisis Belanja Daerah

Analisis kinerja belanja daerah bertujuan untuk menyajikan data analisis terkait proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, realisasi belanja pegawai dan analisis pengeluaran periodik, wajib, dan mengikat. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menentukan kebijakan efisiensi dan efektifitas anggaran pada periode ke depan.

3.2.7. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Analisis proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja bertujuan untuk mendapatkan gambaran kinerja pelaksanaan anggaran belanja. Proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja merupakan perbandingan antara realisasi dengan anggaran (target), yang kemudian diperoleh tingkat realisasi belanja. Berikut ini adalah tabel proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja Daerah tahun 2018-2022.

Tabel 3. 13. Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja dan Proporsi Rata-rata Komponen Belanja Terhadap Total Belanja
Kota Singkawang Tahun 2017-2022 (%)

NO	URAIAN		2017			2018			2019		
			APBD-P	Realisasi	%	APBD-P	Realisasi	%	APBD-P	Realisasi	%
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	BELANJA		875.693.803.004,00	808.098.186.543,34	92,28	963.781.519.756,51	846.529.530.756,31	87,83	992.572.830.275,99	868.360.427.472,46	87,49
		BELANJA OPERASIONAL	664.500.100.455,00	609.112.306.884,34	91,66	694.643.073.821,51	604.158.186.731,31	86,97	765.789.879.603,00	660.021.592.453,46	86,19
		Belanja Pegawai	362.931.626.620,00	329.872.272.728,00	90,89	423.833.004.846,51	372.846.358.044,00	87,97	444.835.433.086,00	374.627.261.454,00	84,22
		Belanja Barang dan Jasa	262.514.719.925,00	244.273.529.692,34	93,05	230.823.525.361,00	193.865.664.551,31	83,99	274.207.520.442,00	241.837.708.596,46	88,20
		Belanja Hibah	29.704.948.910,00	26.077.309.464,00	87,79	33.856.787.614,00	31.464.569.536,00	92,93	41.211.678.075,00	38.722.528.403,00	93,96
		Belanja Batuan Sosial	9.348.805.000,00	8.889.195.000,00	95,08	6.129.756.000,00	5.981.594.600,00	97,58	5.535.248.000,00	4.834.094.000,00	87,33
		Jumlah Belanja Operasional	664.500.100.455,00	609.112.306.884,34	91,66	694.643.073.821,51	604.158.186.731,31	86,97	765.789.879.603,00	660.021.592.453,46	86,19
		BELANJA MODAL	210.664.958.024,00	198.985.656.996,00	94,46	268.238.445.935,00	242.244.490.970,00	90,31	225.782.950.672,99	208.338.835.019,00	92,27
		Belanja Modal Tanah	16.824.346.475,00	11.799.025.000,00	70,13	19.001.691.056,00	17.517.606.638,00	92,19	1.027.550.000,00	868.644.710,00	84,54
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.479.473.649,00	44.636.100.255,00	96,03	65.659.468.142,00	61.779.529.496,00	94,09	84.872.779.649,99	80.193.751.524,00	94,49
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.200.695.025,00	42.226.068.745,00	93,42	41.378.298.380,00	35.074.950.740,00	84,77	44.388.679.841,00	40.873.287.917,00	92,08
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	98.143.014.675,00	96.391.084.596,00	98,21	136.120.457.794,00	122.291.439.180,00	89,84	91.830.533.924,00	82.491.676.718,00	89,83

NO	URAIAN		2017			2018			2019		
			APBD-P	Realisasi	%	APBD-P	Realisasi	%	APBD-P	Realisasi	%
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.017.428.200,00	3.933.378.400,00	97,91	6.078.530.563,00	5.580.964.916,00	91,81	3.663.407.258,00	3.911.474.150,00	106,77
		Jumlah Belanja Modal	210.664.958.024,00	198.985.656.996,00	94,46	268.238.445.935,00	242.244.490.970,00	90,31	225.782.950.672,99	208.338.835.019,00	92,27
		BELANJA TIDAK TERDUGA	528.744.525,00	222.663,00	0,04	900.000.000,00	126.853.055,00	14,09	1.000.000.000,00	-	-
		Belanja Tidak Terduga	528.744.525,00	222.663,00	0,04	900.000.000,00	126.853.055,00	14,09	1.000.000.000,00	-	-
		Jumlah Belanja Tidak Terduga	528.744.525,00	222.663,00	0,04	900.000.000,00	126.853.055,00	14,09	1.000.000.000,00	-	-
		Jumlah Belanja	875.693.803.004,00	808.098.186.543,34	92,28	963.781.519.756,51	846.529.530.756,31	87,83	992.572.830.275,99	868.360.427.472,46	87,49

NO	URAIAN		2020			2021			2022		
			APBD-P	Realisasi	%	APBD-P	Realisasi	%	APBD-P	Realisasi	%
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		BELANJA	949.313.862.360,17	847.117.697.822,13	89,23	1.150.501.148.309,00	1.053.654.087.067,98	91,58	939.731.374.421,00	852.462.710.625,46	90,71
		BELANJA OPERASIONAL	727.284.532.517,46	645.302.413.887,13	88,73	752.273.565.899,00	680.259.287.014,48	90,43	766.872.831.206,00	709.460.637.103,12	92,51
		Belanja Pegawai	429.292.604.995,07	376.546.299.363,00	87,71	426.879.015.990,00	391.236.295.267,50	91,65	387.153.901.571,00	356.894.230.162,00	92,18
		Belanja Barang dan Jasa	244.196.128.505,39	218.699.777.341,13	89,56	295.578.082.168,00	267.408.174.803,98	90,47	330.669.341.216,00	306.675.838.041,12	92,74
		Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	915.366.000,00	-	-

NO	URAIAN		2020			2021			2022		
			APBD-P	Realisasi	%	APBD-P	Realisasi	%	APBD-P	Realisasi	%
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Belanja Hibah	51.971.251.017,00	48.441.241.183,00	93,21	25.995.834.961,00	18.462.010.520,00	71,02	45.510.622.419,00	44.421.707.100,00	97,61
		Belanja Batuan Sosial	1.824.548.000,00	1.615.096.000,00	88,52	3.820.632.780,00	3.152.806.423,00	82,52	2.623.600.000,00	1.468.861.800,00	55,99
		Jumlah Belanja Operasional	727.284.532.517,46	645.302.413.887,13	88,73	752.273.565.899,00	680.259.287.014,48	90,43	766.872.831.206,00	709.460.637.103,12	92,51
		BELANJA MODAL	182.452.616.815,00	169.584.859.897,00	92,95	387.827.582.410,00	366.764.402.831,50	94,57	167.008.543.215,00	139.864.789.578,34	83,75
		Belanja Modal Tanah	1.481.150.000,00	522.500.000,00	35,28	2.145.000.000,00	44.773.000,00	2,09	16.012.803.449,00	4.887.776.200,00	30,52
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.603.946.015,00	50.376.815.037,00	95,77	52.062.755.457,00	50.882.542.056,50	97,73	35.539.605.960,00	28.556.467.532,00	80,35
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39.430.319.556,00	38.652.346.042,00	98,03	86.408.726.018,00	78.483.345.284,00	90,83	28.697.535.028,00	26.578.905.592,74	92,62
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	85.081.282.435,00	76.671.012.204,00	90,12	243.985.315.784,00	234.222.824.631,00	96,00	81.348.382.656,00	75.303.305.731,60	92,57
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.855.918.809,00	3.362.186.614,00	87,20	3.225.785.151,00	3.130.917.860,00	97,06	5.410.216.122,00	4.538.334.522,00	83,88
		Jumlah Belanja Modal	182.452.616.815,00	169.584.859.897,00	92,95	387.827.582.410,00	366.764.402.831,50	94,57	167.008.543.215,00	139.864.789.578,34	83,75
		BELANJA TIDAK TERDUGA	39.576.713.027,71	32.230.424.038,00	81,44	10.400.000.000,00	6.630.397.222,00	63,75	5.850.000.000,00	3.137.283.944,00	53,63
		Belanja Tidak Terduga	39.576.713.027,71	32.230.424.038,00	81,44	10.400.000.000,00	6.630.397.222,00	63,75	5.850.000.000,00	3.137.283.944,00	53,63
		Jumlah Belanja	39.576.713.027,71	32.230.424.038,00	81,44	10.400.000.000,00	6.630.397.222,00	63,75	5.850.000.000,00	3.137.283.944,00	53,63

NO	URAIAN			2020			2021			2022		
				APBD-P	Realisasi	%	APBD-P	Realisasi	%	APBD-P	Realisasi	%
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Tidak Terduga									
			Jumlah Belanja	949.313.862.360,17	847.117.697.822,13	89,23	1.150.501.148.309,00	1.053.654.087.067,98	91,58	939.731.374.421,00	852.462.710.625,46	90,71

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Singkawang Tahun 2017-2021

Proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Hal tersebut juga terjadi pada komponen belanja Operasional, belanja Modal dan belanja tidak terduga. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan anggaran belanja masih belum optimal karena secara umum penyerapan belanja maupun komponen belanja masih dibawah 90%.

Selain proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja, penting juga melihat proporsi realisasi masing-masing komponen belanja terhadap total belanja. Hal ini diperlukan karena dapat menggambarkan komponen apa saja yang memiliki proporsi paling besar terhadap total belanja. Berikut ini adalah tabel proporsi realisasi komponen belanja terhadap total belanja.

3.2.8. Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Analisis terhadap belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur di Kota Singkawang sangat penting untuk dilakukan. Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui gambaran riil alokasi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Hasil analisis yang diperoleh dapat digunakan untuk menentukan prioritas kebijakan alokasi anggaran ke depan. Berikut ini adalah proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Pemerintah Daerah.

Tabel 3.14. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kota Singkawang Tahun 2019-2021

A. Tahun 2019

No	No Rek	Uraian	Jumlah
1	2.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	273.129.040.127,00
2	2.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	34.221.598.222,00
3	2.1.1.03.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	4.427.400.000,00
4	2.1.1.04.	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	248.265.500,00
5	2.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.273.964.408,00
6	2.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	133.411.500,00
7	2.1.1.07.	Uang Lembur	1.612.786.500,00
8	2.1.1.08.	Belanja Pegawai BLUD	36.550.876.647,00
9	2.1.1.09.	Tambahan Penghasilan PNS	17.527.298.550,00
10	2.1.1.10.	Belanja Pegawai BOS	4.502.620.000,00

No	No Rek	Uraian	Jumlah
11	2.1.2.04.	Belanja Premi Asuransi	7.342.146.000,00
12	2.1.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	326.258.500,00
13	2.1.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.802.384.503,00
14	2.1.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.256.607.965,00
15	2.1.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	818.427.000,00
16	2.1.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	669.963.600,00
17	2.1.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.553.143.600,00
18	2.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.786.803.639,00
19	2.1.2.22.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	407.150.000,00
20	2.1.2.23.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	2.645.739.292,00
21	2.1.2.25.	Honorarium PNS	5.856.273.500,00
22	2.1.2.26.	Honorarium Non PNS	22.018.711.000,00
23	2.1.2.28.	Honorarium Pelayanan Kesehatan	5.879.659.024,00
TOTAL			458.990.529.077,00

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Singkawang Tahun 2019-2021

B. Tahun 2020

No	No Rek	Uraian	Jumlah
1	2.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	263.805.840.221,00
2	2.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	39.838.431.713,00
3	2.1.1.03.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	4.581.600.000,00
4	2.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.196.942.431,00
5	2.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	209.386.500,00
6	2.1.1.07.	Uang Lembur	1.925.720.500,00
7	2.1.1.08.	Belanja Pegawai BLUD	41.037.488.377,00
8	2.1.1.09.	Tambahan Penghasilan PNS	17.281.783.821,00
9	2.1.1.10.	Belanja Pegawai BOS	5.687.003.300,00
10	2.1.2.04.	Belanja Premi Asuransi	6.999.668.998,00
11	2.1.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	359.102.800,00
12	2.1.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.670.501.750,00
13	2.1.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.425.114.450,00
14	2.1.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	763.312.000,00
15	2.1.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	634.821.700,00

No	No Rek	Uraian	Jumlah
16	2.1.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	863.986.000,00
17	2.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.019.224.381,00
18	2.1.2.22.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	314.901.770,00
19	2.1.2.23.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.618.815.976,00
20	2.1.2.25.	Honorarium PNS	8.021.012.000,00
21	2.1.2.26.	Honorarium Non PNS	25.248.949.499,00
22	2.1.2.28.	Honorarium Pelayanan Kesehatan	5.672.002.012,00
TOTAL			449.175.610.199,00

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Singkawang Tahun 2019-2021

C. Tahun 2021

No	No Rek	Uraian	Jumlah
1	5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	215.399.978.903,50
2	5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	64.886.063.172,00
3	5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	46.547.897.840,00
4	5.1.01.04.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	14.951.349.024,00
5	5.1.01.05.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	652.759.228,00
6	5.1.01.06.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	801.600.000,00
7	5.1.01.88.	Belanja Pegawai BOS	6.635.056.497,00
8	5.1.01.99.	Belanja Pegawai BLUD	41.361.590.603,00
9	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.736.581.403,00
10	5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	21.158.720,00
11	5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	39.300.000,00
12	5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	202.065.600,00
13	5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	7.370.000,00
14	5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	323.303.269,00
15	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	296.281.774,00
16	5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	59.884.000,00
17	5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	-

No	No Rek	Uraian	Jumlah
18	5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	105.781.020,00
19	5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	9.240.000,00
20	5.1.02.01.01.0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	-
21	5.1.02.01.01.0072	Belanja Pakaian Kerja Bengkel	690.000,00
22	5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	98.860.000,00
23	5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	502.263.000,00
24	5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	226.416.400,00
25	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.447.078.900,00
26	5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	1.316.563.750,00
27	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	3.575.860.400,00
28	5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	11.997.604.564,00
29	5.1.02.02.11.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	169.160.000,00
30	5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.438.581.937,00
31	5.1.02.02.13.	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	269.771.515,00
32	5.1.02.02.14.	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	33.909.292,00
33	5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	20.049.338.764,00
TOTAL			444.163.359.575,50

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Singkawang Tahun 2019-2021

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Pemerintah Kota Singkawang menunjukkan *trend* fluktuatif dan cenderung menurun. Selain analisis terhadap realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, analisis terhadap proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur juga penting untuk dilakukan. Hal ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengeluaran daerah untuk membiayai kebutuhan aparatur. Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dihitung melalui perbandingan total belanja pemenuhan aparatur dengan total pengeluaran daerah. Berikut ini adalah tabel proporsi belanja pemenuhan

aparatur.

Tabel 3. 15. Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Singkawang
Tahun 2019-2021

No	Tahun	Total Belanja Untuk Pemenuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
1	2019	458.990.529.077,00	836.252.420.909,10	54,89
2	2020	449.175.610.199,00	820.804.806.906,34	54,72
3	2021	444.163.359.575,50	863.350.040.755,31	51,45

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Singkawang Tahun 2017-2021

Proporsi belanja pemenuhan aparatur daerah mengalami Penurunan dari tahun ke tahun. Hanya pada tahun 2021 proporsi belanja untuk aparatur mengalami penurunan yang signifikan, Hal ini menunjukkan bahwa porsi belanja untuk pembangunan dan masyarakat di daerah mengalami peningkatan.

3.2.9. Analisis Pembiayaan Daerah

Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah tahun sebelumnya atau periode sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah. Hal ini dilakukan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa akan datang dan untuk menghitung kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis pembiayaan dilakukan melalui analisis realisasi SiLPA, analisis defisit, analisis sumber penutup defisit riil, analisis realisasi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), dan analisis sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan.

3.2.10. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kondisi yang mempengaruhi pelaksanaan APBD ke depan. Berikut ini adalah hasil analisis sumber penutup defisit riil.

Tabel 3. 16. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pendapatan Daerah	879.090.770.463,79	920.008.487.061,04	826.117.163.781,80	886.643.880.118,39	940.121.752.620,75
	Dikurangi realisasi :					
2.	Belanja Daerah	846.529.530.756,31	868.360.427.472,46	847.117.697.822,13	1.053.654.087.067,98	852.462.710.625,46
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	16.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	28.188.994.184,00
A.	Defisit Riil	16.561.239.707,48	43.648.059.588,58	-29.000.534.040,33	-175.010.206.949,59	59.470.047.811,29
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan :					
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	28.776.916.747,51	44.507.732.637,59	87.356.265.903,17	57.448.314.122,84	76.881.004.544,18
2	Pencairan Dana Cadangan					
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	
4	Penerimaan Pinjaman Daerah				194.445.949.708,93	
5	Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman Daerah					
6	Penerimaan Piutang Daerah					
B.	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	28.776.916.747,51	44.507.732.637,59	87.356.265.903,17	251.894.263.831,77	
A+B	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	45.338.156.454,99	88.155.792.226,17	58.355.731.862,84	76.884.056.882,18	136.351.052.355,47

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Singkawang Tahun 2018-2022

Hasil perhitungan analisis penutup defisit di atas, menunjukkan bahwa sumber penutup defisit keuangan daerah Kota Singkawang masih berasal dari SiLPA. Hal ini menunjukkan bahwa SiLPA memiliki peran yang signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Setelah mengetahui sumber penutup defisit utama, kemudian hasil perhitungan tersebut digunakan untuk menghitung komposisi penutup defisit riil Kota Singkawang. Berikut ini adalah tabel komposisi penutup defisit riil Kota Singkawang.

Tabel 3.17 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Proporsi dari Total Defisit Riil (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	5	6	7	8	
A	Defisit Riil	16.561.239.707,48	43.648.059.588,58	-29.000.534.040,33	-175.010.206.949,59	59.470.047.811,29
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	28.776.916.747,51	44.507.732.637,59	87.356.265.903,17	57.448.314.122,84	76.881.004.544,18
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	194.445.949.708,93	-
5	Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
7.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	45.338.156.454,99	88.155.792.226,17	58.355.731.862,84	76.884.056.882,18	136.351.052.355,47

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Singkawang Tahun 2018-2022

Dari tahun 2018 hingga 2022, defisit riil Kota Singkawang berada pada tahun 2020 dan 2021. Defisit riil ini ditutup oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa SiLPA memiliki posisi yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Singkawang.

3.3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah selama beberapa tahun ke depan. Kerangka pendanaan ini dirancang secara efisien untuk mencapai tujuan pembangunan yang efektif, baik dalam konteks kinerja maupun efisiensi anggaran. Struktur APBD yang digunakan dalam sub bab ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sementara itu, teknik yang digunakan dalam memproyeksi APBD Kota Singkawang adalah teknik peramalan (*Forecasting*). Teknis peramalan adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang apa yang akan terjadi pada masa mendatang berdasarkan informasi pada masa lalu dan sekarang yang dimiliki agar kesalahan dapat diminimalisir. Teknik ini tidak memberikan informasi secara pasti, namun berusaha mencari pendekatan tentang apa yang akan terjadi sehingga dapat menentukan kebijakan yang terbaik.

3.3.1. Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang

Proyeksi APBD Kota Singkawang untuk beberapa tahun ke depan mempertimbangkan beberapa kondisi, sebagai berikut; *pertama*, *trend* rata-rata pertumbuhan, proporsi, dan tingkat realisasi masing-masing komponen APBD pada periode sebelumnya dan APBD murni tahun 2023; *kedua*, melihat potensi perkembangan perekonomian mikro dan makro (tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi) dan adanya perubahan kebijakan pemerintah, khususnya yang berimplikasi pada APBD.

Proyeksi APBD Kota Singkawang menggunakan *baseline* APBD murni tahun 2023.

Berikut ini adalah proyeksi APBD Kota Singkawang tahun 2023-2026.

Tabel 3.18 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026

NO	URAIAN			REALISASI (Rp.)				RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
				Baseline APBD Murni 2023	2024	2025	2026	
1	2			3	4	5	6	7
	PENDAPATAN			922.493.952.280,00	1.017.888.806.555,00	1.049.313.331.352,11	1.107.106.766.560,68	7,46
		PENDAPATAN ASLI DAERAH		211.421.219.810,00	232.961.578.881,40	270.379.005.390,43	305.974.556.222,09	15
			Pendapatan Pajak Daerah	73.500.000.000,00	80.850.000.000,00	88.935.000.000,00	97.828.500.000,00	15
			Hasil Retribusi Daerah	8.504.958.296,00	9.355.454.125,60	10.290.999.538,16	11.320.099.491,98	15
			Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.964.741.812,00	9.159.453.083,80	10.533.371.046,37	12.113.376.703,33	15
			Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	121.451.519.702,00	133.596.671.672,00	160.619.634.805,90	184.712.580.026,78	15
		PENDAPATAN TRANSFER		711.072.732.470,00	784.927.227.673,60	778.934.325.961,68	801.132.210.338,59	5
			Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	643.877.047.000,00	714.371.757.930,00	704.851.082.731,00	723.344.804.946,38	5
			Pendapatan Transfer Antar Daerah	67.195.685.470,00	70.555.469.743,60	74.083.243.230,68	77.787.405.392,21	5

NO	URAIAN			REALISASI (Rp.)				RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
				Baseline APBD Murni 2023	2024	2025	2026	
1	2			3	4	5	6	7
	BELANJA			908.552.523.709,00	998.947.377.984,00	1.030.371.902.780,93	1.088.165.337.990,12	7,41
		BELANJA OPERASIONAL		761.328.025.879,00	834.827.367.819,00	878.089.265.542,47	894.542.442.565,34	6,98
			Belanja Pegawai	416.139.246.336,00	447.705.577.512,00	480.807.285.216,61	528.888.013.738,28	8,33
			Belanja Barang dan Jasa	306.588.250.258,00	322.270.852.678,00	336.209.360.950,15	336.270.997.077,01	5,33
			Belanja Hibah	37.047.909.285,00	63.143.055.629,00	59.193.949.175,71	27.316.894.530,05	5
			Belanja Batuan Sosial	1.552.620.000,00	1.707.882.000,00	1.878.670.200,00	2.066.537.220,00	10
		BELANJA MODAL		143.224.497.830,00	153.785.980.557,00	166.069.730.736,94	179.427.113.538,70	7,8
			Belanja Modal Tanah	417.173.000,00	438.031.650,00	481.834.815,00	530.018.296,50	8,33
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.796.903.552,00	23.936.748.729,00	25.133.586.166,08	26.390.265.474,38	5
			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.152.579.839,00	37.960.208.830,00	39.858.219.272,50	41.851.130.236,12	5
			Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	79.263.423.439,00	86.397.131.548,00	95.036.844.703,36	104.540.529.173,70	9,67

NO	URAIAN			REALISASI (Rp.)				RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
				Baseline APBD Murni 2023	2024	2025	2026	
1	2			3	4	5	6	7
			Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.594.418.000,00	5.053.859.800,00	5.559.245.780,00	6.115.170.358,00	10
		BELANJA TIDAK TERDUGA		4.000.000.000,00	10.334.029.608,00	13.787.093.498,48	14.195.781.886,08	64,91
			Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	10.334.029.608,00	13.787.093.498,48	14.195.781.886,08	64,91
	SURPLUS / (DEFISIT)			13.941.428.571,00	18.941.428.571,00	18.941.428.571,18	18.941.428.570,56	11,95
	PEMBIAYAAN			-13.941.428.571,00	-18.941.428.571,00	-18.941.428.571,00	-18.941.428.571,00	11,95
		PENERIMAAN PEMBIAYAAN		20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0
			Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0
		PENGELUARAN PEMBIAYAAN		33.941.428.571,00	38.941.428.571,00	38.941.428.571,00	38.941.428.571,00	4,91

NO	URAIAN			REALISASI (Rp.)				RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
				Baseline APBD Murni 2023	2024	2025	2026	
1	2			3	4	5	6	7
			Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	33,33
			Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	28.941.428.571,00	28.941.428.571,00	28.941.428.571,00	28.941.428.571,00	0
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah tahun Berkenaan			-	-	0	- 0	

Sumber : BKD Kota Singkawang, 2023

Proyeksi pendapatan daerah Kota Singkawang mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,46 persen dari tahun 2023 hingga 2026. Komponen pendapatan daerah yang memiliki kontribusi yang paling tinggi adalah seluruh komponen pendapatan asli daerah. Asumsi peningkatan ini adalah dengan mempertimbangkan pada pertumbuhan ekonomi daerah yang diproyeksikan meningkat pada tahun 2023 hingga 2026. Sementara untuk pendapatan transfer diproyeksikan meningkat sekitar 5 persen pada setiap tahunnya.

Untuk mencapai target-target pendapatan daerah tahun 2023-2026, terutama PAD yang notabene kewenangan daerah, maka upaya atau kebijakan yang dilakukan adalah peningkatan kapasitas pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD. Upaya intensifikasi melalui strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak;
2. Penguatan data objek pajak;
3. Peningkatan *punishment* dan *reward* terhadap subjek pajak;
4. Optimalisasi objek retribusi daerah;
5. Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah penghasil;
6. Peningkatan pelayanan pajak berbasis digital;

Sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan melalui strategi:

1. Peningkatan kontribusi BUMD terhadap PAD;
2. Optimalisasi aset-aset daerah yang potensial dalam mendukung investasi daerah;

Belanja daerah Kota Singkawang disusun berdasarkan pendekatan anggaran berbasis kinerja, memperhatikan prioritas pembangunan daerah, permasalahan pembangunan daerah, dan memperkirakan situasi dan kondisi di masa mendatang. Berangkat dari hal tersebut, maka proyeksi rata-rata pertumbuhan belanja daerah sebesar 7,41 persen atau masih lebih rendah dari proyeksi pendapatan daerah di atas. Hal ini terjadi karena kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah lebih bersifat ekspansi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah ke depan dan kondisi yang dihadapi saat ini. Komponen belanja daerah yang meningkat paling

tinggi adalah belanja tidak terduga diikuti belanja modal dan belanja operasional.

Berangkat dari hal tersebut maka kebijakan belanja daerah tahun 2023-2026 diarahkan untuk:

1. Program-program yang langsung mendukung permasalahan daerah, seperti kemiskinan, pengangguran, kualitas SDM, serta ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana;
2. Memenuhi program-program prioritas dan isu strategi Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026;
3. Memenuhi belanja wajib terutama yang berkaitan dengan pemenuhan capaian pada standar pelayanan minimum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Mengoptimalkan alokasi belanja daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemilihan kepala daerah serentak dan sebagainya.

Proyeksi pembiayaan daerah mengalami pertumbuhan sebesar 11,95 persen. Untuk penerimaan daerah tidak mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2023 hingga 2026, sumber penerimaan pembiayaan hanya berasal dari SiLPA.

Sementara pembiayaan daerah hanya dialokasikan untuk penyertaan modal dalam rangka untuk memenuhi kewajiban penyertaan modal BUMD.

3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Pembahasan sub bab ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah dan rencana penggunaannya dalam beberapa tahun ke depan. Dalam menghitung kapasitas riil kemampuan daerah, sebelumnya harus diuraikan terlebih dahulu mengenai proyeksi pengeluaran wajib dan mengikat. Adapun proyeksi pengeluaran wajib dan mengikat daerah adalah sebagai berikut.

3.3.3. Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Proyeksi terhadap pengeluaran yang bersifat mengikat dan wajib penting untuk dilakukan sebagai bahan untuk menghitung kerangka pendanaan dalam membiayai pembangunan daerah beberapa tahun ke depan. Berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa. Sementara belanja yang bersifat wajib adalah alokasi anggaran atau belanja untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pemilihan kepala daerah, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah proyeksi belanja yang bersifat mengikat dan wajib daerah.

Tabel 3.19. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat
Kota Singkawang Tahun 2022-2026

No	Uraian	Proyeksi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	8	9	10	11	12	13
A.	Belanja Wajib dan mengikat	605.927.071.822,00	680.472.138.698,12	698.704.973.629,35	714.554.339.369,77	733.663.038.822,98	4,90
	Urusan Wajib dasar	538.371.987.325,00	603.846.476.241,60	623.955.214.981,09	643.003.964.349,59	664.286.534.031,96	5,39
1	Pendidikan	205.528.529.603,00	218.563.902.775,00	229.492.097.913,75	240.420.293.052,50	252.441.307.705,13	5,27
2	Kesehatan	222.123.211.574,00	265.253.709.983,67	273.672.680.813,38	282.091.651.643,10	290.510.622.472,81	6,94
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	79.424.064.229,00	80.254.075.229,00	82.424.064.300,00	83.534.064.000,00	85.785.064.500,00	1,94
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	16.839.882.686,00	19.291.497.876,27	17.402.676.262,44	15.513.854.648,61	13.625.033.034,78	-5,16
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9.900.773.509,00	15.641.798.688,73	16.418.965.998,42	17.196.133.308,10	17.973.300.617,79	16,08
6	Sosial	3.648.107.907,00	3.934.073.794,93	3.637.311.722,10	3.340.549.649,28	3.043.787.576,45	-4,43
7	Kesatuan Bangsa Politik dan Dalam Negeri	907.417.817,00	907.417.894,00	907.417.971,00	907.418.048,00	907.418.125,00	-
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	67.555.084.497,00	76.625.662.456,52	74.749.758.648,25	71.550.375.020,19	69.376.504.791,03	0,67

No	Uraian	Proyeksi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	8	9	10	11	12	13
1	Tenaga Kerja	231.328.420,00	231.428.420,00	232.328.420,00	241.328.420,00	251.328.420,00	2,09
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	189.999.000,00	341.391.636,49	371.438.163,51	401.484.690,54	431.531.217,57	22,76
3	Pangan	599.250.000,00	611.235.000,00	623.459.700,00	635.928.894,00	648.647.471,88	2,00
4	Pertanahan	1.446.636.100,00	2.476.875.446,87	2.802.982.417,21	3.129.089.387,55	3.455.196.357,90	24,32
5	Lingkungan Hidup	19.873.426.720,00	21.296.413.575,27	21.946.823.503,44	21.265.409.117,82	21.608.258.747,23	2,11
6	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.224.267.503,00	4.723.864.992,33	4.492.497.081,62	4.261.129.170,90	4.029.761.260,19	-1,17
7	Pengendalian Penduduk dan KB	2.288.242.900,00	2.496.862.734,33	2.597.544.046,76	2.698.225.359,19	2.798.906.671,62	5,17
8	Perhubungan	12.464.457.720,00	14.099.842.775,13	12.319.300.677,22	10.538.758.579,31	8.758.216.481,39	-8,44
9	Komunikasi dan Informatika	6.679.102.009,00	7.527.790.777,20	6.906.347.801,69	6.284.904.826,17	5.663.461.850,66	-4,04
10	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.570.145.807,00	8.631.157.454,20	9.139.311.693,97	9.647.465.933,74	10.155.620.173,51	7,62
11	Penanaman Modal	6.731.364.700,00	8.617.318.201,00	8.925.438.663,00	9.233.559.125,00	9.541.679.587,00	9,11

No	Uraian	Proyeksi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	8	9	10	11	12	13
12	Kepemudaan dan Olahraga	1.626.117.840,00	1.698.799.586,47	640.353.377,27	(418.092.831,93)	(1.476.539.041,13)	-
13	Statistik	174.455.200,00	238.943.987,50	277.834.120,00	316.724.252,50	355.614.385,00	19,49
15	Persandian	36.053.500,00	67.455.700,00	98.857.900,00	130.260.100,00	161.662.300,00	45,52
16	Kebudayaan	130.497.800,00	17.429.980,00	(141.846.211,43)	(301.122.402,86)	(460.398.594,29)	-
17	Perpustakaan	3.247.863.678,00	3.543.240.622,27	3.533.983.815,15	3.524.727.008,04	3.515.470.200,92	2,00
18	Kearsipan	41.875.600,00	5.611.567,47	(16.896.521,16)	(39.404.609,79)	(61.912.698,42)	-
C.	Pengeluaran Pembiayaan	64.241.428.571,00	28.941.428.571,00	28.941.428.571,00	28.941.428.571,00	28.941.428.571,00	-18,07
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah/Cicilan Pokok Utang	64.241.428.571,00	28.941.428.571,00	28.941.428.571,00	28.941.428.571,00	28.941.428.571,00	-18,07
TOTAL BELANJA DAN PENGELUARAN WAJIB DAN MENGIKAT		670.168.500.393,00	709.413.567.269,12	727.646.402.200,35	743.495.767.940,77	762.604.467.393,98	3,28

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Singkawang Tahun 2017-2021

Proyeksi belanja yang bersifat wajib dan mengikat mengalami peningkatan setiap tahun dengan rata-rata pertumbuhan, yaitu sebesar 3,28 persen. Sementara untuk belanja wajib dasar mengalami peningkatan sebesar 5,39 persen. Prioritas pada urusan Kesehatan dan Pendidikan dipergunakan untuk menangani kasus Covid-19.

3.3.4. Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah bertujuan untuk mengetahui gambaran kemampuan riil keuangan daerah yang akan dimiliki untuk membiayai pembangunan Daerah untuk 1 (satu) periode ke depan. Perhitungan kapasitas riil keuangan daerah dilakukan dengan mengurangi penerimaan daerah dengan pengeluaran wajib dan mengikat serta pengeluaran pembiayaan. Penggunaan komponen pengeluaran wajib dan mengikat dalam perhitungan kapasitas riil keuangan daerah, yaitu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berikut ini adalah proyeksi kapasitas riil keuangan Daerah ke depan.

Tabel 3.20. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2022-2026

No	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	869.438.000.395,00	885.360.539.772,84	906.873.775.441,77	929.912.473.705,97	959.757.419.770,91
2	Pencairan Dana Cadangan					
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	76.884.056.882,18	76.884.056.882,18	76.884.056.882,18	76.884.056.882,18	76.884.056.882,18
	Total Penerimaan	946.322.057.277,18	962.244.596.655,02	983.757.832.323,95	1.006.796.530.588,15	1.036.641.476.653,09
	Dikurangi					
4	Pengeluaran Wajib yang Mengikat	670.168.500.393,00	709.413.567.269,12	727.646.402.200,35	743.495.767.940,77	762.604.467.393,98
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan		276.153.556.884,18	252.831.029.385,90	256.111.430.123,60	263.300.762.647,38	274.037.009.259,11

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Singkawang Tahun 2017-2021

Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dalam 1 (satu) periode ke depan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan kapasitas riil kemampuan Keuangan Daerah mengalami berjalan fluktuatif dan cenderung menurun.

3.3.5. Kebijakan Alokasi Anggaran

Kebijakan alokasi anggaran merupakan rencana penggunaan kapasitas riil kapasitas Keuangan Daerah selama 1 (satu) periode ke depan. Rencana penggunaan kapasitas riil keuangan daerah tersebut dibagi ke dalam 2 (dua) prioritas penggunaan anggaran. Berikut ini adalah tabel rencana penggunaan kapasitas riil Keuangan Daerah.

Tabel 3.21. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2022-2026

No	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	946.322.057.277,18	962.244.596.655,02	983.757.832.323,95	1.006.796.530.588,15	1.036.641.476.653,09
2	Prioritas I	670.168.500.393,00	709.413.567.269,12	727.646.402.200,35	743.495.767.940,77	762.604.467.393,98
3	Prioritas II	276.153.556.884,18	252.831.029.385,90	256.111.430.123,60	263.300.762.647,38	274.037.009.259,11

Rencana penggunaan kapasitas riil Keuangan Daerah ke depan di bagi ke dalam 2 (dua) prioritas, sebagai berikut:

1. Prioritas I, yaitu dialokasikan untuk membiayai pengeluaran wajib dan mengikat serta pemenuhan pelayanan dasar;
2. Prioritas II, yaitu dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Alokasi anggaran untuk prioritas II tidak termasuk dalam membiayai anggaran pada komponen prioritas I yang terkait dengan belanja wajib, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang alokasinya telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pengulangan dalam kebijakan alokasi anggaran Daerah.

BAB IV

PERMASALAHAN

DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara yang akan dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sebagaimana uraian pada Bab II, kinerja pembangunan Daerah di satu sisi telah memunculkan outcome yang bermanfaat kepada masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan, serta memenuhi target kinerja, namun di sisi lain masih terdapat beberapa capaian pembangunan yang belum memenuhi target dan belum tercipta outcome yang optimal bagi pemangku kepentingan. Kesenjangan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, sehingga penyusunan permasalahan pembangunan daerah disusun menggunakan metode analisis pohon masalah. Dalam metode ini permasalahan diklasifikasikan ke dalam tiga level yang memiliki hubungan kausalitas atau sebab-akibat, yaitu masalah pokok, masalah dan akar masalah. Klasifikasi ini pada tahap selanjutnya akan membantu dalam perumusan intervensi pembangunan mulai dari tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan.

4.1.1. Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Terkait Pelayanan Dasar

4.1.1.1. Pendidikan

Pelaksanaan urusan pendidikan masih berhadapan dengan dengan masalah pokok yaitu belum optimalnya akses dan kualitas pendidikan terutama pada tingkat dasar dan menengah. Penyebab utamanya adalah berkaitan dengan menurunnya partisipasi pendidikan pada tingkat PAUD. Pada tingkat PAUD, akar masalah yang paling menonjol adalah standardisasi pelaksanaan sekolah PAUD yang belum maksimal. Selama ini, pelaksanaan pendidikan tingkat PAUD sebagian besar dilaksanakan oleh pihak non pemerintah. Pada saat yang sama, proses penyediaan sarana dan prasarana serta standardisasi pendidikan oleh dinas belum maksimal.

Tabel 4. 1.
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya akses dan kualitas pendidikan tingkat dasar dan menengah	Belum optimalnya partisipasi pendidikan pada tingkat PAUD	Belum maksimalnya koordinasi dengan sekolah-sekolah PAUD non-pemerintah
		Standardisasi penyelenggaraan PAUD belum terlaksana sesuai standar nasional.
		Kurangnya dorongan pemerintah dalam mendorong partisipasi pendidikan PAUD
		Belum optimalnya ketersediaan alat peraga pendidikan tingkat PAUD (alat permainan edukatif,
		Belum optimalnya gedung sekolah PAUD yang memadai
	Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan	Belum optimalnya penerapan pembelajaran berbasis digital
	Belum optimalnya sarana dan prasarana pendidikan tingkat SD dan SMP	Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan tingkat SD
		Masih adanya sarana pendidikan tingkat SMP yang perlu diperbaharui
		Belum optimalnya upaya pengintegrasian data siswa antara sekolah dan dinas
	Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pendidikan kesetaraan	Cakupan ketersediaan sekolah kesetaraan belum merata
		Belum optimalnya diversifikasi kompetensi pada sekolah penyetaraan

4.1.1.2. Kesehatan

Urusan kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah. Kondisi kesehatan masyarakat menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di suatu daerah, mengingat urusan kesehatan menjadi salah satu komponen yang menunjang ketercapaian Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) baik dilevel daerah maupun nasional. Upaya pembangunan dalam bidang kesehatan di Kota Singkawang masih menyisakan beberapa permasalahan umum seperti kematian ibu, kematian bayi, penanganan gizi buruk dan penanganan stunting. Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang kesehatan di Kota Singkawang.

Tabel 4. 2.
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat	Masih adanya balita dengan status gizi buruk dan stunting	Belum optimalnya pengetahuan masyarakat terhadap pemenuhan gizi anak
	Masih adanya Angka Kematian Ibu (AKI)	Deteksi dini hipertensi dalam kehamilan belum optimal
		Rendahnya sosialisasi kepada ibu hamil
		Sistem rujukan dan jaringan rujukan belum optimal
	Masih adanya Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup, Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) per 1.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Balita per 1.000	Rendahnya promosi kesehatan konseling gizi
		Rendahnya konseling gizi ibu hamil, anemia dan KEK
		Masih adanya Bayi Berat Lahir Rendah
		Sistem rujukan dan jaringan rujukan belum optimal
	Masih adanya temuan penyakit menular (TBC, dll)	Rendahnya koordinasi lintas sektor
		Belum optimalnya pemenuhan gizi
		Kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri masih perlu ditingkatkan
	Masih tingginya angka prevalensi penyakit tidak menular (Hipertensi, Diabetes Melitus, Diare, polio dll)	Belum optimalnya pola hidup sehat masyarakat
		Belum optimalnya deteksi dini penyakit tidak menular

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum optimalnya pelayanan di fasilitas Kesehatan	Masih kurangnya ketersediaan dan kompetensi tenaga Kesehatan
		Belum optimalnya peran swasta dalam pembangunan Kesehatan
		Rendahnya Rasio Posyandu per 100 Balita
		Rendahnya mutu pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 100.000 penduduk

4.1.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kota Singkawang masih dihadapkan pada tiga permasalahan pokok berkaitan dengan kualitas infrastruktur dasar, air bersih, dan tata ruang. Kualitas infrastruktur dasar belum optimal sehingga masih memerlukan intervensi untuk jaringan irigasi, dan drainase yang diperlukan untuk penanganan/pengendalian banjir. Begitu juga pembangunan maupun peningkatan jalan sebagai salah satu pendongkrak perekonomian masyarakat. Masyarakat Kota Singkawang juga masih dihadapkan pada terbatasnya akses pada air bersih di beberapa wilayah. Jika ditelusuri lebih lanjut, maka ditemukan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh belum optimalnya jaringan air bersih dan belum optimalnya identifikasi sumber air.

Tabel 4. 3.
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas infrastruktur dasar	Belum optimalnya penyelenggaraan jalan	Masih adanya jalan dengan kualitas rendah
	Belum optimalnya kualitas jaringan irigasi	Belum optimalnya pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum optimalnya kualitas jaringan drainase/irigasi	belum adanya masterplan pembangunan drainase/irigasi
		belum tersedianya data yang valid terkait kondisi drainase
Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap air baku	Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana air minum	Belum optimalnya pembangunan jaringan air bersih
Masih adanya pelanggaran tata ruang	Belum optimalnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Masih kurangnya pemahaman atas aturan- aturan yang berlaku tentang rencana tata ruang Kota
Belum optimalnya akses terhadap sanitasi layak	Belum optimalnya ketersediaan sanitasi layak	Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah
		Masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya sanitasi sehat dan layak

4.1.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman masih mengalami permasalahan dalam hal pemenuhan rumah yang layak huni dan masih adanya kawasan kumuh yang belum tertangani. Data pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan bahwa adanya peningkatan Cakupan ketersediaan rumah layak huni dengan tingkat capaian sebesar 97,91%. Namun untuk kawasan kumuh di Kota Singkawang, data menunjukkan dari total kawasan kumuh hanya tertangani sekitar 57,33 % pada tahun 2022. Tantangan dalam urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman antara lain:

Tabel 4. 4.
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur prasarana sarana Dasar (PSD)	Terbatasnya akses prasaranan dan sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana, Utilitas	Belum optimalnya pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan permukiman kumuh, adanya beerapa

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
dan Prasarana Sarana, Utilitas Umum (PSU) di kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh.	Umum (PSU)	perkembangan kawasan perumahan permukiman yang berpotensi menjadi Slum area (kumuh baru)
		Belum optimalnya fasilitas rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
		Masih kurangnya akses terhadap sanitasi layak
		Masih kurangnya akses terhadap air bersih
	Belum optimalnya kualitas lingkungan permukiman	Belum optimalnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat dan menjaga lingkungan permukiman agar tidak kumuh

4.1.1.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan kondusivitas wilayah di Kota Singkawang, beberapa upaya telah dilakukan antara lain peningkatan kualitas demokrasi, ketertiban umum, pendidikan politik, menjaga kerukunan antar umat beragama serta penanggulangan bencana. Pada aspek persentase penegakan produk hukum di Kota Singkawang, terjadi peningkatan setiap tahunnya. Upaya peningkatan penegakan produk hukum selama ini terkendala pada belum optimalnya sinergi kewenangan dan koordinasi antar instansi terkait. Berikut adalah rumusan permasalahan terkait urusan Ketenteraman Ketertiban Umum di Kota Singkawang.

Tabel 4. 5.
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum maksimalnya penegakan produk hukum (Reklame dan PKL)	Belum adanya sinergi kewenangan antar Perangkat Daerah	Kurangnya koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas penanganan bencana	Belum optimalnya upaya efektivitas pencegahan, mitigasi dan penanggulangan bencana	Belum optimalnya pengembangan sistim informasi kebencanaan
		Belum memadainya kapasitas Pendidikan dan pelatihan SDM Kebencanaan
		Belum memadainya ketersediaan peralatan dan logistik Kebencanaan

4.1.1.6. Sosial

Urusan kesejahteraan sosial merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing Pemerintah Daerah. Urusan kesejahteraan sosial dicapai melalui penyelenggaraan pelayanan sosial yang terdiri dari 4 pilar yaitu perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan masyarakat. Secara umum Kota Singkawang sudah melaksanakan fungsi pelayanan sosial, namun upaya tersebut masih perlu untuk ditingkatkan. Dilihat dari persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari 5,12 % pada tahun 2018 menjadi 4,67% pada tahun 2022. Begitu juga mengenai jumlah penduduk miskin menurun dari 11,16 ribu pada tahun 2018 menjadi 10,82 ribu orang.

Jenis PPKS paling banyak di Daerah diantaranya keluarga miskin, wanita korban kekerasan, tuna tubuh, lanjut usia terlantar, anak terlantar, balita terlantar dan sebagainya. Artinya masih perlu upaya peningkatan cakupan pelayanan PPKS untuk periode selanjutnya.

Tabel 4. 6.
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Sosial

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pelayanan sosial pada	Belum optimalnya pengelolaan data PPKS	Validitas DTKS yang masih belum optimal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
PPKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)		Belum optimalnya peranan stakeholder di tingkat kelurahan dalam verifikasi dan validasi data
		Belum sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial non pemerintah
		belum tersedianya akses informasi satu data PPKS
		belum tersedianya data kemiskinan versi daerah
	belum optimalnya pelayanan rehabilitasi sosial dan linjamsos dasar secara menyeluruh terhadap PPKS	pelayanan administrasi kependudukan bagi PPKS/PSKS yang belum terakses dengan baik
		kurangnya sosialisasi tentang administrasi kependudukan bagi PPKS
		belum terpenuhinya kebutuhan dasar pelayanan rehabilitasi sosial bagi PPKS antara lain pangan, sandang, alat bantu dan aksesibilitas lainnya
		terbatasnya SDM dan Sarpas dalam melakukan rehabilitasi sosial
		keterbatasan LKS yang memberikan pelayanan Rehsos
		Belum sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial lainnya dalam rehsos
		belum terpenuhinya pelayanan bimbingan mental, fisik, spritual dan sosial terhadap PPKS maupun Keluarga PPKS
		terbatasnya pelayanan pengadauan dan data PPKS
		belum optimalnya penjangkauan, kedarutan dan penelusuran keluarga PPKS

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		belum adanya kerjasama secara formal antara pemerintah daerah dengan pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial
		belum optimalnya penanganan kebencanaan bagi masyarakat
		terbatasnya SDM dan Sarpas dalam melakukan penanganan kebencanaan
		belum terpenuhinya kebutuhan dasar penanganan kebencanaan antara lain pangan, sandang, alat bantu dan aksesibilitas lainnya
		Belum sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial lainnya dalam penanganan kebencanaan
		belum optimal penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana
	belum optimalnya pemberdayaan sosial PPKS/PPKS	kurang pelatihan kewirausahaan bagi PPKS
		belum tersedianya modal usaha bagi PPKS
		Belum sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial lainnya dalam pemberdayaan sosial
	belum optimalnya peran PSKS (potensi sumber kesejahteraan sosial) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	kurangnya pengembangan kapasitas PSKS
		minimnya pengetahuan PSKS dalam menangani permasalahan sosial
		Minimnya ketrampilan dan keahlian dalam penanganan penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		kurangnya PSKS dalam melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial
		minimnya perekrutan tenaga terampil (pekerja sosial profesional)
		belum terkoordinasinya atau tercatat secara administrasi para pengiat masalah kesejahteraan sosial
		kurangnya penghargaan bagi mereka pengiat masalah kesejahteraan sosial
	Belum optimalnya pengumpulan sumbangan dalam daerah untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang tata cara pengumpulan sumbangan untuk kesejahteraan sosial
		Belum tersedianya aturan daerah tentang pengumpulan sumbangan
	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam menghargai jasa-jasa para pahlawan	Kurangnya situs-situs yang memberikan informasi mengenai para pahlawan
Belum Optimalnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Rendahnya Kesadaran Masyarakat dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

4.1.2. Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar

4.1.2.1. Tenaga Kerja

Kondisi ketenagakerjaan di Kota Singkawang masih belum optimal khususnya dalam serapan tenaga kerja. Data pada tahun 2022 berdasarkan data Singkawang Dalam BPS menunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Singkawang sebesar 68,86%. Hal tersebut dari 100 penduduk Kota Singkawang yang berumur 15 tahun ke atas, terdapat 68 sampai 69 orang tersedia untuk melakukan produksi. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka di Kota Singkawang pada tahun 2022 sebesar 8,63%.

Adapun kualifikasi tenaga kerja yang sedang bekerja pada tahun 2022 didominasi oleh lulusan setara SD sebesar 43,97%, SMP 11,52%, SMK/SMA 29,33%, dan sarjana/diploma 15,18 %. Hal tersebut menunjukkan masih adanya tantangan untuk menyerap penduduk usia kerja agar mampu bekerja serta meningkatkan kualifikasi tenaga kerja. Maka dari itu, ada beberapa tantangan urusan ketenagakerjaan yang perlu diperhatikan yaitu:

Tabel 4. 7.
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Tenaga Kerja

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya serapan tenaga kerja	masih adanya kesenjangan kualifikasi/kompetensi pencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia	Belum tersedianya data yang telah divalidasi dan verifikasi tentang ketersediaan tenaga kerja serta kebutuhan lapangan kerja
		belum adanya kerja sama (MOU) dengan sektor swasta dalam meningkatkan kualitas penyediaan Instruktur dan penempatan kerja bagi yang sudah mengikuti pelatihan
		Belum optimalnya fasilitasi bursa kerja bagi pencari kerja

4.1.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan yang erat kaitannya dengan isu kesetaraan gender dalam program pembangunan nasional. Isu tersebut bertujuan untuk meningkatkan peran dan kualitas hidup perempuan dalam pembangunan. Selain itu, urusan ini memiliki fokus untuk menghapuskan diskriminasi gender serta meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Beberapa indikator yang digunakan untuk melihat kualitas pembangunan daerah yang memperhatikan isu gender adalah Partisipasi angkatan kerja perempuan, partisipasi perempuan di lembaga pemerintah. Selain fokus pemberdayaan perempuan, upaya penanganan kekerasan terhadap anak juga masih perlu ditingkatkan.

Tabel 4.8.
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Belum Adanya RAD KLA	Belum optimalnya data gender dan anak
	belum optimalnya pelibatan Lembaga partisipasi anak	Partisipasi anak belum menjadi arus utama dalam pembangunan.
		Belum optimalnya perlindungan khusus yang mendapatkan pelayanan komprehensif

4.1.2.3. Pangan

Penyelenggaraan urusan pangan di Kota Singkawang masih perlu untuk dioptimalkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah masih adanya daerah rawan pangan meskipun dari sisi cadangan pangan tercukupi. Hal lain adalah keterjangkauan pangan masyarakat tidak merata, belum optimalnya penganeekaragaman pangan lokal yang disebabkan oleh beberapa masalah dan akar masalah. Rincian mengenai permasalahan pembangunan pada bidang urusan pangan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9.
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih belum optimalnya ketahanan pangan daerah	Masih adanya daerah rawan pangan	Belum optimalnya penanganan daerah rawan pangan
		Perlunya data ketersediaan pangan yang akurat
	Keterjangkauan pangan masyarakat tidak merata	Panjangnya rantai pasok dan jaringan distribusi pangan
		Rendahnya akses pangan pada kondisi tertentu
	Belum optimalnya penganekaragaman dan keamanan pangan lokal	Belum optimalnya promosi keanekaragaman pangan lokal kepada masyarakat, pengusaha warung makan dan lembaga umum
		Kurangnya pengelolaan lahan pekarangan untuk diversifikasi tanaman pangan
		Sarana dan prasarana untuk menguji keamanan pangan belum memadai
		Belum terlaksananya sertifikasi uji mutu komoditas beras

4.1.2.4. Pertanahan

Masih terjadinya konflik, sengketa, perkara masalah Pertanahan di wilayah Kota Singkawang terkait pada tata kelola pemanfaatan penggunaan, dan penguasaan tanah seperti belum optimalnya penatagunaan tanah, masih terjadi tumpang tindih alas hak kepemilikan tanah termasuk batas-batas tanah, dan adanya potensi terjadinya konflik di masyarakat terkait penggunaan tanah terhadap aktifitas kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar lokasi, serta belum optimalnya Pengadaan tanah dan penyelesaian ganti kerugian/santunan tanah untuk kepentingan pembangunan yang dapat menimbulkan konflik sengketa perkara pertanahan . Adapun detail pemetaan permasalahan pada bidang urusan pertanahan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 10.
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pertanahan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Pengelolaan pertanahan	Masih belum optimalnya pengelolaan ijin lokasi	Belum tersedianya data base pertanahan
		Belum adanya regulasi dalam bentuk peraturan wali kota tentang ijin membuka tanah negara
	Belum optimalnya redistribusi tanah	Belum tersedianya regulasi, diperlukan perumusan terhadap Perda/Perwako yang mengatur tentang tata kelola pertanahan
	Masih adanya konflik tanah	Belum Optimalnya sosialisasi tentang tata ruang terhadap tata guna lahan pada pola ruang wilayah
		Belum tuntasnya inventarisasi secara menyeluruh terhadap seluruh sebaran tanah kosong
		Belum selesainya (belum tuntas) Pendataan terhadap zonasi nilai tanah dan bangunan di Kota Singkawang
		Belum tersedianya data base pertanahan

4.1.2.5. Lingkungan Hidup

Terciptanya kemajuan daerah dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan merupakan salah satu cita-cita pembangunan. Secara umum, kualitas lingkungan hidup di Kota Singkawang meningkat dari 69,24 Pada tahun 2017 menjadi 73,03 pada tahun 2021. Beberapa permasalahan yang dihadapi pada bidang urusan lingkungan hidup adalah masih rendahnya Indeks Kualitas Air yang mencapai 80,00 pada tahun 2021 dari target sebesar 80,80. Adapun detail permasalahan pembangunan pada bidang urusan lingkungan hidup adalah sebagai berikut.

Tabel 4.11.
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Lingkungan Hidup

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Menurunnya kualitas lingkungan (air, udara, lahan)	Belum maksimalnya pengurangan dan penanganan sampah	Belum maksimalnya upaya pengurangan sampah di masyarakat
		Belum seimbangnya jumlah sarpras yang tersedia dengan jumlah permintaan pelayanan masyarakat
	Belum maksimalnya pengendalian limbah B3	Kurangnya kesadaran sebagian pelaku usaha / kegiatan dalam mengelola limbah B3 yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan
		Belum seimbangnya jumlah sarpras yang tersedia dengan jumlah limbah B3 yang dihasilkan
		Tingginya biaya pengelolaan limbah B3 oleh pihak ketiga
		Sulitnya proses perijinan pengelolaan limbah B3
	Lambatnya proses perijinan LH	Kurangnya kesadaran sebagian pelaku usaha / kegiatan dalam mengelola limbah B3 yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan
		Belum seimbangnya jumlah sarpras yang tersedia dengan jumlah limbah B3 yang dihasilkan
		Tingginya biaya pengelolaan limbah B3 oleh pihak ketiga
		Sulitnya proses perijinan pengelolaan limbah B3
	Lambatnya proses perizinan LH	Perijinan LH yang menjadi kewenangan pemerintah pusat
		Belum maksimalnya sosialisasi dan Bimtek terhadap pelaku usaha

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap proses perijinan LH
	Rendahnya ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan yang terantum dalam dokumen lingkungan	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam meniadakan ketentuan dalam dokumen lingkungan
		Penegakan hukum lingkungan belum terpadu antar bidang urusan
	Masih adanya Pencemaran air	Pembuangan limbah cair langsung ke badan sungai
		Masih terdapatnya pembuangan sampah di badan sungai
		Masih banyaknya aktifitas PETI di hulu sungai
	Masih adanya Pencemaran udara	Masih terdapatnya kebakaran hutan dan lahan
	Masih adanya Pencemaran Tanah	Masih adanya pembuangan limbah B3 cair ke permukaan tanah atau ke badan air
	Kerusakan lingkungan (lahan dan hutan)	Masih banyaknya galian tanah, pasir, batu dan emas tanpa ijin
		Masih terdapatnya kebakaran hutan dan lahan
Perubahan iklim	Alih fungsi lahan	Berkurangnya tutupan lahan
		Belum taatnya terhadap RTRW kota
		Belum maksimalnya penyediaan sarpras RTH

4.1.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sangat erat kaitannya dengan penyediaan data kependudukan yang komprehensif sebagai salah satu basis yang digunakan dalam menentukan arah pembangunan daerah.

Secara umum, kualitas data kependudukan di Kota Singkawang masih belum optimal. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pencatatan pada peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran dan kematian. Selain itu, adanya pemekaran kecamatan di Kota Singkawang juga menjadi tantangan tersendiri.

Tabel 4. 12.
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Belum optimalnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Pemanfaatan data kependudukan belum secara maksimal di manfaatkan oleh instansi/lembaga pengguna
		Keterlambatan pelayanan dalam penerbitan dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Masih rendahnya pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan dari masyarakat, antara lain pelaporan kelahiran, kematian dan perubahan biodata sehingga kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi rendah

4.1.2.7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan lain yang perlu menjadi fokus pembangunan adalah terkait pengendalian penduduk dan pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB). Program KB merupakan salah satu program nasional yang bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, kelahiran anak dan menekan angka kematian ibu. Beberapa permasalahan terkait pengendalian penduduk dan KB di Kota Singkawang adalah terkait partisipasi penduduk dalam program KB yang masih belum optimal walaupun laju pertumbuhan penduduk Kota Singkawang

sudah semakin menurun sejak sepuluh tahun sebelumnya. Adapun pada tahun 2012 laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,91% dan pada tahun 2022 adalah sebesar 1,50 %. Berikut adalah rumusan masalah dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB.

Tabel 4.13.
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya Penyelenggaraan program KB	Angka putus pakai (Drop Out) kontrasepsinya masih tinggi	Pemakaian kontrasepsi jangka panjang masih rendah
	Masih tingginya unmetneed (kebutuhan KB yang tidak terpenuhi)	Persepsi masyarakat terhadap KB masih kurang baik
	Peserta KB aktif belum optimal	Data pencatatan belum optimal
		Masih adanya ketidakpahaman masyarakat tentang KB

4.1.2.8. Perhubungan

Penyelenggaraan urusan perhubungan sangat erat kaitannya dalam upaya menciptakan kenyamanan dan keselamatan transportasi. berkurangnya jumlah barang dan kapal yang masuk ke Singkawang akibat alur yang dangkal sehingga kapal hanya mengandalkan kondisi air laut pasang, hal tersebut merupakan faktor menurunnya minat kapal - kapal yang bersandar di Singkawang. Adapun detail permasalahan pembangunan pada bidang urusan perhubungan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 14.
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perhubungan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kenyamanan dan Keselamatan	Belum optimalnya kualitas pelayanan perhubungan	Belum optimalnya ketersediaan perlengkapan jalan (terutama PJU)

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
transportasi	darat	Belum memadainya pemenuhan fasilitas keselamatan di ruas jalan
	Belum memadainya transportasi umum	Belum optimalnya kualitas prasarana lalu lintas
		Semakin menurunnya armada yang melayani trayek angkutan

4.1.2.9. Komunikasi dan Informatika

Pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika belum maksimal karena pemanfaatan teknologi informasi belum terintegrasi dengan baik. Selain karena sarana pengelolaan jaringan yang belum memadai juga disebabkan oleh jaringan komunikasi dan pengelolaan data yang terintegrasi. Beberapa persoalan berkaitan dengan sarana dan prasarana jaringan komunikasi berkaitan dengan jaringan fiber optik yang rawan terkena gangguan karena masih menggunakan jalur atas. Selain itu, jaringan fiber optik juga belum mencakup semua desa sehingga pengintegrasian data masih terfragmentasi.

Tabel 4.15.

Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya Pemanfaatan Teknologi informasi yang terintegrasi	Sarana pengelolaan Jaringan komunikasi belum optimal	Fiber optik masih menggunakan jalur atas sehingga berisiko terkena gangguan
		Data fiber optik masih terbatas dan tersebar di masing-masing internal Perangkat Daerah

4.1.2.10. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan sektor yang dapat berperan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat. Kondisi capaian kinerja dalam urusan koperasi dan UMKM belum menunjukkan kinerja yang optimal. Hal tersebut dapat terlihat dari kondisi kelembagaan koperasi yang masih memerlukan penataan serta pengembangan UMKM yang ada di Kota Singkawang

yang masih terhambat akibat sulitnya perizinan dan juga akses permodalan. Tantangan atau permasalahan kedepan yang dihadapi untuk memperbaiki sektor Koperasi dan UMKM di Kota Singkawang antara lain:

Tabel 4.16.
Permasalahan Pembangunan Daerah
Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kapasitas pertumbuhan koperasi baru	Belum optimalnya pendampingan bagi kelompok masyarakat yang akan membentuk koperasi	Jumlah tenaga pendamping yang terbatas
		Belum optimalnya kualitas SDM koperasi
		Minimnya kesadaran pengurus dan anggota koperasi
		Terdapat permasalahan internal koperasi
	Belum optimalnya intervensi pemerintah	Belum adanya regulasi khusus yang mengatur pembagian sektor-sektor usaha koperasi
	Belum optimalnya penyelenggaraan pemulihan usaha koperasi	Terbatasnya jumlah bantuan pendanaan bagi koperasi yang berada dalam kondisi darurat tertentu
Belum optimalnya kapasitas kesehatan koperasi	Belum optimalnya pelaporan kegiatan usaha simpan pinjam koperasi	Belum optimalnya kualitas SDM koperasi dalam penyusunan pelaporan
		Belum optimalnya program pelaporan yang terintegrasi
Belum optimalnya kapasitas UMKM yang memiliki izin	Belum optimalnya pendampingan bagi UMKM yang akan mengurus izin usaha berbasis resiko	Kurangnya jumlah pendamping UMKM
		Kurang optimalnya sosialisasi pengurusan NPWP
		Belum tersedianya program pendampingan pengurusan NIB di tingkat kelurahan
	Belum optimalnya data UMKM	Belum optimalnya proses pengumpulan, verifikasi dan pembaharuan dan usaha kecil

4.1.2.11. Penanaman Modal

Urusan penanaman modal pada periode tahun 2018-2021 masih mengalami fluktuasi terkait realisasi investasi dan jumlah investor, meskipun terdapat peningkatan pada tahun 2019. Urusan penanaman modal menjadi prioritas pembangunan Kota Singkawang pada beberapa tahun ke depan, karena merupakan salah satu faktor untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Singkawang, yaitu:

Tabel 4.17.
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Penanaman Modal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih adanya fluktuasi realisasi investasi dan jumlah investor	Masih perlunya penciptaan iklim investasi yang kondusif	Belum optimalnya penyediaan ruang untuk investasi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan
		Belum optimalnya penyediaan dan akses peta potensi investasi
Masih perlunya penguatan kelembagaan perizinan satu pintu	Masih perlunya penguatan tim teknis perizinan	Belum optimalnya sinergi antar Perangkat Daerah
	Masih perlunya peningkatan kemudahan perizinan berbasis aplikasi	Masih perlunya peningkatan aplikasi perizinan dan pemantauan proses perizinan

4.1.2.12. Kepemudaan dan Olahraga

Urusan kepemudaan dan olahraga memegang peranan penting dalam pengembangan sumber daya manusia di Singkawang. Tantangan terbesar dalam pelaksanaan urusan kepemudaan adalah belum optimalnya kontribusi pemuda dalam pembangunan yang disebabkan oleh pengembangan pemuda yang belum optimal. Selain itu, pengembangan pemuda belum diarahkan pada tema-tema yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan masyarakat lokal secara real.

Dari sisi keolahragaan, prestasi olahraga Kota Singkawang secara keseluruhan juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Hal itu disebabkan oleh belum optimalnya sarana dan prasarana keolahragaan karena persebarannya yang kurang merata dan masih terbatas pada jenis olahraga tertentu. Di samping itu,

pengembangan SDM belum optimal karena pembibitan atlet belum terstruktur dengan baik serta belum adanya event-event olahraga reguler sebagai sarana pembibitan.

Tabel 4. 18.
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	Pengembangan kapasitas pemuda belum optimal	Belum optimalnya pendataan organisasi kepemudaan
		Pengembangan pemuda belum diarahkan secara tematik dan peningkatan keterampilan, misalnya pada isu-isu tertentu yang sifatnya inovatif
		Diversifikasi peran organisasi kepemudaan belum optimal
	Belum optimalnya Sarana dan Prasarana, Pengembangan SDM keolahragaan	Persebaran fasilitas olahraga tidak merata
		Sarana keolahragaan masih terbatas pada olahraga tertentu, seperti sepak bola dan voli
		Pembibitan atlet masih belum terstruktur
		Tidak adanya kompetisi reguler dan berjenjang sebagai sarana pembibitan

4.1.2.13. Statistik

Pelaksanaan urusan statistik di Kota Singkawang masih belum optimal. Hingga saat ini, fungsi statistik melekat di Dinas Komunikasi dan Informatika. Seperti tercantum pada tabel di bawah ini, masalah terbesar pelaksanaan urusan Statistik adalah belum optimalnya ketersediaan data statistik yang terintegrasi. Penyebab utama dari masalah pokok tersebut yaitu belum optimalnya kapasitas kelembagaan baik dari sisi kewenangan maupun SDM.

Tabel 4. 19.
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Statistik

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya ketersediaan data statistik yang terintegrasi	Belum optimalnya Kapasitas kelembagaan statistik	Adanya tumpang tindih kewenangan dengan BPS terutama Seksi Statistik
		Kurangnya kompetensi SDM pengelola statistik
		Belum optimalnya standar pelayanan pengelolaan data statistik sektoral

4.1.2.14. Persandian

Di Kota Singkawang, pelaksanaan urusan persandian juga belum menunjukkan progress yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Permasalahan pokok yang ada adalah belum optimalnya layanan persandian akibat dari prosedur penggunaan persandian yang masih minim.

Tabel 4. 20.
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Persandian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya layanan persandian	Prosedur penggunaan persandian (seperti tanda tangan elektronik, tata naskah dinas, tanda tangan, kearsipan) belum optimal	Kurangnya SDM yang memadai dibidang persandian
		Masih perlunya penguatan kapasitas dan pemahaman terkait urgensi persandian

4.1.2.15. Kebudayaan

Pada urusan kebudayaan, minimnya upaya menjadikan budaya lokal sebagai katalisator pembangunan daerah menjadi masalah pokok. Hal ini berkaitan dengan bagaimana menjadikan kebudayaan sebagai bahan pengembangan sektor pariwisata. Upaya ini belum tercapai karena situs-situs kebudayaan belum dijadikan sebagai objek pembangunan pariwisata.

Tabel 4. 21.
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Perlu ditingkatkannya budaya lokal sebagai identitas dan katalisator pembangunan	Belum optimalnya pengelolaan kekayaan budaya	Masih perlu ditingkatkannya fasilitasi terhadap kelompok kesenian
		Masih perlunya revitalisasi nilai tradisi
		Belum optimalnya inventarisasi benda cagar budaya
		Belum optimalnya upaya menjadikan cagar budaya sebagai sarana edukasi

4.1.2.16. Perpustakaan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2017 tentang perpustakaan, disebutkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat. Perpustakaan memiliki andil besar dalam melestarikan hasil karya manusia, baik berupa karya cetak maupun karya rekam lainnya untuk dapat dimanfaatkan masyarakat secara luas. Secara umum, kinerja layanan perpustakaan di Kota Singkawang sudah cukup baik.

Namun, layanan tersebut perlu ditingkatkan dengan mengembangkan perpustakaan berbasis inklusif yakni perpustakaan tidak hanya sebagai tempat membaca tetapi memiliki fungsi lain seperti sebagai tempat diskusi, tempat pelatihan, mini studi dan sebagainya, sehingga semakin memperluas sarana proses belajar masyarakat. Dalam mewujudkan perpustakaan inklusif diperlukan berbagai upaya diantaranya pembangunan sarana prasarana, perluasan layanan, peningkatan kapasitas SDM pengelola dan sebagainya. Berikut adalah rumusan permasalahan terkait urusan Perpustakaan di Kota Singkawang.

Tabel 4. 22.
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perpustakaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pengembangan Literasi	Belum optimalnya cakupan layanan perpustakaan yang inklusif	Perluasan fungsi perpustakaan tidak hanya untuk membaca tetapi ada ruang diskusi, mini studio, tempat pelatihan dan sebagainya
		Perlunya peningkatan kapasitas SDM pengelola perpustakaan

4.1.2.17. Kearsipan

Urusan kearsipan diarahkan untuk penyelamatan dan pelestarian arsip daerah serta peningkatan kualitas pelayanan dalam bidang kearsipan. Arsip sebagai bukti terkait terjadinya peristiwa, kebijakan pemerintah dan sebagainya. Kinerja layanan kearsipan dapat dilihat dari indikator cakupan pengelolaan arsip daerah dan persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku. Secara umum, kedua indikator tersebut masih belum menunjukkan kondisi yang baik. Hal tersebut dikarenakan belum semua Perangkat Daerah mengirimkan arsipnya untuk dikelola Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, sarana prasana kearsipan pada level daerah dan satuan kerja masih terbatas, serta SDM pengelola arsip masih kurang. Berikut adalah rumusan permasalahan terkait urusan Kearsipan di Kota Singkawang.

Tabel 4. 23.
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kearsipan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya sistem kearsipan Daerah	Belum optimalnya pengelolaan depot arsip daerah	Terbatasnya ketersediaan depot arsip daerah
		Belum semua dan Perpustakaan memiliki depot arsip yang baik
		Belum ada berita acara dalam penghapusan arsip sehingga banyak arsip menumpuk (belum ada SOP)
		Belum optimalnya sistem perawatan dan pemeliharaan arsip
		Masih kurangnya tenaga arsiparis

4.1.3. Urusan Pilihan

4.1.3.1 Perikanan dan Kelautan

Kota Singkawang merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pada sektor peternakan dan perikanan. Susu dan ikan lele merupakan beberapa produk unggulan yang dimiliki oleh Kota Singkawang. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sektor peternakan dan perikanan bisa menjadi salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Dukungan serta penyelesaian beberapa permasalahan dalam bidang peternakan dan perikanan menjadi penting untuk dilakukan guna mengoptimalkan potensi yang ada. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang ini adalah terkait manajemen pengelolaan produk hasil ternak dan optimalisasi pemasaran produk hasil ternak.

Tabel 4. 24.
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perikanan dan Kelautan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Maslaah
Belum optimalnya pemasaran perikanan di dalam daerah	Tingkat konsumsi ikan masih rendah	Kesadaran masyarakat tentang gizi/protein hewani belum optimal
		belum optimalnya pengelolaan harga ikan lokal
Belum optimalnya tingkat produksi perikanan dan daya saing produk ikan	Kurangnya ketersediaan bibit ikan	Kapasitas produksi BBI belum optimal
		Kapasitas produksi dari UPR belum optimal
	Besarnya porsi biaya dan tingginya harga pakan	Pabrik pakan skala rumah tangga belum berkembang dengan baik
		Kenaikan harga ikan tidak seimbang dengan kenaikan harga pakan
	Skala Usaha Pembudidaya Ikan	Pembudidaya ikan di Singkawang didominasi oleh pembudidaya skala kecil sehingga porsi biaya tetap yang dikeluarkan menjadi besar.
		Sebagian besar kualitas SDM pembudidaya ikan masih terbatas

Masalah Pokok	Masalah	Akar Maslaah
	Akses untuk permodalan bagi pengembangan usaha perikanan budidaya terbatas	Prosedur perbankan yang sulit dipenuhi bagi pembudidaya skala kecil
		Tingkat suku bunga kredit yang masih relatif tinggi
	Akses pemasaran terbatas	Daya saing produk olahan ikan masih relatif rendah
		Belum optimalnya pemanfaatan system penjualan online
	Teknologi dan sistem produksi	Akses terhadap teknologi Terbatas
		Umumnya masih menerapkan sistem tradisional dan/atau sistem semi-intensif.
		Infrastruktur pendukung masih terbatas
	Adanya penurunan kualitas sumber daya perairan umum	Ikan lebih mudah terkena Penyakit
		Kematian ikan mendadak dalam jumlah besar akibat perubahan musim
		Terjadi konflik kepentingan dengan pengguna lain

4.1.3.2 Perindustrian

Perindustrian merupakan salah satu sektor unggulan yang menopang perekonomian Kota Singkawang. Permasalahan pembangunan yang dihadapi pada sektor perindustrian adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 25.
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perindustrian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya laju pertumbuhan sektor industri terhadap PDRB	Belum optimalnya Pembinaan perindustrian	Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antar stakeholder untuk pengembangan perindustrian
		Masih adanya industri kecil yang belum terdata

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Kompetensi IKM yang masih perlu ditingkatkan

4.1.3.3 Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor potensial di Kota Singkawang terutama di wilayah utara Kalimantan Barat. Tingginya potensi tersebut belum diimbangi oleh dua penyebab yaitu minimnya sarana dan prasarana wilayah dan juga belum optimalnya dukungan SDM.

Tabel 4.26.
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pariwisata

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya potensi kepariwisataan Singkawang	Belum optimalnya pengembangan atraksi, amenitas, akomodasi pariwisata	Paket wisata belum terdiversifikasi
		Destinasi wisata yang belum tersebar
		Belum optimalnya sarana dan prasarana pariwisata
		Belum banyaknya akomodasi pariwisata yang sesuai kebutuhan wisatawan
		Belum optimalnya upaya menarik wisatawan lokal
	Belum optimalnya pengembangan SDM dan kelembagaan pariwisata	Belum optimalnya kompetensi SDM masyarakat

4.1.3.4 Pertanian

Kota Singkawang merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pada sektor pertanian dan peternakan. Beberapa keunggulan sektor pertanian dan peternakan adalah pada komoditas ayam potong dan telur. Sektor pertanian di Kota Singkawang merupakan penyumbang PDRB terbesar ke empat setelah sektor perdagangan, sektor industri pengolahan, dan sektor konstruksi dengan capaian rata-rata 12-13%.

Optimalisasi serta penyelesaian beberapa permasalahan dalam bidang pertanian dan peternakan menjadi penting untuk dilakukan guna mengoptimalkan potensi yang ada. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang ini adalah terkait manajemen pengelolaan produk hasil pertanian dan peternakan dan optimalisasi pemasaran produk hasil ternak.

Tabel 4.27.
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pertanian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kesejahteraan petani	Belum optimalnya kualitas hasil pertanian	Belum optimalnya kapasitas SDM petani
		Belum optimalnya peran kelembagaan petani
		Semakin menurunnya jumlah petani
		Ketersedian sarana prasarana pertanian yang masih kurang
	Belum optimalnya produktivitas lahan pertanian	Semakin menurunnya tingkat kesuburan tanah
		Belum optimalnya ketersediaan sumber daya air pertanian
		Belum optimalnya penggunaan pupuk berimbang
		Belum optimalnya kepatuhan penerapan pola tanam petani
	Belum optimalnya pemasaran dan diversifikasi produk pertanian	Perlunya peningkatan minat petani dalam mengolah produk hasil pertanian
		Belum optimalnya fasilitasi akses pasar
Belum optimalnya produksi, produktivitas ternak, dan daya saing produk hasil ternak	Keterbatasan ketersediaan bibit ternak unggul	Tingkat pengetahuan peternak dalam usaha perbibitan dan manajemen reproduksi ternak masih kurang
		Modal usaha perbibitan ternak yang besar
		Belum berkembangnya kawasan peternakan berupa kluster perbibitan ternak
		Keterbatasan jumlah sarana prasarana Inseminasi Buatan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Keterbatasan ketersediaan pakan ternak	Keterbatasan lahan dan persaingan penggunaan lahan dengan tanaman pangan
		Belum optimalnya ketersediaan pakan
	Tingkat pengetahuan dan SDM Peternak belum optimal	Tingkat pendidikan yang rendah dan sebagian pelaku usaha peternakan dalam katageri usia non produktif
		Kurangnya minat generasi muda dalam usaha peternakan
	Skala usaha peternakan belum optimal	Belum optimalnya pendataan kelompok peternak
		Keterbatasan akses modal
		Belum berkembangnya kelembagaan korporasi peternak
		Belum optimalnya peran kelembagaan asosiasi peternak
		Belum optimalnya kemitraan usaha peternakan
	Tingginya risiko kerugian usaha akibat kematian ternak	Kota Singkawang merupakan daerah endemik penyakit hewan menular strategis (PHMS)
		Kurangnya pengetahuan peternak dalam penerapan cara budidaya ternak yang baik
		Kurangnya tingkat kesadaran peternak dalam program asuransi ternak
	Terbatasnya ketersediaan sarana prasarana dan pemanfaatan alat mesin peternakan	Keterbatasan ketersediaan air untuk budidaya ternak
		Belum optimalnya pemanfaatan alat mesin peternakan
		Keterbatasan akses pemasaran produk hasil ternak

4.1.3.5 Perdagangan

Pembangunan perdagangan dalam perekonomian memiliki peran strategis untuk mendukung kelancaran penyaluran barang dan jasa, pemenuhan kebutuhan pokok

masyarakat, mendorong pembentukan harga yang wajar, penciptaan lapangan kerja serta peningkatan pendapatan. Untuk itu perlu adanya upaya peningkatan perbaikan layanan urusan perdagangan. Selama periode 4 (empat) tahun (2018-2021), kinerja urusan perdagangan cukup baik pada pengelolaan retribusi pasar daerah serta perbaikan sarana prasarana perdagangan (pasar, toko, kios, fasilitas pasar). Namun, untuk masalah ekspor barang dan pembinaan usaha perdagangan masih perlu dioptimalkan.

Tabel 4.28.
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perdagangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya Kontribusi perdagangan terhadap perekonomian daerah	Belum optimalnya pembinaan usaha perdagangan	Belum optimalnya pendataan potensi perdagangan
		Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antar stakeholder untuk pengembangan perdagangan
		Perlu peningkatan kapasitas SDM perdagangan
		Fasilitasi izin usaha perdagangan belum optimal
		Masih perlunya peningkatan upaya promosi usaha Perdagangan
	Belum optimalnya pengelolaan UPT	Belum optimalnya peningkatan sarana dan prasarana pasar
		Belum optimalnya peningkatan retribusi pasar

4.1.4. Unsur Penunjang, Pendukung, Pengawasan Urusan Pemerintahan, serta Unsur Kewilayahan dan Pemerintahan Umum

4.1.4.1. Perencanaan

Perencanaan pembangunan menentukan efektivitas proses pembangunan dan membawa dampak signifikan bagi penerapan akuntabilitas kinerja di Kota Singkawang. Capaian fungsi perencanaan belum optimal untuk mendukung SAKIP yang masih berpredikat “B” hingga tahun 2021. Orientasi pembangunan berbasis kinerja outcome/impact perlu ditingkatkan, serta belum terbangunnya manajemen kinerja yang baik berupa pembagian indikator kinerja yang saling mendukung dan

terkait antara Wali Kota dengan kepala Perangkat Daerah dan struktur di bawahnya. Beberapa kinerja perencanaan masih berorientasi output berupa ketersediaan dokumen perencanaan. Pemetaan permasalahan dalam fungsi perencanaan sebagai berikut:

Tabel 4. 29.
Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Perencanaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	Belum terbangunnya sistem manajemen kinerja	Pembagian dan sinergi target kinerja antara kepala daerah dengan perangkat daerah belum terbangun
	Belum optimalnya kualitas pengendalian dan evaluasi kinerja	Belum terbangunnya sistem pengelolaan data kinerja yang baik
		Belum terintegrasinya SIPD dengan evaluasi dan penatausahaan keuangan
		Pengendalian dan evaluasi belum mengawal capaian kinerja outcome
	Belum optimalnya implemmentasi perencanaan sektoral dan berbasis isu strategis	Belum terbangunnya instrumen pengendalian implementasi, misalnya perencanaan berupa Rencana Aksi Daerah (RAD)
		Perlunya kejelasan tugas dan fungsi antar bidang perencanaan dalam mengawal perencanaan Sektoral

4.1.4.2. Keuangan

Kinerja keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dapat dilihat dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data menunjukkan bahwa sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 PAD di Kota Singkawang terus mengalami peningkatan dengan rata-rata 2,33% per tahun. Meskipun demikian, terdapat tantangan untuk mengoptimalkan pendapatan tersebut khususnya yang bersumber dari retribusi dimana pada tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat tajam

hingga mencapai -24,74%.

Unsur penunjang pemerintahan keuangan juga memiliki isu atau permasalahan urgen berupa upaya mempertahankan capaian akuntabilitas keuangan yang telah mendapatkan Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tabel 4.30.
Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Keuangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Pendapatan Daerah	Masih adanya potensi pendapatan yang tidak terealisasi	Rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak
		Masih adanya objek pajak yang belum membayar pajak sesuai ketentuan
		Menurunnya pendapatan dari komponen retribusi
	Masih adanya potensi penurunan pendapatan	Belum optimalnya pemberlakuan sanksi bagi pelanggar pajak
		Belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah penghasil pendapatan daerah
		Belum optimalnya pemanfaatan objek retribusi

4.1.4.3. Kepegawaian

Kepegawaian merupakan urusan krusial dalam upaya peningkatan tatakelola pemerintahan. Di Kota Singkawang, masalah pokok dari urusan kepegawaian, yaitu belum optimalnya kualitas kepegawaian yang disebabkan oleh manajemen kepegawaian yang belum maksimal. Beberapa persoalan mikro yang teridentifikasi antara lain tidak meratanya distribusi pegawai antara Perangkat Daerah, kurangnya SDM di beberapa posisi, serta proses mutasi yang seringkali tidak berjalan lancar.

Tabel 4. 31.
Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Kepegawaian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Kualitas kepegawaian	Manajemen kepegawaian belum optimal	Tidak meratanya distribusi pegawai antar Perangkat Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Kurangnya SDM di beberapa posisi

4.1.4.4. Pendidikan dan Pelatihan

Belum optimalnya manajemen ASN, juga terkait belum optimalnya peningkatan kompetensi aparatur. Hal ini antara lain disebabkan oleh pelaksanaan pendidikan dan pelatihan masih terpusat, serta skala prioritas pelaksanaan diklat yang berubah. Pemetaan masalah terkait pendidikan dan pelatihan di Kota Singkawang sebagai berikut:

Tabel 4. 32.
Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kompetensi ASN	Belum optimalnya peningkatan kompetensi ASN	Belum optimalnya fasilitas diklat yang dimiliki BKPSDM
		Belum Optimalnya Kapasitas dan Kompetensi Pengelola Diklat

4.1.4.5. Penelitian dan Pengembangan

Pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan merupakan aspek krusial yang menjadi basis pengambilan kebijakan. Namun demikian, tujuan tersebut belum bisa terwujud karena minimnya ketersediaan hasil penelitian yang bisa dijadikan basis perumusan kebijakan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya kapasitas untuk melakukan riset oleh Perangkat Daerah yang mengampu urusan penelitian dan pengembangan. Pada saat yang sama penelitian juga dilaksanakan secara terbagi- bagi/terpecah-pecah di tingkat Perangkat Daerah dengan koordinasi yang lemah.

Tabel 4. 33.
Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih Kurangnya pengembangan penelitian dan inovasi	Belum dijadikannya hasil penelitian untuk basis perumusan kebijakan	Masih minimnya kegiatan penelitian karena tidak adanya SDM fungsional peneliti
		Tidak adanya hasil penelitian yang terstruktur karena penelitian masih tersebar di tingkat Perangkat Daerah
		Belum optimalnya koordinasi kelitbangan
	Belum optimalnya inovasi daerah	Belum optimalnya fasilitasi pengembangan inovasi masyarakat

4.1.4.6. Pengawasan

Capaian fungsi pengawasan di Kota Singkawang telah memenuhi target nasional, yakni Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP yang berada di Level III. Capaian tersebut diperkuat dengan peningkatan integritas aparatur yang ditandai dengan transparansi kegiatan dan kepatuhan pelaporan harta kekayaan. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk penguatan fungsi pengawasan di masa depan, yaitu:

Tabel 4. 34.
Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Pengawasan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Indeks Integritas masih rendah	Belum ada OPD yang meraih predikat WBK/WBBM	Belum intensif memberikan bimbingan pembangunan Zona Integritas
Sebagian besar perangkat daerah belum melakukan manajemen risiko	Masih rendahnya budaya sadar risiko	Belum optimalnya internalisasi budaya sadar risiko
Rekomendasi hasil pengawasan belum seluruhnya ditindaklanjuti	Komitmen Pimpinan PD dalam menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan masih rendah	Pergantian Pejabat pengampu rekomendasi hasil pengawasan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Indeks RB masih belum optimal	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan sebatas pemenuhan dokumen	1. Komitmen Pimpinan OPD dalam pelaksanaan RB masih rendah 2. Penguatan dan Penajaman program RB pada level PD belum optimal 3. Belum adanya reward dan punishment terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di OPD

4.1.4.7. Sekretariat DPRD

DPRD merupakan mitra Wali Kota yang berkedudukan sama tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Dalam melaksanakan fungsinya, DPRD difasilitasi oleh Sekretariat DPRD. Adapun tugas Sekretariat DPRD diantaranya menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD.

Secara umum, kinerja capaian Sekretariat DPRD Kota Singkawang cukup baik yakni sudah mencapai target yang ditentukan. Namun, dalam pelaksanaan tugas fasilitasi masih mengalami beberapa kendala seperti manajemen internal di sekretariat DPRD, kinerja anggota Dewan serta koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait. Berikut adalah rumusan permasalahan terkait urusan Sekretariat DPRD di Kota Singkawang.

Tabel 4. 35.
Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Pendukung Sekretariat DPRD

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Fasilitasi dan tugas anggota DPRD	Belum optimalnya koordinasi antar bagian dalam proses pelayanan anggota DPRD	Manajemen pembagian tugas yang kurang efektif Kurangnya kompetensi sumber daya aparatur serta kemampuan personil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya fasilitasi peningkatan kapasitas anggota dewan berbasis kebutuhan daerah

4.1.4.8. Sekretariat Daerah

Fungsi yang dijalankan oleh Sekretariat Daerah terkait dengan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi kebijakan Wali Kota. Fungsi tersebut menopang kualitas tata kelola pemerintahan yang berjalan di Daerah. Beberapa capaian kinerja yang menandai kualitas tata kelola pemerintahan belum optimal, antara lain terkait Nilai Reformasi Birokrasi dan penerapan SAKIP. Adapun koordinasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik telah menghasilkan nilai IKM yang meningkat setiap tahun. Tantangan yang masih dihadapi fungsi Sekretariat Daerah, yaitu:

Tabel 4. 36.
Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Pendukung Sekretariat Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih kurang optimalnya rumusan dan implementasi kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah	Belum terlaksananya program revitalisasi pasar	kebutuhan regulasi yang optimal dalam pengelolaan pasar
		kurang optimalnya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan
Belum optimalnya administrasi tata pemerintahan, kebijakan kesejahteraan rakyat dan pengkoordinasian serta fasilitasi kebijakan daerah	Belum optimalnya rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat	Belum optimalnya Kebijakan Bansos yang sesuai dengan kebutuhan
	Belum optimalnya produk hukum dalam mendukung dan mengimplementasikan kebijakan daerah	Kurangnya penegakan hukum dalam implementasi produk hukum daerah
Belum optimalnya kualitas pelayanan aparatur	Belum optimalnya Indeks Kepuasan Masyarakat	pengendalian dan pengukuran keberhasilan kebijakan

4.1.4.9. Kewilayahan

Fungsi kewilayahan yang dijalankan oleh kecamatan, salah satunya dalam rangka menopang kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa permasalahan terkait fungsi kecamatan yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut:

Tabel 4. 37.
Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Kewilayahan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pelayanan Publik kepada masyarakat	Masih perlunya penerapan instrumen pengendalian kualitas pelayanan publik	Masih perlunya SKM secara reguler sebagai dasar perbaikan kualitas Pelayanan
Belum optimalnya pengembangan potensi kewilayahan	Belum optimalnya fungsi koordinasi kewilayahan	Belum optimalnya peran kecamatan sebagai instansi terdepan dalam menyusun peta masalah dan potensi kecamatan

4.1.4.10. Pemerintahan Umum-Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan pemerintahan umum terkait pelaksanaan unsur kesatuan bangsa dan politik, sehingga terkait upaya membangun kohesivitas sosial dan peningkatan demokrasi dan kehidupan politik yang kondusif di daerah. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kota Singkawang memiliki beberapa tantangan sebagai berikut:

Tabel 4. 38.
Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Pemerintahan Umum dan Kesatuan Bangsa

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih adanya potensi konflik	Belum optimalnya deteksi dini dan kewaspadaan dini gangguan stabilitas	Minimnya SDM untuk deteksi dan kewaspadaan dini
		Belum optimalnya pendataan dan peran Ormas

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	wilayah	Pengembangan nilai-nilai kebangsaan dan multikulturalisme yang belum efektif

4.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika isu strategis baik internal maupun eksternal diidentifikasi dengan baik, maka dapat diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

4.2.1. Isu Sustainable Development Goals (SDG's)

Prinsip pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) merupakan konsep pembangunan yang diarahkan untuk tujuan pelestarian lingkungan hidup saat ini telah menjadi isu strategis internasional yang relevan. Pencapaian target pembangunan daerah yang ditujukan untuk pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) merupakan konsep pembangunan yang mentransformasikan dan menyentuh aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat, yang biasanya diukur dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, meliputi antara lain:

- a) Mengakhiri kelaparan dan kemiskinan;
- b) Melaksanakan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yang berbasis sosial, ekonomi, dan lingkungan;
- c) Menciptakan kesempatan pekerjaan dan penghidupan serta mengaitkan pertumbuhan dengan pembangunan berkelanjutan;
- d) Bebas dari konflik dan kekerasan, transparansi dan institusi publik yang efektif dan akuntabel; dan
- e) Visi dan semangat baru kemitraan global. Peran spesifik bagi setiap aktor pemerintah, akademisi, bisnis, CSO, dan lain-lain.

Sementara itu, kesepakatan Global Sustainable Development Goals (SDGs), merupakan langkah untuk melanjutkan berbagai program yang telah dilaksanakan dalam agenda MDG's. Indikator target yang ingin dicapai dalam kesepakatan tersebut, adalah tetap terjaganya iklim yang kondusif. Oleh karena itu, dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah dan program-program prioritas yang akan ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, merupakan implementasi dari konsepsi pembangunan berkelanjutan.

4.2.2. Isu Strategis RPJM Nasional Tahun 2020-2024

Isu strategis nasional tidak lepas dari Arahan Presiden Republik Indonesia sebagai dasar penyusunan RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

1. **Pembangunan SDM:** membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri.
2. **Pembangunan Infrastruktur:** melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. **Penyederhanaan Regulasi:** menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan omnibus law terutama menerbitkan 2 undang-undang, yaitu UU Cipta Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.
4. **Penyederhanaan Birokrasi:** memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. **Transformasi Ekonomi:** melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lima Arahan Presiden diinstrumentasikan ke dalam 7 Agenda Pembangunan dan masing-masing agenda pembangunan memiliki lingkungan dan isu strategis:

Tabel 4.39. Tujuh Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024

No	Agenda Pembangunan	Uraian	Lingkungan dan Isu Strategis
1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan: Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata	• Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumberdaya air, sumber daya energi, serta kehutanan • Akselerasi peningkatan nilai tambah pertaniandan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital	• Keberlanjutan dan ketersediaan SDA sebagai modal utama pembangunan makin berkurang. • Efektivitas tata kelola sumber daya ekonomi menghadapi tantangan terkait daya dukung lingkungan, ketersediaan lahan, keterbatasan infrastruktur, penataan ruang, serta kesejahteraan petani- nelayan dan masyarakat yang bergantung penghidupannya pada pemanfaatan SDA • Transformasi struktural berjalan lambat, yaitu Indonesia belum mampu melanjutkan transformasi sosial ekonomi yang terhenti akibat krisis moneter • Revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital, yaitu Indonesia memiliki keunggulan dalam hal harga, namun tertinggal dalam infrastruktur serta kesiapan dan pemanfaatan oleh masyarakat dan institusi pemerintahan.
2.	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan:	• Pengembangan sektor/komoditas/ kegiatan unggulandaerah	• Tingginya angka kemiskinan di wilayah timur Indonesia (18%)

No	Agenda Pembangunan	Uraian	Lingkungan dan Isu Strategis
	Bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang.	• Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang • Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah • Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata • Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim	• Masih adanya ketimpangan pendapatan dengan rasio gini perdesaan 0,317 dan perkotaan 0,392 • Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di Kawasan Barat Indonesia, terutama Pulau Jawa • Terbatasnya sarana prasarana, aksesibilitas, dan belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, desa, kawasan pedesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan
3.	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing: Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah	• Pengendalian penduduk dan penguatan tatakelola kependudukan • Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial • Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta	• Jumlah penduduk usia produktif yang besar harus dimanfaatkan untuk memaksimalkan bonus demografi, jika tidak dikelola baik dapat menyebabkan tingginya tingkat pengangguran, konflik sosial, serta tekanan pada pangan dan lingkungan • Kesejahteraan penduduk meningkat, namun jumlah penduduk yang rentan jatuh miskin saat terjadi guncangan masih cukup tinggi

No	Agenda Pembangunan	Uraian	Lingkungan dan Isu Strategis
		• Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas • Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan Pemuda • Pengentasan kemiskinan • Peningkatan produktivitas dan daya saing	• Derajat kesehatan dan tingkat pendidikan membaik, namun belum menjangkau seluruh penduduk • Perlindungan dan pemenuhan hak anak belum optimal, kesenjangan gender masih relatif tinggi dan kelembagaan PUG belum efektif, serta peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan belum optimal, serta sebagian memiliki perilaku beresiko • Elastisitas terhadap tingkat kemiskinan menurun sehingga laju penurunan kemiskinan cenderung melambat • Produktivitas dan daya saing yang masih perlu ditingkatkan. Peringkat SDM Indonesia 65 dari 130 negara
4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan: Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk	• Revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila • Pemajuan dan pelestarian kebudayaan • Moderasi beragama	• Melemahnya ideologi pancasila dan ketahanan budaya bangsa • Belum optimalnya pemajuan kebudayaan Indonesia • Belum mantapnya pendidikan karakter dan budi pekerti

No	Agenda Pembangunan	Uraian	Lingkungan dan Isu Strategis
	mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan modernitas	• Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas	• Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama • Belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi dan kerukunan • Belum optimalnya peran keluarga • Rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas
5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar: bertujuan mendukung Aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional	• Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar • Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi • Pembangunan infrastruktur perkotaan • Pembangunan energi dan ketenagalistrikan • Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital	• Keterbatasan akses perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau • Belum optimalnya peningkatan akses air minum layak dan aman • Belum optimalnya peningkatan akses layanan sanitasi layak dan aman • Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan yang masih menghadapi tantangan tingkat layanan penyediaan, kuantitas dan kualitas air, dan permasalahan pemanfaatan teknologi untuk menjamin air baku • Keselamatan dan keamanan transportasi yang masih menghadapi permasalahan tingginya angka kematian akibat kecelakaan • Ketahanan kebencanaan infrastruktur

No	Agenda Pembangunan	Uraian	Lingkungan dan Isu Strategis
			• Waduk multiguna dan modernisasi irigasi yang menghadapi tantangan kapasitas tampungan air masih rendah karena terbatasnya jumlah bendungan, embung, dan penampung air lainnya • Infrastruktur ekonomi yang menghadapi tantangan pada aspek konektivitas jalan, kereta api, laut, udara, dan Darat • Infrastruktur perkotaan yang masih menghadapi tantangan: transportasi perkotaan; energi dan ketenagalistrikan perkotaan; infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan; penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman di perkotaan; serta penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman, terjangkau di perkotaan. Energi dan ketenagalistrikan yang menghadapi tantangan keberlanjutan penyediaan, akses dan keterjangkauan, serta kecukupan penyediaan • Transformasi digital memiliki tantangan penuntasan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta fasilitas pendukung transformasi digital
6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan	• Peningkatan kualitas lingkungan hidup	• Tren IKLH nasional menunjukkan kualitas air semakin memburuk, kualitas udara secara

No	Agenda Pembangunan	Uraian	Lingkungan dan Isu Strategis
	ketahanan bencana dan perubahan iklim: Pembangunannasional perlu memperhatikan daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim	• Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim • Pembangunan rendah karbon	absout menurun,dan tutupan lahan mengalami perbaikan • Indonesia memiliki riwayat kejadian bencana yang tinggi • Penurunan emisi gas rumahkaca yang mendekati target
7	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik: Negara wajibhadir dalam melayani danmelindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara	• Reformasi kelembagaan birokrasi untukpelayanan berkualitas • Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasidan tata kelola keamanan siber • Peningkatan aksesterhadap keadilan dan sistem anti korupsi • Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNIdi luar negeri	• Dinamika geopolitik global, antara lain depolarisasi pusat gravitasi politik internasional, instabilitas kawasan Timur Tengah, dinamika kebijakan luar negeri negara adi daya, melemahnya tata kelola globaldan menguatnya uniteralisme • Tantangan nasional berupa demokrasi prosedural, kompleksitas pelayanan birokrasi dan penegakan hukum, perilaku koruptif, potensi ancaman kedaulatannegara, dan kecenderungan meningkatnya kejahatan Trans nasional

No	Agenda Pembangunan	Uraian	Lingkungan dan Isu Strategis
		• Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan industri pertahanan	

4.2.3 Isu-isu Strategis RPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026

Isu-isu strategis pada tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, terdiri dari isu strategis pada lingkup internal dan isu strategis pada lingkup global. Adapun isu-isu strategis pada lingkup internal Pemerintah Kalimantan Barat, adalah :

a. Kekuatan Daerah

- 1) Kalimantan Barat memiliki sumberdaya alam yang melimpah meliputi sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan sektor pertambangan (terutama Uranium, Bauksit, Batu Bara dan Mineral Radioaktif) yang belum termanfaatkan secara optimal;
- 2) Posisi geografis Kalimantan Barat sangat strategis karena terletak pada Alur Laut Kepulauan Indonesia 1 (ALKI-1) dan perairan lautnya berhadapan langsung ke Laut Cina Selatan;
- 3) Mempunyai daerah yang berbatasan langsung (Darat) dengan negara tetangga (Malaysia) yang menjadi beranda terdepan perekonomian wilayah;
- 4) Kalimantan Barat memiliki potensi wisata yang cukup kaya dan beragam, mulai dari wisata alam, wisata sejarah dan budaya serta wisata minat khusus seperti Eco Tourism dengan alamnya yang masih potensial;
- 5) Kalimantan Barat mempunyai bentang hutan hujan tropika basah (tropical rainforest) yang cukup luas yang memiliki berbagai biodiversity endemik bagi pengembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk kepentingan kerjasama dengan pihak luar negeri, serta memiliki peran sebagai paru-paru dunia;

b. Kelemahan Daerah

- 1) Terbatasnya infrastruktur dasar yang menghambat pengembangan usaha dan pelayanan publik;
- 2) Lemahnya daya saing Kalimantan Barat karena belum berkembangnya hilirisasi industri;
- 3) Kondisi infrastruktur di daerah perbatasan negara dan daerah tertinggal masih terbatas;

- 4) Belum optimalnya pengembangan sumber daya manusia yang ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih berada di bawah rata-rata nasional;
- 5) Belum optimalnya kompetensi, sistem kinerja dan kesejahteraan aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan publik;
- 6) Prasarana wilayah yang dimiliki belum mendorong peningkatan investasi;
- 7) Investasi belum optimal dalam mendukung perekonomian daerah;
- 8) Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai akibat dari kegiatan ekstraksi sumber daya alam dan lahan;
- 9) Belum optimalnya pelayanan akses dan pemerataan di bidang pendidikan dan kesehatan, terutama di wilayah perbatasan, pedalaman, pesisir dan kepulauan;
- 10) Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam di bidang kehutanan, pertanian, perkebunan, pertambangan dan energi, kelautan dan perikanan;
- 11) Masih sering terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas darat, laut dan udara serta kesehatan masyarakat;
- 12) Panjangnya rentang kendali pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang disebabkan belum optimalnya konektivitas dan aksesibilitas antar daerah di wilayah Kalimantan Barat

Sedangkan identifikasi Isu-isu strategis pada lingkungan eksternal Pemerintah Kalimantan Barat, antara lain :

a. Peluang daerah

- 1) Pengembangan kerjasama antarkawasan dan antarnegara secara lebih luas dan nyata seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan memperluas peluang investasi, produksi, kesempatan kerja dan pendapatan bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah;
- 2) Kalimantan Barat merupakan provinsi yang mempunyai akses hubungan darat secara langsung dengan negara tetangga Malaysia dan Brunei,

sehingga memiliki peluang sebagai berikut :

- a) Interaksi sosial ekonomi yang didukung dengan bis antar kota-antar negara yang semakin meningkat.
 - b) Kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (Sosek Malindo) mendorong tumbuh dan berkembangnya perekonomian wilayah kedua Negara.
 - c) Terbukanya pintu gerbang internasional yang meliputi: Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong-Tebedu, PLBN Aruk–Biawak, PLBN Badau- Lubuk Antu dan pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Jagoi Babang-Serikin
- 3) Adanya komitmen global terhadap mitigasi perubahan iklim dan percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);
 - 4) Perubahan tatanan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya semakin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan pembangunan;
 - 5) Dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024, tujuan pengembangan Wilayah Pulau adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui:
 - (a) pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa,
 - (b) penyediaan infrastruktur wilayah,
 - (c) peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus.
- b. Ancaman Daerah
- 1) Globalisasi membawa dampak yang dapat menjadi ancaman bagi Kalimantan Barat, yaitu:
 - a) Perlambatan ekonomi pada negara-negara tujuan ekspor atau menjadi mitra dagang Indonesia belum pulih sepenuhnya sehingga berdampak pada perekonomian daerah;
 - b) Pemberlakuan Zona Perdagangan Bebas (Free Trade Area) meningkatkan arus masuk barang dan jasa dari pasar internasional yang

berdampak pada determinasi pasar lokal (daerah) dan pasar dalam negeri;

c) Arus informasi yang bersifat negatif semakin sulit dibendung akibat pesatnya perkembangan teknologi informasi sehingga dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat di daerah;

2) Kurangnya koordinasi lintas sektoral antara pusat dan daerah dalam rangka pengawasan perairan teritorial Kalimantan Barat, sehingga masih terjadi Illegal Fishing, Unreported Fishing and Unregulated Fishing di wilayah perairan Kalimantan Barat;

3) Letak geografis Kalimantan Barat terutama di kawasan perbatasan negara rawan terjadi ilegal trading, trafficking, dan penyelundupan narkoba serta terorisme;

4) Pengelolaan daerah tertinggal dan persoalan perbatasan antar negara belum optimal.

4.2.4. Telaah RTRW Kota Singkawang 2022-2042

Penyusunan RPD Tahun 2023-2026 berpedoman pada tujuan RTRW Kota Singkawang 2022-2042, yaitu penataan ruang wilayah Kota Singkawang sebagai pusat kegiatan wilayah yang memiliki keunggulan pariwisata berwawasan lingkungan hidup, kegiatan industri serta perdagangan dan jasa berorientasi ekspor yang aman, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan dengan menyusun kebijakan dan strategi penataan ruang yang terdiri atas:

- a. Pengembangan kawasan pusat kegiatan wilayah yang mencakup kawasan pemerintahan, pariwisata budaya, perdagangan dan jasa untuk mendukung perwujudan kota sebagai kota wisata unggulan;
- b. Pengembangan pusat pelayanan yang merata dan berhirarki untuk peningkatan pelayanan ke seluruh wilayah;
- c. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan lainnya yang terpadu dan merata;
- d. Perlindungan kawasan-kawasan yang merupakan situs cagar budaya dan pengembangan daya tarik wisata;

- e. Perwujudan dukungan untuk sektor pariwisata dengan kemudahan investasi pada sektor jasa, industri, dan perdagangan;
- f. Pengembangan kegiatan industri untuk memacu perkembangan kegiatan perdagangan berorientasi ekspor dan menunjang pengembangan kegiatan di sektor pertanian pangan, perkebunan, peternakan, serta perikanan dan kelautan baik di wilayah kota maupun di wilayah kabupaten yang berbatasan;
- g. Perwujudan dan pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- h. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; dan
- i. Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang Kota Singkawang, ditetapkan Strategi penataan ruang wilayah yaitu:

- a) Strategi pengembangan kawasan pusat kegiatan wilayah yang mencakup kawasan pemerintahan, perdagangan dan jasa untuk mendukung perwujudan kota sebagai pusat kegiatan wilayah yang terdiri atas:
 - a. Menetapkan kawasan pemerintahan kota dan kawasan komersial yang memiliki jangkauan pelayanan regional sebagai bagian dari kawasan strategis;
 - b. Menata jaringan prasarana dan simpul transportasi darat dalam rangka menjaga kelancaran lalu lintas lokal dan regional di kawasan pusat kota;
 - c. Menata kawasan terbangun khususnya kegiatan-kegiatan komersial terutama yang berada pada jalan arteri dan kolektor;
 - d. Mengendalikan kawasan permukiman yang berkepadatan tinggi;
 - e. Mengembangkan sistem jaringan drainase yang efektif dan efisien dalam rangka menghindari terjadinya banjir; dan
 - f. Menyediakan ruang terbuka hijau yang memadai sebagai unsur pengikat sosial masyarakat kota.
- b) Strategi untuk pengembangan pusat pelayanan yang merata dan berhirarki untuk peningkatan pelayanan ke seluruh wilayah, terdiri atas:

- a. Menjaga berfungsinya secara optimal pusat- pusat pelayanan yang sudah ada;
 - b. Mendorong berfungsinya pusat-pusat pelayan kegiatan yang baru;
 - c. Meningkatkan keterkaitan antar-pusat pelayanan dalam wilayah kota, dan antara pusat-pusat pelayan dengan daerah layanannya yang merupakan bagian dari wilayah kabupaten yang berbatasan; dan
 - d. Mengendalikan perkembangan pusat-pusat pelayanan yang agar sesuai dengan fungsi dan panduan rancang kota.
- c) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan lainnya yang terpadu dan merata, terdiri atas:
- a. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara, serta keterpaduan intra dan antarmoda;
 - b. Membangun jaringan jalan baru yang diarahkan untuk menghubungkan pusat- pusat pelayanan kota dengan pusat-pusat lingkungan serta jalan alternatif untuk mengantisipasi kemacetan pada ruas-ruas jalan yang sangat berpotensi mengalami kemacetan dalam masa rencana;
 - c. Membangun Jalan Lingkar Barat (by pass) yang menghubungkan Jalan Kaliasin sampai Jalan Ratu Sepudak (Semelagi Kecil) yang berfungsi sebagai jalan arteri;
 - d. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi;
 - e. Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan, serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik secara optimal;
 - f. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air, mempercepat konservasi sumber daya air, serta meningkatkan pengendalian daya rusak air; dan
 - g. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan yang meliputi drainase, air minum, persampahan, pengolahan limbah, angkutan umum, jalur pejalan kaki, kegiatan sektor informal, dan jalur evakuasi bencana.

- d) Strategi perlindungan kawasan-kawasan yang merupakan situs cagar budaya dan pengembangan daya tarik wisata, terdiri atas:
- a. Menetapkan kawasan-kawasan yang merupakan situs cagar budaya;
 - b. Melindungi dan memelihara kawasan yang merupakan situs cagar budaya dengan cara pengamanan, perawatan, dan pemugaran;
 - c. Menetapkan areal objek wisata dan kawasan terkait sekitarnya sebagai bagian dari kawasan pariwisata;
 - d. Pengembangan kawasan untuk Bumi Perkemahan di sekitar Danau Sarantangan di Kelurahan Sagatani, Kebun Botani di Kelurahan Bagak Sahwa, kebun koleksi di Kelurahan Nyarumkop dan Bagak Sahwa, serta konservasi di luar habitat alami (ex situ) di Gunung Besar di Kelurahan Sedau dan di kaki Gunung Raya di Kelurahan Bagak Sahwa untuk menunjang pengembangan wisata pendidikan dan budidaya tanaman hortikultura; dan
 - e. Mengembangkan prasarana dan sarana pendukung pada areal pengembangan pariwisata.
- e) Strategi peningkatan potensi alam dan budaya dalam mewujudkan pengembangan pariwisata unggulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
- a. Menetapkan areal objek wisata dan kawasan terkait sekitarnya sebagai bagian dari kawasan pariwisata;
 - b. Mengembangkan kegiatan pada kawasan wisata alam dan budaya tanpa merusak kelestariannya dengan membaginya kedalam zona lindung dan budi daya;
 - c. Mengembangkan prasarana dan sarana pendukung pada areal pengembangan pariwisata; dan
 - d. Mengembangkan desa wisata sebagai kesatuan dari atraksi wisata alam maupun budaya untuk meningkatkan perekonomian dan partisipasi masyarakat.
- f) Strategi perwujudan dukungan untuk sektor pariwisata dengan kemudahan investasi pada sektor jasa, industri, dan perdagangan terdiri atas:

- a. Menetapkan areal objek wisata dan kawasan terkait sekitarnya sebagai bagian dari kawasan pariwisata; dan
 - b. Mengembangkan prasarana dan sarana pendukung pada areal pengembangan pariwisata
- g) Strategi pengembangan kegiatan industri untuk memacu perkembangan kegiatan perdagangan berorientasi ekspor dan menunjang pengembangan kegiatan di sektor pertanian pangan, perkebunan, peternakan, serta perikanan dan kelautan baik di wilayah kota maupun di wilayah kabupaten yang berbatasan, terdiri atas:
- a. Menetapkan kawasan industri di Kelurahan Sedau dan Kelurahan Pangmilang yang terintegrasi dengan kawasan pelabuhan dan pergudangan, serta rencana jalur rel kereta api;
 - b. Membangun kanal pengendali banjir yang menghubungkan bagian hulu dari Sungai Sedau dengan muara Sungai Jamthang untuk mengantisipasi terjadinya banjir di kawasan industri;
 - c. Mengembangkan prasarana dan sarana pengelolaan lingkungan khusus untuk kawasan industri;
 - d. Mendayagunakan secara optimal kawasan industri beserta fasilitasnya dengan memperhatikan kelestarian dan kualitas lingkungan;
 - e. Mendorong pengembangan sektor industri ke arah pengembangan dan pemanfaatan sentra- sentra industri kecil dan aneka industri dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan; dan
 - f. Mendorong pengembangan kawasan industri yang dikelola oleh perusahaan pengelola kawasan industri.
- h) Strategi perwujudan dan pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup, terdiri atas:
- a. Menetapkan kawasan lindung;
 - b. Melestarikan ekosistem kawasan cagar alam;
 - c. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung selain dari kawasan cagar alam yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;

- d. Mengalokasikan peruntukan ruang terbuka hijau kota dengan luas lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota, dengan ruang terbuka hijau publik lebih dari 20% dari luas wilayah kota; dan
 - e. Mengembangkan Kerjasama dengan kabupaten yang berbatasan dalam meningkatkan fungsi lindung.
- i) Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, terdiri atas:
- a. Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup terutama kawasan cagar alam, kawasan resapan air, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, RTH hutan kota, sempadan danau, sempadan sungai, dan sempadan pantai;
 - b. Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - c. Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
 - d. Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
 - e. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - f. Mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya; dan
 - g. Mengembangkan kegiatan budi daya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana alam
- j) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, terdiri atas:
- a. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak di

kawasan pusat kota;

- b. Membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan tangkapan air untuk mempertahankan ketersediaan sumber air;
- c. Membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
- d. Melakukan penyempurnaan secara berkala terhadap ketentuan-ketentuan peraturan zonasi yang telah ditetapkan terutama dalam rangka mengantisipasi dampak yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan atau teknologi baru;
- e. Mengendalikan perkembangan kawasan terbangun yang mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan sungai dan pantai; dan
- f. Menata kawasan perkotaan yang adaptif terhadap ancaman bencana banjir.

Rencana struktur ruang wilayah Kota Singkawang meliputi sistem pusat pelayanan, dan sistem jaringan prasarana.

1. Sistem Pusat Pelayanan

Sistem pusat pelayanan di daerah terdiri atas Pusat Pelayanan Kota (PPK), Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

- a. Pusat Pelayanan Kota (PPK) meliputi kawasan perdagangan dan jasa, perkantoran dan pelayanan umum yang terletak di Kecamatan Singkawang Barat.
- b. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) meliputi:
 - 1) SPPK I berfungsi sebagai simpul transportasi udara serta pusat permukiman, perdagangan dan jasa berada di Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan;
 - 2) SPPK II berfungsi sebagai simpul transportasi laut, pusat kegiatan pariwisata, serta perdagangan dan jasa yang berada di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan;
 - 3) SPPK III yang berfungsi sebagai pusat pelayanan umum, perdagangan dan jasa, berada di Kelurahan Setapuk Besar

Kecamatan Singkawang Utara;

- 4) SPPK IV yang berfungsi sebagai pusat permukiman dan pariwisata berada di Kelurahan Pajintan, Kecamatan Singkawang Timur; dan
- 5) SPPK V berada yang berfungsi sebagai pusat pariwisata, perdagangan dan jasa berada di Kelurahan Bagak Sahwa, Kecamatan Singkawang Timur

c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), meliputi:

- 1) Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan Semelagi Kecil, kecamatan Singkawang Utara;
- 2) Pusat Pelayanan Lingkungan Sungai Rasau, Kecamatan Singkawang Utara;
- 3) Pusat Pelayanan Lingkungan Naram, Kecamatan Singkawang Utara;
- 4) Pusat Pelayanan Lingkungan Mayasopa, Kecamatan Singkawang Timur;
- 5) Pusat Pelayanan Lingkungan Sijangkung, Kecamatan Singkawang Selatan; dan
- 6) Pusat Pelayanan Lingkungan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan.

2. Sistem Jaringan Prasarana

Sistem Jaringan Prasarana yang ada di daerah merupakan sistem jaringan transportasi yang terdiri atas sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan infrastruktur perkotaan.

a. Sistem Jaringan Transportasi, meliputi:

1) Sistem jaringan jalan; terdiri atas:

a) Jalan umum, terdiri atas:

(1) Jalan arteri; terdiri atas:

- Jalan arteri primer, terdiri atas jalan Aliyang, sebagian Jalan Tebas-Singkawang, sepanjang 49,72 km (empat puluh sembilan koma tujuh puluh dua

kilometer), Batas Kota Singkawang-Sei. Duri dan sebagian jalan Ahmad Yani, sepanjang 0,14 km (nol koma empat belas kilometer)

- Jalan arteri sekunder, terdiri atas Jalan Merdeka, Jalan Diponegoro, Sebagian jalan Ahmad Yani, sepanjang 1,23 km (satu koma dua puluh tiga kilometer), Sebagian jalan Tebas-Singkawang sepanjang 1,45 km (satu koma empat puluh lima kilometer).

(2) Jalan kolektor, terdiri atas:

- Jalan kolektor primer, terdiri atas Jalan Sudirman; dan Jalan Pahlawan
- Jalan kolektor sekunder, terdiri atas Jalan Baru, Jalan Budi Utomo, Jalan Bun Fui, Jalan Conglongkong Trans, Jalan Demang Akub, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Firdaus HR, Jalan Firdaus HR II, Jalan Firdaus III, Jalan GS. Lalanang, Jalan Gunung Kaba', Jalan H. Bakar, Jalan Hamid Matali, Jalan Hermansyah, Jalan Jembatan 25, Jalan Kepol Mahmud, Jalan Kridasana, Jalan Kurau, Jalan Lingkar Timur, Jalan Mahad Usman, Jalan Matang Lintang, Jalan Mesjid Raya, Jalan Mesjid Sei Bulan, Jalan Niaga, Jalan Nusantara, Jalan P. Antasari, Jalan Padat Karya Sungai Wie, Jalan Pangmilang SP1-SP2, Jalan Pelita, Jalan Pemuda, Jalan Pertanian, Jalan Perwira, Jalan Poros Pajintan, Jalan Pramuka, Jalan R. A. Kartini, Jalan Raya Sagatani, Jalan Raya Sebakuan, Jalan Sama-Sama, Jalan Saman Bujang, Jalan Sanggau Kulor, Jalan Sejahtera, Jalan Semai, Jalan SM. Tsjafioeddin, Jalan Stasiun, Jalan Tani SMP VII, Jalan Trans Semelagi, Jalan Trisula, Jalan

Veteran, Jalan Veteran Ujung, Jalan Wonosari, dan Jalan Yunus Yakob.

(1) Jalan lokal, dan

(2) Jalan lingkungann berupa jalan lingkungan sekunder tersebar di seluruh Kota Singkawang.

b) Jalan khusus, yaitu Jalan Tanjung Bajau dari Kawasan Wisata Palm Beach menuju Sinka Island Park,

c) Jalan tol, terdiri dari:

(1) Jalan tol yang menghubungkan Pontianak-Mempawah-Bengkayang-Singkawang, dan

(2) Pintu Tol Singkawang berada di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan.

d) Terminal penumpang, terdiri atas:

(1) Terminal penumpang tipe A, berupa Terminal Singkawang yang ditetapkan di Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah,

(2) Terminal penumpang tipe C, meliputi:

- Terminal Beringin di Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah,
- Terminal Pasiran di Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat,
- Terminal di Kelurahan Semelagi Kecil Kecamatan Singkawang Utara,
- Terminal di Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan, dan
- Terminal di Kelurahan Bagak Sahwa Kecamatan Singkawang Timur

e) Terminal barang, yaitu rencana lokasi terminal barang berada di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, dan

- f) Jembatan timbang, yaitu rencana revitalisasi penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor dengan pengaktifan kembali Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Sedau.
- 2) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, berupa:
 - a) Alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau, berupa alur-pelayaran kelas II yang menghubungkan Kota Singkawang dengan Pelabuhan Pulau Tambelan, dan
 - b) Pelabuhan Penyeberangan, yaitu Pelabuhan Sedau Singkawang yang ditetapkan di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan.
- 3) Sistem jaringan transportasi laut, terdiri dari:
 - a) pelabuhan pengumpul, yaitu Pelabuhan Singkawang yang berada di Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat, dan
 - b) pelabuhan perikanan, berupa pangkalan pendaratan ikan berada di Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat dan Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan.
- 4) Bandar udara umum dan bandar udara khusus, berupa:
 - a) Bandar Udara umum, berupa Bandar Udara Pengumpan. Bandar Udara pengumpan yaitu Bandar Udara Singkawang di Kelurahan Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan, dan
 - b) Bandar Udara khusus, yaitu Bandar Udara Smart Semelagi di Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara.
- b. Sistem Jaringan Energi, terdiri atas:
 - 1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, merupakan jaringan minyak dan gas bumi yang berupa jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen

melintasi Ruas Jalan yang terdiri atas Jalan Raya Sedau, Jalan Batas Kota Singkawang-Sungai Duri, Jalan Ahmad Yani, Jalan Diponegoro, Jalan Merdeka, Jalan Bambang Ismoyo, dan Jalan Ratu Sepudak.

2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, terdiri atas:

a) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, berupa pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) Sungai Wie di Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah dan PLTD Sudirman di Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, dan

b) Jaringan Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:

(1) Jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem, berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT), terdapat di:

- Kelurahan Semelagi Kecil, Kelurahan Setapuk Besar, Kelurahan Setapuk Kecil, Kelurahan Sungai Rasau, Kelurahan Sungai Bulan, Kelurahan Sungai Garam, Kelurahan Naram di Kecamatan Singkawang Utara,
- Kelurahan Bukit Batu, Kelurahan Sungai Wie, dan Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah,
- Kelurahan Kuala dan Kelurahan Pasiran di Kecamatan Singkawang Barat,
- Kelurahan Sedau dan Kelurahan Pangmilang di Kecamatan Singkawang Selatan, dan
- Kelurahan Pajintan, Kelurahan Bagak Sahwa, dan Kelurahan Nyarumkop di Kecamatan Singkawang Timur.

(2) Jaringan distribusi tenaga listrik, terdiri atas,

- Saluran udara tegangan menengah (SUTM), terdapat di jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal di Kota Singkawang, dan
- Saluran udara tegangan rendah (SUTR), terdapat di seluruh wilayah Kota Singkawang.

(3) Gardu listrik berupa gardu induk, terdapat di Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah.

c. Sistem Jaringan Telekomunikasi, terdiri atas:

1) Jaringan tetap, terdiri atas:

- a) Jaringan tetap yang akan dikembangkan di seluruh Kota Singkawang, dan
- b) Infrastruktur jaringan tetap berupa landasan dari kabel bawah laut Palapa Ring yang terletak di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan.

2) Jaringan bergerak, terdiri atas:

- a) Jaringan bergerak terrestrial, dikembangkan di Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, dan
- b) Jaringan bergerak seluler berupa Base Transceiver Station (BTS) dikembangkan di Kecamatan Singkawang Utara, Kecamatan Singkawang Selatan, Kecamatan Singkawang Barat, Kecamatan Singkawang Timur, dan Kecamatan Singkawang Tengah.

d. Sistem Jaringan Sumber Daya Air, berupa prasarana sumber daya air yang terdiri atas:

1) Sistem jaringan irigasi, terdiri atas:

- a) Jaringan irigasi primer berupa anak sungai yang mengalir melintasi beberapa kelurahan yang terdiri dari:
(1) Kelurahan Sedau, Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Pangmilang, dan Kelurahan Sagatani di Kecamatan

- Singkawang Selatan,
- (2) Kelurahan Sanggau Kulor, Kelurahan Bagak Sahwa, dan Kelurahan Nyarumkop di Kecamatan Singkawang Timur, dan
 - (3) Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah.
- b) Jaringan irigasi sekunder berada pada kawasan-kawasan pertanian yang tersebar di beberapa kelurahan meliputi:
- (1) Kelurahan Sedau, Kelurahan Pangmilang, dan Kelurahan Sagatani di Kecamatan Singkawang Selatan,
 - (2) Kelurahan Pajintan, Kelurahan Sanggau Kulor, Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Mayasopa, dan Kelurahan Nyarumkop di Kecamatan Singkawang Timur,
 - (3) Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah, dan
 - (4) Kelurahan Pasiran di Kecamatan Singkawang Barat
- c) Jaringan irigasi tersier mengalir melintasi beberapa kelurahan yang terdiri dari:
- (1) Kelurahan Sedau, Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Pangmilang, dan Kelurahan Sagatani di Kecamatan Singkawang Selatan,
 - (2) Kelurahan Pajintan, Kelurahan Sanggau Kulor, Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Nyarumkop, dan Kelurahan Mayasopa di Kecamatan Singkawang Timur, dan
 - (3) Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah.
- 2) Sistem pengendalian banjir, berupa kolam retensi terletak di Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, dan

3) Bangunan sumber daya air, terdiri atas:

- a) Embung terletak di Kelurahan Semelagi Kecil di Kecamatan Singkawang Utara, Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah, Kelurahan Pajintan di Kecamatan Singkawang Timur dan Kelurahan Pangmilang di Kecamatan Singkawang Selatan,
- b) Pintu Air terletak di:
 - (1) Kelurahan Kuala dan Kelurahan Pasiran di Kecamatan Singkawang Barat,
 - (2) Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Sedau, Kelurahan Pangmilang, dan Kelurahan Sagatani di Kelurahan Singkawang Selatan,
 - (3) Kelurahan Sanggau Kulor, Kelurahan Pajintan, Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Nyarumkop, dan Kelurahan Mayasopa di Kecamatan Singkawang Utara, dan
 - (4) Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah
- c) Prasarana Irigasi terletak di:
 - (1) Kelurahan Kuala dan Kelurahan Pasiran di Kecamatan Singkawang Barat,
 - (2) Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Sedau, Kelurahan Pangmilang, dan Kelurahan Sagatani di Kelurahan Singkawang Selatan,
 - (3) Kelurahan Sanggau Kulor, Kelurahan Pajintan, Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Nyarumkop, dan Kelurahan Mayasopa di Kecamatan Singkawang Utara, dan
 - (4) Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah.

e. Infrastruktur Perkotaan, terdiri atas:

1) SPAM, terdiri atas:

a) Jaringan perpipaan, meliputi:

(1) Unit air baku, terdiri dari:

- Unit air baku berupa intake yang terdapat di:
 - Kelurahan Sedau, Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Pangmilang, dan Kelurahan Sagatani di Kecamatan Singkawang Selatan,
 - Kelurahan Pasiran di Kecamatan Singkawang Barat,
 - Kelurahan Sanggau Kulor, Kelurahan Pajintan, Kelurahan Nyarumkop, Kelurahan Bagak Sahwa, dan Kelurahan Mayasopa di Kecamatan Singkawang Timur, dan
 - Kelurahan Semelagi Kecil dan Kelurahan Sungai Bulan di Kecamatan Singkawang Utara.

- Jaringan air baku yang tersebar di beberapa kelurahan meliputi:

- Kelurahan Mayasopa, Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Nyarumkop, Kelurahan Pajintan, dan Kelurahan Sanggau Kulor di Kecamatan Singkawang Timur,
- Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah, dan
- Kelurahan Naram, Kelurahan Sungai Bulan, dan Kelurahan Semelagi Kecil di Kecamatan Singkawang Utara

(2) Unit produksi, terdiri atas:

- Unit produksi berupa Instalasi Pengolahan Air (IPA) terdiri dari Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah, Kelurahan Sungai Bulan

dan Kelurahan Semelagi Kecil di Kecamatan Singkawang Utara.

- Unit produksi berupa reservoir yang terletak di Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah.
- Jaringan produksi meliputi:
 - Kelurahan Sanggau Kulor dan Kelurahan Pajintan di Kelurahan Singkawang Timur,
 - Kelurahan Roban, Kelurahan Condong, Kelurahan Sekip Lama, Kelurahan Jawa, dan Kelurahan Sungai Wie, di Kecamatan Singkawang Tengah, dan
 - Kelurahan Sungai Garam Hilir di Kecamatan Singkawang Utara

(3) Unit distribusi, berupa jaringan distribusi yang tersebar hampir di seluruh Kota Singkawang kecuali Kelurahan Mayasopa di Kecamatan Singkawang Timur.

(4) Bukan jaringan perpipaan, terdiri dari sumur pompa terdapat di Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, Kelurahan Pajintan, Mayasopa, Bagak Sahwa Kecamatan Singkawang Timur, dan Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan.

2) SPAL, terdiri atas:

- a) Sistem pengelolaan air limbah non domestik terletak di:
 - (1) Kelurahan Pasiran dan Kelurahan Melayu di Kecamatan Singkawang Barat,
 - (2) Kelurahan Roban, Kelurahan Sekip Lama, Kelurahan Sungai Wie, Kelurahan Condong di Kecamatan Singkawang Tengah,
 - (3) Kelurahan Sedau, Kelurahan Pangmilang, Kelurahan

- Sagatani, Kelurahan Sijangkung di Kecamatan Singkawang Selatan,
- (4) Kelurahan Setapuk Kecil di Kecamatan Singkawang Utara, dan
- (5) Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Sanggau Kulor di Kecamatan Singkawang Timur
- b) Sistem pengelolaan air limbah domestik, terdiri dari:
- (1) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat, meliputi:
- Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Pajintan Kecamatan Singkawang Timur,
 - Kelurahan Bukit Batu Kecamatan Singkawang Tengah, dan
 - Kelurahan Pangmilang, Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat berupa penanganan limbah rumah tangga pada kawasan padat permukiman dengan pembangunan WC, septic tank rumah tangga atau septic tank bio filter yang tersebar di seluruh kelurahan sesuai kebutuhan.
- 3) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), berada di dekat kawasan pengolahan sampah perkotaan TPA Wonosari di Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah dan pada Kawasan Peruntukan Industri yang terdapat di Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan,
- 4) Sistem jaringan persampahan, terdiri atas:
- a) Tempat penampungan sampah sementara (TPS), terdapat di:
- (1) Kelurahan Setapuk Besar, Kelurahan Sungai Bulan, Kelurahan Naram, dan Kelurahan Sungai Garam Hilir

- di Kecamatan Singkawang Utara,
- (2) Kelurahan Sungai Wie, Kelurahan Roban, dan Kelurahan Condong di Kecamatan Singkawang Tengah,
 - (3) Kelurahan Pasiran dan Kelurahan Melayu di Kecamatan Singkawang Barat,
 - (4) Kelurahan Sedau di Kecamatan Singkawang Utara, dan
 - (5) Kelurahan Pajintan di Kecamatan Timur
- b) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) terdapat di Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah
 - c) Tempat Pemrosesan Akhir sampah yakni TPA Wonosari terdapat di Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah
- 5) Sistem jaringan evakuasi bencana, terdiri atas:
- a) Jalur evakuasi bencana mengikuti jaringan jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan di Kota Singkawang, dan
 - b) Tempat evakuasi bencana memanfaatkan lapangan olahraga, fasilitas umum, RTH, kantor pemerintah dan bangunan besar lain yang aman dari bencana
- 6) Sistem drainase, terdiri atas:
- a) Jaringan drainase primer, terdapat di: Sungai Singkawang, Sungai Sedau, Sungai Air Merah, Sungai Semelagi Kecil, Sungai Pinang, Sungai Selakau, Sungai Air Putih, Sungai Air Hitam, Sungai Setapuk Besar, Sungai Setapuk Kecil, Sungai Sei. Rasau, Sungai Sei. Bulan, Sungai Nangka, Sungai Garam, Sungai Wie, Sungai Sakok, dan Sungai Jamthang.
 - b) Jaringan drainase sekunder terdapat disepanjang kanan dan kiri jaringan jalan dengan fungsi arteri, kolektor dan

sebagian lokal di Kota Singkawang.

- c) Jaringan drainase tersier meliputi jaringan drainase yang terdapat disepanjang kanan dan kiri jaringan jalan dengan fungsi jalan lokal di Kota Singkawang.
 - d) Jalur sepeda, berupa pengembangan jalur sepeda yang berada di sebagian ruas jalan Jalan Ahmad Yani, Jalan Firdaus HR, Jalan SM. Tsjafoeddin, Jalan Diponegoro, Jalan Pemuda, Jalan Merdeka, Jalan Setiabudi, Jalan Sejahtera, Jalan Kalimantan, Jalan Sudirman, dan Jalan Nusantara.
- 7) Jaringan pejalan kaki, berupa pengembangan jalur pejalan kaki yang berada di sebagian ruas jalan Kota Singkawang khususnya pada kawasan pendidikan, perkantoran, perdagangan dan jasa, dan pariwisata yang terdiri dari Jalan Firdaus HR, Jalan Dr. Sutomo, Jalan P. Antasari, Jalan SM. Tsjafoeddin, Jalan Yos Sudarso, Jalan Alianyang, Jalan Ahmad Yani, Jalan Firdaus HR II, Jalan Diponegoro, Jalan Merdeka, Jalan Pemuda, Jalan Nusantara, Jalan Perwira, Jalan R.A Kartini, Jalan Satria, Jalan Bintara, Jalan Sudirman, Jalan Kalimantan, Jalan GS. Lalanang, Jalan Yohana Godang, dan Jalan GM. Situt.

B. Rencana Pola Ruang

Rencana Pola Ruang Wilayah Daerah meliputi:

1. Kawasan Lindung

Rencana pola ruang kawasan lindung terdiri atas:

- a. Badan air, adalah sebagian badan air yang berada di Kota Singkawang, dengan luas kurang lebih 265 ha (dua ratus enam puluh lima hektare), yaitu: Sungai Singkawang, Sungai Sedau, Sungai Air Merah, dan Sungai Selakau, Sungai Setapuk Besar, Sungai Garam, Sungai Wie, Embung Panjintan, dan Danau

Serantangan.

- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, berupa kawasan lindung gambut. Kawasan lindung gambut memiliki luas kurang lebih 287 ha (dua ratus delapan puluh tujuh hektare), terdapat di:
 - 1) Kelurahan Pangmilang di Kecamatan Singkawang Selatan, dan
 - 2) Kelurahan Sedau di Kecamatan Singkawang Selatan
- c. Kawasan perlindungan setempat, memiliki luas kurang lebih 397 ha (tiga ratus sembilan puluh tujuh hektare) yang terletak di sekitar Sungai Acoi, Sungai Garam, Sungai Merah, Sungai Pasi, Sungai Sedau, Sungai Setapuk Besar, Sungai Transad, Sungai Wie, Sungai Singkawang, Danau serantangan, Danau Biru, dan Kawasan Pantai di Kecamatan Singkawang Selatan
- d. Ruang terbuka hijau, memiliki luas 7.749 ha (tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan hektare), terdiri atas:
 - 1) Rimba Kota, memiliki luas kurang lebih 7.355 ha (tujuh ribu tiga ratus lima puluh lima hektare) yang terletak di:
 - a) Kelurahan Kuala dan Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat,
 - b) Kelurahan Pangmilang, Kelurahan Sagatani, Kelurahan Sedau dan Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan,
 - c) Kelurahan Roban dan Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah,
 - d) Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Mayasopa, Kelurahan Nyarumkop, Kelurahan Pajintan dan Kelurahan Sanggau Kulor Kecamatan Singkawang Timur, dan
 - e) Kelurahan Naram, Kelurahan Semelagi Kecil, Kelurahan Setapuk Besar, Kelurahan Setapuk Kecil, Kelurahan

Sungai Bulan, Kelurahan Sungai Garam Hilir dan Kelurahan Sungai Rasau Kecamatan Singkawang Utara

- 2) Taman Kota, memiliki luas kurang lebih 221 ha (dua ratus dua puluh satu hektare) tersebar di seluruh Kota Singkawang:
 - a) Kelurahan Sungai Rasau, Kelurahan Setapuk Besar, dan Kelurahan Setapuk Kecil di Kecamatan Singkawang Utara,
 - b) Kelurahan Sedau, Kelurahan Sijangkung, dan Kelurahan Pangmilang di Kecamatan Singkawang Selatan,
 - c) Kelurahan Pasiran, Kelurahan Melayu, dan Kelurahan Tengah di Kecamatan Singkawang Barat, dan
 - d) Kelurahan Roban, Kelurahan Jawa, dan Kelurahan Condong di Kecamatan Singkawang Tengah.
- 3) Taman Kecamatan, memiliki luas kurang lebih 10 ha (sepuluh hektare) terletak di Kelurahan Sungai Rasau, Kecamatan Singkawang Utara.
- 4) Taman Kelurahan, memiliki luas kurang lebih 7 ha (tujuh hektare) terletak di:
 - a) Kelurahan Naram, Kelurahan Sungai Bulan dan Kelurahan Sungai Rasau, Kecamatan Singkawang Utara, dan
 - b) Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat
- 5) Pemakaman, dengan luas kurang lebih 154 ha (seratus lima puluh empat hektare) yang tersebar di seluruh Kota Singkawang.
- e. Kawasan konservasi, berupa kawasan suaka alam (KSA). Kawasan suaka alam (KSA) merupakan cagar alam Gunung Raya Pasi di Kota Singkawang dengan luas kurang lebih 2.479 ha (dua ribu empat ratus tujuh puluh sembilan hektare) terletak di Kelurahan Pangmilang, Kelurahan Sagatani, Kelurahan Sijangkung di Kecamatan Singkawang Selatan dan Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Nyarumkop, Kelurahan Pajintan.

f. Kawasan ekosistem mangrove, dengan luasan kurang lebih 137 ha (seratus tiga puluh tujuh hektare), terdapat di:

- 1) Kelurahan Sungai Wie di Kecamatan Singkawang Tengah,
- 2) Kelurahan Pasiran dan Kelurahan Kuala di Kecamatan Singkawang Barat,
- 3) Kelurahan Sungai Garam Hilir, Kelurahan Naram, Kelurahan Sungai Bulan, Kelurahan Sungai Rasau, Kelurahan Setapuk Kecil, Kelurahan Setapuk Besar, Kelurahan Semelagi Kecil di Kecamatan Singkawang Utara, dan
- 4) Kelurahan Sedau di Kecamatan Singkawang Selatan.

2. Kawasan Budi Daya

Kawasan Budi Daya meliputi:

- a. Badan jalan, meliputi sebagian badan jalan yang tersebar di seluruh Kota Singkawang, dengan luas kurang lebih 220 ha (dua ratus dua puluh hektare).
- b. Kawasan hutan produksi, meliputi:
 - 1) Kawasan hutan produksi tetap dengan luasan kurang lebih 5.183 ha (lima ribu seratus delapan puluh tiga hektare), terdapat di:
 - a) Kelurahan Mayasopa dan Kelurahan Nyarumkop di Kecamatan Singkawang Timur, dan
 - b) Kelurahan Semelagi Kecil, Kelurahan Setapuk Besar, Kelurahan Setapuk Kecil, Kelurahan Sungai Rasau di Kecamatan Singkawang Utara.
 - 2) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan luasan kurang lebih 0,28 ha (nol koma dua delapan hektare) terdapat di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan.

c. Kawasan pertanian, terdiri atas:

- 1) Kawasan tanaman pangan, dengan luasan kurang lebih dengan luas kurang lebih 10.995 ha (sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima hektare), terdapat di:
 - a) Kelurahan Semelagi Kecil, Kelurahan Setapak Besar, Kelurahan Setapak Kecil, Kelurahan Sungai Rasau, Kelurahan Sungai Bulan, Kelurahan Naram, dan Kelurahan Sungai Garam Hilir di Kecamatan Singkawang Utara,
 - b) Kelurahan Bukit Batu, Kelurahan Roban, dan Kelurahan Sungai Wie di Kecamatan Singkawang Tengah,
 - c) Kelurahan Sedau, Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Pangmilang, dan Kelurahan Sagatani di Kecamatan Singkawang Selatan,
 - d) Kelurahan Sanggau Kulor, Kelurahan Pajintan, Kelurahan Nyarumkop, Kelurahan Bagak Sahwa, dan Kelurahan Mayasopa di Kecamatan Singkawang Timur, dan
 - e) Kelurahan Pasiran di Kecamatan Singkawang Barat.
- 2) Kawasan hortikultura, dengan luasan kurang lebih 702 ha (tujuh ratus dua hektare) tersebar di seluruh Kota Singkawang:
 - a) Kelurahan Mayasopa di Kecamatan Singkawang Timur, dan
 - b) Kelurahan Sagatani di Kecamatan Singkawang Selatan
- 3) Kawasan perkebunan, dengan luasan kurang lebih 9.819 ha (sembilan ribu delapan ratus sembilan belas hektare), terdapat di:
 - a) Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Mayasopa, Kelurahan Nyarumkop, Kelurahan Sanggau Kulor, dan Kelurahan Pajintan di Kecamatan Singkawang Timur,
 - b) Kelurahan Semelagi Kecil, Kelurahan Setapak Besar, Kelurahan Setapak Kecil, Kelurahan Sungai Rasau,

- Kelurahan Sungai Bulan, Kelurahan Naram, dan Kelurahan Sungai Garam Hilir di Kecamatan Singkawang Utara,
- c) Kelurahan Sedau, Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Pangmilang, dan Kelurahan Sagatani di Kecamatan Singkawang Selatan, dan
 - d) Kelurahan Roban dan Kelurahan Sungai Wie di Kecamatan Singkawang Tengah
- 4) Kawasan peternakan, dengan luasan kurang lebih 2.266 ha (dua ribu dua ratus enam puluh enam hektare), terdapat di:
- a) Kelurahan Naram dan Kelurahan Sungai Bulan di Kecamatan Singkawang Utara,
 - b) Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah,
 - c) Kelurahan Pajintan, Kelurahan Nyarumkop dan Kelurahan Sanggau Kulor di Kecamatan Singkawang Timur, dan
 - d) Kelurahan Sedau, Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Pangmilang dan Kelurahan Sagatani di Kecamatan Singkawang Selatan
- d. Kawasan perikanan, terdiri dari:
- 1) Kawasan perikanan tangkap, dengan luasan kurang lebih 62 ha (enam puluh dua hektare) terdapat di Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah.
 - 2) Kawasan perikanan budi daya, dengan luasan kurang lebih 53 ha (lima puluh tiga hektare) terdapat di Kelurahan Setapuk Besar, Kelurahan Sungai Rasau, dan Kelurahan Sungai Bulan di Kecamatan Singkawang Utara.
- e. Kawasan pertambangan dan energi, meliputi:
- 1) Kawasan pertambangan mineral, terdiri atas:
 - a) Kawasan peruntukan pertambangan batuan, dengan luasan kurang lebih 203 ha (dua ratus tiga hektare), terdapat di:

- (1) Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah,
 - (2) Kelurahan Sanggau Kulor, Kelurahan Nyarumkop di Kecamatan Singkawang Timur, dan
 - (3) Kelurahan Sedau dan Kelurahan Sagatani Kecamatan Singkawang Selatan.
- b) Kawasan pertambangan mineral bukan logam, dengan luasan kurang lebih 230 ha (dua ratus tiga puluh hektare) terdapat di Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan.
- 2) Kawasan pembangkitan tenaga listrik, dengan luas kurang lebih 6 ha (enam hektare), terdapat di Kelurahan Roban, Kelurahan Sungai Wie dan Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah.
- f. Kawasan peruntukan industri, terdapat di Kelurahan Pangmilang, Kelurahan Sijangkung, dan Kelurahan Sedau dengan luas kurang lebih 208 ha (dua ratus delapan hektare).
- g. Kawasan pariwisata, dengan luas kurang lebih 1.255 ha (seribu dua ratus lima puluh lima hektare), terdiri atas:
- 1) Kawasan Mangrove Setapak di Kecamatan Singkawang Utara,
 - 2) Taman Pasir Panjang Indah di Kecamatan Singkawang Selatan,
 - 3) Palm Beach di Kecamatan Singkawang Selatan,
 - 4) Tanjung Bajau di Kecamatan Singkawang Selatan,
 - 5) Pantai Batu Burung di Kecamatan Singkawang Selatan,
 - 6) Danau Serantangan di Kecamatan Singkawang Selatan,
 - 7) Taman Rekreasi Bukit Bougenville di Kecamatan Singkawang Selatan,
 - 8) Taman Rekreasi Chidayu Indah di Kecamatan Singkawang Selatan,
 - 9) Dayang Resort di Kecamatan Singkawang Selatan,
 - 10) Batu Belimbing di Kecamatan Singkawang Timur,

- 11) Wisata Mangrove Kuala di Kecamatan Singkawang Barat, dan
12) Taman Rekreasi Teratai Indah di Kecamatan Singkawang Barat.
- h. Kawasan permukiman, terdiri atas:
- 1) Kawasan perumahan, dengan luasan kurang lebih 10.086 ha (sepuluh ribu delapan puluh enam hektare) yang tersebar diseluruh Kota Singkawang.
 - 2) Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, memiliki luas kurang lebih 363 ha (tiga ratus enam puluh tiga hektare), yang tersebar di seluruh Kota Singkawang.
 - 3) Kawasan infrastruktur perkotaan, memiliki luas kurang lebih 68 ha (enam puluh delapan hektare) yang terdapat di:
 - a) Kelurahan Sedau, Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Sagatani, dan Kelurahan Pangmilang di Kecamatan Singkawang Selatan,
 - b) Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah, dan
 - c) Kelurahan Sanggau Kulor di Singkawang Timur
- i. Kawasan perdagangan dan jasa, dengan luasan kurang lebih 1.455 ha (seribu empat ratus lima puluh lima hectare), yang tersebar di seluruh Kota Singkawang,
- j. Kawasan perkantoran, dengan luasan kurang lebih 45 ha (empat puluh lima hektare), yang tersebar di seluruh Kota Singkawang,
- k. Kawasan transportasi, memiliki luas 279 ha (dua ratus tujuh puluh sembilan hektare) yang terdapat di:
- 1) Kelurahan Kuala di Kecamatan Singkawang Barat,
 - 2) Kelurahan Pangmilang dan Kelurahan Sedau di Kecamatan Singkawang Selatan,
 - 3) Kelurahan Sungai Wie di Kecamatan Singkawang Tengah, dan
 - 4) Kelurahan Semelagi Kecil di Kecamatan Singkawang Utara.
- l. Kawasan pertahanan dan keamanan, dengan luas kurang lebih 194 ha (seratus sembilan puluh empat hektare), terdapat di:
- 1) Kelurahan Bukit Batu, Kelurahan Sekip Lama, Kelurahan Jawa,

Kelurahan Condong, dan Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah,

- 2) Kelurahan Sedau, Kelurahan Sijangkung, dan Kelurahan Sagatani di Kecamatan Singkawang Selatan,
- 3) Kelurahan Pasiran, Kelurahan Melayu, dan Kelurahan Tengah di Kecamatan Singkawang Barat, dan
- 4) Kelurahan Pajintan di Kecamatan Singkawang Timur.

Kawasan pertahanan dan keamanan, terdiri dari:

- 1) Sekolah Calon Tamtama (Secata) dan Sartaif Tentara Nasional Indonesia Markas Komando Resimen Induk Daerah Militer XII Tanjungpura, di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan,
- 2) Lapangan Tembak Rindam di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan,
- 3) Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) XII Tanjungpura di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan,
- 4) Komando Distrik Militer (Kodim) 1202/ Komando Rayon Militer (Koramil) 1202-16/Sedau, di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan,
- 5) Sekolah Polisi Negara (SPN) Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, di Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan,
- 6) Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Satuan Korps Brigade Mobil (Brimob)/Detasemen B Pelopor, Kelurahan Sijangkung, Kecamatan Singkawang Selatan,
- 7) Komando Rayon Militer (Koramil) 1202-05/Singkawang Barat, di Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat,
- 8) Komando Distrik Militer (Kodim) 1202/Singkawang, di Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat,
- 9) Kepolisian Resor (Polres) Singkawang di Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat,

- 10) Detasemen Polisi Militer (Denpom) XII/1 Sintang, Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat,
- 11) Perumahan Polisi/ Tentara di Kelurahan Tengah, Kecamatan Singkawang Barat,
- 12) Brigade Infantri (Brigif) 19/Khatulistiwa di Kelurahan Bukit Batu, Kecamatan Singkawang Tengah,
- 13) Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Singkawang, di Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah,
- 14) Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura Batalyon Infanteri Raider 641/Beruang, di Kelurahan Pajintan, Kecamatan Singkawang Timur,
- 15) Mess Singkawang Lapangan Udara (Lanud) Hadi Soemantri, di Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, dan
- 16) Kepolisian Sektor (Polsek) di Kecamatan Singkawang Tengah, Kecamatan Singkawang Barat dan Kecamatan Singkawang Selatan.

4.2.5. Penetapan Isu Strategis Kota Singkawang

Berdasarkan hasil capaian dan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka ditetapkan isu strategis pembangunan sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Dan Berkarakter dengan permasalahannya yaitu Belum optimalnya pelayanan kesehatan dengan indikator masih adanya Masih adanya balita dengan status gizi buruk dan stunting, Masih adanya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup, Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) per 1.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Balita per 1.000, masih adanya temuan penyakit menular (TBC, Covid 19 dll) serta Masih adanya angka prevalensi penyakit tidak menular (Hipertensi, Diabetes Melitus, Diare, polio dll).
- Sesuai RPJPD Kota Singkawang tahap 4, ditargetkan pencapaian pembangunan urusan kesehatan yaitu:

- Peningkatan kualitas maupun jangkauan cakupan program yang berdampak pada penurunan angka kematian bayi, angka kematian ibu dan peningkatan status gizi balita.
- Peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga kesehatan dan manajemen kesehatan.
- Membaiknya indikator-indikator pembangunan kesehatan (AKBayi = 17 per 1.000 kh ; AKBalita = 20 per 1.000 kh ; AKIbu = 250 per 100.000 kh; AHHidup = 77 thn ; % Balita Gizi Buruk = 0,5%).

Adapun dari dimensi pendidikan, permasalahan yang dapat ditemukan adalah menurunnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, SD/MI/Paket A serta Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) SD/MI/Paket A.

Sesuai RPJPD Kota Singkawang tahap 4, ditargetkan untuk pencapaian urusan pendidikan yaitu:

- Peningkatan kemampuan akademik dan profesionalisme diikuti dengan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.
- Peningkatan kualitas dan pemberdayaan lembaga pendidikan (sekolah dan luar sekolah).
- Penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan memenuhi standar.
- Peningkatan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
- Membaiknya indikator-indikator pembangunan pendidikan (APK SD/MI = 100,0% ; APM SD/MI = 100,0% ; APK SMP/MTs = 100,0% ; APM SMP/MTs = 99,0% ; APK SMA/SMK/MA = 90,0% ; APM SMA/SMK/MA = 80,0% ; AMH usia 15-24 thn = 100,0%; IPM = 80,0).

2. Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor Strategis Yang Berwawasan Lingkungan.

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang mengalami penurunan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 hingga mencapai - 2,43 dari 4,53 pada tahun 2019 yang salah satu faktor terbesarnya adalah

terjadinya pandemi Covid-19 sehingga berdampak pada menurunnya perekonomian hampir disemua sector khususnya sektor perdagangan dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum.

Berdasarkan RPJPD Kota Singkawang, sampai akhir tahun 2025 perekonomian Kota Singkawang ditargetkan tumbuh sebesar 6,29% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,28% per tahun. Adapun prioritas Pembangunan ekonomi pada tahap akhir diprioritaskan pada beberapa hal sebagai berikut:

- Peningkatan kegiatan industri, perdagangan, dan jasa berskala luas.
- Perencanaan pengembangan sektor/bidang usaha skala menengah/besar yang dipandang strategis untuk dipromosikan kepada investor luar.
- Pengembangan kegiatan penanaman modal di daerah berskala nasional dan internasional.
- Pengembangan kawasan perdagangan dan bisnis terpadu di daerah.

3. Peningkatan infrastruktur dasar yang berkelanjutan

Sesuai RPJPD Kota Singkawang pada Tahap ke-4, pembangunan infrastruktur ditargetkan dapat mencapai pembangunan berbagai bidang sebagai berikut:

- Bidang Transportasi:
pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dengan target sepanjang $\pm$ 350 Km, pemeliharaan dan rehabilitasi jembatan sebanyak 30 unit, pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang $\pm$ 85 Km, pembangunan dan peningkatan jembatan $\pm$ 15 unit. Peningkatan infrastruktur dan fungsi Bandar Udara Singkawang. Peningkatan Status dan Pelayanan Pelabuhan Laut Singkawang.
- Bidang Sumber Daya Air:
Bidang Sumber Air (Daerah Irigasi & Daerah Rawa) : perbaikan tanggul 22.500 M', perbaikan pintu air 12 unit, pembuatan pintu air 30 unit, perbaikan saluran 75.000 M', pembuatan saluran 40.000 M', pembuatan Jalan Usaha Tani 1.400 M', perbaikan bangunan pelengkap 20 unit,

perbaikan bangunan bendung 18 unit, pembuatan bangunan bendung 5 unit dan normalisasi sungai 12.000 M’.

- Bidang Informasi dan Telekomunikasi :
semakin berkembang dan memasyarakatnya pengguna pelayanan informasi dan telekomunikasi.
- Bidang Sumber daya air : peningkatan pelayanan air bersih.
- Bidang Energi Listrik :
kebutuhan akan energi listrik untuk wilayah Kota Singkawang terpenuhi dan sistem manajemen dan tingkat keandalan pelayanan kepada konsumen semakin baik.

4. Peningkatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk mencapai target akhir RPJPD Kota Singkawang khususnya Tahap ke-4 yaitu untuk Peningkatan Efektivitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam melalui Peningkatan Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik
Adapun target pembangunan jangka panjang Kota Singkawang yaitu:
 - Terwujudnya prototipe sebuah civil society yang kuat di Kota Singkawang;
 - Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sudah sepenuhnya didasarkan pada semangat dan prinsip-prinsip good governance.
6. Reformasi Birokrasi Yang Akuntabel
Adapun target pembangunan jangka panjang Kota Singkawang yaitu:
Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintahan daerah untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
7. Lemahnya penegakkan implementasi produk hukum
dapat dilihat dari masih tingginya angka kriminalitas sehingga Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Kondusif, Toleran Dan Berbudaya belum optimal.

Tabel 4.40 Rumusan Isu Strategis RPD

Isu Internasional (Pengarusutamaan TPB/SDGs)	Agenda Nasional	Isu Strategis Provinsi	RPJPD		Rumusan Isu Strategis
			Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	RPD 2023 - 2026
1	2	3	4	5	6
TPB Pilar Pembangunan Sosial	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Belum meratanya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan sehingga belum terpenuhinya SPM Pendidikan dan Kesehatan.	Terwujudnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif, produktif, inovatif, berbudaya dan mandiri berlandaskan kepada nilai-nilai luhur Pancasila.	Terkendalnya tingkat pertumbuhan penduduk.	Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berkarakter; Belum optimalnya derajat Kesehatan masyarakat; (masih tingginya kasus stunting) Belum optimalnya
				meningkatkan pemerataan kesehatan serta peningkatan kualitas dan cakupan program layanan kesehatan.	
				meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang semakin membaik serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan	

Isu Internasional (Pengarusutamaan TPB/SDGs)	Agenda Nasional	Isu Strategis Provinsi	RPJPD		Rumusan Isu Strategis
			Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	RPD 2023 - 2026
				peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang ditandai dengan meningkatnya IPM	kualitas Pendidikan (masih minimnya penyelenggaraan Pendidikan inklusif)
				meningkatnya pemerataan pendidikan dalam kerangka penuntasan wajib belajar 12 tahun dan peningkatan kualitas lulusan	
TPB Pilar Pembangunan Sosial dan Pilar Pembangunan Ekonomi	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Kesejahteraan petani masih sangat rendah ditunjukkan dari penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) dan produktivitas pertanian.	Terwujudnya perekonomian yang maju dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan investasi, yang berbasis pada peningkatan kegiatan jasa,	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh meluasnya kegiatan investasi di berbagai sektor ekonomi strategis.	Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor Strategis Yang Berwawasan Lingkungan
				Meningkatnya kegiatan dan peran usaha skala mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan Koperasi dalam berbagai kegiatan perdagangan dan	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dalam

Isu Internasional (Pengarusutamaan TPB/SDGs)	Agenda Nasional	Isu Strategis Provinsi	RPJPD		Rumusan Isu Strategis
			Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	RPD 2023 - 2026
			perdagangan, dan agroindustri.	jasa dalam rangka mengatasi persoalan kemiskinan dan pengangguran.	mendukung pertumbuhan perekonomian sektor industri, UMKM, perdagangan pariwisata, ekonomi kreatif dan pertanian untuk memperluas lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan
				Meningkatnya kemampuan pengelolaan pariwisata yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah dan masyarakat.	
		Peranan perindustrian, perdagangan dan pariwisata terhadap perekonomian belum optimal.		Meningkatnya kemampuan perpajakan daerah (local taxing power) dalam upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah.	
				Meningkatnya kegiatan industri pengolahan hasil pertanian (agroindustri) berbasis pada hasil produk agribisnis lokal, dan pengembangan klaster (IKM).	

Isu Internasional (Pengarusutamaan TPB/SDGs)	Agenda Nasional	Isu Strategis Provinsi	RPJPD		Rumusan Isu Strategis
			Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	RPD 2023 - 2026
				Dihasilkannya komoditas unggulan yang memiliki aksesibilitas pasar yang kuat dan berdaya saing, serta mampu mendorong kegiatan industri pengolahan dan perdagangan.	
TPB Pilar Pembangunan Lingkungan dan Pilar Pembangunan Ekonomi	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi serta akses infrastruktur dasar belum memadai sehingga tidak menarik bagi masuknya investasi.	Terwujudnya infrastruktur yang memadai, penataan ruang dan tata guna tanah untuk meningkatkan arus perdagangan barang dan jasa serta mengembangkan kepariwisataan.	Meningkatkan sistem manajemen dan prasarana transportasi agar tetap dalam kondisi mantap sebagai faktor pendukung utama untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan dan ketertiban dengan melibatkan peran serta swasta dan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.	- Belum optimalnya sistem manajemen dan prasarana transportasi

Isu Internasional (Pengarusutamaan TPB/SDGs)	Agenda Nasional	Isu Strategis Provinsi	RPJPD		Rumusan Isu Strategis
			Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	RPD 2023 - 2026
				Merealisasikan rencana pembangunan bandar udara sebagai salah satu pelayanan kepada masyarakat dan investor untuk transportasi ke dalam dan luar propinsi maupun kemancanegara dalam rangka mewujudkan Kota Singkawang sebagai pusat bisnis, industri jasa, pariwisata dan agropolitan.	- Belum selesainya proses pembangunan Bandar udara Singkawang
				Mengoptimalkan fungsi terminal sesuai dengan status terminal, yaitu terminal dalam kota, terminal antar kota dan terminal antar negara.	Belum adanya terminal tipe A sebagai sarana pendukung transportasi antar negara
	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan			Menjaga dan meningkatkan kualitas air serta pengembangan sistem distribusi air bersih	Belum terjaganya kualitas air baku Belum terpenuhinya pemenuhan air bersih pada

Isu Internasional (Pengarusutamaan TPB/SDGs)	Agenda Nasional	Isu Strategis Provinsi	RPJPD		Rumusan Isu Strategis
			Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	RPD 2023 - 2026
	ketahanan bencana dan perubahan iklim			secara merata dan berkeadilan dengan pengelolaan secara efektif, efisien dan berkelanjutan.	masyarakat kota Singkawang
				Kondisi lingkungan hidup dan pengelolaan SDA masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga daya dukung lingkungan kecenderungannya terus menurun dan ketersediaan SDA semakin menipis.	Menurunnya kualitas lingkungan hidup
TPB Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public	Wilayah Provinsi Kalimantan Barat terlalu luas sehingga menyulitkan dalam pelayanan	Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintahan daerah untuk	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja dalam rangka memberikan pelayanan publik.	- Belum optimalnya Reformasi Birokrasi Yang Akuntabel

Isu Internasional (Pengarusutamaan TPB/SDGs)	Agenda Nasional	Isu Strategis Provinsi	RPJPD		Rumusan Isu Strategis
			Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	RPD 2023 - 2026
		dan pengalokasian anggaran.	mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).	Meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang baik dan membangun sinergisitas antar lembaga dan antar daerah.	- Belum optimalnya Kualitas Pelayanan Publik
		Belum adanya keterpaduan rencana sektor dengan rencana tata ruang dan belum tersedianya data dan informasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan penataan ruang dan perencanaan pembangunan daerah.	Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, berkeadilan, dan berkeeseimbangan ekosistem.	Menegakan supremasi hukum dan kepastian hukum masyarakat serta peraturan daerah.	

Isu Internasional (Pengarusutamaan TPB/SDGs)	Agenda Nasional	Isu Strategis Provinsi	RPJPD		Rumusan Isu Strategis
			Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	RPD 2023 - 2026
		Kualitas regulasi, birokrasi, dan tata kelola pemerintahan masih relatif rendah sehingga berdampak terhadap penurunan daya saing daerah.		Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif.	Belum optimalnya Penyusunan perencanaan yang berkualitas dan partisipatif serta tepat waktu
				Menata dan meningkatkan kapasitas kelembagaan daerah, kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah.	Belum optimalnya Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas kinerja aparatur
				Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah melalui pengawasan	Belum optimalnya pengawasan

Isu Internasional (Pengarusutamaan TPB/SDGs)	Agenda Nasional	Isu Strategis Provinsi	RPJPD		Rumusan Isu Strategis
			Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	RPD 2023 - 2026
				internal, eksternal dan pengawasan masyarakat.	internal berbasis resiko
			Terwujudnya budaya politik yang demokratis, dan keamanan serta ketertiban masyarakat berbasis supremasi hukum.	Mewujudkan situasi kondusif di daerah melalui peningkatan peran penyidik PNS dalam penegakan Perda.	Lemahnya Penegakkan Implementasi Produk hukum
				Mengembangkan budaya hukum di masyarakat.	Belum maksimalnya pemahaman terhadap kesatuan bangsa dan politik
				Melakukan proses legal drafting untuk menginventarisir, merancang, menetapkan, dan mengimplementasikan Perda serta mengevaluasi Perda-Perda yang sudah tidak relevan.	
				Meningkatkan sistem koordinasi antar komponen masyarakat guna mewujudkan stabilitas politik dan	

Isu Internasional (Pengarusutamaan TPB/SDGs)	Agenda Nasional	Isu Strategis Provinsi	RPJPD		Rumusan Isu Strategis
			Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	RPD 2023 - 2026
				keamanan di Kota Singkawang.	
				Membangun struktur dan kultur politik masyarakat Kota Singkawang yang demokratis.	
				Meningkatkan peran dan fungsi institusi politik dan komunikasi politik baik yang berada pada suprastruktur politik, infrastruktur politik dan antara komponen masyarakat yang ada di Kota Singkawang.	
				Meningkatkan semangat nasionalisme, wawasan kebangsaan, dan kesadaran bela negara.	
				Meningkatkan pemahaman masyarakat Kota Singkawang tentang multikulturalisme budaya	

Isu Internasional (Pengarusutamaan TPB/SDGs)	Agenda Nasional	Isu Strategis Provinsi	RPJPD		Rumusan Isu Strategis
			Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	RPD 2023 - 2026
				dan politik, sehingga terimplementasikannya budaya politik yang demokratis, menjunjung tinggi hukum dan etika politik.	
				Mengembangkan iklim dan proses politik yang demokratis di Kota Singkawang sehingga memungkinkan semua elemen masyarakat bisa berpartisipasi dan melakukan kontrol yang efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.	
				Meningkatkan etika dan moral budaya politik sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dan UUD 1945	

Isu Internasional (Pengarusutamaan TPB/SDGs)	Agenda Nasional	Isu Strategis Provinsi	RPJPD		Rumusan Isu Strategis
			Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	RPD 2023 - 2026
				yang bertumpu pada kebhineka Tunggal ika-an.	
				Meningkatkan kemandirian dan fungsi partai politik dalam menyerap, menyampaikan, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan mengembangkan sikap bijaksana dan menjunjung tinggi etika demokrasi.	
				Meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan dan sumberdaya manusia anggota partai politik dan anggota DPRD.	
				Mendorong terlaksananya penegakan supremasi hukum agar lebih menjamin terciptanya kepastian hukum, keadilan	

Isu Internasional (Pengarusutamaan TPB/SDGs)	Agenda Nasional	Isu Strategis Provinsi	RPJPD		Rumusan Isu Strategis
			Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	RPD 2023 - 2026
				dan kebenaran, serta menghargai dan menjunjung tinggi HAM.	
				Meningkatkan upaya deteksi dini, pencegahan, dan penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, obat-obat terlarang, serta zat adiktif.	
				Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.	

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

Bab V memuat rumusan tujuan dan sasaran tahun 2023-2026. Tujuan adalah suatu pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab seluruh isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi optimal yang ingin dicapai di masa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional.

Sedangkan perumusan sasaran bertujuan menjabarkan pernyataan tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah Kota Singkawang. Rumusan tujuan dan sasaran tidak lepas dari amanat RPJPD Kota Singkawang 2005-2025 dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang berupa:

1. Terwujudnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
2. Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif, produktif, inovatif, berbudaya dan mandiri berlandaskan kepada nilai-nilai luhur Pancasila.
3. Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintahan daerah untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Terwujudnya perekonomian yang maju dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan investasi, yang berbasis pada peningkatan kegiatan jasa, perdagangan, dan agroindustri.
5. Terwujudnya pembangunan yang merata dan berkeadilan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pembangunan bagi kelompok masyarakat miskin.
6. Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, berkeadilan, dan berkeeseimbangan ekosistem.
7. Terwujudnya infrastruktur yang memadai, penataan ruang dan tata guna tanah untuk meningkatkan arus perdagangan barang dan jasa serta mengembangkan kepariwisataan.
8. Terwujudnya budaya politik yang demokratis, dan keamanan serta ketertiban masyarakat berbasis supremasi hukum.

Dari sasaran pokok pembangunan daerah, dijabarkan menjadi arah pembangunan daerah, yang terdiri dari :

1. Arah pembangunan dari sektor Perekonomian Daerah yaitu:
 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh meluasnya kegiatan investasi di berbagai sektor ekonomi strategis;
 - Meningkatnya kegiatan industri pengolahan hasil pertanian (agroindustri) berbasis pada hasil produk agribisnis lokal, dan pengembangan klaster industri kecil menengah (IKM);
 - Meningkatnya kegiatan dan peran usaha skala mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan Koperasi dalam berbagai kegiatan perdagangan dan jasa dalam rangka mengatasi persoalan kemiskinan dan pengangguran;
 - Dihasilkannya komoditas unggulan yang memiliki aksesibilitas pasar yang kuat dan berdaya saing, serta mampu mendorong kegiatan industri pengolahan dan perdagangan;
 - Meningkatnya kemampuan pengelolaan pariwisata yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah dan masyarakat;
 - Meningkatnya kemampuan perpajakan daerah (local taxing power) dalam upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah.
2. Arah Pembangunan daerah sektor Penduduk, Kesehatan dan Pendidikan, yaitu:
 - Kebijakan pembangunan bidang demografi di Kota Singkawang memiliki peran penting dalam mewujudkan Kota Singkawang yang maju, mandiri, berdaya saing pada pasar lokal, nasional dan global dibarengi dengan semakin terkendalinya tingkat pertumbuhan penduduk, persebaran penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang semakin membaik serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan. sehingga mampu mendukung terwujudnya sumberdaya manusia yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif, sehat dan berakhlak mulia.
 - Pembangunan sumberdaya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan penduduk/masyarakat Kota Singkawang yang maju dan mandiri sehingga mampu berdaya saing dalam pasar global. Sehubungan dengan ini, pembangunan sumberdaya manusia diarahkan pada peningkatan kualitas

sumberdaya manusia yang ditandai dengan meningkatnya IPM.

- Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan merupakan investasi dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Oleh karena itu Pembangunan Pendidikan dalam jangka panjang diarahkan pada pemerataan sarana dan prasarana pendidikan dalam kerangka penuntasan wajib belajar 15 tahun dan peningkatan kualitas lulusan. Selain itu pembangunan pendidikan diarahkan pada meningkatkan kualitas sumberdaya manusia untuk mendukung terwujudnya sumberdaya manusia yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif, sehat dan berakhlak mulia.
 - Pembangunan Kesehatan dalam jangka panjang diarahkan pada pemerataan sarana dan prasarana kesehatan serta peningkatan kualitas dan cakupan program layanan kesehatan. Pembangunan Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumberdaya manusia kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan yang disertai oleh peningkatan pengawasan obat, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan. Pembangunan kesehatan juga diarahkan untuk perbaikan gizi sejak usia dini. Konsumsi rumah tangga dengan kandungan gizi yang cukup, seimbang, serta terjamin keamanannya dalam rangka mencapai status gizi yang baik.
3. Arah Pembangunan Daerah sektor Prasarana dan Sarana, yaitu:
- Meningkatkan sistem manajemen dan prasarana transportasi agar tetap dalam kondisi mantap sebagai faktor pendukung utama untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan dan ketertiban dengan melibatkan peran serta swasta dan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - Merealisasikan rencana pembangunan bandar udara sebagai salah satu pelayanan kepada masyarakat dan investor untuk transportasi ke dalam dan luar propinsi maupun kemancanegara dalam rangka mewujudkan Kota Singkawang sebagai pusat bisnis, industri jasa, pariwisata dan agropolitan.

- Mengoptimalkan fungsi terminal sesuai dengan status terminal, yaitu terminal dalam kota, terminal antar kota dan terminal antar negara.
 - Meningkatkan fungsi pelayanan pos dan telekomunikasi secara merata ke seluruh lapisan masyarakat serta meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam menguasai, memanfaatkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan keunggulan kompetitif daerah.
 - Meningkatkan peran mass-media dan cyber-media yang bebas dan bertanggung jawab untuk mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh informasi, dan sebagai alat kontrol sosial yang konstruktif.
 - Menjaga dan meningkatkan kualitas air serta pengembangan sistem distribusi air bersih secara merata dan berkeadilan dengan pengelolaan secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
 - Pengembangan kemampuan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik dilakukan dengan mencari sumber energi alternatif dan peningkatan kemampuan pelayanan serta meningkatkan sistem dan manajemen penyaluran energi listrik dalam upaya penurunan tingkat kerugian teknis dan non teknis (losses).
4. Arah pembangunan daerah sektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yaitu:
- Kota Singkawang mempunyai variasi batuan, hal ini menyebabkan sumber daya alam yang berasal dari mineral dan energi juga bervariasi, hal ini dapat menjadi potensi tambang yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Kota Singkawang.
 - Kondisi lingkungan hidup dan pengelolaan SDA masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga daya dukung lingkungan kecenderungannya terus menurun dan ketersediaan SDA semakin menipis.

5. Arah pembangunan daerah sektor Hukum, Keamanan, dan Ketertiban Masyarakat, yaitu:

- Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.
- Menegakan supremasi hukum dan kepastian hukum masyarakat serta peraturan daerah.
- Meningkatkan perlindungan hukum dan HAM.
- Mewujudkan situasi kondusif di daerah melalui peningkatan peran penyidik PNS dalam penegakan Perda.
- Meningkatkan upaya deteksi dini, pencegahan, dan penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, obat-obat terlarang, serta zat adiktif.
- Mengembangkan budaya hukum di masyarakat.
- Melakukan proses legal drafting untuk menginventarisir, merancang, menetapkan, dan mengimplementasikan Perda serta mengevaluasi Perda-Perda yang sudah tidak relevan.
- Mendorong terlaksananya penegakan supremasi hukum agar lebih menjamin terciptanya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, serta menghargai dan menjunjung tinggi HAM.

6. Arah pembangunan daerah sektor Politik dan Pemerintahan, yaitu:

a. Politik:

- Membangun struktur dan kultur politik masyarakat Kota Singkawang yang demokratis.
- Meningkatkan peran dan fungsi institusi politik dan komunikasi politik baik yang berada pada suprastruktur politik, infrastruktur politik dan antara komponen masyarakat yang ada di Kota Singkawang.
- Meningkatkan sistem koordinasi antar komponen masyarakat guna mewujudkan stabilitas politik dan keamanan di Kota Singkawang.
- Meningkatkan pemahaman masyarakat Kota Singkawang tentang multikulturalisme budaya dan politik, sehingga

terimplementasikannya budaya politik yang demokratis, menjunjung tinggi hukum dan etika politik.

- Mengembangkan iklim dan proses politik yang demokratis di Kota Singkawang sehingga memungkinkan semua elemen masyarakat bisa berpartisipasi dan melakukan kontrol yang efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- Meningkatkan etika dan moral budaya politik sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dan UUD 1945 yang bertumpu pada kebhineka Tunggal ika-an.
- Meningkatkan kemandirian dan fungsi partai politik dalam menyerap, menyampaikan, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan mengembangkan sikap bijaksana dan menjunjung tinggi etika demokrasi.
- Meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan dan sumberdaya manusia anggota partai politik dan anggota DPRD.
- Meningkatkan semangat nasionalisme, wawasan kebangsaan, dan kesadaran bela negara.

b. Pemerintahan

- Menata dan meningkatkan kapasitas kelembagaan daerah, kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah.
- Meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang baik dan membangun sinergisitas antar lembaga dan antar daerah.
- Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja dalam rangka memberikan pelayanan publik.
- Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah melalui pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat.
- Meningkatkan kesejahteraan PNS melalui pola renumerasi berbasis sistem kinerja baik individu maupun kelembagaan.

7. Arah pembangunan daerah sektor Tata Ruang, yaitu:

- Wilayah Singkawang Tengah dan sebagian wilayah Singkawang Barat diarahkan sebagai pusat kegiatan perdagangan grosir dan jasa komersial, pusat pengembangan industri sedang hingga besar, pusat pemerintahan kota serta pusat permukiman penduduk.
- Wilayah Singkawang Utara diarahkan fungsinya sebagai pusat pengembangan pertanian tanaman pangan, hortikultura (sayuran dan buah-buahan) dan budidaya ikan tambak, serta pengembangan permukiman penduduk.
- Wilayah Singkawang Timur diarahkan sebagai pusat pengembangan pertanian lahan gambut. Di samping itu juga diberikan fungsi penting sebagai pintu gerbang timur Kota Singkawang dan pusat pengembangan pendidikan yang diarahkan ke bagian selatan wilayah Singkawang Timur.
- Wilayah Singkawang Selatan ditetapkan sebagai pusat pengembangan agrowisata, perkebunan, peternakan, pariwisata dan kelautan.

8. Arah pembangunan daerah sektor Budaya dan Agama, yaitu:

a. Budaya:

- Mewujudkan karakter masyarakat Kota Singkawang yang tangguh, kompetitif, bermoralitas tinggi, cerdas-inovatif, patriotik, gotong-royong, dinamis dan toleran dalam kemajemukan, serta berorientasi kepada kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS).
- Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas perilaku masyarakat sesuai dengan ajaran agama, tata nilai dan adat istiadat budaya, serta peraturan yang berlaku secara harmonis, serasi, rukun dan damai.
- Meningkatkan ragam dan kualitas produk pariwisata serta promosi dan pemasaran, baik di dalam maupun luar negeri.
- Menata dan mengembangkan pariwisata dan meningkatkan keanekaragaman obyek dan daya tarik wisata daerah.
- Melakukan perlindungan dan pemberdayaan yang adil dan obyektif terhadap semua potensi sosial dan budaya yang ada pada seluruh

masyarakat Singkawang. Perlindungan potensi sosial dan budaya diarahkan kepada upaya-upaya pelestarian, pemugaran, rekonstruksi, dan fungsionalisasi khazanah sosial dan budaya yang ada di masyarakat sebagai wadah kearifan lokal (local wisdom).

- Meningkatkan pemberdayaan potensi sosial dan budaya, potensi pariwisata secara baik dan berwawasan lingkungan, serta pembinaan masyarakat terutama generasi mudanya melalui olah raga, seni, dan kegiatan budaya lainnya demi untuk keharmonisan dan kesejahteraan masyarakat Kota Singkawang.
- Mengembangkan dan melestarikan potensi kesenian dan kebudayaan lokal dalam rangka membentuk karakteristik masyarakat kota serta mencegah masuknya budaya asing yang negatif.

b. Agama:

- Memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral, spiritual, dan etika dalam kehidupan individu, sosial, bermasyarakat, dan bernegara.
- Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana ibadah.
- Meningkatkan kerukunan hidup beragama dan mengembangkan sikap toleransi dalam kehidupan beragama.
- Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan untuk kesejahteraan umat.

Sasaran pokok pembangunan dan arah pembangunan daerah direncanakan dan dijalankan melalui 4 (empat) tahap pembangunan. Sedangkan Prioritas pembangunan periode keempat yaitu:

1. Perekonomian Daerah

Pembangunan sektor strategis Kota Singkawang pada periode ini diorientasikan untuk memberikan daya ungkit bagi perekonomian daerah. Proses pembangunan ditujukan untuk memperkuat struktur ekonomi dengan berbasis pada potensi SDA dan sumber daya pendukung lainnya. Sektor riil semakin tumbuh dan secara bertahap mampu merealisasikan pertumbuhan ekonomi yang mantap pada tahun 2027. Sampai akhir tahun

2027, perekonomian Kota Singkawang tumbuh sebesar 6,29%, dengan rata-rata pertumbuhan 6,28% per tahun. Keberadaan sektor industri, perdagangan dan sektor jasa semakin berperan dalam menggerakkan perekonomian Kota Singkawang. Ketiga sektor tersebut memberikan daya ungkit yang cukup besar dan menjadikan perekonomian Kota Singkawang semakin unggul dan berdaya saing.

Pembangunan ekonomi pada tahap ini diprioritaskan pada beberapa hal sebagai berikut:

- Peningkatan kegiatan industri, perdagangan, dan jasa berskala luas.
- Perencanaan pengembangan sektor/bidang usaha skala menengah/besar yang dipandang strategis untuk dipromosikan kepada investor luar.
- Pengembangan kegiatan penanaman modal di daerah berskala nasional dan internasional.
- Pengembangan kawasan perdagangan dan bisnis terpadu di daerah.

2. Penduduk, Kesehatan dan Pendidikan

a. Penduduk

Mengendalikan angka laju pertumbuhan penduduk Kota Singkawang dengan besaran antara 1,55 hingga <1,75% pertahun.

Mengendalikan besaran angka laju pertumbuhan penduduk yang mampu untuk menghindari terjadinya struktur usia penduduk yang semakin menua (aging population), agar tidak menjadi tenaga kerja non produktif.

Memperbaiki komposisi persebaran penduduk antar kelurahan dan kecamatan serta antara pusat kegiatan ekonomi dan bukan pusat kegiatan ekonomi.

Mengendalikan dan menjaga keharmonisan hubungan antara penduduk yang memiliki heterogenitas dan pluralistik dan senantiasa menjadikannya sebagai salah satu kekuatan untuk membangun Kota Singkawang dimasa yang akan datang.

b. Ketenagakerjaan

- Penurunan angka pengangguran terbuka menjadi 1,8% melalui pembangunan berorientasi padat karya.
- Perlindungan tenaga kerja anak dan perempuan.

c. Pendidikan

- Peningkatan kemampuan akademik dan profesionalisme diikuti dengan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.
- Peningkatan kualitas dan pemberdayaan lembaga pendidikan (sekolah dan luar sekolah).
- Penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan memenuhi standar.
- Peningkatan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
- Membaiknya indikator-indikator pembangunan pendidikan (APK SD/MI = 100,0% ; APM SD/MI = 100,0% ; APK SMP/MTs = 100,0% ; APM SMP/MTs = 99,0% ; APK SMA/SMK/MA = 90,0% ; APM SMA/SMK/MA = 80,0% ; AMH usia 15-24 thn = 100,0% ; IPM = 80,0).

d. Kesehatan

- Peningkatan kualitas maupun jangkauan cakupan program yang berdampak pada penurunan angka kematian bayi, angka kematian ibu dan peningkatan status gizi balita.
- Peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga kesehatan dan manajemen kesehatan.
- Membaiknya indikator-indikator pembangunan kesehatan (AKBayi = 17 per 1.000 kh ; AKBalita = 20 per 1.000 kh ; AKIbu = 250 per 100.000 kh ; AHHidup = 77 thn ; % Balita Gizi Buruk = 0,5%).

e. Fertilitas dan Keluarga Berencana

- Pemantapan dan pengembangan Program KIE dalam menunjang Kesehatan Reproduksi dan partisipasi Pria ber KB (jumlah peserta KB Aktif meningkat menjadi 95,0%).
- Peningkatan kualitas dan kuantitas Kader KB dalam rangka mendorong terwujudnya keluarga berkualitas tinggi.

f. Kesejahteraan Sosial

Pemberdayaan penduduk dan keluarga miskin, fakir miskin, penyandang cacat, dan kelompok rentan lainnya sehingga jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 9,0% dan jumlah keluarga berstatus KS I (keluarga miskin) berkurang menjadi 7,7%.

3. Prasarana dan Sarana

- Bidang Transportasi ; pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dengan target sepanjang $\pm$ 350 Km, pemeliharaan dan rehabilitasi jembatan sebanyak 30 unit, pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang $\pm$ 85 Km, pembangunan dan peningkatan jembatan $\pm$ 15 unit. Peningkatan infrastruktur dan fungsi Bandar Udara Singkawang. Peningkatan Status dan Pelayanan Pelabuhan Laut Singkawang.
- Bidang Sumber Daya Air: Bidang Sumber Air (Daerah Irigasi & Daerah Rawa) : perbaikan tanggul 22.500 M', perbaikan pintu air 12 unit, pembuatan pintu air 30 unit, perbaikan saluran 75.000 M', pembuatan saluran 40.000 M', pembuatan Jalan Usaha Tani 1.400 M', perbaikan bangunan pelengkap 20 unit, perbaikan bangunan bendung 18 unit, pembuatan bangunan bendung 5 unit dan normalisasi sungai 12.000 M'.
- Bidang Informasi dan Telekomunikasi : semakin berkembang dan memasyarakatnya pengguna pelayanan informasi dan telekomunikasi.
- Bidang Sumber daya air : peningkatan pelayanan air bersih.
- Bidang Energi Listrik : kebutuhan akan energi listrik untuk wilayah Kota Singkawang terpenuhi dan sistem manajemen dan tingkat keandalan pelayanan kepada konsumen semakin baik.

4. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam melalui Peningkatan Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup

5. Hukum, Keamanan, dan Ketertiban Masyarakat

- Menjadikan Kota Singkawang sebagai kota jasa dan tujuan wisata utama yang paling aman dan tertib di Kalimantan Barat khususnya dan Indonesia umumnya.
- Mengimplementasikan Perda dan sekaligus melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan relevansi Perda-Perda yang ada sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan politik dan hukum yang ada.

6. Politik dan Pemerintahan

- Terwujudnya prototipe sebuah civil society yang kuat di Kota Singkawang.
- Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sudah sepenuhnya didasarkan pada semangat dan prinsip-prinsip good governance.

7. Tata Ruang

- Evaluasi dan revisi tata ruang di semua wilayah disesuaikan perkembangan dan kebutuhan tata ruang kota.
- Berkembang pesatnya kawasan baru dan tumbuhnya pusat-pusat industri sebagai fasilitas vital perdagangan regional sesuai dengan RTRK Kota Singkawang.

8. Budaya dan Agama

- Terbangunnya secara signifikan tingkat kesolehan individu dan kesolehan sosial dalam kehidupan masyarakat.
- Kearifan lokal menjadi identitas sosial dan budaya, dan terwujudnya civil society.

Dari prioritas pembangunan pada tahap 4 (empat) RPJMD tersebut, dirumuskan tujuan pembangunan Kota Singkawang untuk kurun waktu selama 4 (empat) tahun ke depan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter, dengan rumusan sasaran:
 - Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
 - Meningkatnya kualitas pendidikan
 - Meningkatnya pengembangan kelestarian budaya
 - Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga
 - Meningkatnya pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk, peran aktif perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan daerah
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan bertumpu pada percepatan sektor strategis untuk penurunan kemiskinan, dengan rumusan sasaran:
 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM
 - Meningkatnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan Perikanan
 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
 - Meningkatnya iklim investasi PMA/PMDN di daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan
 - Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial
3. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan, dengan rumus sasaran :
 - Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar
 - Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi
 - Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sampah yang dikelola
 - Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan

4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan fungsi pelayanan publik yang berbasis inovasi dan teknologi informasi, dengan rumus sasaran:
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
 - Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah
 - Meningkatnya pemahaman terhadap kesatuan bangsa dan politik
 - Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum

Tabel 5.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Sat ua n	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir	Urusa n	Penang gung Jawab
					2023	2024	2025	2026			
					K	K	K	K			
1	2	3	4	5	6				7	8	9
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdayasaing dan berkarakter		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Per sen	72,89	73,3	73,4	73,5	73,6	73,6		
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Per sen	72,11	73,252	73,71	74,17	74,63	74,63	Kesehatan	Dinkes dan KB
	Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Per sen	12,92	12,93	12,94	12,95	12,96	12,96	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Rata Rata Lama Sekolah	Per sen	8,19	8,27	8,35	8,43	8,51	8,51	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya pengembangan kelestari	Persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilestarikan	Per sen	82,67	83,15	83,74	84,12	84,54	84,54	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Sat ua n	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir	Urusa n	Penang gung Jawab
					2023	2024	2025	2026			
					K	K	K	K			
1	2	3	4	5	6				7	8	9
	an budaya										
	Mening katnya kualitas pemuda dan olahraga	Persentase Partisipasi Atlet pada PorProv dan Popda	Per sen	61,71	65	68	70	75	75	Kepem udaan dan Olahra ga	Dinas Pariwis ata, Pemuda dan Olahrag a
	Mening katnya pengend alian pertumb uhan jumlah pendudu k, peran aktif perempu an dan perlindu ngan anak dalam	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Perempuan	Per sen	52,72	53,25	53,78	54,32	54,86	54,86	Pember dayaan peremp uan dan perlind ungan anak	Dinsos, PP dan PA
		Skor tingkat Capaian Kota Layak Anak	Sko r	681,55	685	690	695	699	699	Pember dayaan peremp uan dan perlind ungan anak	Dinsos, PP dan PA

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir	Uraian	Penanggung Jawab
					2023	2024	2025	2026			
					K	K	K	K			
1	2	3	4	5	6				7	8	9
	pembangunan daerah	Laju Pertumbuhan Penduduk	Per sen	1,55	1,65	1,62	1,59	1,56	1,56	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinkes dan KB
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dengan Bertumpu Pada Percepatan Sektor		Persentase pertumbuhan ekonomi	Per sen	5,05	5,1	5,3	5,4	5,6	5,6		
		Inflasi	Per sen	5,96	4,5	4	3,8	3,6	3,6		
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan, perindustrian, koperasi	Volume usaha koperasi	Rp	253.625.219.385	263.625.219.385	273.625.219.385	283.625.219.385	293.625.219.385	293.625.219.385	Koperasi	Disdagnkop dan UKM
		Volume usaha UMKM	Rp	782.901.050.097	792.901.050.097	802.901.050.097	812.901.050.097	822.901.050.097	822.901.050.097	UKM	Disdagnkop dan UKM
		Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Per sen	3,68	4	4,05	4,1	4,15	4,15	Perdagangan	Disdagnkop dan UKM

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Sat ua n	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir	Urusa n	Penang gung Jawab
					2023	2024	2025	2026			
					K	K	K	K			
1	2	3	4	5	6				7	8	9
Strategi s untuk penuru nan kemiski nan	dan UKM	Pertumbuhan PDRB sektor industri	Per sen	4,58	4,6	4,61	4,62	4,65	4,65	Perind ustrian	Disdagi n kop dan UKM
	Mening katnya ketahan an pangan dan pertumb uhan ekonomi sektor pertania n dan Perikana n	Distribusi PDRB sektor pertanian dan Perikanan	Per sen	11,82	11,82	11,87	11,92	11,97	11,97	Pertani an dan Perikan an	Disperta hankan
		Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Sko r	85,7	86,1	86,5	86,9	87,4	87,4	Pangan	Disperta hankan
	Mening katnya pertumb uhan ekonomi di sektor pariwisa	PAD sektor pariwisata	Per sen	9,77	9,8	9,83	9,84	9,85	9,85	Pariwis ata	Dinas Pariwis ata, Pemuda dan Olahrag a

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Sat ua n	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir	Urusa n	Penang gung Jawab
					2023	2024	2025	2026			
					K	K	K	K			
1	2	3	4	5	6				7	8	9
	ta dan ekonomi kreatif	Cakupan Pembinaan Ekonomi Kreatif	Per sen	25	26	26	27	28	28	Pariwis ata	Dinas Pariwis ata, Pemuda dan Olahrag a
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Per sen	8,63	8,4	8	7,8	7,7	7,7		
	Mening katnya iklim	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Per sen	68,86	69,41	69,96	70,51	71,06	71,06	Penana man Modal	DPMT K
	investasi PMA/P MDN di daerah untuk memper luas lapanga n pekerjaa n dan pengent asan	Persentase Penduduk Miskin	Per sen	4,67	4,67	4,5	4,33	4,16	4,16		DPMT K; Disdagi nkok dan UKM; Disperta hankan; Dinas Pariwis ata, Pemuda dan

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir	Urusan	Penanggung Jawab
					2023	2024	2025	2026			
					K	K	K	K			
1	2	3	4	5	6				7	8	9
	kemiskinan										Olahrag a
	Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	Persentase PPKS yang Tertangani	Persen	69,14	84	85	86	87	87	Sosial	Dinsos, PP dan PA
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan		Indeks infrastruktur daerah	Persen	58,67	66,38	68,65	70,7	73,66	73,66		
	Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Persen	97,91	97,97	98,03	98,08	98,14	98,14	PERKIM	Disperkimta
		Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan	Persen	64,98	49,92	46,16	38,63	30,05	30,05	PERKIM	Disperkimta
		Persentase penduduk berakses air minum	Persen	48,71	49,42	49,75	50,06	50,36	50,36	PUPR	Dinas PUPR

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Sat ua n	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir	Urusa n	Penang gung Jawab
					2023	2024	2025	2026			
					K	K	K	K			
1	2	3	4	5	6				7	8	9
n Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan		Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	Per sen	93,5	93,8	94,08	94,2	94,57	94,57	PUPR	Dinas PUPR
	Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi	Persentase Jalan mantap	Per sen	52,35	53,02	54,12	55,3	56,41	56,41	PUPR	Dinas PUPR
		Luas kawasan genangan banjir		4,1	3,73	3,69	3,66	3,64	3,64	PUPR	Dinas PUPR
		Persentase Drainase dalam kondisi baik	Per sen	73,52	75,45	76,86	77,41	81,61	81,61	PUPR	Dinas PUPR
		Persentase Kelancaran Lalu Lintas	Per sen	99,4	99,41	99,42	99,43	99,44	99,44	Perhubungan	Dishub
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sampah yang dikelola	Nil ai	63,85	66,11	66,21	66,31	66,41	66,41	Lingku ngan Hidup	DLH
		Timbulan sampah terkelola	Per sen	95,98	99	99	100	100	100	Lingku ngan Hidup	DLH
	Meningkatnya kualitas penataa	Ketaatan terhadap RTRW	Per sen	96,24	96,24	97,05	98,19	99,2	99,2	PUPR	Dinas PUPR

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Sat ua n	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir	Urusa n	Penang gung Jawab
					2023	2024	2025	2026			
					K	K	K	K			
1	2	3	4	5	6				7	8	9
	n ruang dan penataa n banguna n										
Mening katnya tata kelola pemer intahan yang baik melalui penguat an fungsi pelayan an publik yang berbasi s inovasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Hur uf	63,37	70,01	70,1	70,2	70,3	70,3		
	Mening katnya kualitas pelayan an publik dalam penyele nggaran pemerin tahan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Per sen	85,04	86	87	87,5	88	88	Dukca pil, Dispus sip, Kecam atan Admini strasi, Set.DP RD	Disdukc apil, Dispuss ip, Kecama tan, Set.DP RD
		Nilai RB	Nil ai	63,37	70,01	70,1	70,2	70,3	70,3	Sekre ariat Daerah	SETDA
	Mening katnya akuntabi litas	Indeks SPBE	Per sen	2,6	2,65	3,34	3,35	3,36	3,36	Komin fo, Persan dian,	Diskom info

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Sat ua n	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir	Urusa n	Penang gung Jawab
					2023	2024	2025	2026			
					K	K	K	K			
1	2	3	4	5	6				7	8	9
dan teknolo gi informa si	kinerja dan keuanga n penyele nggaraa n pemerin tah daerah									Statisti k	
		Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)	Nil ai	59,73	59,73	62,72	65,85	69,14	69,14	Kepega waian	BKPSD M
		Indeks SAKIP	Nil ai	-	63,00	63,20	63,50	64,00	64,00	Perenc anaan	Bapped a
		Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Per sen	-	25	50	75	100	100	Peneliti an dan kelitba ngan	Bapped a
		Indeks Inovasi Daerah	Per sen	-	58	59	60	61	61	Peneliti an dan kelitba ngan	Bapped a
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Per sen	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Keuan gan	BPKAD , Bapend a
		Indeks Integritas	Nil ai	73,91	75	76	77	77,5	77,5	Inspekt orat Daerah	Inspekt orat Daerah
	Mening katnya pemaha man	Indeks Toleransi	Nil ai	6,583	6,6	6,63	6,66	6,7	6,7	Kesatu an Bangsa	Badan Kesatua n Bangsa

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir	Urusan	Penanggung Jawab
					2023	2024	2025	2026			
					K	K	K	K			
1	2	3	4	5	6				7	8	9
	terhadap kesatuan bangsa dan politik serta Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum									dan Politik	dan Politik
		Persentase Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	100	100	100	100	100	TRAN TIB	Satuan Polisi Pamong Praja
		Indeks Risiko Bencana	Persen	125	120	115	110	110	110	TRAN TIB	BPBD

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Bab ini berisi tentang penjelasan terkait upaya-upaya yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan seperti yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi dalam jangka waktu 4 (empat) tahun yang akan datang dirumuskan melalui strategi, arah kebijakan dan program prioritas. Rumusan strategi, arah kebijakan dan program prioritas, juga memperhatikan pemetaan permasalahan pembangunan yang dijabarkan pada Bab IV.

6.1. Strategi

Strategi dirumuskan sebagai intervensi atas permasalahan pembangunan yang masih terjadi, yang kemudian dikonversi menjadi rumusan program pembangunan / perangkat daerah. Adapun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026, dirumuskan sebagaimana uraian pada tabel di bawah ini:

TABEL 6.1
TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI KOTA SINGKAWANG

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi
1	2	3
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Penguatan layanan kesehatan yang merata, terjangkau dan bermutu
	Meningkatnya kualitas pendidikan	Optimalisasi akses dan kualitas pendidikan
	Meningkatnya pengembangan kelestarian budaya	Pengembangan seni budaya serta revitalisasi pusaka cagar budaya
	Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga	Peningkatan kualitas dan kuantitas olahragawan yang berprestasi

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi
1	2	3
	Meningkatnya pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk, peran aktif perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan daerah	Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan dalam pembangunan
		Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
		Peningkatan kualitas perlindungan dan kompetensi perempuan pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan perlindungan anak
		Peningkatan implementasi pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan pengendalian penduduk
		Peningkatan keikutsertaan keluarga dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dengan Bertumpu Pada Percepatan Sektor Strategis untuk penurunan kemiskinan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM	Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM
		Peningkatan daya saing sektor perdagangan dan industri
	Meningkatnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan Perikanan	Peningkatan produksi sektor pertanian
		Peningkatan produksi sektor perikanan
		Peningkatan ketahanan pangan masyarakat
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Pengembangan sektor pariwisata secara inovatif dan berkelanjutan
		Optimalisasi sektor ekonomi kreatif sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi
	Meningkatnya iklim investasi PMA/PMDN di daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan	Peningkatan Investasi (PMDN/PMA) di daerah
		Meningkatkan Serapan Tenaga Kerja dikota Singkawang

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi
1	2	3
	pengentasan kemiskinan	
	Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan sosial
		Peningkatan pelayanan sosial bagi PPKS
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar	Peningkatan Pemenuhan Infrastruktur pelayanan Dasar
	Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi	Peningkatan pemenuhan infrastruktur pengembangan ekonomi
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sampah yang dikelola	Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan
	Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan	Optimalisasi penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan fungsi pelayanan publik yang berbasis inovasi dan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Pemantapan sistem pendukung kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Kecamatan	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan kualitas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah
		Meningkatnya Fungsi <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
	Meningkatnya pemahaman terhadap kesatuan bangsa dan politik	Peningkatan Ideologi dan wawasan kebangsaan

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi
1	2	3
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
		Peningkatan sarana dan prasarana pendukung upaya pencegahan dan pengulangan bencana

6.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah / Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi yang merupakan langkah-langkah berisikan program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran.

Adapun arah kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan penjabaran strategi rencana pembangunan daerah Kota Singkawang tahun 2023-2026 dipadukan dalam matrik kebijakan berikut ini, arah kebijakan merupakan penterjemahan dari strategi yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dan saran dalam Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

TABEL 6.2

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA SINGKAWANG

Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Penguatan layanan kesehatan yang merata, terjangkau dan bermutu	Peningkatan akreditasi dan standarisasi Pelayanan Kesehatan dalam mewujudkan pelayanan yang bermutu dan profesional
		Peningkatan gizi ibu dan anak
		Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan
Meningkatnya kualitas pendidikan	Optimalisasi akses dan kualitas pendidikan	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan
		Peningkatan pendidikan inklusif

Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3
		Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan
Meningkatnya pengembangan kelestarian budaya	Pengembangan seni budaya serta revitalisasi pusaka cagar budaya	Pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian pusaka cagar budaya
Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga	Peningkatan kualitas dan kuantitas olahragawan yang berprestasi	Pembinaan olahragawan secara berkelanjutan
		Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana olahraga
	Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan dalam pembangunan	Peningkatan peran pemuda dan organisasi kepemudaan dalam pembangunan
Meningkatnya pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk, peran aktif perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan daerah	Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender
	Peningkatan kualitas perlindungan dan kompetensi perempuan pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya	Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, dari kekerasan dan atau TPPO
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan perlindungan anak	Penguatan Sistem Perlindungan Anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik sosial budaya anak untuk memastikan anak menikmati haknya
	Peningkatan implementasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan pengendalian penduduk	Pengendalian Penduduk dan peningkatan keluarga sejahtera
	Peningkatan keikutsertaan keluarga dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM	Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM	Peningkatan kelembagaan serta SDM pelaku Koperasi dan UMKM
	Peningkatan daya saing sektor perdagangan dan industri	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan
		Peningkatan kapasitas pelaku industri
Meningkatnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan Perikanan	Peningkatan produksi sektor pertanian	Pembangunan dan perbaikan prasarana pertanian
	Peningkatan produksi sektor perikanan	Pembangunan dan perbaikan prasarana perikanan

Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3
	Peningkatan ketahanan pangan masyarakat	Diversifikasi pangan berkelanjutan
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Pengembangan sektor pariwisata secara inovatif dan berkelanjutan	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pariwisata
	Optimalisasi sektor ekonomi kreatif sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi	Peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif
Meningkatnya iklim investasi PMA/PMDN di daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan	Peningkatan Investasi (PMDN/PMA) di daerah	Pengembangan regulasi iklim investasi serta pelayanan penanaman modal
	Meningkatkan Serapan Tenaga Kerja dikota Singkawang	Perluasan lapangan kerja
		Peningkatan kapasitas penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor
		Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan sosial	Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
	Peningkatan pelayanan sosial bagi PPKS	Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap PPKS
		Pendayagunaan dan pemberdayaan lembaga sosial dalam Penanganan PPKS
Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar	Peningkatan Pemenuhan Infrastruktur pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas rumah rusak/tidak layak huni
		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana
		Fasilitasi peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana dasar pemukiman yang memadai
		Peningkatan pengelolaan air bersih
		Peningkatan pengelolaan sanitasi
Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi	Peningkatan pemenuhan infrastruktur pengembangan ekonomi	Pemeliharaan dan rehabilitasi gedung
		Peningkatan kualitas perencanaan lingkungan hidup
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sampah yang dikelola	Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan	Peningkatan ketersediaan sarana prasarana persampahan
		Peningkatan layanan persampahan
Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan	Optimalisasi penyelenggaraan	Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi perencanaan,

Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3
	perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang
		Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan pertanahan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Pemantapan sistem pendukung kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital	Penerapan instrumen pengendalian kualitas pelayanan publik
		Peningkatan database kependudukan dan catatan sipil yang valid dan update
		Peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan dan catatan sipil
		Peningkatan fasilitas perpustakaan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Kecamatan		Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah		Penguatan kolaborasi berbagai pihak penyelenggaraan pemerintah
		Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas kinerja aparatur
		Penyusunan perencanaan yang berkualitas dan partisipatif serta tepat waktu
	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan kualitas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah	Penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah
	Meningkatnya Fungsi <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>	Fasilitasi Pendampingan Perangkat Daerah
Meningkatnya pemahaman terhadap kesatuan bangsa dan politik	Peningkatan Ideologi dan wawasan kebangsaan	Meningkatkan edukasi pancasila dan cinta tanah air serta wawasan kebangsaan bagi Pelajar dan masyarakat
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Peningkatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, satuan perlindungan masyarakat

Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3
		Peningkatan upaya penegakan gangguan kentraman dan ketertiban secara dini untuk menjaga keharmonisan antar masyarakat
	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung upaya pencegahan dan pengurangan bencana	Pengembangan infrastruktur untuk mencegah dan mengurangi resiko bencana

6.3. Program Prioritas

Program pembangunan daerah Kota Singkawang menjadi program prioritas tahun 2023-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran serta langkah-langkah dalam strategi pembangunan. Uraian program prioritas pembangunan Kota Singkawang tahun 2023-2026 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

TABEL 6.3

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SINGKAWANG

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir	Urusan	Penanggung Jawab
								2023	2024	2025	2026			
								K	K	K	K			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter					Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	72,89	73,3	73,4	73,5	73,6	73,6		
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat				Angka harapan hidup	Tahun	72,11	73,252	73,71	74,17	74,63	74,63	Kesehatan	Dinkes dan KB
		Penguatan layanan kesehatan yang merata, terjangkau dan bermutu	Peningkatan akreditasi dan standarisasi Pelayanan Kesehatan dalam mewujudkan pelayanan yang bermutu dan profesional	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase dari SPM Bidang Kesehatan	persen	62,76	100	100	100	100	100	Kesehatan	Dinkes dan KB
			Penurunan											

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir	Urusan	Penanggung Jawab
								2023	2024	2025	2026			
								K	K	K	K			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12
			Stunting											
			Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan	Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase Instalasi Farmasi Kota Singkawang menerapkan Manajemen sediaan Farmasi dan Makanan Minuman sesuai Standar	persen	85	85	90	90	95	95	Kesehatan	Dinkes dan KB
				Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	persen	100	100	100	100	100	100	Kesehatan	Dinkes dan KB
				Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Jumlah UKBM yang mengalami pengembangan dan Peningkatan	persen	n/a	85	85	85	85	85	Kesehatan	Dinkes dan KB
	Meningkatnya kualitas pendidikan				Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,92	12,93	12,94	12,95	12,96	12,96	Pendidikan	Disdikbud
					Angka Rata Rata Lama Sekolah	Tahun	8,19	8,27	8,35	8,43	8,51	8,51	Pendidikan	Disdikbud
		Optimalisasi akses dan kualitas	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana	Pengelolaan pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persen	29,83	29,88	29,93	30,15	30,22	30,22	Pendidikan	Disdikbud

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir	Urutan	Penanggung Jawab
								2023	2024	2025	2026			
								K	K	K	K			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12
		pendidikan	dan prasarana pendidikan											
			Peningkatan pendidikan inklusif		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	Persen	101,82	100	100	100	100	100	Pendidikan	Disdikbud
					Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	Persen	102,34	100	100	100	100	100	Pendidikan	Disdikbud
					Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	91,26	91,38	91,47	91,58	91,71	91,71	Pendidikan	Disdikbud
					Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	79,2	80,51	81,39	81,88	82,53	82,53	Pendidikan	Disdikbud
					Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI PAKET A	Persen	98,69	98,91	99,31	99,82	100	100	Pendidikan	Disdikbud
					Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs PAKET B	Persen	96	96,45	96,81	97,21	97,88	97,88	Pendidikan	Disdikbud
					Angka Pendidikan yang di tamatkan jenjang SD/MI/Paket A	Persen	55,47	55,54	55,6	55,63	55,69	55,69	Pendidikan	Disdikbud
					Angka Pendidikan yang di tamatkan jenjang SMP/MTs/Paket B	Persen	33,08	33,14	33,19	33,23	33,27	33,27	Pendidikan	Disdikbud
					Angka Putus Sekolah SD/MI	Persen	0,68	0,57	0,53	0,48	0,42	0,42	Pendidikan	Disdikbud
					Angka Putus Sekolah SMP/MTs	Persen	1,47	1,41	1,36	1,32	1,27	1,27	Pendidikan	Disdikbud
					Angka Kelulusan SD/MI	Persen	100	100	100	100	100	100	Pendidikan	Disdikbud
					Angka Kelulusan SMP/MTS	Persen	100	100	100	100	100	100	Pendidikan	Disdikbud

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir	Urutan	Penanggung Jawab
								2023	2024	2025	2026			
								K	K	K	K			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12
					Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTS	Person	112,54	100	100	100	100	100	Pendidikan	Disdikbud
					Ruang Kelas SD/MI dalam kondisi bangunan baik	Person	96,1	96,18	96,24	96,31	96,35	96,35	Pendidikan	Disdikbud
					Ruang Kelas SMP/MTS dalam kondisi bangunan baik	Person	95,07	95,12	95,19	95,24	95,29	95,29	Pendidikan	Disdikbud
					Rasio Ketersediaan SD/MI / penduduk usia 7-12 tahun	Angka	39,77	39,83	39,88	39,92	39,95	39,95	Pendidikan	Disdikbud
					Rasio Ketersediaan SMP/MTS / penduduk usia 13-15 tahun	Angka	35,2	35,4	35,6	35,8	36	36	Pendidikan	Disdikbud
					Persentase Lembaga PKBM yang terakreditasi Minimal B	Person	57,14	71,43	85,71	100	100	100	Pendidikan	Disdikbud
				Pengembangan kurikulum	Persentase Penerapan Kurikulum Mulok pada Pendidikan Anak Usia Dini	Person	48,39	50,54	53,76	55,91	59,14	59,14	Pendidikan	Disdikbud
					Persentase Penerapan Kurikulum Mulok pada Pendidikan Dasar	Person	100	100	100	100	100	100	Pendidikan	Disdikbud
			Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan	Pendidik dan tenaga kependidikan	Guru yang memenuhi Kualitas S1/DIV jenjang SD/MI	Person	90,38	91,21	92,33	93,1	93,9	93,9	Pendidikan	Disdikbud
					Guru yang memenuhi Kualitas S1/DIV jenjang SMP/MTS	Person	94,27	94,88	95,1	95,48	96	96	Pendidikan	Disdikbud
					Rasio guru SD/MI terhadap murid SD/MI	Angka	523,26	527	531	535	539	539	Pendidikan	Disdikbud
					Rasio guru SMP/MTS terhadap murid SMP/MTS	Angka	587,65	589	591	593	597	597	Pendidikan	Disdikbud

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir	Urusan	Penanggung Jawab
								2023	2024	2025	2026			
								K	K	K	K			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12
	Meningkatkan pengembangan kelestarian budaya	Pengembangan seni budaya serta revitalisasi pusaka cagar budaya	Pembudayaan masyarakat dalam pelestarian pusaka cagar budaya	Pengembangan kebudayaan	Rasio guru SD/MI terhadap murid per kelas	Angka	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,09	Pendidikan	Disdikbud
					Rasio guru SMP/MTS terhadap murid per kelas	Angka	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16	0,16	Pendidikan	Disdikbud
					Persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilestarikan	Persentase	82,67	83,15	83,74	84,12	84,54	84,54	Kebudayaan	Disdikbud
					Persentase Kekayaan Budaya yang dikelola	Persentase	80	81	82	83	84	84	Kebudayaan	Disdikbud
					Cakupan Pelaku keragaman budaya yang dibina (jumlah orang)	Persentase	50	98	98	98	98	98	Kebudayaan	Disdikbud
					Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Persentase	81,3	82,3	83,3	84,3	85,3	85,3	Kebudayaan	Disdikbud
					Persentase Kelestarian Cagar Budaya	Persentase	87	87,5	88	88,5	89	89	Kebudayaan	Disdikbud
					Persentase Peningkatan Seni Budaya Yang Dilestarikan	Persentase	70	70,5	71	71,5	72	72	Kebudayaan	Disdikbud
					Persentase Partisipasi Atlet pada PorProv dan Popda	Persentase	61,71	65	68	70	75	75	Keperguruan dan Olahraga	Disparpora
					Persentase peningkatan kompetensi SDM keolahragaan	Persentase	10	12	15	17	20	20	Keperguruan	Disparpora

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir	Urutan	Penanggung Jawab
								2023	2024	2025	2026			
								K	K	K	K			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12
		s dan kuantitas olahraga gawan yang berpres tasi	gawan secara berkelanjutan	daya saing keolahragaan									dan Olahraga	
			Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana olahraga		Persentase sarana dan prasarana olahraga yang tersedia dan dimanfaatkan	Persen	36	45	54	63	72	72	Keperluan dan Olahraga	Disparpora
		Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan dalam pembangunan	Peningkatan peran pemuda dan organisasi kepemudaan dalam pembangunan	Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	persen	n/a	30	33	37	40	40	Keperluan dan Olahraga	Disparpora
				Pengembangan kapasitas kepramukaan	Persentase kelompok pramuka aktif	persen	n/a	30	33	37	40	40	Keperluan dan Olahraga	Disparpora

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir	Urusan	Penanggung Jawab
								2023	2024	2025	2026			
								K	K	K	K			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12
	Meningkatkan pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk, peran aktif perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan daerah				Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Perempuan	Person	52,72	53,25	53,78	54,32	54,86	54,86	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Dinas, PP dan PA
					Skor tingkat Capaian Kota Layak Anak	Skor	681,55	685	690	695	699	699	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Dinas, PP dan PA
					Laju Pertumbuhan Penduduk	Person	1,55	1,65	1,62	1,59	1,56	1,56	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas dan KB

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir	Urutan	Penanggung Jawab
								2023	2024	2025	2026			
								K	K	K	K			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12
		Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender	Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase Partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah	Person	12	12	12,50	12,70	13	13	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Dinso s, PP dan PA
		Peningkatan kualitas perlindungan dan kompetensi perempuan pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya	Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, dari kekerasan dan atau TPPO	Perlindungan perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Termasuk TPPO Yang Dilayani Sesuai Standar	Person	71	75	78	80	85	85	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Dinso s, PP dan PA
				Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Berbasis Gender yang ditindaklanjuti	Person	100	100	100	100	100	100	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Dinso s, PP dan PA

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir	Urusan	Penanggung Jawab
								2023	2024	2025	2026			
								K	K	K	K			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan perlindungan anak	Penguatan Sistem Perlindungan Anak yang responsif terhadap	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Cakupan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Berbasis Gender yang ditindaklanjuti	Person	37	38	39	40	42	42	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Dinas, PP dan PA
			keragaman dan karakteristik sosial budaya anak untuk memastikan	Perlindungan khusus anak	Persentase AMPK yang mendapatkan pelayanan secara komprehensif	Person	69	90	90	90	90	90	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Dinas, PP dan PA
			anak menemukannya	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase penyediaan dokumen data profil gender yang mutakhir	n/a	n/a	100	100	100	100	100		

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir	Urusan	Penanggung Jawab
								2023	2024	2025	2026			
								K	K	K	K			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12
		Peningkatan implementasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan pengendalian penduduk	Pengendalian Penduduk dan peningkatan keluarga sejahtera	Pengendalian penduduk	Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur	Person	n/a	2,03	2,02	2	1,9	1,9	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinkes dan KB
		Peningkatan keikutsertaan keluarga dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan		Pembinaan keluarga berencana (kb)	Rasio Jumlah Akseptor KB	Person	n/a	80	85	90	100	100	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinkes dan KB
				Program Pemberdayaan dan Peningkatan	Jumlah PPKS	Person	n/a	75	80	85	85	85	Pengendalian Penduduk	Dinkes dan KB

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir	Urusan	Penanggung Jawab
								2023	2024	2025	2026			
								K	K	K	K			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12
		Reproduksi		n Keluarga Sejahtera (KS)									duk dan Keluarga Berencana	
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan Dengan Bertumpu Pada Percepatan Sektor Strategis untuk penurunan kemiskinan					Persentase pertumbuhan ekonomi	Persen	5,05	5,1	5,3	5,4	5,6	5,6		
					Tingkat Inflasi	Persen	5,96	4,5	4	3,8	3,6	3,6		
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM				Volume usaha koperasi	Rp	253.62 5.219. 385	263.62 5.219. 385	273.62 5.219. 385	283.62 5.219. 385	293.62 5.219. 385	293.62 5.219. 385	Koperasi	Disdanginkop dan UKM
					Volume usaha UMKM	Rp	782.90 1.050. 097	792.90 1.050. 097	802.90 1.050. 097	812.90 1.050. 097	822.90 1.050. 097	822.90 1.050. 097	UKM	Disdanginkop dan UKM
		Peningkatan daya saing koperasi dan UKM	Peningkatan kelembagaan serta SDM pelaku Koperasi dan UKM	Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase koperasi aktif	Persen	74,29	74,30	74,40	74,50	74,50	74,50	Koperasi, UKM	Disdanginkop dan UKM
				Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP Koperasi yang meningkat status kesehatannya	Persen	n/a	6,00	8,82	11,42	13,88	13,88	Koperasi, UKM	Disdanginkop dan UKM
				Pendidikan dan Latihan	Persentase SDM pengelola Koperasi yang meningkat kapasitasnya	Persen	n/a	14,87	18,08	21,05	23,82	23,82	Koperasi, UKM	Disdanginkop dan UKM

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir	Urusan	Penanggung Jawab
								2023	2024	2025	2026			
								K	K	K	K			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12
				Perkoperasian										
				Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	Persen	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	Koperasi, UKM	Disdaginkop dan UKM
				Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan omzet pelaku usaha	Persen	n/a	2	2	2	2	2	Koperasi, UKM	Disdaginkop dan UKM
					Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Persen	3,68	4	4,05	4,1	4,15	4,15	Perdagangan	Disdaginkop dan UKM
		Peningkatan daya saing sektor perdagangan dan industri	Peningkatan kualitas sarana dan prasaran perdagangan	Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase distribusi bahan pokok dan barang penting	Persen	74,24	80,00	81,00	82,00	83,00	83,00	Perdagangan	Disdaginkop dan UKM
				Perizinan dan pendaftaran perusahaan	Pertumbuhan Pelaku Usaha Formal	Angka	n/a	24 Pelaku Usaha	24 Pelaku Usaha	24 Pelaku Usaha	24 Pelaku Usaha	96 Pelaku Usaha	Perdagangan	Disdaginkop dan UKM

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir	Urusan	Penanggung Jawab
								2023	2024	2025	2026			
								K	K	K	K			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12
				Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase peningkatan omset pelaku usaha produk unggulan	Perse	n/a	7	8	9	10	10	Perdagangan	Disdaginkop dan UKM
				Standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase alat-alatukur, takar, timbangan perlengkapannya(UTTP) yang bertandasah yang berlaku	Perse	92,91	93,50	94,00	94,50	95	95	Perdagangan	Disdaginkop dan UKM
				Peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dalam kondisi baik	Perse	n/a	83	84	85	86	86	Perdagangan	Disdaginkop dan UKM
					Pertumbuhan PDRB sektor industri	Perse	4,58	4,6	4,61	4,62	4,65	4,65	Perindustrian	Disdaginkop dan UKM
			Peningkatan kapasitas pelaku industri	Perencanaan dan pembangunan industri	Persentase Pertambahan Jumlah industri kecil dan menengah	Perse	9,18	9,25	9,50	9,75	10,00	10	Perindustrian	Disdaginkop dan UKM
				Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase peningkatan IKM yang memiliki legalitas usaha	Perse	n/a	2	2	2,5	2,5	2,5	Perindustrian	Disdaginkop dan UKM
			Meningkatnya				Distribusi PDRB sektor pertanian dan Perikanan	Perse	11,82	11,82	11,87	11,92	11,97	11,97

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir	Urutan	Penanggung Jawab
								2023	2024	2025	2026			
								K	K	K	K			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12
	ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan Perikanan	Peningkatan produksi sektor pertanian	Pemanfaatan dan perbaikan prasarana pertanian	Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase ketersediaan lahan sawah yang terpetakan dan terlindungi	Perse	n/a	100	100	100	100	100	Pertanian	Disper tahankan
					Persentase Ketersediaan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian	Perse	60	100	100	100	100	100	Pertanian	Disper tahankan
					Persentase peningkatan Jumlah Pemotongan hewan di RPH	Perse	11,9	12	13	14	15	15	Pertanian	Disper tahankan
				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Perse	0,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	Pertanian	Disper tahankan
					Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Perse	n/a	n/a	80	80	80	80	Pertanian	Disper tahankan
				Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase Luasan Lahan Pertanian yang diawasi penggunaan sarana Pertanian	Perse	50	50	50	50	50	50	Pertanian	Disper tahankan
					Persentase Penyediaan Sarana Peternakan	Perse	n/a	100	100	100	100	100	Pertanian	Disper tahankan
					Persentase Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Ternak	Perse	n/a	n/a	50	55	60	60	Pertanian	Disper tahankan

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir	Urutan	Penanggung Jawab
								2023	2024	2025	2026			
								K	K	K	K			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12
				Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Penyediaan Infrastruktur Dalam Mendukung Kemandirian Pangan	Persen	n/a	100	100	100	100	100	pangan	Dispersihankan
				Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Penurunan Penyakit Hewan/ternak	Persen	16,8	16	14	12	10	10	Pertanian	Dispersihankan
					Persentase Peningkatan kualitas pangan asal hewan yang Aman Sehat Utuh Halal	Persen	n/a	2,5	5	7,5	10	10	Pertanian	Dispersihankan
				Penyuluhan pertanian	Persentase Kelompok tani Kelas Pemula yang meningkat skornya	Persen	n/a	20	25	30	35	35	Pertanian	Dispersihankan
				Perizinan Usaha Pertanian	Persentase pertimbangan teknis yang dikeluarkan	Persen	n/a	n/a	100	100	100	100	Pertanian	Dispersihankan
		Peningkatan produksi sektor perikanan	Pemanfaatan dan perbaikan prasarana perikanan	Pengelolaan perikanan tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Persen	5	7	8	9	10	10	Perikanan	Dispersihankan
				Pengelolaan perikanan budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Persen	10	12	14	16	18	18	Perikanan	Dispersihankan
				Pengolahan dan pemasaran	Persentase Pelaku Usaha Skala kecil yang dibina	Persen	n/a	80	80	80	80	80	Perikanan	Dispersihankan

Tujuan n	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir	Urusan	Penanggung Jawab	
								2023	2024	2025	2026				
								K	K	K	K				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12	
				hasil perikanan											
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Tingkat pelanggaran di Perairan umum	Pelanggaran	0	0	0	0	0	0	Perikanan	Disper tahankan	
						Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Skor	85,7	86,1	86,5	86,9	87,4	87,4	Pangan	Disper tahankan
		Peningkatan ketahanan pangan masyarakat	Diversifikasi pangan berkelanjutan	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase konsumsi energi	Persen	92,8	93,7	94,7	95,6	96,6	96,6	Pangan	Disper tahankan	
				Penanganan kerawanan pangan	Persentase daerah rawan pangan	Persen	n/a	46	38	31	23	23	Pangan	Disper tahankan	
				Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Persen	100	83	87	90	93	93	Pangan	Disper tahankan	
		Meningkatkan					PAD sektor pariwisata	Persen	9,77	9,8	9,83	9,84	9,85	9,85	Pariwisata

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir	Urusan	Penanggung Jawab
								2023	2024	2025	2026			
								K	K	K	K			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12
	a pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Peningkatan sektor pariwisata secara inovatif dan berkelanjutan	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pariwisata	Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase destinasi dalam keadaan kondisi baik	Person	20	50	65	75	85	95	Pariwisata	Disparpora
					Persentase peningkatan destinasi wisata yang dikembangkan	Person	20	20	20	20	40	40	Pariwisata	Disparpora
				Pemasaran pariwisata	Persentase event pariwisata	Person	100	100	100	100	100	100	Pariwisata	Disparpora
					Cakupan Pembinaan Ekonomi Kreatif	Person	25	26	26	27	28	28	Pariwisata	Disparpora
		Optimalisasi sektor ekonomi kreatif sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi	Peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	Person	5,5	5,3	5,5	5,8	6,05	6,05	Pariwisata	Disparpora
				Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Cakupan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Person	5	5,25	5,5	5,75	6	6	Pariwisata	Disparpora

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir	Urutan	Penanggung Jawab
								2023	2024	2025	2026			
								K	K	K	K			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12
					Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Person	8,63	8,4	8	7,8	7,7	7,7		
	Meningkatkan iklim investasi PMA/ PMDN di daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Person	68,86	69,41	69,96	70,51	71,06	71,06	Penanaman Modal	DPM TK
					Persentase Penduduk Miskin	Person	4,67	4,67	4,5	4,33	4,16	4,16		
		Peningkatan Investasi (PMDN/ PMA) di daerah	Pengembangan regulasi iklim investasi serta pelayanan penanaman modal	Pengembangan iklim penanaman modal	Persentase Kebijakan Pengembangan Iklim PM	Person	n/a	25,00	13,00	13,00	50,00	50,00	Penanaman Modal	DPM TK
				Promosi Penanaman Modal	Bertambahnya Investor Baru di Kota Singkawang	Investor	100	100	100	100	100	100	Penanaman Modal	DPM TK
				Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan Dan Non Perizinan	Person	86,33	87	88	89	90	90	Penanaman Modal	DPM TK
				Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Person	100	100	100	100	100	100	Penanaman Modal	DPM TK

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir	Urusan	Penanggung Jawab
								2023	2024	2025	2026			
								K	K	K	K			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Besaran perusahaan yang patuh LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	Person	21	22	23	24	25	25	Penanaman Modal	DPM TK
		Meningkatkan Serapan Tenaga Kerja di kota Singkawang	Perluasan lapangan kerja	Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada pasar kerja	Person	60,42	61,46	62,50	63,45	64,58	64,58	Tenaga Kerja	DPM TK
			Peningkatan kapasitas penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor	Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang telah memenuhi sarana Hubungan Industrial	Person	56,68	57,25	58,21	59,16	60,11	60,11	Tenaga Kerja	DPM TK
				Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Tersusunnya dokumen Rencana Tenaga Kerja	Person	0	20	20	40	20	20	Tenaga Kerja	DPM TK
			Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran Pencari Kerja yang dilatih lulus Uji Kompetensi	Person	26,09	42,86	56,25	62,50	78,13	78,13	Tenaga Kerja	DPM TK

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir	Urutan	Penanggung Jawab
								2023	2024	2025	2026			
								K	K	K	K			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12
	Meningkatkan peran penangan masalah kesejahteraan sosial				Persentase PPKS yang Tertangani	Person	69,14	84	85	86	87	87	Sosial	Dinso s, PP dan PA
		Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan sosial	Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Kesejahteraan Sumber Sosial (PSKS) yang telah di Berdayakan	Person	20	20	40	60	100	100	Sosial	Dinso s, PP dan PA
		Peningkatan pelayanan sosial bagi PPKS	Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap PPKS	Rehabilitasi Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Terhadap pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Person	100	100	100	100	100	100	Sosial	Dinso s, PP dan PA
				Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan	Persentase Pelayanan dan Penanganan Warga Migran Korban Tindak kekerasan	Person	100	100	100	100	100	100	Sosial	Dinso s, PP dan PA
				Perlindungan dan Jaminan Sosial	persentase Perlindungan dan jaminan Sosial Terhadap Fakir Miskin	Person	71	72	73	74	75	75	Sosial	Dinso s, PP dan PA
					Persentase Kesejahteraan/Kemandirian Keluarga Miskin	Person	100	100	100	100	100	100	Sosial	Dinso s, PP

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir	Urusan	Penanggung Jawab
								2023	2024	2025	2026			
								K	K	K	K			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12
														dan PA
			Pendayagunaan dan pemberdayaan lembaga sosial dalam Penanganan PPKS	Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Bencana Skala Kota	Persentase	100	100	100	100	100	100	Sosial	Dinas, PP dan PA
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Penguasaan					Indeks infrastruktur daerah	Nilai	58,67	66,38	68,65	70,7	73,66	73,66		
	Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar				Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Persentase	97,91	97,97	98,03	98,08	98,14	98,14	PERKIM	Disperkimda
					Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan	Persentase	64,98	49,92	46,16	38,63	30,05	30,05	PERKIM	Disperkimda
					Persentase penduduk berakses air minum	Persentase	48,71	49,42	49,75	50,06	50,36	50,36	PUPR	Dinas PUPR

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir	Urusan	Penanggung Jawab
								2023	2024	2025	2026			
								K	K	K	K			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12
Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan					Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	Person	93,5	93,8	94,08	94,2	94,57	94,57	PUPR	Dinas PUPR
		Peningkatan Pemanfaatan Infrastruktur pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas rumah rusak/tidak layak huni	Perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh (dengan Luas di bawah 10 Ha) yang ditangani	Person	0	5,4	10,81	16,21	21,62	21,62	PERKIM	Disperkimta
					Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar kawasan permukiman kumuh (dengan luas dibawah 10 Ha)	Person	0	3,79	7,57	11,36	15,14	15,14	PERKIM	Disperkimta
			Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Pengembangan perumahan	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Terdampak Relokasi Program Pemerintah yang ditangani	Person	100	100	100	100	100	100	PERKIM	Disperkimta

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir	Urusan	Penanggung Jawab
								2023	2024	2025	2026			
								K	K	K	K			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12
			Fasilitasi peningkatan keterseediaan prasarana dan sarana dasar pemukiman yang memadai	Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan (Perumahan Pengembang) yang ditangani	Person	0	39,43	55,47	71,51	87,55	87,55	PERKIM	Disperkimta
			Peningkatan pengelolaan air bersih	Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih perpipaan dan non perpipaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Person	100	100	100	100	100	100	PUPR	Dinas PUPR
			Peningkatan pengelolaan sanitasi	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Person	3,37	3,75	4,12	4,48	4,84	4,84	PUPR	Dinas PUPR
				Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampah	Persentase Perencanaan Sistem pengelolaan sampah regional	Person	100	100	100	100	100	100	PUPR	Dinas PUPR

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir	Urutan	Penanggung Jawab
								2023	2024	2025	2026			
								K	K	K	K			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12
				an Regional										
				Kawasan permukiman	Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha) yang ditangani	Persen	35,02	50,08	53,84	61,37	69,95	69,95	PERKIM	Disperkimta
					Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha)	Persen	0	25	50	75	100	100	PERKIM	Disperkimta
	Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pembangunan ekonomi				Persentase Jalan mantap	Persen	52,35	53,02	54,12	55,3	56,41	56,41	PUPR	Dinas PUPR
					Persentase Genangan/banjir Kota Singkawang	Persen	4,1	3,73	3,69	3,66	3,64	3,64	PUPR	Dinas PUPR
					Persentase Drainase dalam kondisi baik	Persen	73,52	75,45	76,86	77,41	81,61	81,61	PUPR	Dinas PUPR
					Persentase Kelancaran Lalu Lintas	Persen	99,4	99,41	99,42	99,43	99,44	99,44	Perhubungan	Dishub
				Penyelenggaraan jalan	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	Persen	38,42	38,3	39,1	40,12	41,07	41,07	PUPR	Dinas PUPR
				Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase jasa konstruksi yang layak	Persen	84,44	50	55,26	60,53	69,74	69,74	PUPR	Dinas PUPR
				Peningkatan pemenuhan infrastruktur										
				Peningkatan infrastruktur dan										

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir	Urusan	Penanggung Jawab
								2023	2024	2025	2026			
								K	K	K	K			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12
		struktur pengembangan ekonomi	konektivitas	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase Drainase yang terbangun	Person	n/a	3,01	2,35	2,13	2,01	2,01	PUPR	Dinas PUPR
				Pengembangan Permukiman	Persentase jalan permukiman dalam kondisi baik	Person	32,72	34,9	37,03	39,1	41,12	41,12	PUPR	Dinas PUPR
			Peningkatan Penanganan Banjir	Pengelolaan sumber daya air (sda)	Persentase Luas Kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi infrastruktur pengendalian banjir di WS Kab/Kota	Person	8,33	8,5	8,75	9,02	9,29	9,29	PUPR	Dinas PUPR
			Pemeliharaan dan rehabilitasi gedung	Penataan bangunan gedung	Persentase bangunan gedung daerah kota dalam kondisi baik	Person	70,59	72,06	73,53	75	76,47	76,47	PUPR	Dinas PUPR
				Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (laj)	Persentase Ketersediaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Person	70	71,3	73,2	75,1	77	77	Perhubungan	Dishub
					Persentase Ruas Jalan bermasalah yang Terawasi	Person	15	18	24	30	36	36	Perhubungan	Dishub
					Persentase Sarana dan Prasarana Terminal yang Tersedia	Person	42	47	52	57	62	62	Perhubungan	Dishub
					Persentase Peningkatan Ketersediaan Lahan Parkir yang Dikelola	Person	7,54	8,73	8,03	7,43	7,4	31,59	Perhubungan	Dishub
					Persentase Lampu PJU Terhadap Panjang Jalan	Person	42,72	44,8	46,9	48,9	51	51	Perhubungan	Dishub

Tujuan n	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir	Urusan	Penanggung Jawab
								2023	2024	2025	2026			
								K	K	K	K			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12
					Kota dan Jalan Lingkungan yang Terpasang									
					Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Induk PJU	Person	n/a	20	40	100	100	100	Perhubungan	Dishub
					Persentase Ketersediaan Jumlah Dokumen Transportasi Darat	Person	n/a	40	60	80	100	100	Perhubungan	Dishub
					Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Nilai	n/a	76	77	78	79	79	Perhubungan	Dishub
				Pengelolaan penerbangan	Persentase Pelaksanaan Monitoring Pembangunan Bandar Udara	Dokumen		2	1	1	1	5	Perhubungan	Dishub
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sampah yang dikelola				Indeks kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	63,85	66,11	66,21	66,31	66,41	66,41	Lingkungan Hidup	DLH
					Timbulan sampah terkelola	Person	95,98	99	99	100	100	100	Lingkungan Hidup	DLH
			Peningkatan kualitas perencanaan lingkungan	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Person	na	1	1	1	1	1	Lingkungan Hidup	DLH

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir	Urusan	Penanggung Jawab
								2023	2024	2025	2026			
								K	K	K	K			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12
			ngan hidup	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Pengelolaan RTH	Persen	0,43	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	Lingkungan Hidup	DLH
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase pendampingan penghargaan lingkungan hidup	Persen	na	35	35	35	35	35	Lingkungan Hidup	DLH
				Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase dunia pendidikan /lembaga masyarakat yang berhasil mendapatkan penilaian tingkat propinsi dan nasional	Persen	na	18	20	22	24	24	Lingkungan Hidup	DLH
				Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup strategis yang wajib disusun	Persen	na	10	10	10	10	10	Lingkungan Hidup	DLH

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir	Urusan	Penanggung Jawab
								2023	2024	2025	2026			
								K	K	K	K			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi	Person	na	5	6	7	8	8	Lingkungan Hidup	DLH
				Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat bidang Lingkungan Hidup	Person	100	95	95	95	95	95	Lingkungan Hidup	DLH
				Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	Persentase pengelolaan limbah B 3 yang tertangani	Person	76	77	78	79	80	80	Lingkungan Hidup	DLH

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir	Urutan	Penanggung Jawab
								2023	2024	2025	2026			
								K	K	K	K			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12
				(Limbah B3)										
		Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan	Peningkatan keterseediaan sarana prasarana persampahan	Pengelolaan Persampahan	Cakupan penanganan sampah	Ton/Tahun	25.882,88	23.980,97	23.919,77	24.853,78	25.142,09	25.142,09	Lingkungan Hidup	DLH
			Peningkatan layanan persampahan		Cakupan pengurangan sampah	Ton/Tahun	6.769,10	9.367,86	9.827,51	10.651,62	10.775,18	10.775,18	Lingkungan Hidup	DLH
	Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan				Ketaatan terhadap RTRW	Persen	96,24	96,24	97,05	98,19	99,2	99,2	PUPR	Dinas PUPR
		Optimalisasi penyelenggaraan perencanaan, peman	Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi perencanaan	Penyelenggaraan penataan ruang	Persentase rencana tata ruang	Persen	14,29	28,57	57,14	85,71	100	100	PUPR	Dinas PUPR
				Penataan bangunan dan	Persentase kawasan yang tertata	Persen	8,3	8,45	8,62	14,35	21,79	21,79	PUPR	Dinas PUPR

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir	Urusan	Penanggung Jawab
								2023	2024	2025	2026			
								K	K	K	K			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12
	an bangunan	faatan dan pengendalian tata ruang	anaan, pemaanfaatan, dan pengendalian tata ruang	lingkungannya										
			Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan pertanahan	Penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Sengketa Tanah Garapan yang difasilitasi	Perse	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Pertanahan	Disperkimta
				Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/ Santunan Tanah untuk pembangunan	Perse	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Pertanahan	Disperkimta
				Penetapan Tanah Ulayat	Persentase Terdatanya Jumlah Tanah Ulayat/ Hukum Adat/ Kas Desa	Perse	0	0	36,84	78,94	100	100	Pertanahan	Disperkimta
				Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Luas Potensi Pemanfaatan atas tanah kosong yang sudah di inventarisasi	Perse	0	0	33,33	66,66	100,00	100,00	Pertanahan	Disperkimta
				Pengelolaan izin membuka tanah	Persentase Terdatanya/ Tertib Administrasi Data Pertanahan mengenai Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)	Perse	76,39	79,77	84,82	91,57	100,00	100,00	Pertanahan	Disperkimta

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir	Urutan	Penanggung Jawab
								2023	2024	2025	2026			
								K	K	K	K			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12
				Penatagunaan tanah	Persentase Luas Wilayah Yang Sudah Terpetakan	Perse	5,0	7	12	24	36	36	Pertanian	Disperkimta
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan fungsi pelayanan publik yang berbasis inovasi dan teknologi informasi					Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	63,37	70,01	70,1	70,2	70,3	70,3		
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah				Indeks Kepuasan Masyarakat	Perse	85,04	86	87	87,5	88	88	Dukcapil, Dispusip, Kecamatan Administrasi, Set.D PRD	Disdukcapil, Dispusip, Kecamatan, Set.D PRD
					Nilai RB	Nilai	63,37	70,01	70,1	70,2	70,3	70,3	Sekretariat Daerah	SETDA
		Pemanfaatan sistem pendukung kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan	Penerapan instrumen pengendalian kualitas pelayanan publik	Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase Terlaksananya IKK Oleh Perangkat Daerah	Perse	70	75	80	85	90	90	Sekretariat Daerah	SETDA
					Persentase Tindaklanjuti Perda	Perse	76,29	78	80	82	85	85	Sekretariat Daerah	SETDA
					Persentase Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat Yang Ditindaklanjuti	Perse	0	20	40	60	80	80	Sekretariat Daerah	SETDA

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir	Urusan	Penanggung Jawab
								2023	2024	2025	2026			
								K	K	K	K			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12
		nan publik berbasis digital		Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Yang Ditindaklanjuti	Persen	55,88	60	62	65	68	68	Sekretariat Daerah	SETDA
					Persentase Capaian Realisasi Fisik Perangkat Daerah	Persen	89,65	90	91	92	93	93	Sekretariat Daerah	SETDA
					Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Tender	Persen	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah	SETDA
			Peningkatan database kependudukan dan catatan sipil yang valid dan update	Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persen	100	100	100	100	100	100	DUK CAPI L	Disdukcapil
			Peningkatan kesadaran masyarakat			Persen	100	100	100	100	100	100	DUK CAPI L	Disdukcapil
						Persen	100	100	100	100	100	100	DUK CAPI L	Disdukcapil

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir	Urusan	Penanggung Jawab
								2023	2024	2025	2026			
								K	K	K	K			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12
			dalam mengurus dokumen kependudukan dan catatan sipil			Person	100	100	100	100	100	100	DUK CAPI L	Disdukcapil
				Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	Person	100	100	100	100	100	100	DUK CAPI L	Disdukcapil
						Person	100	100	100	100	100	100	DUK CAPI L	Disdukcapil
				Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase Peserta Yang Memahami Kegiatan Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Person	100	100	100	100	100	100	DUK CAPI L	Disdukcapil
					Persentase OPD yang telah menandatangani Perjanjian kerjasama terkait pemanfaatan data kependudukan	Person	100	100	100	100	100	100	DUK CAPI L	Disdukcapil
				Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Penyajian Profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan	Person	100	100	100	100	100	100	DUK CAPI L	Disdukcapil
				Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Fasilitasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Person	80	80	81	82	83	83	SET DPRD	Sekretariat DPRD
			Peningkatan fasilitas	Pembinaan perpustakaan	Persentase kunjungan ke perpustakaan	Person	10,48	10,67	10,87	11,07	11,27	11,27	Perpustakaan	Dispusip

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir	Urusan	Penanggung Jawab
								2023	2024	2025	2026			
								K	K	K	K			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12
			s perpustakaan		Persentase jumlah perpustakaan yang dibangun	Perse	29,19	29,3	29,32	29,34	29,36	29,36	Perpustakaan	Dispusip
					Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan digital	Perse	14,86	15	15,14	15,28	15,42	15,42	Perpustakaan	Dispusip
				Pengelolaan arsip	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Arsip Digital	Perse	10,35	13,79	13,79	17,24	17,24	17,24	Kearsipan	Dispusip
					Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan kearsipan	Perse	86,2	89,64	93,08	96,52	99,96	99,96	Kearsipan	Dispusip
					Perlindungan dan penyelamatan arsip	Perse	10,35	13,79	13,79	17,24	17,24	17,24	Kearsipan	Dispusip
	Meningkatkan kualitas pelayanan		Peningkatan kualitas pelayanan	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	Perse	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Administrasi	Seluruh Kecamatan

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir	Urusan	Penanggung Jawab
								2023	2024	2025	2026			
								K	K	K	K			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12
	nan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Kecamatan		publik dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peran aktif kelompok/lembaga kemasyarakatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Person	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Administrasi	Seluruh Kecamatan
				Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan	Person	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Administrasi	Seluruh Kecamatan
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kelompok/lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan di tingkat Kecamatan	Person	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Administrasi	Seluruh Kecamatan
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintahan daerah				Indeks SPBE	Nilai	2,6	2,65	3,34	3,35	3,36	3,36	Kominfo, Persandian, Statistik	Diskominfo
			Penguatan kolaborasi berbagai pihak penyelenggara	Pengelolaan Informasi dan komunikasi publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan Data dan Informasi Publik	Skor	87,107 (Baik)	87 (Baik)	87,5 (Baik)	88 (Baik)	88,5 (Baik)	88,5 (Baik)	KOMINFO	Diskominfo
				Pengelolaan Aplikasi informatika	Persentase Penerapan Aplikasi e-Government	Person	36	45	50	55	60	60	KOMINFO	Diskominfo

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir	Urusan	Penanggung Jawab
								2023	2024	2025	2026			
								K	K	K	K			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12
			aan pemerintah	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks Area Teknologi dan Keamanan Informasi	Skor	57	57	60	63	66	66	Persandian	Diskominfo
				Penyelenggaraan statistik sektoral	Indeks Domain Proses Bisnis Statistik	Skor	1,9	2,21	2,42	2,63	2,84	2,84	Statistik	Diskominfo
				Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)		Nilai	59,73	59,73	62,72	65,85	69,14	69,14	Kepegawaian	BKPSDM
			Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas kinerja aparatur	Kepegawaian daerah	Persentase Fasilitasi Pelayanan Pembinaan Disiplin ASN	Persen	100	100	100	100	100	100	Kepegawaian	BKPSDM
					Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persen	100	99	99	99	99	99	Kepegawaian	BKPSDM
					Persentase Pemenuhan Formasi pengadaan ASN	Persen	N/A	93	93	92	93	93	Kepegawaian	BKPSDM
					Persentase ASN yang mengikuti Tugas Belajar	Persen	N/A	75	75	75	75	75	Kepegawaian	BKPSDM
				Pengembangan sumber daya manusia	Persentase Fasilitasi Pelayanan Pengembangan Kompetensi Managerial	Persen	25,96	35	50	65	80	80	Pendidikan dan Pelatihan	BKPSDM

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir	Urusan	Penanggung Jawab
								2023	2024	2025	2026			
								K	K	K	K			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12
					Persentase Fasilitas Pelayanan Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional	Persen	N/A	70	70	70	70	70	Pendidikan dan Pelatihan	BKPSDM
					Indeks SAKIP	Nilai	-	63,00	63,20	63,50	64,00	64,00	Perencanaan	Bappeda
			Penyusunan perencanaan yang berkualitas dan partisipatif serta tepat waktu	Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Konsistensi Program RPJMD / RPD ke dalam RKPD	Persen	100	100	100	100	100	100	Perencanaan	Bappeda
					Persentase Capaian Target Kinerja Indikator Program	Persen	100	100	100	100	100	100	Perencanaan	Bappeda
					Persentase Kesesuaian antar Dokumen RKPD dengan RPJMD/RPD	Persen	91	100	100	100	100	100	Perencanaan	Bappeda
					Persentase Kesesuaian antar Dokumen Renja dengan RENSTRA	Persen	n/a	100	100	100	100	100	Perencanaan	Bappeda
					Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persen	-	25	50	75	100	100	Penelitian dan kelitbangan	Bappeda
					Indeks Inovasi Daerah	Persen	-	58	59	60	61	61	Penelitian dan	Bappeda

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir	Urusan	Penanggung Jawab
								2023	2024	2025	2026			
								K	K	K	K			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12
													kelitbangan	
				Penelitian dan pengembangan daerah	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Didiseminasikan	Persen	n/a	100	100	100	100	100	Penelitian dan kelitbangan	Bappeda
					Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan	Persen	n/a	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	Penelitian dan kelitbangan	Bappeda
					Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Persen	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Keuangan	BPKAD, Bapenda
		Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan kualitas pengawasan	Penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah	Pengelolaan keuangan daerah	Persentase OPD yang menyusun dokumen rencana anggaran tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	Keuangan	BPKAD
					Cakupan pencapaian penyerapan belanja perangkat daerah sesuai target	Persen	100	100	100	100	100	100	Keuangan	BPKAD
					Persentase OPD yang telah menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	Keuangan	BPKAD
				Pengelolaan barang	Persentase OPD yang menyampaikan RKBMD tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	Keuangan	BPKAD

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir	Urusan	Penanggung Jawab
								2023	2024	2025	2026			
								K	K	K	K			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12
		terhadap pengelolaan keuangan daerah		milik daerah	Persentase OPD yang menyampaikan LBMD tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	Keuangan	BPKAD
				Pengelolaan pendapatan daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	10	10	10	10	10	10	Keuangan	Bapenda
				Indeks Integritas		Nilai	73,91	75	76	77	77,5	77,5	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
		Meningkatkan Fungsi <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>	Fasilitasi Pemandangan Perangkat Daerah	Penyelenggaraan pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal	Persen	96,2	98	98	100	100	100	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
					Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan eksternal :								Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
					- BPK	Persen	92,2	92	93	94	95	95	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
					- ITPROV	Persen	98,4	98	98	98	100	100	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
					Persentase penyelesaian kasus pengaduan dan Pemeriksaan Khusus	Persen	100	100	100	100	100	100	Inspektorat	Inspektorat

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir	Urusan	Penanggung Jawab
								2023	2024	2025	2026			
								K	K	K	K			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12
													Daerah	Daerah
					Persentase Penyelesaian Masalah Perangkat Daerah melalui pemberian Advis	Person	100	100	100	100	100	100	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
					Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Person	100	100	100	100	100	100	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
					Cakupan Perangkat Daerah yang melakukan pengelolaan risiko korupsi	Person	n/a	30	60	90	95	95	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
					Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP BB pada wilayah kerja Irbab	Person	6,90	100	100	100	100	100	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
	Meningkatnya pemahaman terhadap kesatuan bangsa dan politik				Indeks Toleransi	Nilai	6,583	6,6	6,63	6,66	6,7	6,7	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Peningkatan Ideologi dan wawasan	Meningkatkan edukasi pancasila	Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter	Persentase Pelaksanaan Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Person	n/a	100	100	100	100	100	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir	Urutan	Penanggung Jawab
								2023	2024	2025	2026			
								K	K	K	K			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12
		kebangsaan	ila dan cinta tanah air serta wawasan kebangsaan bagi Pelajar dan masyarakat	Kebangsaan										
				Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persen	n/a	100	100	100	100	100	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	n/a	100	100	100	100	100	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,	Persentase Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persen	n/a	100	100	100	100	100	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir	Urusan	Penanggung Jawab	
								2023	2024	2025	2026				
								K	K	K	K				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12	
				Sosial dan Budaya											
				Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Person	n/a	100	100	100	100	100	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum				Persentase Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Person	100	100	100	100	100	100	TRANTIB	Satuan Polisi Pamong Praja	
					Indeks Risiko Bencana	Person	125	120	115	110	110	110	110	TRANTIB	BPBD

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir	Urusan	Penanggung Jawab
								2023	2024	2025	2026			
								K	K	K	K			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12
		Peningkatan sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, satuan pengamanan masyarakat	Peningkatan pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, satuan pengamanan masyarakat	Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Tingkat Penyelesaian K3 (Ketenteraman, Ketertiban dan Keindahan)	Person	100	100	100	100	100	100	TRA NTIB	Satuan Polisi Pamong Praja
			Peningkatan upaya penegakan gangguan ketenteraman dan ketertiban secara dini untuk		Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum PERDA dan PERKADA (SPM)	Person	100	100	100	100	100	100	TRA NTIB	Satuan Polisi Pamong Praja

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir	Urusan	Penanggung Jawab
								2023	2024	2025	2026			
								K	K	K	K			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12
			menjaga keharmonisan antar masyarakat											
		Peningkatan sarana dan prasarana pendukung upaya pencegahan dan penganggulangan bencana	Pengembangan infrastruktur untuk mencegah dan mengurangi resiko bencana	Penanggulangan bencana	Persentase Pelaksanaan Penanggulangan Bencana	Person	100	100	100	100	100	100	TRANTIB	BPBD
				Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM)	Person	100	100	100	100	100	100	TRANTIB	Satuan Polisi Pamong Praja

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Kerangka pendanaan pembangunan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Maka kerangka pendanaan pembangunan Kota Singkawang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.1.

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SINGKAWANG

N O	URAIAN	REALISASI (Rp.)					RATA-RATA PERTUMBUH AN (%)
		Baseline APBD Murni 2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	PENDAPATAN	869.438.000.395,00	919.891.236.089,00	966.318.933.635,00	1.003.747.593.774,00	1.047.082.501.716,00	4,76%
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	186.000.000.000,00	203.411.085.611,00	216.623.077.092,00	229.835.068.571,00	243.047.060.052,00	6,93%
	Pendapatan Pajak Daerah	64.140.000.000,00	67.669.865.801,00	72.445.541.442,00	77.221.217.082,00	81.996.892.723,00	6,33%
	Hasil Retribusi Daerah	7.040.000.000,00	6.324.958.296,00	6.486.783.146,00	6.648.607.996,00	6.810.432.847,00	-0,67%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.839.224.000,00	7.964.741.812,00	8.587.421.477,00	9.210.101.142,00	9.832.780.807,00	9,57%
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	107.980.776.000,00	121.451.519.702,00	129.103.331.027,00	136.755.142.351,00	144.406.953.675,00	7,57%
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	186.000.000.000,00	203.411.085.611,00	216.623.077.092,00	229.835.068.571,00	243.047.060.052,00	6,93%
	PENDAPATAN TRANSFER	683.438.000.395,00	716.480.150.478,00	749.695.856.543,00	773.912.525.203,00	804.035.441.664,00	4,15%
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	621.263.447.000,00	649.284.465.008,00	678.416.419.095,00	702.549.335.777,00	730.588.500.260,00	4,14%
	Bagi Hasil Pajak	21.234.039.000,00	24.234.039.000,00	25.234.039.000,00	26.234.039.000,00	27.234.039.000,00	6,51%

N O	URAIAN	REALISASI (Rp.)					RATA-RATA PERTUMBUH AN (%)
		Baseline APBD Murni 2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dana Alokasi Umum	457.023.658.000,00	472.529.273.285,00	490.282.910.750,00	502.036.548.214,00	520.790.185.678,00	3,32%
	Dana Alokasi Khusus	140.941.192.000,00	145.445.652.723,00	152.849.469.345,00	161.778.748.563,00	167.514.275.582,00	4,42%
	Dana Insentif Daerah	2.064.558.000,00	7.075.500.000,00	10.050.000.000,00	12.500.000.000,00	15.050.000.000,00	82,38%
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	62.174.553.395,00	67.195.685.470,00	71.279.437.448,00	71.363.189.426,00	73.446.941.404,00	4,30%
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	62.174.553.395,00	64.195.685.470,00	66.279.437.448,00	68.363.189.426,00	70.446.941.404,00	3,17%
	Penapatan Bagi Hasil Lainnya	0	0	0	0	0	0,00%
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Lainnya	0	3.000.000.000,00	5.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00%
	Jumlah Pendapatan Transfer	683.438.000.395,00	716.480.150.478,00	749.695.856.543,00	773.912.525.203,00	804.035.441.664,00	4,15%
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	0	0	0	0	-
	Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0,00%
	Pendapatan Lainnya	0	0	0	0	0	0,00%
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	0	0	-

N O	URAIAN	REALISASI (Rp.)					RATA-RATA PERTUMBUH AN (%)
		Baseline APBD Murni 2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	JUMLAH PENDAPATA N	869.438.000.395, 00	919.891.236.089,00	966.318.933.635,00	1.003.747.593.774,00	1.047.082.501.716,00	4,76%
	BELANJA	805.196.571.824, 00	902.949.807.518,00	949.377.505.064,00	986.806.165.203,00	1.030.141.073.145,00	6,40%
	BELANJA OPERASIONAL	686.063.723.088, 00	712.026.150.532,00	718.068.482.847,00	718.175.554.250,00	724.013.406.501,00	1,37%
	Belanja Pegawai	414.306.449.201,0 0	434.997.852.305,00	433.550.000.000,00	432.250.000.000,00	431.500.000.000,00	1,05%
	Belanja Barang dan Jasa	227.953.043.437,0 0	227.953.043.437,00	235.924.796.507,00	240.331.867.910,00	245.919.720.161,00	1,92%
	Belanja Bunga	880.208.333,00	0	0	0	0	0,00%
	Belanja Hibah	39.607.022.117,00	45.758.254.790,00	45.276.686.340,00	42.276.686.340,00	43.276.686.340,00	2,55%
	Belanja Batuan Sosial	3.317.000.000,00	3.317.000.000,00	3.317.000.000,00	3.317.000.000,00	3.317.000.000,00	0,00%
	Jumlah Belanja Operasional	686.063.723.088, 00	712.026.150.532,00	718.068.482.847,00	718.175.554.250,00	724.013.406.501,00	1,37%
	BELANJA MODAL	108.132.848.736, 00	180.923.656.986,00	221.309.022.217,00	258.630.610.953,00	296.127.666.644,00	30,25%
	Belanja Modal Tanah	718.200.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	5.000.000.000,00	6.000.000.000,00	114,81%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.835.187.872,00	22.796.239.485,00	32.510.766.587,00	38.225.293.689,00	50.939.820.791,00	28,62%
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.826.609.685,00	43.555.442.233,00	63.692.633.022,00	90.209.192.884,00	102.967.014.602,00	52,79%
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	61.444.349.916,00	109.926.669.464,00	120.768.042.735,00	122.166.270.438,00	133.498.703.240,00	24,80%

N O	URAIAN	REALISASI (Rp.)					RATA-RATA PERTUMBUH AN (%)
		Baseline APBD Murni 2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.308.501.263,00	3.645.305.804,00	3.337.579.873,00	3.029.853.942,00	2.722.128.011,00	-17,51%
	Jumlah Belanja Modal	108.132.848.736,00	180.923.656.986,00	221.309.022.217,00	258.630.610.953,00	296.127.666.644,00	30,25%
	BELANJA TIDAK TERDUGA	11.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-2,27%
	Belanja Tidak Terduga	11.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-2,27%
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	11.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-2,27%
	Jumlah Belanja	805.196.571.824,00	902.949.807.518,00	949.377.505.064,00	986.806.165.203,00	1.030.141.073.145,00	6,40%
	SURPLUS / (DEFISIT)	64.241.428.571,00	16.941.428.571,00	16.941.428.571,00	16.941.428.571,00	16.941.428.571,00	-18,41%
	PEMBIAYAAN	44.241.428.571,00	-16.941.428.571,00	-16.941.428.571,00	-16.941.428.571,00	-16.941.428.571,00	-15,43%
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00%
	Penggunaan SiLPA	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00%
	Penerimaan Kembali Investasi Non- Permanen	0	0	0	0	0	-
	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00%

N O	URAIAN	REALISASI (Rp.)					RATA-RATA PERTUMBUH AN (%)
		Baseline APBD Murni 2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	64.241.428.571,0 0	36.941.428.571,00	36.941.428.571,00	36.941.428.571,00	36.941.428.571,00	-10,62%
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	10.300.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	-5,58%
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	53.941.428.571,00	28.941.428.571,00	28.941.428.571,00	28.941.428.571,00	28.941.428.571,00	-11,59%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10.300.000.000,0 0	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	-5,58%
	PEMBIAYAAN NETTO	44.241.428.571,0 0	-16.941.428.571,00	-16.941.428.571,00	-16.941.428.571,00	-16.941.428.571,00	-15,43%

7.2. Program Perangkat Daerah

Perangkat Daerah melaksanakan program prioritas yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Program prioritas yang dilaksanakan beserta indikator kinerja, pagu indikatif target perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan urusan.

Program merupakan penjabaran dari strategi yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pembangunan Kota Singkawang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Untuk selanjutnya perangkat daerah merumuskan kegiatan-kegiatan dalam mencapai outcome program.

Dalam Bab VII ini ditampilkan program-program prioritas yang akan dilaksanakan perangkat daerah dalam dua bentuk, pertama yaitu berdasarkan urusan. Tujuannya untuk melihat seberapa besar alokasi perurusan dan mengukur pencapaian kinerja urusan. Sedangkan bentuk kedua berdasarkan Perangkat Daerah, tujuannya untuk melihat pagu setiap perangkat daerah dan mengukur capaian yang diharapkan.

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas Perangkat Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2022	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Urusan	Penanggu ng Jawab
							2023	2024	2025	2026			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				565.475.890.494	581.133.107.670	583.729.381.478	591.356.752.128	2.321.695.131 .770	Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah Provinsi	Seluruh PD
1			Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				254.118.225.777	278.930.923.242	295.888.618.263	316.541.285.126	1.145.479.052 .407		
1	01		Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan				54.446.364.955	66.422.296.386	81.010.745.791	98.777.683.104	300.657.090.236		
1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persen	29,83	4.216.880.400	5.060.256.480	6.072.307.776	7.286.769.331	22.636.213.987	Pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	Persen	101,82	49.857.682.255	60.915.877.146	74.403.042.703	90.848.439.398	276.025.041.502		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Mts/Paket B	Persen	102,34							
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	91,26							
				Angka Partisipasi	Persen	79,20							

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2022	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Urusan	Penanggu ng Jawab
							2023	2024	2025	2026			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Murni (APM) SMP/Mts/Paket B									
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI PAKET A	Persen	98,69							
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/Mts PAKET B	Persen	96,00							
				Angka Pendidikan Yang Di Tamatkan Jenjang SD/MI/Paket A	Persen	55,47							
				Angka Pendidikan Yang Di Tamatkan Jenjang SMP/MTS/Pak ert B	Persen	33,08							
				Angka Putus Sekolah SD/MI	Persen	0,68							
				Angka Putus Sekolah SMP/Mts	Persen	1,47							
				Angka Kelulusan SD/MI	Persen	100,00							
				Angka Kelulusan SMP/MTS	Persen	100,00							
				Angka Melanjutkan Dari SD/MI Ke SMP/MTS	Persen	112,54							

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2022	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Urusan	Penanggu ng Jawab
							2023	2024	2025	2026			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Ruang Kelas SD/MI Dalam Kondisi Bangunan Baik	Persen	96,10							
				Ruang Kelas SMP/MTS Dalam Kondisi Bangunan Baik	Persen	95,07							
				Rasio Ketersediaan SD/MI / Penduduk Usia 7-12 Tahun	Angka	39,77							
				Rasio Ketersediaan SMP/MTS / Penduduk Usia 13-15 Tahun	Angka	35,20							
				Persentase Lembaga PKBM Yang Terakreditasi Minimal B	Persen	57,14							
1	01	03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Penerapan Kurikulum Mulok Pada Pendidikan Anak Usia Dini	Persen	48,39	51.841.800	62.210.160	74.652.192	89.582.630	278.286.782	Pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Persentase Penerapan Kurikulum Mulok Pada Pendidikan Dasar	Persen	100,00	45.000.000	54.000.000	64.800.000	77.760.000	241.560.000	Pendidikan		
1	01	04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Guru Yang Memenuhi Kualitas S1/DIV Jenjang SD/MI	Persen	90,38	274.960.500	329.952.600	395.943.120	475.131.744	1.475.987.964	Pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2022	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Urusan	Penanggu ng Jawab
							2023	2024	2025	2026			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Guru Yang Memenuhi Kualitas S1/DIV Jenjang SMP/MTS	Persen	94,27							
				Rasio Guru SD/MI Terhadap Murid SD/MI	Angka	523,26							
				Rasio Guru SMP/MTS Terhadap Murid SMP/MTS	Angka	587,65							
				Rasio Guru SD/MI Terhadap Murid Per Kelas	Angka	0,05							
				Rasio Guru SMP/MTS Terhadap Murid Per Kelas	Angka	0,12							
1	02		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan				53.159.963.134	53.348.729.650	53.387.080.813	53.589.451.778	213.485.225.375		
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Dari SPM Bidang Kesehatan	Persen	62,76	52.467.773.622	52.641.081.580	52.672.029.430	52.863.906.098	210.644.790.731	Kesehatan	Dinkes Dan KB

Kode			Bidang Ururan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2022	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ururan	Penanggu ng Jawab
							2023	2024	2025	2026			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100,00	491.965.502	494.674.989	495.158.826	498.158.616	1.979.957.934	Kesehatan	Dinkes Dan KB
1	02	04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Instalasi Farmasi Kota Singkawang Menerapkan Manajemen Sediaan Farmasi Dan Makanan Minuman Sesuai Standar	Persen	85,00	125.000.000	137.500.000	144.375.000	151.593.750	558.468.750	Kesehatan	Dinkes Dan KB
1	02	05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Jumlah UKBM Yang Mengalami Pengembangan Dan Peningkatan	Persen	N/A	75.224.010	75.473.080	75.517.557	75.793.313	302.007.961	Kesehatan	Dinkes Dan KB
1	03		Ururan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang				128.215.825.035	136.698.720.312	138.079.335.253	140.087.007.053	543.080.887.653		
1	03	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Infrastruktur Pengendalian Banjir Di WS Kab/Kota	Persen	8,33	2.250.745.876	2.263.141.801	2.265.355.360	2.279.079.420	9.058.322.457	PUPR	Dinas PUPR

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2022	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Urusan	Penanggu ng Jawab
							2023	2024	2025	2026			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	03	03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga Yang Terlayani Air Bersih Perpipaan Dan Non Perpipaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari- Hari	Persen	100	12.234.000.000	12.356.340.000	12.479.903.400	12.604.702.434	49.674.945.83 4	PUPR	Dinas PUPR
1	03	04	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Perencanaan Sistem Pengelolaan Sampah Regional	Persen	100	74.068.288	74.476.217	74.549.061	75.000.697	298.094.263	Lingkunga n Hidup	Dinas PUPR
1	03	05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persen	3,37	3.016.514.632	3.033.128.009	3.036.094.683	3.054.488.065	12.140.225.38 9	PUPR	Dinas PUPR
1	03	06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Yang Terbangun	Persen	N/A	10.858.000.000	11.292.320.000	11.744.012.800	12.213.773.312	46.108.106.11 2	PUPR	Dinas PUPR
1	03	07	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Jalan Permukiman Dalam Kondisi Baik	Persen	32,72	14.298.591.074	14.377.340.199	14.391.402.543	14.478.589.074	57.545.922.89 0	PUPR	Dinas PUPR
1	03	08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik	Persen	70,59	30.713.507.037	35.949.182.389	35.386.164.159	35.554.723.584	137.603.577.1 69	PUPR	Dinas PUPR

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2022	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Urusan	Penanggu ng Jawab
							2023	2024	2025	2026			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	03	09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Kawasan Yang Tertata	Persen	8,30	1.200.867.440	1.207.481.187	1.208.662.213	1.215.984.576	4.832.995.416	PUPR	Dinas PUPR
1	03	10	Program Penyelenggaraa n Jalan	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	Persen	38,42	51.261.351.678	53.824.419.262	55.170.029.744	56.273.430.339	216.529.231.0 23	PUPR	Dinas PUPR
1	03	11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Jasa Konstruksi Yang Layak	Persen	84,44	184.015.278	185.028.738	185.209.713	186.331.757	740.585.486	PUPR	Dinas PUPR
1	03	12	Program Penyelenggaraa n Penataan Ruang	Persentase Rencana Tata Ruang	Persen	14,29	2.124.163.732	2.135.862.510	2.137.951.577	2.150.903.795	8.548.881.614	PUPR	Dinas PUPR
1	04		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman				15.916.980.744	20.124.132.535	21.050.304.027	21.682.085.959	78.773.503.26 5		
1	04	02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Dan Terdampak Relokasi Program Pemerintah Yang Di Tangani	Persen	100,00	611.000.000	522.907.749	900.000.000	935.708.899	2.969.616.648	PERKIM	Disperkimt a
1	04	03	Program Kawasan Permukiman	Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh (Dengan Luas Di Bawah 10	Persen	35,02	2.759.231.768	2.797.924.085	2.839.003.326	2.878.476.359	11.274.635.53 8	PERKIM	Disperkimt a

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2022	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Urusan	Penanggu ng Jawab
							2023	2024	2025	2026			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Ha) Yang Ditangani									
				Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni Pada Kawasan Permukiman Kumuh (Dengan Luas Di Bawah 10 Ha)	Persen	0,00	390.000.000	390.000.000	392.000.000	392.000.000	1.564.000.000	PERKIM	
1	04	04	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan Dan Permukiman Yang Berpotensi Kumuh Di Luar Kawasan Kumuh (Dengan Luas Di Bawah 10 Ha) Yang Ditangani	Persen	0,00	5.060.000.000	5.700.000.000	6.206.000.000	6.762.600.000	23.728.600.000	PERKIM	Disperkimt a
				Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni Di Luar Kawasan Permukiman Kumuh (Dengan Luas Dibawah 10 Ha)	Persen	0,00	460.000.000	640.000.000	640.000.000	640.000.000	2.380.000.000	PERKIM	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2022	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Urusan	Penanggu ng Jawab
							2023	2024	2025	2026			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	04	05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan (Perumahan Pengembang) Yang Ditangani	Persen	0,00	6.636.748.976	10.073.300.701	10.073.300.701	10.073.300.701	36.856.651.079	PERKIM	Disperkimt a
1	05		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum				519.098.144	571.007.959	628.108.755	654.705.665	2.372.920.523		
1	05	02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Penyelesaian K3 (Ketentraman, Ketertiban Dan Keindahan)	Persen	100,00	299.288.964	329.217.860	362.139.646	362.139.646	1.352.786.117	TRANTIB	Satuan Polisi Pamong Praja
				Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum PERDA Dan PERKADA (SPM)	Persen	100,00							
1	05	03	Program Penanggulanga n Bencana	Persentase Pelaksanaan Penanggulanga n Bencana	Persen	100,00	213.722.514	235.094.765	258.604.242	284.464.666	991.886.187	TRANTIB	BPBD

Kode			Bidang Urutan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2022	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Urutan	Penanggung Jawab
							2023	2024	2025	2026			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	05	04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Warga Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran (SPM)	Persen	100,00	6.086.666	6.695.333	7.364.866	8.101.353	28.248.219	TRANTIB	Satuan Polisi Pamong Praja
1	06		Urutan Pemerintahan Bidang Sosial				1.859.993.765	1.766.036.401	1.733.043.624	1.750.351.566	6.768.784.706		
1	06	02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Kesejahteraan Sumber Sosial (PSKS) Yang Telah Di Berdayakan	Persen	20,00	80.000.000	133.500.000	137.600.000	142.360.000	493.460.000	Sosial	Dinsos, PP Dan PA
			Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Pelayanan Dan Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan	Persen	100,00	7.500.000	7.700.000	8.000.000	8.000.000	31.200.000	Sosial	Dinsos, PP Dan PA
1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persen	100,00	1.242.700.500	1.096.086.018	1.096.375.617	1.098.171.130	4.533.333.265	Sosial	Dinsos, PP Dan PA
1	06	05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Perlindungan Dan Jaminan Sosial Terhadap Fakir Miskin	Persen	71,00	154.765.300	166.033.830	176.072.213	185.734.184	682.605.527	Sosial	Dinsos, PP Dan PA

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2022	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Urusan	Penanggu ng Jawab
							2023	2024	2025	2026			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Persentase Kesejahteraan/ Kemandirian Keluarga Miskin	Persen	100,00	110.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	410.000.000	Sosial	Dinsos, PP Dan PA
1	06	06	Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Bencana Skla Kota	Persen	100,00	135.027.965	160.716.553	160.839.515	161.601.881	618.185.914	Sosial	Dinsos, PP Dan PA
1	06	07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Dengan Kondisi Baik	Persen	1,00	130.000.000	102.000.000	54.156.279	54.484.371	340.640.650	Sosial	Dinsos, PP Dan PA
2			Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				29.207.327.454	21.628.094.612	22.296.589.709	22.312.277.530	95.444.289.305		
2	07		Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja				239.890.349	345.127.274	480.337.688	383.642.254	1.028.997.564		
2	07	02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Tersusunnya Dokumen Rencana Tenaga Kerja	Persen	0,00	25.000.000	30.000.000	150.000.000	37.000.000	242.000.000	Tenaga Kerja	DPMTK
2	07	03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran Pencari Kerja Yang Dilatih Lulus Uji Kompetensi	Persen	26,09	115.000.000	190.099.842	190.285.777	191.438.573	686.824.191	Tenaga Kerja	DPMTK
2	07	04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang	Persen	60,42	24.890.349	25.027.432	25.051.911	25.203.681	100.173.373	Tenaga Kerja	DPMTK

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2022	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Urusan	Penanggu ng Jawab
							2023	2024	2025	2026			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Ditempatkan Pada Pasar Kerja									
2	07	05	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan Yang Telah Memenuhi Sarana Hubungan Industrial	Persen	56,68	75.000.000	100.000.000	115.000.000	130.000.000	420.000.000	Tenaga Kerja	DPMTK
2	08		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak				729.000.000	488.500.000	491.300.000	495.400.000	2.204.200.000		
2	08	02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah	Persen	11,70	95.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	425.000.000	Pemberday aan Perempuan Dan Perlindung an Anak	Dinsos, PP Dan PA
2	08	03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Termasuk TPPO Yang Dilayani Sesuai Standar	Persen	71,00	95.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	320.000.000	Pemberday aan Perempuan Dan Perlindung an Anak	Dinsos, PP Dan PA

Kode			Bidang Ururan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2022	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ururan	Penanggu ng Jawab
							2023	2024	2025	2026			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	08	04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Berdasarkan Gender Yang Ditindaklanjuti	Persen	100,00	75.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	165.000.000	Pemberday aan Perempuan Dan Perlindung an Anak	Dinsos, PP Dan PA
2	08	05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Penyediaan Dokumen Data Profil Gender Yang Mutakhir	Persen	N/A	-	38.500.000	41.300.000	45.400.000	125.200.000	Pemberday aan Perempuan Dan Perlindung an Anak	Dinsos, PP Dan PA
2	08	06	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Cakupan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Berdasarkan Gender Yang Ditindaklanjuti	Persen	37,00	280.000.000	160.000.000	160.000.000	160.000.000	760.000.000	Pemberday aan Perempuan Dan Perlindung an Anak	Dinsos, PP Dan PA
2	08	07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase AMPK Yang Mendapatkan Pelayanan Secara Komprehensif	Persen	69,00	184.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	409.000.000	Pemberday aan Perempuan Dan Perlindung an Anak	Dinsos, PP Dan PA
2	09		Ururan Pemerintahan Bidang Pangan				1.078.317.450	2.212.000.000	2.497.000.000	2.392.100.000	8.179.417.450		

Kode			Bidang Ururan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2022	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ururan	Penanggu ng Jawab
							2023	2024	2025	2026			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	09	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Penyediaan Infrastruktur Dalam Mendukung Kemandirian Pangan	Persen	N/A	208.000.000	767.000.000	761.000.000	519.000.000	2.255.000.000	Pangan	Dispertahan kan
2	09	03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Konsumsi Energi	Persen	92,8	818.229.650	1.180.000.000	1.445.000.000	1.565.000.000	5.008.229.650	Pangan	Dispertahan kan
2	09	04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rawan Pangan	Persen	N/A	35.000.000	110.000.000	121.000.000	133.100.000	399.100.000	Pangan	Dispertahan kan
2	09	05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Persen	100,00	17.087.800	155.000.000	170.000.000	175.000.000	517.087.800	Pangan	Dispertahan kan
2	10		Ururan Pemerintahan Bidang Pertanahan				2.393.868.950	2.789.068.143	2.921.113.364	2.866.012.568	10.970.063.025		
2	10	04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Sengketa Tanah Garapan Yang Difasilitasi	Persen	100,00	59.589.200	75.000.000	75.000.000	75.000.000	284.589.200	Pertanahan	Disperkimp ta
2	10	05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/ Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persen	50,00	1.581.611.800	1.416.000.000	1.459.600.000	1.507.560.000	5.964.771.800	Pertanahan	Disperkimp ta

Kode			Bidang Ururan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2022	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ururan	Penanggu ng Jawab
							2023	2024	2025	2026			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	10	07	Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase Terdatanya Jumlah Tanah Ulayat/ Hukum Adat/ Kas Desa	Persen	0,00	-	80.000.000	100.000.000	90.000.000	270.000.000	Pertanahan	Disperkimp ta
2	10	08	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Luas Potensi Pemanfaatan Atas Tanah Kosong Yang Sudah Di Inventarisasi	Persen	0,00	-	153.000.000	156.060.000	159.181.200	468.241.200	Pertanahan	Disperkimp ta
2	10	09	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase Terdatanya/ Tertib Administrasi Data Pertanahan Mengenai Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)	Persen	76,39	57.667.950	75.068.143	93.203.364	112.183.868	338.123.325	Pertanahan	Disperkimp ta
2	10	10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase Luas Wilayah Yang Sudah Terpetakan	Persen	4,99	695.000.000	990.000.000	1.037.250.000	922.087.500	3.644.337.500	Pertanahan	Disperkimp ta
2	11		Ururan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup				4.552.377.373	4.677.355.965	4.591.462.223	4.624.831.938	18.446.027.49 9		
2	11	02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Strategis Yang Wajib Disusun Persentase Dokumen	Persen	N/A	55.402.788	150.000.000	55.762.405	56.100.227	317.265.421	Lingkunga n Hidup	DLH

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2022	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Urusan	Penanggu ng Jawab
							2023	2024	2025	2026			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Perencanaan Lingkungan Hidup Strategis Yang Wajib Disusun									
2	11	03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Peningatan Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persen	N/A	75.857.551	76.275.334	76.349.938	76.812.484	305.295.307	Lingkunga n Hidup	DLH
2	11	04	Program Pengelolaan Keanekaragama n Hayati (Kehati)	Persentase Pengelolaan RTH	Persen	0,43	282.669.810	284.226.607	284.504.606	286.228.203	1.137.629.227	Lingkunga n Hidup	DLH
2	11	05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pengelolaan Limbah B 3 Yang Tertangani	Persen	76,00	13.244.200	16.500.000	20.000.000	23.000.000	72.744.200	Lingkunga n Hidup	DLH
2	11	06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase Usaha/Kegiatan Yang Dibina Dan Diawasi	Persen	N/A	39.821.142	40.040.456	40.079.619	40.322.431	160.263.647	Lingkunga n Hidup	DLH

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2022	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Urusan	Penanggu ng Jawab
							2023	2024	2025	2026			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	11	08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Pendampingan Penghargaan L ingkungan Hidup	Persen	N/A	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	34.000.000	Lingkunga n Hidup	DLH
2	11	09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Dunia Pendidikan /Lembaga Masyarakat Yang Berhasil Mendapatkan Penilaian Tingkat Propinsi Dan Nasional	Persen	N/A	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	200.000.000	Lingkunga n Hidup	DLH
2	11	10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup	Persen	100,00	8.639.343	8.686.924	8.695.420	8.748.099	34.769.787	Lingkunga n Hidup	DLH
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	Cakupan Penangan Sampah	Ton/ Tahun	25.882,88	4.018.242.539	4.043.126.644	4.047.570.234	4.075.120.494	16.184.059.911	Lingkunga n Hidup	DLH
				Cakupan Pengurangan Sampah	Ton/ Tahun	6.769,10						Lingkunga n Hidup	DLH

Kode			Bidang Ururan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2022	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ururan	Penanggu ng Jawab
							2023	2024	2025	2026			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12		Ururan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil				804.917.405	807.143.582	808.273.849	813.821.634	3.174.156.470		
2	12	02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persen	100,00	440.356.000	440.356.377	440.395.849	440.640.577	1.761.748.803	DUKCAPI L	Disdukcapil
2	12	03	Program Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	Persen	100,00	109.557.205	109.787.205	109.878.000	110.181.057	439.403.467	DUKCAPI L	Disdukcapil
					Persen	100,00						DUKCAPI L	Disdukcapil
2	12	04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Peserta Yang Memahami Kegiatan Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persen	100,00	240.004.200	242.000.000	243.000.000	248.000.000	973.004.200	DUKCAPI L	Disdukcapil
				Presentase OPD Yang Telah Menandatangani Perjanjian Kerjasama Terkait Pemanfaatan Data Kependudukan	Persen	100,00						DUKCAPI L	Disdukcapil
2	12	05	Program Pengelolaan Profil Data Kependudukan	Persentase Penyajian Profil Data Perkembangan	Persen	100,00	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	60.000.000	DUKCAPI L	Disdukcapil

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2022	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Urusan	Penanggu ng Jawab
							2023	2024	2025	2026			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Dan Proyeksi Kependudukan									
2	13		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa				450.000.000	495.000.000	544.500.000	598.950.000	2.088.450.000		
2	13	04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pemuktahiran Profil Kelurahan Desa Dan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan	Persen	100,00	100.000.000	110.000.000	121.000.000	133.100.000	464.100.000	Pemberday aan Masyaraka t Dan Desa / Kelurahan	Dinsos, PP Dan PA
2	13	05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Kelurahan	Persen	12,50	350.000.000	385.000.000	423.500.000	465.850.000	1.624.350.000	Pemberday aan Masyaraka t Dan Desa / Kelurahan	Dinsos, PP Dan PA
2	14		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana				2.542.361.000	2.814.950.000	2.455.000.000	2.656.087.000	10.468.398.000		
2	14	02	Program Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur	Persen	N/A	325.000.000	335.630.000	346.000.000	352.000.000	1.358.630.000	Pengendali an Penduduk Dan Keluarga Berencana	Dinkes Dan KB

Kode			Bidang Ururan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2022	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ururan	Penanggu ng Jawab
							2023	2024	2025	2026			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	14	03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Rasio Jumlah Akseptor KB	Persen	N/A	1.177.361.000	1.460.520.000	1.090.000.000	1.266.087.000	4.993.968.000	Pengendali an Penduduk Dan Keluarga Berencana	Dinkes Dan KB
2	14	04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Jumlah PPKS	Persen	N/A	1.040.000.000	1.018.800.000	1.019.000.000	1.038.000.000	4.115.800.000	Pengendali an Penduduk Dan Keluarga Berencana	Dinkes Dan KB
2	15		Ururan Pemerintahan Bidang Perhubungan				2.322.608.239	2.334.794.122	2.336.970.173	2.350.461.686	9.344.834.220		
2	15	02	Program Penyelenggaraa n Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Persentase Ketersediaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Persen	70	2.065.578.959	2.076.955.082	2.078.986.533	2.091.581.526	8.313.102.100	Perhubung an	Dishub
				Persentase Ruas Jalan Bermasalah Yang Terawasi	Persen	15,00						Perhubung an	
				Persentase Sarana Dan Prasarana Terminal Yang Tersedia	Persen	42,00						Perhubung an	
				Persentase Peningkatan Ketersediaan Lahan Parkir Yang Dikelola	Persen	7,54						Perhubung an	
				Persentase Lampu PJU Terhadap Panjang Jalan Kota Dan Jalan	Persen	42,72						Perhubung an	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2022	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Urusan	Penanggu ng Jawab
							2023	2024	2025	2026			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Lingkungan Yang Terpasang									
				Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Induk PJU	Persen	N/A						Perhubung an	
				Persentase Ketersediaan Jumlah Dokumen Transportasi Darat	Persen	N/A						Perhubung an	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pengujian Berkala Kemdaraan Bermotor	Persen	N/A						Perhubung an	
2	15	03	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Pelaksanaan Program Pengelolaan Pelayaran	Persen	N/A	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	440.000.000	Perhubung an	Dishub
2	15	04	Program Pengelolaan Penerbangan	Persentase Pelaksanaan Monitoring Pembangunan Bandar Udara	Persen	100,00	147.029.280	147.839.040	147.983.640	148.880.160	591.732.120	Perhubung an	Dishub
2	16		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika				2.446.782.984	2.460.258.579	2.462.664.935	2.477.584.344	9.847.290.842		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2022	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Urusan	Penanggu ng Jawab
							2023	2024	2025	2026			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	16	02	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan Data dan Informasi Publik	Skor	87,107 (Baik)	603.043.947	606.365.196	606.958.277	610.635.374	2.427.002.794	KOMINF O	Diskominfo
2	16	03	Program Penerapan Aplikasi Informatika	Persentase Penerapan Aplikasi e- Government	Persen	36	1.843.739.037	1.853.893.382	1.855.706.658	1.866.948.970	7.420.288.047	KOMINF O	Diskominfo
2	17		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah				1.389.036.145	1.396.686.224	1.398.052.309	1.406.522.042	5.590.296.720		
2	17	03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	Persen	74,29	144.426.984	145.222.412	145.364.452	146.245.105	581.258.953	Koperasi, UKM	Disdaginko p Dan UKM
2	17	04	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usk Koperasi	Persentase KSP/USP Koperasi Yang Meningkat Status Kesehatannya	Persen	N/A	71.858.985	72.254.746	72.325.418	72.763.582	289.202.731	Koperasi, UKM	Disdaginko p Dan UKM
2	17	05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Pengelola Koperasi Yang Meningkat Kapasitasnya	Persen	N/A	333.311.006	335.146.707	335.474.511	337.506.895	1.341.439.119	Koperasi, UKM	Disdaginko p Dan UKM

Kode			Bidang Ururan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2022	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ururan	Penanggu ng Jawab
							2023	2024	2025	2026			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	Persen	7,40	85.624.220	86.095.793	86.180.002	86.702.101	344.602.116	Koperasi, UKM	Disdaginko p Dan UKM
2	17	08	Program Pengembangan Umk	Persentase Peningkatan Omzet Pelaku Usaha Mikro	Persen	2,00	753.814.950	757.966.566	758.707.926	763.304.359	3.033.793.801	Koperasi, UKM	Disdaginko p Dan UKM
2	18		Ururan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				1.789.054.919	1.704.038.365	1.713.612.194	1.813.958.938	7.020.664.415		
2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Kebijakan Pengembangan Iklim PM	Persen	N/A	231.600.000	135.000.000	140.000.000	227.849.000	734.449.000	Penanaman Modal	DPMTK
2	18	03	Program Promosi Penanaman Modal	Bertambahnya Investor Baru Di Kota Singkawang	Investor	17	5.217.562	5.235.283	5.238.447	5.258.066	20.949.358	Penanaman Modal	DPMTK
2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan Dan Non Perizinan	Persen	86,33	1.155.848.610	1.162.214.417	1.163.351.168	1.170.399.025	4.651.813.220	Penanaman Modal	DPMTK
2	18	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Besaran Perusahaan Yang Patuh LKPM (Laporan Kegiatan	Persen	21,00	390.363.747	392.513.665	392.897.579	395.277.846	1.571.052.838	Penanaman Modal	DPMTK

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2022	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Urusan	Penanggu ng Jawab
							2023	2024	2025	2026			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penanaman Modal)									
2	18	06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persen	100,00	6.025.000	9.075.000	12.125.000	15.175.000	42.400.000	Penanaman Modal	DPMTK
2	19		Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga				588.454.578	1.870.951.283	1.870.951.283	1.870.951.283	6.201.308.427		
2	19	02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	Persen	N/A	193.454.578	330.000.000	330.000.000	330.000.000	1.183.454.578	Kepemudaan Dan Olahraga	Disparpora
2	19	03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Keolahragaan	Persen	10,00	395.000.000	1.465.951.283	1.465.951.283	1.465.951.283	4.792.853.849	Kepemudaan Dan Olahraga	Disparpora
				Persentase Sarana Dan Prasarana Olahraga Yang Tersedia Dan Termanfaat	Persen	36,00	-	-	-	-	-	-	
2	19	04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Kelompok Pramuka Aktif	Persen	N/A	N/A	75.000.000	75.000.000	75.000.000	225.000.000	Kepemudaan Dan Olahraga	Disparpora
2	20		Urusan Pemerintahan				177.386.047	178.362.996	178.537.452	179.619.074	713.905.569		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2022	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Urusan	Penanggu ng Jawab
							2023	2024	2025	2026			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Bidang Statistik										
2	20	02	Program Penyelenggaraa n Statistik Sektoral	Indeks Domain Proses Bisnis Statistik	Persen	1,90	177.386.047	178.362.996	178.537.452	179.619.074	713.905.569	Statistik	Diskominfo
2	21		Urusan Pemerintahan Bidang Persandian				36.659.199	36.861.098	36.897.152	37.120.684	147.538.133		
2	21	02	Program Penyelenggaraa n Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks Area Teknologi dan Keamanan Informasi	Angka	57	36.659.199	36.861.098	36.897.152	37.120.684	147.538.133	Persandian	Diskominfo
2	22		Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan				332.901.102	350.346.330	370.611.447	395.514.514	1.449.373.393		
2	22	02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Kekayaan Budaya Yang Dikelola	Persen	80,00	118.950.551	119.605.668	119.722.654	120.447.962	478.726.835	Kebudayaa n	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
				Cakupan Pelaku Keragaman Budaya Yang Dibina (Jumlah Orang)	Persen	50,00	58.950.551	70.740.661	84.888.793	101.866.552	316.446.558	Kebudayaa n	
2	22	03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Peningkatan Seni Budaya Yang Dilestarikan	Persen	70,00	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	300.000.000	Kebudayaa n	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaa n

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2022	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Urusan	Penanggu ng Jawab
							2023	2024	2025	2026			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	22	05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Persen	81,30	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	220.000.000	Kebudayaa n	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaa n
				Persentase Kelestarian Cagar Budaya	Persen	87,00	25.000.000	30.000.000	36.000.000	43.200.000	134.200.000	Kebudayaa n	
2	23		Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan				11.000.000.000	400.000.000	550.000.000	600.000.000	12.550.000.000		
2	23	02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Kunjungan Ke Perpustakaan	Persen	10,48	11.000.000.000	400.000.000	550.000.000	600.000.000	12.550.000.000	Perpustaka an	Dispussip
				Persentase Jumlah Perpustakaan Yang Dibina	Persen	29,19						Perpustaka an	
				Persentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan Digital	Persen	14,86						Perpustaka an	
2	24		Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan				55.072.714	65.100.651	80.105.640	100.136.571	300.415.577		
2	24	02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Arsip Digital	Persen	10,35	50.000.000	60.000.000	75.000.000	95.000.000	280.000.000	Kearsipan	Dispussip
				Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Pengelolaan Kearsipan	Persen	86,20						Kearsipan	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2022	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Urusan	Penanggu ng Jawab
							2023	2024	2025	2026			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	24	03	Pprogram Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase Perangkat Daerah Yang Arsipnya Diakuisisi	Persen	10,35	5.072.714	5.100.651	5.105.640	5.136.571	20.415.577	Kearsipan	Dispuissip
3			Urusan Pemerintahan Pilihan				10.960.376.695	12.566.955.288	13.160.003.436	13.819.988.178	50.507.323.597		
3	25		Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan				414.764.481	670.050.735	842.148.594	1.145.755.318	3.072.719.127		
3	25	03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Persen	5,00	240.261.755	495.000.000	667.000.000	970.000.000	2.372.261.755	Perikanan	Dispertahan kan
3	25	04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Persen	10,00	78.615.417	79.048.390	79.125.706	79.605.068	316.394.581	Perikanan	Dispertahan kan
3	25	05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Tingkat Pelanggaran Di Perairan Umum	Pelangga ran	0,00	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	300.000.000	Perikanan	Dispertahan kan
3	25	06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Pelaku Usaha Skala Kecil Yang Dibina	Persen	N/A	20.887.309	21.002.345	21.022.887	21.150.249	84.062.791	Perikanan	Dispertahan kan
3	26		Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata				1.322.850.000	1.822.930.974	1.825.930.974	1.825.930.974	6.797.642.922		
3	26	02	Program Peningkatan Daya Tarik	Persentase Destinasi Pariwisata	Persen	20,00	267.000.000	267.000.000	270.000.000	270.000.000	1.074.000.000	Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2022	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Urusan	Penanggu ng Jawab
							2023	2024	2025	2026			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Destinasi Pariwisata	Dalam Kondisi Baik									Dan Olahraga
				Persentase Peningkatan Destinasi Wisata Yang Dikembangkan	Persen	20,00						Pariwisata	
3	26	03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Event Pariwisata	Persen	100,00	635.800.000	928.381.944	928.381.944	928.381.944	3.420.945.832	Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
3	26	04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Cakupan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persen	5,00	295.500.000	195.000.000	195.000.000	195.000.000	880.500.000	Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
3	26	05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	Persen	5,50	124.550.000	432.549.030	432.549.030	432.549.030	1.422.197.090	Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
3	27		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian				4.176.167.853	5.008.645.317	5.411.507.843	5.716.416.377	20.312.737.39 1		
3	27	02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Luasan Lahan Pertanian Yang Diawasi Penggunaan Sarana Pertanian	Persen	50,00	504.032.946	506.808.894	507.304.599	510.377.971	2.028.524.410	Pertanian	Dispertahan kan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2022	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Urusan	Penanggu ng Jawab
							2023	2024	2025	2026			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Persentase Penyediaan Sarana Pernakan	Persen	N/A						Pertanian	
				Persentase Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak Dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Ternak	Persen	N/A						Pertanian	
3	27	03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Lahan Sawah Yang Terpetakan Dan Terlindungi	N/A	100,00	2.845.082.308	2.987.336.423	3.136.703.244	3.293.538.406	12.262.660.38 1	Pertanian	Dispertahan kan
				Persentase Ketersediaan Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian	60	100,00						Pertanian	
				Persentase Peningkatan Jumlah Pemotongan Hewan Di RPH	11,9	0,50						Pertanian	
3	27	04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Penyakit Hewan/Ternak	Persen	16,80	370.564.700	834.000.000	962.000.000	1.087.000.000	3.253.564.700	Pertanian	Dispertahan kan
				Persentase Peningkatan Kualitas Pangan Asal	Persen	N/A						Pertanian	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2022	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Urusan	Penanggu ng Jawab
							2023	2024	2025	2026			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Hewan Yang Aman Sehat Utuh Halal									
3	27	05	Program Pengendalian Dan Penanggulanga n Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian Dan Penanggulanga n Bencana Pertanian	Persen	0,40	21.003.900	75.000.000	75.000.000	75.000.000	246.003.900	Pertanian	Dispertahan kan
				Persentase Pengendalian Dan Penanggulanga n Bencana Non Alam Yang Bersifat Zoonosis	Persen	N/A						Pertanian	
3	27	06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Pertimbangan Teknis Yang Memenuhi Syarat	Persen	N/A	-	20.500.000	20.500.000	20.500.000	61.500.000	Pertanian	Dispertahan kan
3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani Kelas Pemula Yang Meningkatkan Skornya	Persen	N/A	435.484.000	585.000.000	710.000.000	730.000.000	2.460.484.000	Pertanian	Dispertahan kan
3	30		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Persentase Kelompok Tani Kelas Pemula Yang Meningkatkan Skornya	Persen	N/A	2.557.896.499	2.573.396.865	2.586.021.930	2.634.157.336	10.351.472.630		
3	30	02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Pertumbuhan Pelaku Usaha Formal	Angka	N/A	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	160.000.000	Perdagang an	Disdaginko p Dan UKM

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2022	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Urusan	Penanggu ng Jawab
							2023	2024	2025	2026			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	30	03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan Dalam Kondisi Baik	Persen	N/A	1.787.330.000	1.799.330.000	1.811.330.000	1.855.590.000	7.253.580.000	Perdagang an	Disdaginko p Dan UKM
3	30	04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Distribusi Bahan Pokok Dan Barang Penting	Persen	74,24	539.568.580	542.540.241	543.070.894	546.360.947	2.171.540.662	Perdagang an	Disdaginko p Dan UKM
3	30	06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat-Ala Tukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapann ya (UTTP) Yang Bertanda Sah Yang Berlaku	Persen	92,91	95.997.918	96.526.624	96.621.036	97.206.389	386.351.968	Perdagang an	Disdaginko p Dan UKM
3	30	07	Program Peningkatan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Omset Pelaku Usaha Produk Unggulan	Persen	N/A	95.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000	380.000.000	Perdagang an	Disdaginko p Dan UKM
3	31		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian				2.488.697.862	2.491.931.397	2.494.394.095	2.497.728.174	9.972.751.527		
3	31	02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil Dan Menengah	Persen	9,18	2.318.309.432	2.320.604.557	2.322.899.682	2.325.194.807	9.287.008.478	Perindustri an	Disdaginko p Dan UKM
3	31	03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Peningkatan IKM Yang Memiliki	Persen	N/A	170.388.430	171.326.840	171.494.413	172.533.367	685.743.049	Perindustri an	Disdaginko p Dan UKM

Kode			Bidang Ururan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2022	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Urusan	Penanggung Jawab
							2023	2024	2025	2026			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Legalitas Usaha									
4			Unsur Pendukung Ururan Pemerintahan				36.971.318.178	41.392.359.854	41.453.694.487	41.583.642.606	161.401.015.125		
4	01		Sekretariat Daerah				28.711.491.424	28.719.186.499	28.656.274.905	28.686.223.024	114.773.175.852		
4	01	02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Terlaksananya IKK Oleh Perangkat Daerah	Persen	70,00	27.063.206.893	27.067.331.557	27.003.782.390	27.029.777.554	108.164.098.393	SETDA	Sekretariat Daerah
				Persentase Tindakan Perda	Persen	76,29						SETDA	
				Persentase Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat Yang Ditindaklanjuti	Persen	0,00						SETDA	
4	01	03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Yang Ditindaklanjuti	Persen	55,88	1.648.284.531	1.651.854.942	1.652.492.515	1.656.445.470	6.609.077.458	SETDA	Sekretariat Daerah
				Persentase Capaian Realisasi Fisik Perangkat Daerah	Persen	89,65						SETDA	
				Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Tender	Persen	100,00						SETDA	

Kode			Bidang Urutan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2022	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Urutan	Penanggung Jawab
							2023	2024	2025	2026			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	02		Sekretariat DPRD				8.259.826.754	12.673.173.355	12.797.419.582	12.897.419.582	46.627.839.273		
4	02	02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Persentase Dukungan Tugas Dan Fungsi DPRD Sesuai Standar	Persen	100,00	8.259.826.754	12.673.173.355	12.797.419.582	12.897.419.582	46.627.839.273	SET DPRD	Sekretariat DPRD
5			Unsur Penunjang Urutan Pemerintahan				23.644.871.504	24.145.539.994	24.949.031.713	25.457.640.719	98.197.083.931		
5	01		Urutan Pemerintahan Bidang Perencanaan				1.538.479.670	1.769.251.621	2.038.639.364	2.339.835.268	7.686.205.923		
5	01	02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Program RPJMD / RPD Ke Dalam RKPD	Persen	100,00	923.479.670	993.951.621	1.252.833.364	1.393.313.148	4.563.577.803	Perencanaan	Bappeda
				Persentase Capaian Target Kinerja Indikator Program	Persen	100,00						Perencanaan	
5	01	03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Antar Dokumen RKPD Dengan RPJMD/RPD	Persen	91,00	615.000.000	775.300.000	785.806.000	946.522.120	3.122.628.120	Perencanaan	Bappeda
				Persentase Kesesuaian Antar Dokumen Renja Dengan RENSTRA	Persen	100,00						Perencanaan	

Kode			Bidang Ururan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2022	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ururan	Penanggu ng Jawab
							2023	2024	2025	2026			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	02		Keuangan				14.505.391.834	14.615.268.373	14.689.151.949	14.826.140.243	58.635.952.400		
5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD Yang Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Tepat Waktu;	Persen	100,00	12.083.012.097	12.141.030.110	12.167.933.300	12.247.707.764	48.639.683.272	Keuangan	BPKAD
				Cakupan Pencapaian Penyerapan Belanja Perangkat Daerah Sesuai Target;	Persen	100,00						Keuangan	
				Persentase OPD Yang Telah Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu.	Persen	100,00						Keuangan	
5	02	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD Yang Menyampaikan RKBMD Tepat Waktu	Persen	100,00	865.703.422	908.988.593	954.438.023	1.002.159.924	3.731.289.962	Keuangan	BPKAD
				Persentase OPD Yang Menyampaikan LBMD Tepat Waktu	Persen	100,00						Keuangan	
5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	10,00	1.556.676.315	1.565.249.670	1.566.780.626	1.576.272.555	6.264.979.166	Keuangan	Bapenda

Kode			Bidang Ururan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2022	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ururan	Penanggu ng Jawab
							2023	2024	2025	2026			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	03		Ururan Pemerintahan Bidang Kepegawaian				3.100.000.000	3.150.000.000	3.200.000.000	3.210.000.000	12.660.000.000		
5	03	02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Fasilitasi Pelayanan Pembinaan Disiplin ASN	Persen	100,00	3.100.000.000	3.150.000.000	3.200.000.000	3.210.000.000	12.660.000.000	Kepegawai an	BKPSDM
				Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persen	100,00						Kepegawai an	
				Persentase Pemenuhan Formasi Pengadaan ASN	Persen	N/A						Kepegawai an	
				Persentase ASN Yang Mengikuti Tugas Belajar	Persen	N/A						Kepegawai an	
5	04		Ururan Pemerintahan Bidang Pendidikan Dan Pelatihan				4.000.000.000	4.100.000.000	4.500.000.000	4.550.000.000	17.150.000.000		
5	04	02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Fasilitasi Pelayanan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN	Persen	191,00	4.000.000.000	4.100.000.000	4.500.000.000	4.550.000.000	17.150.000.000	Kepegawai an	BKPSDM
				Persentase CPNS Yang Mengikuti Pelatihan Dasar	Persen	50,00						Kepegawai an	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2022	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Urusan	Penanggu ng Jawab
							2023	2024	2025	2026			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	05		Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian Dan Pengembangan				501.000.000	511.020.000	521.240.400	531.665.208	2.064.925.608		
5	05	02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Didiseminasi n	Persen	N/A	501.000.000	511.020.000	521.240.400	531.665.208	2.064.925.608	Penelitian Dan Kelitbanga n	Bappeda
				Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan	Persen	N/A						Penelitian Dan Kelitbanga n	
6			Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan				1.944.340.000	2.344.500.000	2.598.950.000	2.708.845.000	9.596.635.000		
6	01		Inspektorat Daerah				1.944.340.000	2.344.500.000	2.598.950.000	2.708.845.000	9.596.635.000		
6	01	02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal	Persen	96,21	1.546.277.000	1.800.000.000	2.000.000.000	2.050.000.000	7.396.277.000	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
				Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Eksternal :									
				- BPK	Persen	92,20							
				- ITPROV	Persen	98,40							

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2022	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Urusan	Penanggu ng Jawab
							2023	2024	2025	2026			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Persentase Penyelesaian Kasus Pengaduan Dan Pemeriksaan Khusus	Persen	100							
				Persentase Penyelesaian Masalah Perangkat Daerah Melalui Pemberian Advis	Persen	100							
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Cakupan Perangkat Daerah Yang Melakukan Pengelolaan Risiko Operasional	Persen	100	398.063.000	544.500.000	598.950.000	658.845.000	2.200.358.000	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
				Cakupan Perangkat Daerah Yang Melakukan Pengelolaan Risiko Korupsi	Persen	N/A							
				Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai SAKIP BB Pada Wilayah Kerja Irbn	Persen	100							
7			Unsur Kewilayahan										
7	01		Kecamatan Administrasi				10.207.843.113	10.459.700.544	10.968.749.300	11.541.038.363	43.177.331.319		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2022	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Urusan	Penanggu ng Jawab
							2023	2024	2025	2026			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Dilaksanakan	Persen	100,00	2.743.400.000	2.898.390.000	3.096.825.500	3.325.045.515	12.063.661.015	Pendidikan	Kecamatan
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Peran Aktif Kelompok/Lembaga Kemasyarakatan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Persen	100,00	6.457.726.700	6.548.293.360	6.850.852.907	7.180.693.959	27.037.566.925	Pendidikan	Kecamatan
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Tingkat Kecamatan	Persen	100,00	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	1.000.000.000	Pendidikan	Kecamatan
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Kelompok/Lembaga Kemasyarakatan Yang Mendapatkan Peningkatan Wawasan Kebangsaan Di Tingkat Kecamatan	Persen	100,00	756.716.413	763.017.184	771.070.893	785.298.889	3.076.103.379	Pendidikan	Kecamatan
8			Unsur Pemerintahan Umum				15.391.476.144	19.272.214.216	21.033.335.360	2.760.000.000	58.457.025.720		
8	01		Kesatuan Bangsa Dan Politik				15.391.476.144	19.272.214.216	21.033.335.360	2.760.000.000	58.457.025.720		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2022	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Urusan	Penanggu ng Jawab
							2023	2024	2025	2026			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persen	N/A	200.000.000	220.000.000	230.000.000	250.000.000	900.000.000	Kesatuan Bangsa Dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	01	03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persen	N/A	14.721.476.144	18.532.214.216	20.183.335.360	1.830.000.000	55.267.025.720	Kesatuan Bangsa Dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	01	04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	N/A	150.000.000	170.000.000	200.000.000	220.000.000	740.000.000	Kesatuan Bangsa Dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	01	05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persen	N/A	170.000.000	180.000.000	240.000.000	260.000.000	850.000.000	Kesatuan Bangsa Dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2022	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Urusan	Penanggu ng Jawab
							2023	2024	2025	2026			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	01	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persen	N/A	150.000.000	170.000.000	180.000.000	200.000.000	700.000.000	Kesatuan Bangsa Dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk tahun 2023-2026. Gambaran kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berkaitan dengan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Selain itu, bab ini juga menyajikan IKU masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah.

8.1. Indikator Kinerja Utama Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah ditetapkan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk tahun 2023-2026. Adapun IKU Daerah yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 8.1
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA SINGKAWANG

No	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5				6
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	72,89	73,30	73,40	73,50	73,60	73,60
2	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,05	5,10	5,30	5,40	5,60	5,60
3	Tingkat Inflasi	Persen	5,96	4,50	4,00	3,80	3,60	3,60
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,63	8,51	8,00	7,80	7,7	7,70
5	Indeks Infrastruktur Daerah	Nilai	58,67	66,38	68,65	70,70	73,66	73,66
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	63,37	70,01	70,10	70,20	70,30	70,33

8.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat Perangkat Daerah. IKU tersebut secara langsung mendukung capaian IKU daerah. Berikut ini adalah IKU masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang:

TABEL 8.2
PENERAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023-2026

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5				6
A.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN							
1	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,92	12,93	12,94	12,95	12,96	12,96
2	Angka Rata Rata Lama Sekolah	Tahun	8,19	8,27	8,35	8,43	8,51	8,51
3	Persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilestarikan	Tahun	82,67	83,15	83,74	84,12	84,54	84,54
B.	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA							
4	Angka harapan hidup	Tahun	72,11	73,252	73,71	74,17	74,63	74,63
5	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,55	1,65	1,62	1,59	1,56	1,56
C.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
6	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	48,71	49,42	49,75	50,06	50,36	50,36
7	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	Persen	93,5	93,8	94,08	94,2	94,57	94,57
8	Persentase Jalan mantap	Persen	52,35	53,02	54,12	55,3	56,41	56,41
9	Persentase Genangan/banjir Kota Singkawang	Persen	4,1	3,73	3,69	3,66	3,64	3,64

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5				6
10	Persentase Drainase dalam kondisi baik	Persen	73,52	75,45	76,86	77,41	81,61	81,61
11	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	96,24	96,24	97,05	98,19	99,2	99,2
D.	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN							
12	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Persen	97,91	97,97	98,03	98,08	98,14	98,14
13	Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan	Persen	64,98	49,92	46,16	38,63	30,05	30,05
E.	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
14	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Perempuan	Persen	52,72	53,25	53,78	54,32	54,86	54,86
15	Skor tingkat Capaian Kota Layak Anak	Skor	681,55	685	690	695	699	699
16	Persentase PPKS yang Tertangani	Persen	69,14	84	85	86	87	87
F.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	85,04	86	87	87,5	88	88
G.	DINAS PERHUBUNGAN							
18	Persentase Kelancaran Lalu Lintas	Persen	99,4	99,41	99,42	99,43	99,44	99,44

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5				6
H.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
19	Indeks SPBE	Nilai	2,6	2,65	3,34	3,35	3,36	3,36
I.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA							
20	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	68,86	69,41	69,96	70,51	71,06	71,06
J.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							
21	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	85,04	86	87	87,5	88	88
K.	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA							
22	Persentase Partisipasi Atlet pada PorProv dan Popda	Persen	61,71	65	68	70	75	75
23	PAD sektor pariwisata	Persen	9,77	9,8	9,83	9,84	9,85	9,85
24	Cakupan Pembinaan Ekonomi Kreatif	Persen	25	26	26	27	28	28
L.	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN							
25	Distribusi PDRB sektor pertanian dan Perikanan	Persen	11,82	11,82	11,87	11,92	11,97	11,97
26	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Skor	85,7	86,1	86,5	86,9	87,4	87,4

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5				6
M.	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH							
27	Volume usaha koperasi	Rp	253.625.219.385	263.625.219.385	273.625.219.385	283.625.219.385	293.625.219.385	293.625.219.385
28	Volume usaha UMKM	Rp	782.901.050.097	792.901.050.097	802.901.050.097	812.901.050.097	822.901.050.097	822.901.050.097
29	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Persen	3,68	4	4,05	4,1	4,15	4,15
30	Pertumbuhan PDRB sektor industri	Persen	4,58	4,6	4,61	4,62	4,65	4,65
N.	SEKRETARIAT DPRD							
31	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	85,04	86	87	87,5	88	88
O.	SEKRETARIAT DAERAH							
32	Nilai RB	Nilai	63,37	70,01	70,1	70,2	70,3	70,3
P.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							
33	Indeks SAKIP	Nilai	-	63,00	63,20	63,50	64,00	64,00
34	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persen	-	25	50	75	100	100
35	Indeks Inovasi Daerah	Persen	-	58	59	60	61	61
Q.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							
36	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Persen	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
R.	BADAN PENDAPATAN DAERAH							
37	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Persen	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5				6
S.	INSPEKTORAT DAERAH							
38	Indeks Integritas	Nilai	73,91	75	76	77	77,5	77,5
O.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
39	Indeks Toleransi	Nilai	6,583	6,6	6,63	6,66	6,7	6,7

8.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Adapun IKK Kota Singkawang yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 8.3

**PENERAPAN INDIKATOR KINERJA MENURUT BIDANG URUSAN PENYELENGGARAAN TINGKAT SASARAN
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023-2026**

No.	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5				6
LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR								
A.	Pendidikan							
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persen	29,83	29,88	29,93	30,15	30,22	30,22
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	Persen	101,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	Persen	102,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	91,26	91,38	91,47	91,58	91,71	91,71
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	79,20	80,51	81,39	81,88	82,53	82,53
6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI PAKET A	Persen	98,69	98,91	99,31	99,82	100,00	100,00
7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs PAKET B	Persen	96,00	96,45	96,81	97,21	97,88	97,88
8	Angka Pendidikan yang di tamatkan jenjang SD/MI/Pakert A	Persen	55,47	55,54	55,60	55,63	55,69	55,69
9	Angka Pendidikan yang di tamatkan jenjang SMP/MTS/Pakert B	Persen	33,08	33,14	33,19	33,23	33,27	33,27
10	Angka Putus Sekolah SD/MI	Persen	0,68	0,57	0,53	0,48	0,42	0,42
11	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	Persen	1,47	1,41	1,36	1,32	1,27	1,27
12	Angka Kelulusan SD/MI	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Angka Kelulusan SMP/MTS	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTS	Persen	112,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5				6
15	Ruang Kelas SD/MI dalam kondisi bangunan baik	Persen	96,10	96,18	96,24	96,31	96,35	96,35
16	Ruang Kelas SMP/MTS dalam kondisi bangunan baik	Persen	95,07	95,12	95,19	95,24	95,29	95,29
17	Rasio Ketersediaan SD/MI / penduduk usia 7-12 tahun	Angka	39,77	39,83	39,88	39,92	39,95	39,95
18	Rasio Ketersediaan SMP/MTS / penduduk usia 13-15 tahun	Angka	35,20	35,40	35,60	35,80	36,00	36,00
19	Persentase Lembaga PKBM yang terakreditasi Minimal B	Persen	57,14	71,43	85,71	100,00	100,00	100,00
20	Persentase Penerapan Kurikulum Mulok pada Pendidikan Anak Usia Dini	Persen	48,39	50,54	53,76	55,91	59,14	59,14
21	Persentase Penerapan Kurikulum Mulok pada Pendidikan Dasar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22	Guru yang memenuhi Kualitas S1/DIV jenjang SD/MI	Persen	90,38	91,21	92,33	93,10	93,90	93,90
23	Guru yang memenuhi Kualitas S1/DIV jenjang SMP/MTS	Persen	94,27	94,88	95,10	95,48	96,00	96,00
24	Rasio guru SD/MI terhadap murid SD/MI	Angka	523,26	527,00	531,00	535,00	539,00	539,00
25	Rasio guru SMP/MTS terhadap murid SMP/MTS	Angka	587,65	589,00	591,00	593,00	597,00	597,00
26	Rasio guru SD/MI terhadap murid per kelas	Angka	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,09
27	Rasio guru SMP/MTS terhadap murid per kelas	Angka	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16	0,16
28	Persentase Kekayaan Budaya yang dikelola	Persen	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	84,00
29	Cakupan Pelaku keragaman budaya yang dibina (jumlah orang)	Persen	50,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00

No.	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5				6
30	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Persen	81,30	82,30	83,30	84,30	85,30	85,30
31	Persentase Kelestarian Cagar Budaya	Persen	87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	89,00
32	Persentase Peningkatan Seni Budaya Yang Dilestarikan	Persen	70,00	70,50	71,00	71,50	72,00	72,00
B. Kesehatan								
14	Persentase dari SPM Bidang Kesehatan	persen	62,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Persentase Instalasi Farmasi Kota Singkawang menerapkan Manajemen sediaan Farmasi dan Makanan Minuman sesuai Standar	persen	85,00	85,00	90,00	90,00	95,00	95,00
16	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Jumlah UKBM yang mengalami pengembangan dan Peningkatan	persen	n/a	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
18	Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih perpipaan dan non perpipaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persen	100	100	100	100	100	100
19	Persentase jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	3,37	3,75	4,12	4,48	4,84	4,84
20	Persentase Perencanaan Sistem pengelolaan sampah regional	Persen	100	100	100	100	100	100
21	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	Persen	38,42	38,3	39,1	40,12	41,07	41,07
22	Persentase jasa konstruksi yang layak	Persen	84,44	100	100	100	100	100
23	Persentase Drainase yang terbangun	Persen	1,27	3,01	2,35	2,13	2,01	2,01

No.	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5				6
24	Persentase Luas Kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi infrastruktur pengendalian banjir di WS Kab/Kota	Persen	8,33	8,50	8,75	9,02	9,29	9,29
25	Persentase jalan permukiman dalam kondisi baik	Persen	32,72	34,9	37,03	39,10	41,12	41,12
26	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	Persen	70,59	72,06	73,53	75,00	76,47	76,47
27	Persentase rencana tata ruang	Persen	14,29	28,57	57,14	85,71	100	100
28	Persentase kawasan yang tertata	Persen	8,30	8,45	8,62	14,35	21,79	21,79
D.	Perumahan dan Kawasan Permukiman							
29	Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh (dengan Luas di bawah 10 Ha) yang ditangani	Persen	0,00	5,40	10,81	16,21	21,62	21,62
30	Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar kawasan permukiman kumuh (dengan luas dibawah 10 Ha)	Persen	0,00	3,79	7,57	11,36	15,14	15,14
31	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Terdampak Relokasi Program Pemerintah yang di tangani	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
32	Persentase Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan (Perumahan Pengembang) yang ditangani	Persen	0,00	39,43	55,47	71,51	87,55	87,55
33	Persentase Penanganan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha)	Persen	35,02	50,08	53,84	61,37	69,95	69,95
34	Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha)	Persen	0,00	25,00	50,00	75,00	100,00	100,00
E.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum							

No.	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5				6
35	Persentase Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
36	Indeks Risiko Bencana	Persen	n/a	125,00	120,00	115,00	110,00	110,00
37	Tingkat Penyelesaian K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum PERDA dan PERKADA (SPM)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
39	Persentase Pelaksanaan Penanggulangan Bencana	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40	Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F.	Sosial							
41	Persentase Potensi Kesejahteraan Sumber Sosial (PSKS) yang telah di Berdayakan	Persen	20,00	20,00	40,00	60,00	100,00	100,00
42	Persentase Rehabilitasi Sosial Terhadap pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43	Persentase Pelayanan dan Penanganan Warga Migran Korban Tindak kekerasan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44	persentase Perlindungan dan jaminan Sosial Terhadap Fakir Miskin	Persen	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	75,00
45	Persentase Kesejahteraan/Kemandirian Keluarga Miskin	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46	Persentase Penanganan Bencana Skala Kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR								
A.	Tenaga Kerja							

No.	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5				6
47	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada pasar kerja	Persen	60,42	61,46	62,5	63,54	64,58	64,58
48	Persentase Perusahaan yang telah memenuhi sarana Hubungan Industrial	Persen	56,68	57,25	58,21	59,16	60,11	60,11
49	Persentase Tersusunnya dokumen Rencana Tenaga Kerja	Persen	0,00	20,00	20,00	40,00	20,00	20,00
50	Persentase Pencari Kerja yang dilatih lulus Uji Kompetensi	Persen	26,09	42,86	56,25	62,5	78,13	78,13
B.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
51	Persentase Partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah	Persen	11,70	12,00	12,50	12,70	13,00	13,00
52	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Termasuk TPPO Yang Dilayani Sesuai Standar	Persen	71,00	75,00	78,00	80,00	85,00	85,00
53	Cakupan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Berbasis Gender yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	90,00	92,00	93,00	95,00	95,00
54	Cakupan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Berbasis Gender yang ditindaklanjuti	Persen	37,00	38,00	39,00	40,00	42,00	42,00
55	Persentase AMPK yang mendapatkan pelayanan secara komprehensif	Persen	69,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
C.	Pangan							
56	Persentase Penyediaan Infrastruktur Dalam Mendukung Kemandirian Pangan	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
57	Persentase konsumsi energi	Persen	92,80	93,70	94,70	95,60	96,60	96,60

No.	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5				6
58	Persentase daerah rawan pangan	Persen	n/a	46,00	38,00	31,00	23,00	23,00
59	Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Persen	100,00	83,00	87,00	90,00	93,00	93,00
D. Lingkungan Hidup								
60	Persentase peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Persen	na	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
61	Persentase Pengelolaan RTH	Persen	0,43	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
62	Persentase pendampingan penghargaan lingkungan hidup	Persen	na	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
63	Persentase dunia pendidikan /lembaga masyarakat yang berhasil mendapatkan penilaian tingkat propinsi dan nasional	Persen	na	18,00	20,00	22,00	24,00	24,00
64	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup strategis yang wajib disusun Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup strategis yang wajib disusun	Persen	na	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
65	Persentase usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi	Persen	na	5,00	6,00	7,00	8,00	8,00
66	Persentase tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat bidang Lingkungan Hidup	Persen	100,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
67	Persentase pengelolaan limbah B 3 yang tertangani	Persen	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	80,00
68	Cakupan penangan sampah	Ton/ Tahun	5.882,88	23.980,97	23.919,77	24.853,78	25.142,09	25.142,09
69	Cakupan pengurangan sampah	Ton/ Tahun	6.769,10	9.367,86	9.827,51	10.651,62	10.775,18	10.775,18

No.	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5				6
E.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
70	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
71	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72	Persentase Peserta Yang Memahami Kegiatan Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
73	Presentase OPD yang telah menandatangani Perjanjian kerjasama terkait pemanfaatan data kependudukan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74	Persentase Penyajian Profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa / Kelurahan							
75	Persentase Pemuktahiran Profil Kelurahan Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	100
76	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang diberdayakan	Persen	12,50	12	25	37	50	50
G.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
77	Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur	Persen	n/a	2,03	2,02	2,00	1,90	1,90
78	Rasio Jumlah Akseptor KB	Persen	n/a	80,00	85,00	90,00	100,00	100,00
79	Jumlah PPKS	Persen	n/a	75,00	80,00	85,00	85,00	85,00
H.	Perhubungan							

No.	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5				6
80	Persentase Ketersediaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Persen	70	71,30	73,20	75,10	77,00	77,00
81	Persentase Ruas Jalan bermasalah yang Terawasi	Persen	15,00	18,00	24,00	30,00	36,00	36,00
82	Persentase Sarana dan Prasarana Terminal yang Tersedia	Persen	42,00	47,00	52,00	57,00	62,00	62,00
83	Persentase Peningkatan Ketersediaan Lahan Parkir yang dikelola	Persen	7,54	8,73	8,03	7,43	7,40	31,59
84	Persentase Lampu PJU Terhadap Panjang Jalan Kota dan Jalan Lingkungan yang Terpasang	Persen	42,72	44,80	46,90	48,90	51,00	51,00
85	Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Induk PJU	Persen	n/a	20,00	40,00	100,00	100,00	100,00
86	Persentase Ketersediaan Jumlah Dokumen Transportasi Darat	Persen	n/a	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00
87	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persen	n/a	76	77	78	79	79
I.	Komunikasi dan Informatika							
88	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan Data dan Informasi Publik	Nilai	87,107 (Baik)	87 (Baik)	87,5 (Baik)	88 (Baik)	88,5 (Baik)	88,5 (Baik)
89	Persentase Penerapan Aplikasi e-Government	Persen	36	45	50	55	60	60
J.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
90	Persentase koperasi aktif	Persen	74,29%	74,30%	74,40%	74,50%	74,50%	74,50%
91	Persentase KSP/USP Koperasi yang meningkat status kesehatannya	Persen	n/a	6,00	8,82	11,42	13,88	13,88
92	Persentase SDM pengelola Koperasi yang meningkat kapasitasnya	Persen	n/a	14,87	18,08	21,05	23,82	23,82

No.	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5				6
93	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	Persen	7,4%	7,4%	7,4%	7,4%	7,4%	7,4%
K.	Penanaman Modal							
94	Persentase Pengembangan Iklim PM	Persen	n/a	29,00	43,00	57,00	100,00	100,00
95	Persentase Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
96	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan Dan Non Perizinan	Persen	86,33	87,00	88,00	89,00	90,00	90,00
97	Persentase Pemanfaatan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
98	Persentase perusahaan yang patuh LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	Persen	21,00	22,00	23,00	24,00	25,00	25,00
L.	Kepemudaan dan Olahraga							
99	Persentase peningkatan kompetensi SDM keolahragaan	Persen	10,00	12,00	15,00	17,00	20,00	20,00
100	Persentase sarana dan prasarana olahraga yang tersedia dan termanfaat	Persen	36,00	45,00	54,00	63,00	72,00	72,00
101	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	n/a	30,00	33,00	37,00	40,00	40,00
102	Persentase kelompok pramuka aktif	Persen	n/a	30,00	33,00	37,00	40,00	40,00
M.	Statistik							
103	Indeks Domain Proses Bisnis Statistik	Nilai	1,90	2,21	2,42	2,63	2,84	2,84
N.	Persandian							
104	Indeks Area Teknologi dan Keamanan Informasi	Nilai	57	57	60	63	66	66
O.	Kebudayaan							
105	Persentase Kekayaan Budaya yang dikelola	Persen	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	84,00

No.	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5				6
106	Cakupan Pelaku keragaman budaya yang dibina (jumlah orang)	Persen	50,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
107	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Persen	81,30	82,30	83,30	84,30	85,30	85,30
108	Persentase Kelestarian Cagar Budaya	Persen	87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	89,00
109	Persentase Peningkatan Seni Budaya Yang Dilestarikan	Persen	70,00	70,50	71,00	71,50	72,00	72,00
P.	Perpustakaan							
110	Persentase kunjungan ke perpustakaan	Persen	10,48	10,67	10,87	11,07	11,27	11,27
111	Persentase jumlah perpustakaan yang dibina	Persen	29,19	29,30	29,32	29,34	29,36	29,36
112	Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan digital	Persen	14,86	15,00	15,14	15,28	15,42	15,42
Q.	Kearsipan							
113	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Arsip Digital	Persen	10,35	13,79	13,79	17,24	17,24	17,24
114	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan kearsipan	Persen	86,20	89,64	93,08	96,52	99,96	99,96
115	Persentase Perangkat Daerah yang Arsipnya diakuisisi	Persen	10,35	13,79	13,79	17,24	17,24	17,24
Urusan Pilihan								
A.	Perikanan							
116	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Persen	5	7	8	9	10	10
117	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Persen	10	12	14	16	18	18

No.	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5				6
118	Persentase Pelaku Usaha Skala kecil yang dibina	Persen	n/a	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
119	Tingkat pelanggaran di Perairan umum	Pelanggaran	0	0	0	0	0	0
B.	Pariwisata							
120	Persentase destinasi dalam keadaan kondisi baik	Persen	20,00	50,00	65,00	75,00	85,00	95,00
121	Persentase peningkatan destinasi wisata yang dikembangkan	Persen	20,00	20,00	20,00	20,00	40,00	40,00
122	Persentase event pariwisata	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
123	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	Persen	5,50	5,30	5,50	5,80	6,05	6,05
124	Cakupan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persen	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,00
C.	Pertanian							
125	Persentase ketersediaan lahan sawah yang terpetakan dan terlindungi	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
126	Persentase Ketersediaan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian	Persen	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
127	Persentase peningkatan Jumlah Pemotongan hewan di RPH	Persen	11,90	12	13	14	15	15
128	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persen	0,40	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
129	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Persen	n/a	n/a	80,00	80,00	80,00	80,00
130	Persentase Luasan Lahan Pertanian yang diawasi penggunaan sarana Pertanian	Persen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

No.	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5				6
131	Persentase Penyediaan Sarana Peternakan	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
132	Persentase Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Ternak	Persen	n/a	n/a	50,00	55,00	60,00	60,00
133	Persentase Penurunan Penyakit Hewan/ternak	Persen	16,80	16,00	14,00	12,00	10,00	10,00
134	Persentase Peningkatan kualitas pangan asal hewan yang Aman Sehat Utuh Halal	Persen	n/a	2,50	5,00	7,50	10,00	10,00
135	Persentase Kelompok tani Kelas Pemula yang meningkat skornya	Persen	n/a	20	25	30	35	35
136	Persentase pertimbangan teknis yang dikeluarkan	Persen	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00
D.	Perdagangan							
137	Persentase distribusi bahan pokok dan barang penting	Persen	74,24	80,00	81,00	82,00	83,00	83,00
138	Pertumbuhan Pelaku Usaha Formal	Angka	n/a	24 Pelaku Usaha	24 Pelaku Usaha	24 Pelaku Usaha	24 Pelaku Usaha	96 Pelaku Usaha
139	Persentase peningkatan omset pelaku usaha produk unggulan	Persen	n/a	7,00	8,00	9,00	10,00	10,00
140	Persentase alat-alatukur, takar, timbangan dan perlengkapannya(UTTP) yang bertandasah yang berlaku	Persen	92,91	93,50	94,00	94,50	95,00	95,00
141	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dalam kondisi baik	Persen	n/a	83,00	84,00	85,00	86,00	86,00
E.	Perindustrian							
142	Persentase Pertambahan Jumlah industri kecil dan menengah	Persen	9,18	9,25	9,50	9,75	10,00	10,00

No.	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5				6
143	Persentase peningkatan IKM yang memiliki legalitas usaha	Persen	n/a	2,00	2,00	2,50	2,50	2,50
Penunjang Urusan								
A.	Sekretariat Daerah							
144	Persentase Terlaksananya IKK Oleh Perangkat Daerah	Persen	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00
145	Persentase Tindaklanjut Perda	Persen	76,29	78,00	80,00	82,00	85,00	85,00
146	Persentase Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat Yang Ditindaklanjuti	Persen	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	80,00
147	Persentase Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Yang Ditindaklanjuti	Persen	55,88	60,00	62,00	65,00	68,00	68,00
148	Persentase Capaian Realisasi Fisik Perangkat Daerah	Persen	89,65	90,00	91,00	92,00	93,00	93,00
149	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Tender	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B.	Sekretariat DPRD							
150	Persentase Fasilitasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persen	80,00	80,00	81,00	82,00	83,00	83,00
C.	Perencanaan							
151	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD / RPD ke dalam RKPD	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
152	Persentase Capaian Target Kinerja Indikator Program	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
153	Persentase Kesesuaian antar Dokumen RKPD dengan RPJMD/RPD	Persen	91,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5				6
154	Persentase Kesesuaian antar Dokumen Renja dengan RENSTRA	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
155	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Didiseminasikan	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
156	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan	Persen	n/a	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67
D.	Keuangan							
157	Persentase OPD yang menyusun dokumen rencana anggaran tepat waktu	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
158	Cakupan pencapaian penyerapan belanja perangkat daerah sesuai target	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
159	Persentase OPD yang telah menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
160	Persentase OPD yang menyampaikan RKBMD tepat waktu	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
161	Persentase OPD yang menyampaikan LBMD tepat waktu	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
162	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E.	Kepegawaian							
163	Persentase Fasilitasi Pelayanan Pembinaan Disiplin ASN	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
164	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persen	100,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
165	Persentase Pemenuhan Formasi pengadaan ASN	Persen	N/A	93,00	93,00	92,00	93,00	93,00
166	Persentase ASN yang mengikuti Tugas Belajar	Persen	N/A	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

No.	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5				6
F.	Pendidikan dan Pelatihan							
167	Persentase Fasilitasi Pelayanan Pengembangan Kompetensi Managerial	Persen	25,96	35	50	65	80	80
168	Persentase Fasilitasi Pelayanan Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional	Persen	N/A	70	70	70	70	70
G.	Penelitian dan Pembangunan							
169	Indeks inovasi daerah	Nilai	n/a	58,00	59,00	60,00	61,00	61,00
H.	Inspektorat Daerah							
170	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal	Persen	96,21	98,00	98,00	100,00	100,00	100,00
171	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan eksternal :							
	- BPK	Persen	92,2	92,0	93,0	94,0	95,0	95,0
	- ITPROV	Persen	98,4	98,00	98,00	98,00	100,00	100,00
172	Persentase penyelesaian kasus pengaduan dan Pemeriksaan Khusus	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
173	Persentase Penyelesaian Masalah Perangkat Daerah melalui pemberian Advis	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
174	Cakupan Perangkat Daerah Yang Melakukan Pengelolaan Risiko Operasional	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
175	Cakupan Perangkat Daerah yang melakukan pengelolaan risiko korupsi	Persen	n/a	30,00	60,00	90,00	95,00	95,00
176	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP BB pada wilayah kerja Irban	Persen	6,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I.	Kecamatan Administrasi							

No.	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5				6
177	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
178	Persentase peran aktif kelompok/lembaga kemasyarakatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
179	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
180	Persentase kelompok/lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan di tingkat Kecamatan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
J.	Kesatuan Bangsa dan Politik							
181	Persentase Pelaksanaan Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persen	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
182	Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persen	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
183	Persentase Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
184	Persentase Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
185	Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persen	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BAB IX

PENUTUP

Perubahan Rencana Pembangunan daerah (RPD) Tahun 2023-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023-2026. Dalam menjalankan RPD Kota Singkawang tahun 2023-2026 diperlukan kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi sebagai berikut:

1. Perubahan RPD tahun 2023-2026 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
2. Perubahan RPD tahun 2023-2026 menjadi pedoman bagi penyusunan RKPD mulai tahun 2024;
3. Efektivitas pelaksanaan Perubahan RPD tahun 2023-2026 memerlukan kolaborasi dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan di Kota Singkawang, yaitu DPRD, masyarakat, dan sektor swasta serta didukung sinergi antar Pemerintah Daerah Kota Singkawang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat;
4. Perubahan RPD tahun 2023-2026 menjadi pedoman bagi pengendalian dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, melalui instrument berupa rumusan dan target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci yang termuat di dalam tujuan, sasaran dan program pembangunan.

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

SUMASTRO